



RAD TPB/SDGs

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (RAD-TPB/SDGs)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019 - 2023



PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals 5 (lima) Tahunan* bersama Bupati/Walikota dengan melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pihak terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TAHUN 2019 - 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumberdaya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

- a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*.

Pasal 4

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi:

- a. penghapusan kemiskinan;
- b. penghapusan kelaparan;
- c. mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan;
- d. mewujudkan pendidikan berkualitas;
- e. kesetaraan gender;
- f. mewujudkan tersedianya air bersih dan sanitasi layak;
- g. mewujudkan energi bersih dan terjangkau;
- h. mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak bagi masyarakat;
- i. membangun infrastruktur yang tangguh dan industry inklusif , serta inovatif;
- j. penurunan kesenjangan dalam masyarakat;
- k. mewujudkan kota inklusif dan berkelanjutan;
- l. mewujudkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana;
- n. pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut;
- o. pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat;
- p. mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh; dan
- q. kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Pasal 5

- (1) RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di NTB

BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB V : Penutup

- (2) RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD TPB/SDGs dibentuk Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center dan Sekretariat Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).
- (2) Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah, Akademisi, lembaga non pemerintah, professional media dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023, Bappeda melalui Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center dan Sekretariat Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs.

Pasal 8

- (1) RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang atau ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Kaji ulang atau ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2019-2023.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang tidak berpedoman pada RAD TPB/SDGs dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan penilaian kinerja.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melalui Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan RAD TPB/SDGs setiap tahun kepada Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan RAD TPB/SDGs di daerahnya setiap tahun kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal *21 November 2018*

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB harus memacu semua pemerintah daerah khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya, ini adalah hal yang patut disyukuri karena pada pencanangan MGDs, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup sukses dalam pencapaian MDGs dibuktikan dengan lima tahun berturut-turut mendapatkan MDGs Award dari pemerintah pusat. Prestasi ini harus memacu NTB untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya pada TPB/SDGs ini.

Percepatan diperlukan untuk mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada bulan Juli 2018, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk TPB/SDGs sebagaimana dimandatkan oleh perpres. Mengintegrasikan sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memprioritaskan dan merencanakan tindakan dengan bantuan perangkat analisa data akan sangat mendukung percepatan pencapaian TPB/SDGs. Juga terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas pemerintah daerah untuk SDGs, yang dapat dicapai melalui pembentukan Akademi SDGs untuk pejabat daerah.

Percepatan juga diperlukan untuk pengumpulan data. BPS telah mengumpulkan data untuk indikator TPB/SDGs, Hal ini diperlukan untuk menetapkan data acuan dasar yang kuat yang akan mengukur kemajuan pencapaian SDGs secara kredibel.

Prinsip utama agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah konsultasi, inklusi, dan partisipasi. Harus ada sinergi antara pemerintah, pemilik modal, pengusaha, filantropi, akademisi dan masyarakat madani agar terjadi percepatan pencapaian TPB/SDGs.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Keselarasan SDGs Terhadap RPJMD	1
1.2 TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs	7
1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs	12
1.4 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs	13
1.5 Pembiayaan SDGs	14
1.6 Metodologi Penyusunan RAD TPB/SDGs	15
1.7 Sistematisasi Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	16
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DI NTB	19
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Di Manapun ...	19
2.1.a Mengurangi Kemiskinan Di Semua Dimensi	19
2.1.b Sistem Perlindungan Sosial Daerah	22
2.1.c Akses Terhadap Pelayanan Dasar Untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah	23
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	24
2.2.a Menghilangkan Kelaparan	24
2.2.b Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi	26

2.2.c Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan	31
2.3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	35
2.3.a Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)	35
2.3.b Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita	36
2.3.c Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular	38
2.3.d Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)	42
2.3.e Mencapai Cakupan Kesehatan Universal	43
2.3.f Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	43
2.3.g Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin	44
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	46
2.4.a Partisipasi Pendidikan Penduduk NTB	46
2.4.b Disparitas Pendidikan Penduduk NTB	55
2.4.c Kemampuan Siswa Indonesia	56
2.4.d Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan	58
2.4.e Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan	59
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	60
2.5.a Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	64
2.5.b Menghapus Semua Praktek Berbahaya	67
2.5.c Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, Serta Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin	70
2.5.d Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi	71

2.5.e Meningkatkan Penggunaan Teknologi	72
2.5.f Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan	72
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	73
2.6.a Menjamin Akses Air Minum Layak dan Terjangkau ...	74
2.6.b Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau ...	75
2.6.c Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	76
2.6.d Peningkatan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	78
2.6.e Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau Sebagai Air Baku	78
2.6.f Jumlah DAS Yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya	79
2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern	81
2.7.a Kebutuhan Energi Daerah	81
2.7.b Produksi dan Penggunaan Energi	84
2.7.c Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	87
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Perkembangan Ekonomi Makro	88
2.8.a Perkembangan Ekonomi Makro	88
2.8.b Penciptaan Lapangan Kerja Yang Layak dan Produktif ..	88
2.8.c Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM)	89
2.8.d Peningkatan Pariwisata	90
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	97
2.9.a Pembangunan Infrastruktur	97
2.10 Mengurangi Kesenjangan	102
2.10.a Kesenjangan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ...	102

2.10.e	Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	106
2.11	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	106
2.11.a	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	107
2.11.b	Jumlah Kota Tangguh Bencana Yang Terbentuk	108
2.13	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	117
2.13.a	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Kabupaten/Kota	117
2.13.b	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Rumah Kaca (GRK)	118
2.14	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosisten Lautan	120
2.14.a	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan di Daerah	120
2.14.b	Jumlah Nelayan Yang Dilindungi	125
2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	126
2.16	Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan dan Membangun Kelembagaan Yang Tangguh	128
2.16.a	Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan	128
2.16.c	Membangun Kelembagaan Yang Tangguh	129
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	132
2.17.a	Mobilisasi Sumber Daya Domestik	132
2.17.b	Kemitraan Multipihak	134
2.17.c	Teknologi Informasi	139
2.17.d	Ketersediaan Data	143

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

TPB/SDGs	144
3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	144
3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	155

3.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	162
3.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	171
3.5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	180
3.6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	190
3.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	198
3.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ...	201
3.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	208
3.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	213
3.11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan ...	218
3.12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	226
3.13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	231
3.14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	234
3.15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	237
3.16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	240
3.17	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	248
BAB IV	PEMANTAUN, EVALUASI DAN PELAPORAN	255
4.1	Mekanisme Pemantaun dan Evaluasi RAD TPB/SDGs ..	256
4.1.a	Mekanisme Pemantau RAD TPB/SDGs Provinsi	256
4.1.b	Mekanisme Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi	258
4.1.c	Mekanisme Pemantau dan Evaluasi Renaksi Pihak Non Pemerintah	263
BAB V	PENUTUP	261
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	264

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Keterkaitan Nawacita (RPJMN), RPJMD dan SDGs	4
Tabel 2.1	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2011-2016	21
Tabel 2.2	Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi NTB Tahun 2014-2017	25
Tabel 2.3	Ketersediaan dan Surplus Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2016	27
Tabel 2.4	Prevalensi Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2015 dan 2016	27
Tabel 2.5	Perkembangan Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2015- 2017	30
Tabel 2.6	Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2016 – 2017	34
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2016- 2017	34
Tabel 2.8	Kematian Bayi Tahun 2015 – 2017	37
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Utama Perluasan Akses Pendidikan	47
Tabel 2.10	Perkembangan lulusan SD/MI dan angka melanjutkan ke SMP/MTS Tahun 2012/2013 -2016/2017	55
Tabel 2.11	Perkembangan lulusan SMP/MTS dan angka melanjutkan ke SMA,MA dan SMK Tahun 2012/2013 - 2016/2017	55
Tabel 2.12	Guru Tetap dan Tidak Tetap Yang Sudah dan Belum Kualifikasi Berdasarkan Satuab Pendidikan Tahun 2016/2017	58
Tabel 2.13	Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2017	67
Tabel 2.13.a	Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2016 – 2017 dan Target 2018	74
Tabel 2.14	Capaian Pelayanan Sanitasi Provinsi NTB	76
Tabel 2.15	Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi NTB Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2014 – 2016	77

Tabel 2.16	Luas Lahan Kritis dalam KPH yang Direhabilitasi Tahun 2013 – 2017 dan Jumlah DAS Prioritas Yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya Tahun 2015 – 2017.....	80
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2016 s/d 2017	82
Tabel 2.18	Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017	83
Tabel 2.19	Kebutuhan Pembangkit Energi Sumber Daya Mineral di NTB Tahun 2017-2020, 2025-2050	84
Tabel 2.20	Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2017	86
Tabel 2.21	Rekap Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)Tahun 2014 – 2017	88
Tabel 2.22	Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017	92
Tabel 2.23	Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2017	94
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2017	97
Tabel 2.25	Data Bongkar Muat Barang di Provinsi NTB Tahun 2017	99
Tabel 2.26	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Nusa Tenggara Barat September 2016, Maret 2017 dan September 2017	104
Tabel 2.26.a	Jumlah Kepesertaan Aktif Jaminan Social Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017 2018	106
Tabel 2.26.b	Data Penanganan Perumahan Provinsi NTB Tahun 2014 – 2017	
Tabel 2.27	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017	109
Tabel 2.28	Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2016-2017	110
Tabel 2.29	Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2017	110
Tabel 2.30	Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB	122
Tabel 2.31	Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	124

Tabel 2.32	Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2016 – 2017	125
Tabel 2.33	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017	128
Tabel 2.34	Opini BK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 – 2017	131
Tabel 2.35	Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2013-2016	131
Tabel 2.36	Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2017	132
Tabel 2.37	Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama DPM-PTSP Provinsi NTB Tahun 2017	133
Tabel 2.38	Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2017	139
Tabel 2.39	Komoditas dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 ...	141
Tabel 2.40	Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	142
Tabel 2.41	Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	142
Tabel 3.1	Target Pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	150
Tabel 3.2	Target Pencapaian Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	158
Tabel 3.3	Target Pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	165
Tabel 3.4	Target Pencapaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	173
Tabel 3.5	Target Pencapaian Tujuan 5 Kesetaraan Gender	185
Tabel 3.6	Target Pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	193
Tabel 3.7	Target Pencapaian Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	200
Tabel 3.8	Target Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	205
Tabel 3.9	Target Pencapaian Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	210
Tabel 3.10	Target Pencapaian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	215
Tabel 3.11	Target Pencapaian Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	221

Tabel 3.12	Target Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	229
Tabel 3.13	Target Pencapaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	233
Tabel 3.14	Target Pencapaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan	236
Tabel 3.15	Target Pencapaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan	239
Tabel 3.16	Target Pencapaian Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	242
Tabel 3.17	Target Pencapaian Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	250

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Jumlah dan Persentase kemiskinan Provinsi NTB 2013 – 2018 20
Gambar 2.2	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2011-2016 23
Gambar 2.3	Penemuan Kasus Gizi Buruk pada Balita di Provinsi NTB Tahun 2011-2016 26
Gambar 2.4	Status Gizi Balita berdasarkan BB/U di Provinsi NTB Tahun 2016 30
Gambar 2.5	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2011-2016 36
Gambar 2.6	Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS dan Kematian AIDS di Provinsi NTB Tahun 2011-2016 39
Gambar 2.7	Trend Kasus Baru IMS (Syphilis) di Provinsi NTB Tahun 2010 - 2016 40
Gambar 2.8	Tren Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun 2011-2016 41
Gambar 2.8.a	Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2016 44
Gambar 2.9	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi NTB Tahun 2016 46
Gambar 2.10	Pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B 60
Gambar 2.11	Realisasi kinerja PPRG Tahun 2015-2017 64
Gambar 2.11.a	Cakupan Pemakaian Kontrasepsi oleh Peserta KB Baru dan KB aktif di Provinsi NTB Tahun 2016 72
Gambar 2.12	Struktur dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 101
Gambar 2.13	Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor 119
Gambar 2.15	Grafik Perbandingan Baseline dan Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2010-2017 120
Gambar 4.1	Indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan 256

Gambar 4.2	Alur Informasi Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB	257
Gambar 4.3	Alur Pelaporan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs	258
Gambar 4.4	Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah	259

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Perkembangan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Nusa Tenggara Barat	31
Grafik 2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2016/2017	49
Grafik 2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	49
Grafik 2.4 Perkembangan APK SMP/MTs	50
Grafik 2.5 APK SMA/MA/SMK	51
Grafik 2.6 Perkembangan Grafik APM SD/MI/Paket A 2012/2013 - 2016/2017	52
Grafik 2.7 Perkembangan APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2012-2017	53
Grafik 2.8 Perkembangan SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2012/2013 - 2016/2017	54
Grafik 2.9 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Kabupaten/Kota Jenjang SMK Tahun 2012/2013 2016/2017	57
Grafik 2.10 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Kabupaten/Kota Jenjang SMP/MTs Tahun 2012/2013-2016/2017	57
Grafik 2.11 Grafik Perkembangan Rasio Siswa SMK/SMA Tahun 2016/2017	63
Grafik 2.11.a Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB Tahun 2012 – 2015	65
Grafik 2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di NTB Tahun 2012 – 2015 ..	63
Grafik 2.13 Capaian kinerja Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	65
Grafik 2.14 Rata-rata usia kawin pertama perempuan Tahun 2015-2017	69
Grafik 2.14a Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	132
Grafik 2.15 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2017	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI bahwa agenda pembangunan Indonesia Tahun 2015 – 2019 merupakan pencabaran operasional dari nawacita sebagai upaya meneguhkan kembali ideologi bangsa sehingga mampu bertahan dan menyongsong perubahan, adapun Nawacita itu antara lain :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RPJMN 2015-2019 dirumuskan dengan memperhatikan elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2014-2019) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan yang tertuang dalam agenda NAWACITA menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang” yang akan diwujudkan melalui 7 misi, yaitu : 1) Mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional; 2) Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi; 3) Mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif; 4) Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani; 5) Mempercepat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan; 6) Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sector pariwisata, industrial sector unggulan, serta Kawasan strategis; 7) Menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan. Dari visi dan misi ini, terlihat jelas keselarasan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018.

Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2018-2023, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Sinergi antara Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, RPJMD dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti pada tabel berikut.

Tabel 1 : Keterkaitan Nawacita (RPJMN), RPJMD dan SDGs

RPJMN 2015-2019		RPJMD PROVINSI NTB 2018-2023	SDGs
NAWACITA	7 MISI	8 MISI	TUJUAN
8 Melakukan revolusi karakter bangsa	7 Mewujudkan masyarakat yang berkeperibadian dalam kebudayaan	1 Mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional	G 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G 5 Kesetaraan Gender
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	2 Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi	G 1 Tanpa Kemiskinan G 2 Tanpa Kelaparan G 10 Berkurangnya Kesenjangan G 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan G 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	3 Mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif	G 4 Pendidikan Berkualitas G 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

RPJMN 2015-2019		RPJMD PROVINSI NTB 2018-2023		SDGs	
NAWACITA	7 MISI	8 MISI	TUJUAN		
4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	4 Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani	G 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
			G 14	Ekosistem Laut	
			G 15	Ekosistem Daratan	
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	5 Mempercepat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan	G 7	Energi Bersih dan Terjangkau	
			G 12	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	
			G 14	Ekosistem Laut	
			G 15	Ekosistem Daratan	
			G 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	6 Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sector pariwisata, industrial sector unggulan, serta Kawasan strategis	G 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
			G 11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	
			G 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	

RPJMN 2015-2019		RPJMD PROVINSI NTB 2018-2023	SDGs
NAWACITA	7 MISI	8 MISI	TUJUAN
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara	1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	7 Menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan	G 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G 13 Penanganan Perubahan Iklim
2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	4 Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani	G 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan G 5 Kesetaraan Gender

1.2 TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

Menjelang berakhirnya era Millenium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bertajuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Rio De Janeiro, Brazil, Juni 2012, atau yang sering disebut dengan konferensi Rio +20. Point paling penting dari dokumen tersebut adalah diperlukannya agenda pembangunan berkelanjutan baru yang melanjutkan MDGs, namun dengan visi yang lebih luas, holistik dan bersifat universal.

SDGs merupakan visi terhadap keadaan menyeluruh dunia pada Tahun 2030. Perbedaan prinsip penyusunan SDGs dan MDGs yaitu : MDGs fokus pada permasalahan negara-negara berkembang dan tertinggal, dimana negara-negara maju berperan sebagai pendonor. Sedangkan prinsip utama SDGs berlaku universal untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju beserta setiap warna negaranya.

Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang penanggulangan kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang tanpa kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang pelestarian lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target tujuan global, TPB/SDGs lebih bertujuan menuntaskan seluruh target dari tujuan global pada tahun 2030. Misalnya tujuan “tanpa kemiskinan” dan “tanpa kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “*Zero Goal*”. Dalam konsep SDGs juga, subyek pembangunan bukan saja pemerintah melainkan kewajiban berbagai pihak untuk memenuhinya baik berupa pemikiran maupun sumber daya. Artinya mewujudkan kesejahteraan suatu daerah tidak saja bersumber dari sumber daya dan anggaran pemerintah tetapi merupakan partisipasi dari seluruh unsur/stakeholder. Disisi lain, SDGs menyeimbangkan ke-tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan yang dilakukan secara bersama dan simultan tanpa ada ego sektoral.

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16

tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator Global dan 319 indikator nasional.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu provinsi yang berhasil mendapatkan penghargaan MDGs dalam rentang waktu 2011- 2015, antara lain tahun 2012-2014 laju pencapaian MDG's dan pencapaian indikator MDG's terbanyak.

Tahun 2013 Provinsi NTB meraih penghargaan pada 3 kategori berbeda yakni Pencapaian Sasaran MDGs, Laju Pencapaian Sasaran MDGs dan Laju Pengurangan Kedalaman Kemiskinan tahun 2009-2011.

Tahun 2014 mendapatkan penghargaan dengan kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik dan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak 2011-2013.

Tahun 2015 juga pencapaian MDGs mendapatkan penghargaan pada kategori Pencapaian indikator terbanyak MDGs Tahun 2015, dan laju pencapaian MDGs tertinggi tahun 2013-2015

Adapun uraian pencapaian MDGs yang mendapatkan penghargaan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan Pertama.

NTB berhasil menurunkan separuh proporsi penduduk miskin dalam kurun waktu 25 tahun (1990-2015). Momentum terbaik terjadi pada 2009-2014 ketika laju penurunan kemiskinan NTB tercatat rata-rata 1,4% ini merupakan laju penurunan kemiskinan paling progresif di Indonesia.

Pencapaian Tujuan Kedua.

NTB berhasil mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Angka harapan lama sekolah anak NTB 12,7 tahun salah satu yang tertinggi di Indonesia dan diatas rata-rata nasional. Angka putus sekolah di NTB pun terhitung rendah 0,20% untuk Sekolah Dasar sederajat dan 0,48% untuk Sekolah Menengah sederajat.

Pencapaian Tujuan Ketiga

NTB berhasil mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Gender NTB meningkat signifikan hingga 30% dari 63,04 pada 2007 menjadi 90,02% pada 2015.

Pencapaian Tujuan Ke Empat

NTB berhasil menekan angka kematian anak hingga 2/3 sepanjang 25 tahun (1990-2015). Selama lima tahun terakhir, tercatat penurunan Angka Kematian Bayi hingga 30% dari 72 per 1000 kelahiran pada 2009 menjadi 57 per 1000 kelahiran pada 2015.

Pencapaian Tujuan Ke Lima

NTB berhasil menurunkan 21% angka kematian Ibu selama lima tahun terakhir, dari 320 per 100 ribu kelahiran pada 2009 menjadi 251 per 100 ribu kelahiran pada 2015 .

Pencapaian Tujuan ke Enam

NTB berhasil menangani 100 % dari orang dengan HIV / AIDS. Pusat layanan yang tersebar di seluruh Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten / Kota. Malaria dapat dikurangi hingga hampir 100 % , dari 3,4 per seribu pada tahun 2009 untuk 00:43 per seribu penduduk pada 2015. Seluruh puskesmas dan rumah sakit telah menyediakan layanan pengobatan standar TB internasional (DOTS)

Pencapaian Tujuan Ke Tujuh

NTB memastikan kelestarian lingkungan. Selama lima tahun terakhir Rumah Tangga Layak Sanitary meningkat dari 42,52 % menjadi 59%, dan akses ke air bersih NTB mencapai 77% pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Laporan Tahunan MDGs Provinsi NTB Tahun 2015, pencapaian akhir dari keseluruhan tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu (1) indikator yang telah tercapai, (2) indikator yang akan tercapai (on track), dan (3) indikator yang memerlukan perhatian khusus untuk mencapainya (off track).

Tujuan dan indikator yang telah dicapai Provinsi NTB Tahun 2015 adalah :

1. MDGs 1, yaitu : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%); Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas; Prevalensi balita gizi buruk; Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi Minimum 2.000 Kkal/kapita/hari
2. MDGs 3, yaitu : Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP, MTs & Paket B; Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
3. MDGs 5, yaitu : Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih; cakupan pelayanan antenatal satu kali kunjungan

4. MDGs 6, yaitu : Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi; Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk; Angka kejadian tuberkolosis (per 100.000 penduduk/tahun); tingkat kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk); Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS
5. MDGs 7, yaitu : Jumlah emisi karbon dioksida CO₂; Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas daratan; Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial; Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Tujuan dan indikator yang akan tercapai adalah :

1. MDGs 1, yaitu : Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hari
2. MDGs 2, yaitu : APM SD/MI/Paket A; Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD; Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki.
3. MDGs 3, yaitu : Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, MI & Paket A; Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA, MA & Paket C; Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 15-24 tahun
4. MDGs 4, yaitu : Angka kematian Balita (AKBA)/1.000 kelahiran hidup; Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
5. MDGs 5, yaitu : Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; cakupan pelayanan antenatal empat kali kunjungan.
6. MDGs 6, yaitu : Angka kejadian malaria (per 1.000 penduduk); Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida; Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
7. MDGs 7, yaitu : Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

Tujuan dan indikator MDGs yang memerlukan perhatian khusus untuk mencapainya adalah :

1. MDGs 1, yaitu : Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional; Indeks kedalaman kemiskinan; proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri; prevalensi balita gizi kurang
2. MDGs 3, yaitu : Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian
3. MDGs 4, yaitu : Angka kematian bayi (AKB)/1.000 kelahiran hidup; Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
4. MDGs 5, yaitu : Angka Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (semua cara); Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (cara modern); Angka kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun; Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya empat kali kunjungan); Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi).
5. MDGs 6, yaitu : Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi; Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS.
6. MDGs 7, yaitu : Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

Menurut SDGs Center Universitas Pajajaran bahwa mayoritas indikator-indikator SDGs di Provinsi NTB diproyeksikan baru setengah jalan untuk dapat memenuhi targetnya pada tahun 2030. Sebagai bentuk antisipasi, tujuan SDGs yang perlu mendapatkan perhatian adalah kesehatan (SDGs Tujuan 3) dan daya dukung perkotaan yang berkelanjutan (SDGs Tujuan 11). Adapun indikator yang diprediksikan cukup jauh mencapai target SDGs adalah angka kematian neonatal (indikator SDGs ke 11). Hingga tahun 2030 indikator tersebut menunjukkan trend yang meningkat dan menjauhi target SDGs, yakni 12 kasus per 1000 kelahiran. Disisi lain, pemenuhan ketersediaan jaringan air ledeng pada tahun 2030 diperkirakan baru mampu memenuhi 49% dari target 100%.

Adapun aspek pendidikan merupakan tujuan SDGs ke 4 tingkat kesiapannya sudah lebih baik dengan indikator angka melek huruf usia 15 s.d 24 tahun diproyeksikan mencapai 100% pada Tahun 2030. Begitu juga untuk sanitasi dan air bersih (SDGs Tujuan 6) diperkirakan mencapai target 100% pada tahun 2030.

Selanjutnya, target indikator MDGs yang telah tercapai agar dipertahankan, dan target indikator yang belum tercapai diupayakan tercapai pada pelaksanaan Agenda TPB/SDGs.

1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs

Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Sebagai langkah awal seperti dalam Rencana Aksi Nasional pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai 80% dari 319 indikator SDGs Nasional. Demikian pula Pemerintah Provinsi NTB mendukung pelaksanaan TPB/SDGs dengan membentuk Tim Penyusun RAD SDGs, Tim Sekretariat SDGs dan Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Database sejak Tahun 2017 dan Tahun 2018 membentuk SDGs Centre yang nantinya berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, Surat Keputusan Gubernur NTB tersebut antara lain:

1. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 18 April 2017 Nomor 050-373 Tahun 2017, tentang Pembentukan Tim Sekretariat SDGs Provinsi NTB.
2. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 14 Maret 2018 Nomor 050.13-228 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sekretariat SDGs Provinsi NTB Tahun 2018
3. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 14 Maret 2018 Nomor 050.13-229 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Base Capaian Indikator SDGs Provinsi NTB Tahun 2018.
4. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 14 Maret 2018 Nomor 050.13-226 Tahun 2018 tentang Tim Penyusun RAD TPB/SDGs Provinsi NTB
5. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 14 Maret 2018 Nomor 050.13-228 tentang Laporan Tahunan Pencapaian SDGs Provinsi NTB
6. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 050.13-636 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDG's, serta memberi masukan bagi penyusunan kebijakan dalam rangka SDG's di daerah.

1.4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs

Berdasarkan *outcome* dokumen Rio+20 prinsip-prinsip SDGs, yaitu : (1) tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs; (2) mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional maupun prioritas daerah; (3) fokus pada dimensi pembangunan berkelanjutan secara berimbang ekonomi, sosial dan lingkungan; (4) koheren dan terintegrasi dengan agenda pembangunan pasca 2015. Dengan kata lain, pembangunan adalah esensial untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Saat yang bersamaan pembangunan pun harus berlandaskan pada efisiensi dan penggunaan lingkungan yang bertanggung jawab dari seluruh sumber daya masyarakat yang langka, yaitu : alam, manusia, dan sumber daya ekonomi. Konsep ini menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar lingkungan yang tinggi. Inilah *underlying concept* pembangunan berkelanjutan yang saat ini berkembang mengikuti dinamika perubahan.

Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan agar dapat memfasilitasi generasi sekarang sekaligus generasi yang akan datang. Konsep pembangunan adalah mengurangi sampah dari hasil pembangunan yang tidak efisien, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, yaitu diantara kesetaraan, inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

Terdapat 3 (tiga) prinsip untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yakni universal/keseluruhan, integrasi dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. SDGs lebih pada konsep ekonomi hijau yang artinya meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan keadaan lingkungan. Prinsip

universality yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak individu, perdamaian dan kemitraan. Pembangunan yang universal tidak hanya dilakukan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. Prinsip *integration* dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak sehingga pemanfaatan alam harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun prinsip *no-one left behind* atau “tidak ada seorangpun yang tertinggal”, dimana kegiatan yang dilaksanakan melibatkan semua pemangku kepentingan guna memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Jadi pelaksanaan TPB memperhatikan semua *stakeholders* dengan melibatkan empat platform partisipasi yang terdiri atas pemerintah dan parlemen, akademi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media, untuk bersama-sama mencapai target-target yang ditetapkan dengan tujuan yang jelas yaitu mensejahterakan masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan RAD TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur-unsur yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun nonpemerintah.

1.5. Pembiayaan SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

Optimalisasi Penerimaan Daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai,

pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*).

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat Nusa Tenggara Barat sangatlah tinggi, Kegiatan-kegiatan di daerah menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, mempunyai potensi yang sangat besar. Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, dll). Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu duabelas bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2016-2018 harus ditetapkan. Perpres merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, daerah dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting.

Koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan BAPPEDA NTB kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs, melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Rapat sosialisasi TPB/SDGs baik dilingkup pemerintah dan lembaga non pemerintah serta stakeholder lainnya. Sosialisasi juga dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota se-NTB.
- b. Rapat koordinasi untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Dalam rapat koordinasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Rapat koordinasi selanjutnya melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari mitra

pembangunan di Provinsi NTB, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, akademisi, serta media dan filantropi. Dalam rapat koordinasi ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.

- c. Tahap berikutnya adalah pembentukan Tim Sekretariat TPB/SDGs dan Tim Penyusun RAD TPB/SDGs.
- d. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan/*Goals* untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah yang mendukung indikator SDGs, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah.
- e. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan/*Goals* juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (*baseline*) secara runtun waktu (*series*) sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan sub pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2018.
- f. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui diskusi-diskusi/FGD dan surat elektronik (*email*). Melalui pendekatan ini, Tim penyusun RAD TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

1.7. Sistematika Rencana Daerah TPB/SDGs Aksi

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai (1) Keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMD; (2) TPB/SDGs menyempurnakan MDGs; (3) Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan TPB/SDGs; (4) Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs; (5) Pembiayaan SDGs; (6) Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah

TPB/SDGs; (7) Sistematika RAD TPB/SDGs.

Bab kedua menjabarkan tentang (1) Mengahiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; (2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum; (6) Pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern; (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (9) Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; (11) Kota dan Pemukiman berkelanjutan; (12) Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (13) Penangan perubahan iklim dan penanggulangan bencana; (14) Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan; (15) Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan; (16) Menciptakan perdamaian, menyediakan akses keadilan dan membangun kelembagaan yang tangguh; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Provinsi NTB yang terdapat pada RPJMD 2013-2018 yang telah diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 yang kemudian diselaraskan dengan 17 Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah Provinsi NTB menentukan program-program pembangunan yang diselaraskan dengan Tujuan TPB/SDGs seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan Renstra maupun Renja OPD setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan program kegiatan nonpemerintah sebagaimana tertuang dalam matrik Lampiran II.

Bab keempat menjelaskan tentang mekanisme, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2016-2018. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan

indikator TPB/SDGs Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DI NTB

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

2.1.a. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.

Provinsi NTB pada tahun 2013 meraih penghargaan pada 3 kategori berbeda yakni Pencapaian Sasaran MDGs, Laju Pencapaian Sasaran MDGs dan Laju Pengurangan Kedalaman Kemiskinan tahun 2009-2011.

NTB berhasil menurunkan separuh proporsi penduduk miskin dalam kurun waktu 25 tahun (1990-2015). Momentum terbaik terjadi pada 2009-2014 ketika laju penurunan kemiskinan NTB tercatat rata-rata 1,4% ini merupakan laju penurunan kemiskinan paling progresif di Indonesia.

Sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2018 mencapai 748.120 orang (14,75%). Jika dilihat dalam periode Maret 2015 jumlah penduduk miskin 823.866 orang (17.10%), artinya jumlah penduduk miskin berkurang 74.880 orang (1.03%). Salah satu bentuk komitmen pemerintah NTB dalam mengurangi kemiskinan ditunjukkan dengan keberpihakan anggaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 159.932 Milyar menjadi Rp. 865.456 Milyar pada tahun 2016. Kemudian anggaran kemiskinan tahun 2017 pun meningkat menjadi Rp. 912.954 Milyar.

Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,25% pada tahun 2013 menjadi 15,05% pada tahun 2017 (BPS, angka September). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 815.501 penduduk pada tahun 2013 menjadi 748,12 ribu pada tahun 2017.

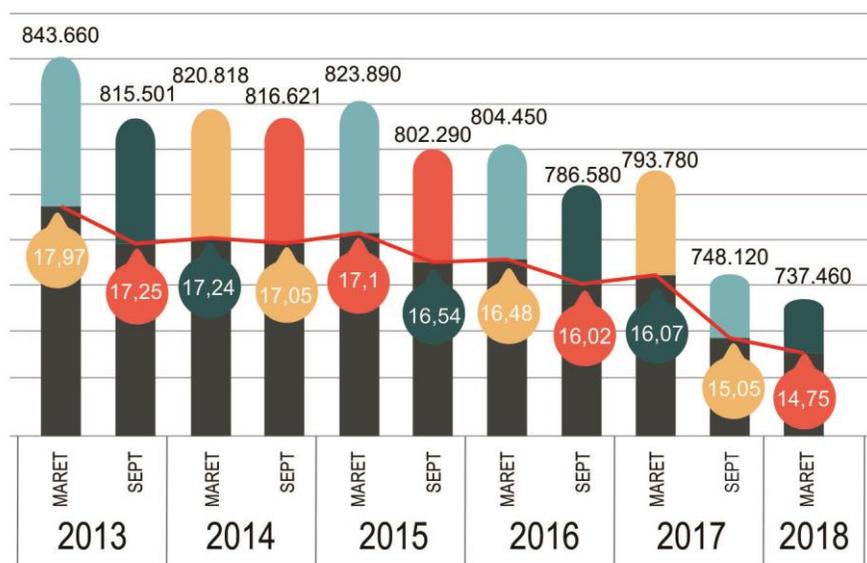
Selama periode Maret 2017 - September 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 18,49 ribu orang (dari 387,04 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 368,55 ribu orang pada September 2017), dan di daerah perdesaan penduduk miskin

juga berkurang sebanyak 27,16 ribu orang (dari 406,73 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 379,57 ribu orang pada September 2017).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 17,53 persen, turun menjadi 16,23 persen pada September 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,89 persen pada Maret 2017 menjadi 14,06 persen pada September 2017.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,44 persen untuk perkotaan dan 75,73 persen untuk perdesaan.

Gambar 2.1. Jumlah dan Persentase kemiskinan Provinsi NTB 2013 - 2018



Sumber: BPS 2017, diolah Bappeda

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada Tabel 3 memperlihatkan besarnya Garis Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Selama Maret 2017 dan September 2017, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan, yaitu dari

Rp 345.341,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 352.690 ,- per kapita per bulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,66 persen.

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan dan Perubahannya, Maret dan September Tahun 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Sep-17	267.116	96.581	363.697
Maret 2018	279.003	98.141	377.145
Perubahan Sep 17 - Maret 2018 (%)	4,45	1,62	3,7
Perdesaan			
Sep-17	260.052	83.335	343.387
Maret 2018	271.987	84.374	356.361
Perubahan Sep 17 - Maret 2018 (%)	4,59	1,25	3,78
Perkotaan+Perdesaan			
Sep-17	263.301	89.389	352.69
Maret 2018	275.124	90.777	365.901
Perubahan Sep17 - Maret 2018 (%)	4,49	1,55	3,75

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017 dan Maret 2018.

Pada September 2017, lima komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah komoditi beras memberikan sumbangan sebesar 25,40 persen di perkotaan dan 31,69 persen di perdesaan, rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua kepada Garis Kemiskinan (7,10 persen di perkotaan dan 5,33 persen di perdesaan). Komoditi ketiga yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan adalah daging sapi sebesar 3,48 persen, sedangkan komoditi ketiga yang memberikan sumbangan terbesar di perdesaan adalah telur ayam ras sebesar 4,11 persen. Komoditi keempat yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan adalah telur ayam ras sebesar 3,29 persen, sedangkan komoditi keempat yang memberikan sumbangan terbesar di perdesaan adalah daging sapi sebesar 2,82 persen. Komoditi kelima yang memberikan sumbangan terbesar di

perkotaan adalah mie instan sebesar 2,07 persen, sedangkan komoditi kelima yang memberikan sumbangan terbesar di perdesaan adalah gula pasir sebesar 2,36 persen.

Untuk komoditi non makanan, komoditi yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah pertama komoditi perumahan memberikan sumbangan sebesar 7,67 di perkotaan dan 8,43 persen di perdesaan. Komoditi kedua yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan adalah listrik sebesar 3,03 persen, sedangkan komoditi kedua yang memberikan sumbangan terbesar di perdesaan adalah bensin sebesar 2,85 persen. Komoditi ketiga yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan adalah bensin sebesar 3,00 persen, sedangkan komoditi ketiga yang memberikan sumbangan terbesar di perdesaan adalah listrik sebesar 1,71 persen. Komoditi keempat yang memberikan sumbangan terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan adalah pendidikan dengan sumbangan masing-masing sebesar 2,10 persen dan 1,24 persen.

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program antara lain Program jamban keluarga, pembangunan rumah tidak layak huni, BUMDES, kawasan rumah pangan lestari, kelompok usaha bersama, bank sampah, dan air bersih. Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

2.1.b Sistem Perlindungan Sosial Daerah.

Peranserta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan dan kemandirian pembangunan di bidang kesehatan yang diwujudkan antara lain sebagai penyelenggara berbagai upaya pelayanan kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan

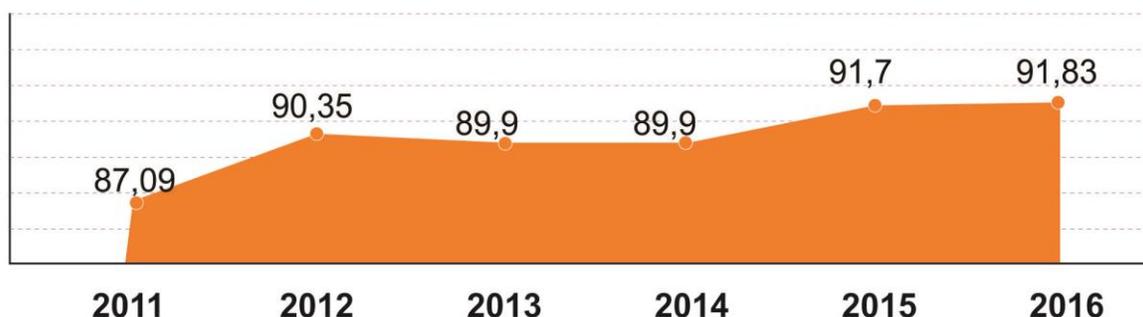
kesehatan. Peran serta dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dalam bentuk pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan, dana sehat, asuransi sosial di bidang kesehatan dan berbagai bentuk pembiayaan kesehatan prabayar.

Perkembangan peserta jaminan kesehatan di Provinsi NTB cukup positif. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2016 sebanyak 67,36% dari total penduduk, dan kesemuanya merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini dikarenakan jamkesda dan asuransi swasta ataupun asuransi perusahaan sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2.1.c Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah.

Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 sebesar 91,83% berarti sekitar 8,17% persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan (seperti: dukun beranak). Cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan cakupan tahun 2015 yaitu 91,7%.

Gambar : 2.2. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2011-2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2011-2016

Akses Pelayanan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Namun, pendidikan dasar setingkat SD/MI/Sederajat APM hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 1,82%, atau meningkat menjadi 99,62% pada tahun 2016 dari sebelumnya 97,62% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Peningkatan APM pada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs/Sederajat yaitu sebesar 5,65% dari sebelumnya 82,83% pada tahun 2015 yang

meningkat menjadi 98,48% pada tahun 2016. Peningkatan APM cukup signifikan terlihat pada jenjang pendidikan menengah atas yaitu SMA/SMK/MA/ sederajat yang ditunjukkan dengan APM pada tahun 2015 adalah 64,97%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 83,35%.

Masalah yang masih dihadapi Indonesia terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antarwilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2.a Menghilangkan Kelaparan

Ketersediaan energi Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 5.310,97 kal/kapita/hari meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.011,83 kal/kapita/hari dan telah melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan sebesar 2.200 kkal/kap/hari atau 227,813. Sedangkan ketersediaan protein tahun 2017 sebesar 137,52 gr/kapita/hari meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 118,07 gr/kap/hari, namun masih melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan sebesar 57 gr/kap/hari. Perkembangan ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB tahun 2014-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi NTB Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Energi (kalori/kapita/hari)	4.380,00	3.991,00	5.011,83	5.310,97
2.	Protein (gr/kapita/hari)	115,84	135,17	118,07	137,52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan tabel 2.2. di atas terlihat bahwa ketersediaan energi tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3. Ketersediaan dan Surplus Tanaman Pangan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2016**

No	Komoditas	Tahun	Produksi (Ton)*	Kebutuhan (Ton)**	Surplus (Ton)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Padi	2014	2.116.637	5609281	595.218
		2015	2.417.392	567.213	254.602
		2016*	2.032.283	387.360	811.493
2	Jagung	2014	785.864	6.588	473.923
		2015	959.973	6.777	451.477
		2016*	870.678	4.623	485.273
3	Kedelai	2014	97.172	28.643	61.609
		2015	125.036	31.915	84.467
		2016*	74.927	21.795	48.576
4	Daging Sapi	2014	14.038	6.540	3.121
		2015	15.646	6.431	7.116
		2016*	24.527	3.419	18.864
5	Daging Ayam Ras	2014	76.915	11.027	66.028
		2015	8.253	11.625	-2.750
		2016	11.233	11.289	78
6	Daging Ayam Buras	2014	13.275	3.819	9.456
		2015	7.180	3.868	3.453
		2016*	7.648	3.959	3.872
7	Cabe Rawit	2014	15.067	5.126	9.147
		2015	80.592	9.526	66.817
		2016*	14.317	5.627	5.296
8	Cabe Merah	2014	7.195	1.719	3.269
		2015	14.052	2.031	9.037
		2016*	3.420	1.212	204
9	Telur	2014	12.228	34.180	-20.076
		2015	35.563	39.168	-2.362
		2016*	16.396	40.121	-21.573

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

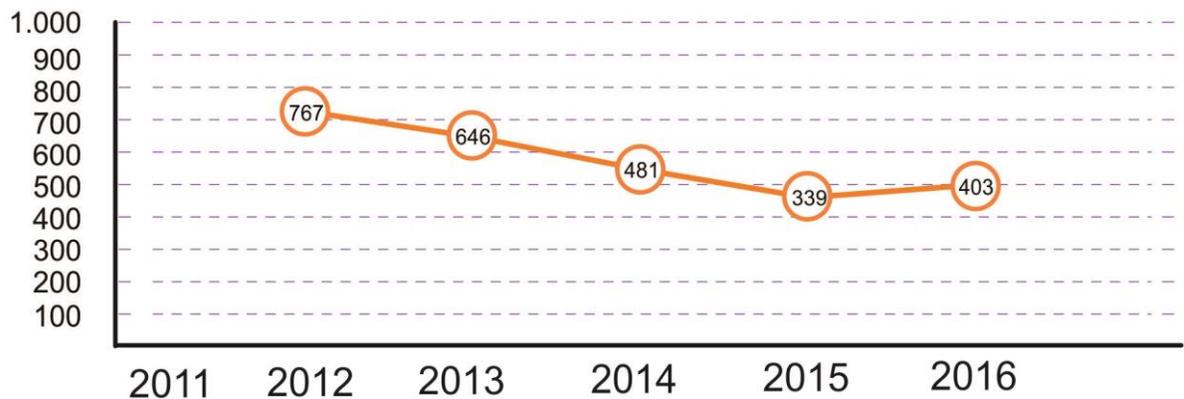
Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih

terbatas.

2.2.b Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target RPJMD yaitu penurunan prevalensi kurang gizi, melalui kegiatan pendidikan gizi masyarakat, penanggulangan kurang gizi baik gizi makro maupun gizi mikro, surveilans gizi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Surveilans gizi melalui laporan rutin penemuan kasus gizi buruk yang sudah dikonfirmasi BB/PB atau BB/TB, perkembangannya dari tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3.: Penemuan Kasus Gizi Buruk pada Balita di Provinsi NTB Tahun 2011-2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2011-2016

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Status gizi dapat memberikan gambaran derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah yang diukur melalui berbagai indikator antara lain status gizi balita, GAKI, KEK, dan anemia zat besi. Penilaian status gizi masyarakat biasanya menggunakan indikator status gizi balita. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk

variabel tertentu. Jika keseimbangan ini terganggu, maka cenderung terjadi gangguan pada pertumbuhan tubuh. Gangguan ini dapat tercermin dari perubahan pada berat badan (BB) atau tinggi badan (TB).

Penilaian status gizi dilakukan setiap tahun dilakukan melalui survei Pemantauan Status Gizi (PSG). Rincian hasil pengukuran status gizi menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan tinggi badan menurut umur (TB/U) di Provinsi NTB tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

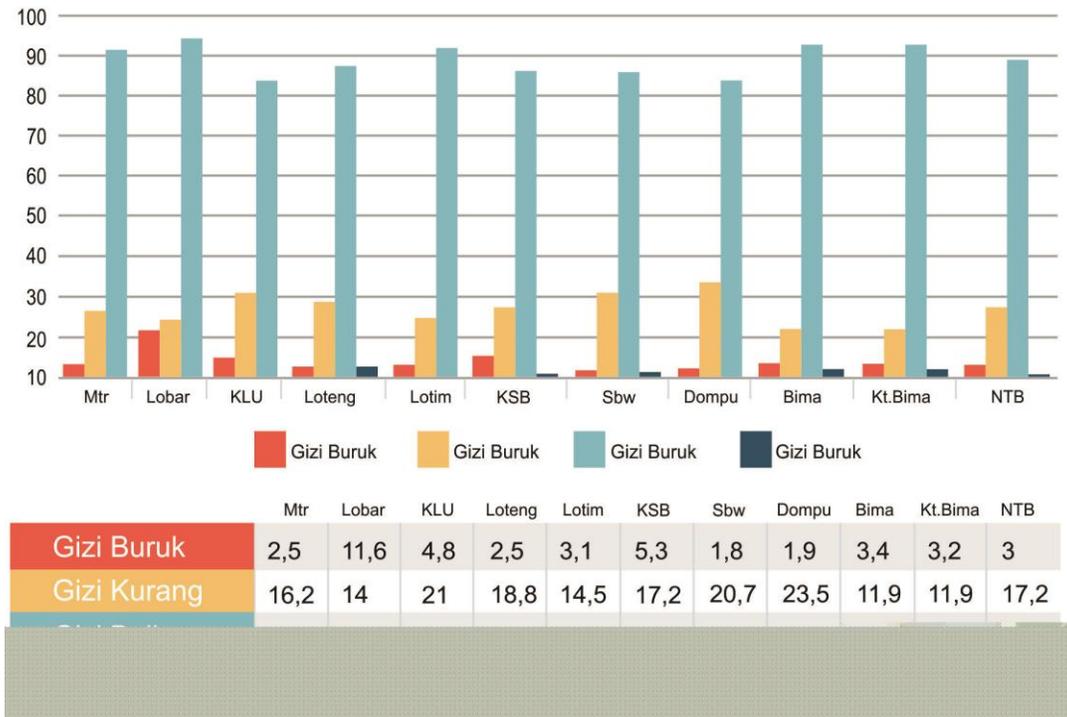
Tabel 2.4. : Prevalensi Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2015 dan 2016

Indeks	Klasifikasi Status Gizi	Persentase	
		2015	2016
BB/U	Gizi Lebih	1,00	0,6
	Gizi Baik	82,11	79,1
	Gizi Kurang	13,77	17,2
	Gizi Buruk	3,12	3,0
	Underweight	16,89	20,2
PB/U atau TB/U	Normal	65,31	70,0
	Pendek (<i>Stunted</i>)	21,68	21,7
	Sangat Pendek (<i>Severely Stunted</i>)	13,01	8,3
	Stunting	34,69	29,9
	Gemuk	6,08	2,4
BB/PB atau BB/TB	Normal	85,04	87,9
	Kurus (<i>Wasted</i>)	6,71	7,7
	Sangat Kurus (<i>Severely Wasted</i>)	2,17	2,0
	Wasting	8,88	9,76

Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi Provinsi NTB tahun 2015 dan 2016

Hasil pengukuran status gizi balita berdasarkan berat badan per umur per kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat tahun 2016 terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4. : Status Gizi Balita berdasarkan BB/U di Provinsi NTB Tahun 2016



Sumber: Laporan Pemantauan Status Gizi Provinsi NTB Tahun 2016

Pada gambar 2.4. terlihat bahwa prevalensi gizi buruk terbesar ada di Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan untuk prevalensi gizi kurang terbesar di Kabupaten Dompu. Masalah gizi kurang dan gizi buruk menurut indeks BB/U masih menjadi persoalan di NTB, sehingga memerlukan penanganan yang komperhensif dan terpadu baik itu lintas sektor dan lintas program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Penilaian menggunakan indeks BB/U memberikan gambaran kondisi status gizi balita pada saat sekarang, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah kekurangan berat badan (kurang gizi atau gizi buruk) itu disebabkan oleh bentuk badan yang “kurus-tinggi” atau “gemuk-pendek”. Karena itu diperlukan indeks pengukuran lain, yaitu PB/U atau TB/U. Panjang badan atau Tinggi badan akan memberikan sumbangan berat badan yang cukup meskipun kondisinya kurus. Indikator panjang badan atau tinggi badan menurut umur memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya KRONIS sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan. Klarifikasi lebih lanjut untuk melihat dua indeks yang lainnya (PB/U atau TB/U dan BB/PB atau BB/TB) sangat

diperlukan untuk mendapatkan gambaran penanganan yang lebih tepat.

Pada tabel 2.4. menunjukkan bahwa balita NTB masih ada yang berpostur *stunted*. Indikator panjang atau tinggi badan dapat mencerminkan gizi masa lalu anak, yaitu gizi ketika masih dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupannya. Penanganan masalah pendek (*stunted*) harus menjadi perhatian kita bersama, strategi penanganan untuk anak-anak pendek tersebut adalah dengan memperbaiki jumlah dan bioavailabilitas mikronutrien dalam diet dengan cara meningkatkan konsumsi makanan bersumber hewani dan bukannya meningkatkan asupan energi. Selain itu perlu adanya intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan karena akan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, disamping meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki pola asuh terutama dalam pemberian makanan pada anak dan gizi anak selama dalam kandungan. Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi NTB telah menginisiasi program Generasi Emas NTB (GEN), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak. Program ini dimulai dari pemantauan ibu hamil yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh tenaga terlatih GEN, yaitu Kader GEN dan Pendamping Desa. Disamping itu, terkait dengan pelaksanaan GEN, jajaran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB melaksanakan kegiatan Aksi Kepedulian yang dikenal dengan program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan bagian dari program Aksi Seribu Hari atau disingkat ASHAR. Program GEN merupakan program jangka panjang Pemerintah Provinsi NTB, dengan tujuan pada tahun 2025 akan lahir generasi unggul, generasi emas dari NTB.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan Dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO

RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020.

Pola pangan harapan (PPH) dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari).

Target Pola Pangan Harapan dihitung dengan cara interpolasi dari data dasar capaian konsumsi aktual tahun 2013, dengan harapan pola pangan harapan ideal akan tercapai di tahun 2030 mendekati 100.

Indikator Kinerja RPJMD 2013-2018 yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perkembangan capaian PPH dari tahun 2015-2016 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perkembangan Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2015-2017

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja		2017		Capaian 2017 Terhadap (%)				Target Akhir RPJMD 2018
			2015	2016	Target	Realisasi	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Thd Target Thn 2017	Thd Target 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:4 x100%	9 = 7:5 x100%	10 = 7:6 x100%	11 = 7:12 x100%	12
Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Point	81,3	80,9	81,7	82,0	100,86	101,36	100,37	99,39	82,5

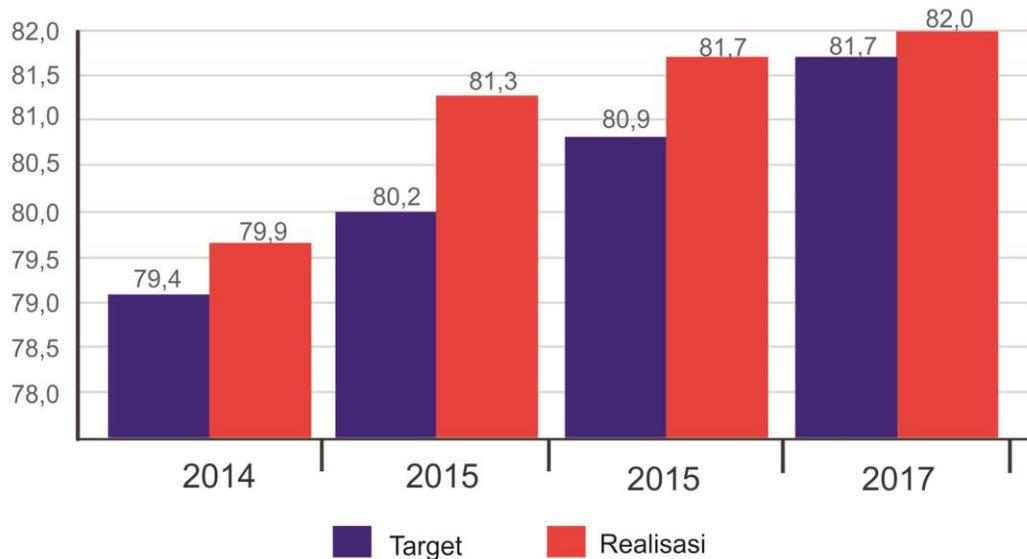
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Perkembangan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dicapai dari tahun ke tahun (2014-2017) menunjukkan adanya kenaikan rata-rata sebesar 1,13 %, hal ini mengindikasikan adanya perbaikan konsumsi pangan kearah yang lebih baik dari kualitas maupun keanekaragaman kelompok bahan pangan yang dikonsumsi penduduk. Melihat kondisi tersebut pencapaian target skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Tahun 2018 sebesar 82,5 optimis dapat tercapai.

Sebagai indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat, pada tahun 2017 realisasi PPH tercapai sebesar 82,0 (100,37%) melampaui target yang ditetapkan 81,70 dari skor PPH ideal yaitu 100, selama tahun 2014-2016 skor PPH meningkat sebesar 0,87% pertahun.

Indikator Kinerja RPJMD 2013-2018 yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perkembangan capaian PPH dari tahun 2014-2017 disampaikan sebagai berikut:

Grafik2.1.
Perkembangan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
di Nusa Tenggara Barat



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan provinsi NTB 2017.

Sebagai indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat, pada tahun 2017 realisasi PPH tercapai sebesar 82,0 (100,37%) melampaui target yang ditetapkan 81,70 dari skor PPH ideal yaitu 100, selama tahun 2013-2017 skor PPH meningkat sebesar 0,87 % pertahun.

2.2.c Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.

Capain produksi padi pada tahun 2017 sebesar 2.344.692 ton Gabah Kering Giling/GKG (aram II BPS 2017), jika dibandingkan dengan tahun 2016 naik sebesar 15,42 % (2.095.117), akan tetapi jika dibandingkan dengan target RPJMD hanya tercapai 96,32 persen yaitu sebesar 2.434.299 ton GKG. Tidak tercapainya target sesuai RPJMD disebabkan adanya beberapa petani beralih komoditas ke tanaman jagung karena harga jagung sudah ada penetapan harga oleh pemerintah dengan produksi persatuan luas (hektar)

lebih tinggi.

Capaian produksi kedelai sebesar 51.365 ton biji kering (aram II BPS 2017) turun dari target RPJMD sebesar 40,90 persen dari target RPJMD 125.601 ton. Hal ini disebabkan karena harga kedelai belum dapat ditetapkan seperti jagung, sehingga minat petani untuk menanam kedelai masih kurang. Disamping itu banyak petani yang beralih komoditas ke tanaman jagung yang mempunyai harga pasti yang lebih tinggi dan produktivitas lebih tinggi dengan satuan produksi per hektar tanaman kedelai masih rendah berkisar antara 1 – 2,5 ton.

Dilihat dari capaian produksi komoditi perkebunan tahun 2017 hanya beberapa komoditi yang tidak mencapai target dalam RPJMD kecuali kakao meningkat 101,89 persen dan tembakau meningkat 141,41 persen disusul jambu mete 106,58 persen. Sedangkan penurunan produksi pada komoditi kopi sebesar 1,81 persen dari target RPJMD 4.954,78 ton dan komoditi kelapa 4,83 persen dari target RPJMD 50.801,02 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan antara lain oleh alih fungsi lahan, penebangan tanaman perkebunan untuk bahan bangunan dan tanaman sudah tua/rus

Pertanian sub sektor tanaman pangan masih terfokus pada komoditas padi, jagung dan kedelai yang memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri. Selain itu ketiga komoditi tersebut berperan penting terhadap ketahanan pangan dan memberikan andil yang cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB), kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian regional dan nasional.

Keberhasilan program yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian harus didukung oleh upaya akselerasi peningkatan produktivitas padi, jagung, kedelai (Pajale) melalui pembinaan, bimbingan, pendampingan dan pengawalan yang bukan hanya dilakukan petugas/penyuluh tetapi juga bekerjasama dengan TNI. Demikian pula untuk sinergisitas kegiatan memerlukan konsultasi dengan instansi terkait baik Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pusat dalam rangka peningkatan produktivitas Pajale. Agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Angka Sementara BPS, produksi padi tahun 2017 diperkirakan 2.323.699 ton gabah kering giling (GKG) naik 10,91% dibandingkan tahun 2016 (2.095.118 ton). Produksi jagung tahun 2017 juga diperkirakan sebesar 2.127.324 ton

meningkat 66,42% dari tahun 2016 yang sebesar 1.278.271 ton. Sedangkan produksi kedelai tahun 2017 diperkirakan 56.097 ton turun 48,76% dari tahun 2016 yang sebesar 109.480 ton. Peningkatan produksi padi dan jagung terjadi karena adanya peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Khusus untuk jagung, peningkatan produksi terjadi karena adanya kegiatan pengembangan jagung mendukung program pemerintah untuk zero import jagung tahun 2017 dan ketertarikan petani untuk budidaya jagung sebagai akibat ditetapkannya standar harga jagung yang cukup menjanjikan. Namun peningkatan produksi padi dan jagung diikuti dengan turunnya produksi kedelai.

Swasembada beras, jagung dan kedelai merupakan salah satu perwujudan dari kemandirian pangan serta ketahanan pangan nasional. Gerakan yang selalu didengungkan, yaitu gerakan Upaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai atau UPSUS PJK merupakan upaya yang terkoordinasi untuk membangun sistem pertanian tangguh dengan memasyarakatkan teknologi serta motivasi baru melalui pendekatan budidaya dan sosial ekonomi, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Upsus swasembada pangan yang dilakukan beberapa tahun terakhir telah berdampak positif terhadap peningkatan produksi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pengembangan sub sektor peternakan yang sangat besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan peternakan. Upaya peningkatan populasi dan produksi peternakan dilakukan melalui program intensifikasi pengembangan komoditas terutama pada komoditas strategis yang mendukung peningkatan sektor ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mendukung Ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komoditas strategis peternakan yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat digambarkan dalam populasi ternak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6.
Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2016 – 2017

	Ternak	Populasi Ternak (ekor)	
		2016	2017
1	Sapi	1.092.719	1.149.540
2	Kerbau	125.122	116.847
3	Kuda	60.532	48.367
4	Kambing	639.678	656.585
5	Domba	25.912	18.660
6	Babi	55.670	53.784
7	Ayam Ras Petelur	488.863	740.211
8	Ayam Ras Pedaging	7.536.124	8.705.364
9	Ayam Buras	8.130.691	8.104.488
10	Itik	1.118.908	957.073

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Tahun 2017

Pelestarian sumberdaya ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus dipertahankan bahkan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dibutuhkan program dan kegiatan yang bersifat intensif-massiv dan inovatif dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan NTB BSS. Capaian kinerja subsektor peternakan (ternak sapi) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	CAPAIAN
1	Populasi	Ekor	1.092.719	1.147.355	1.149.540
2	Induk Produktif	Ekor	491.724	516.310	517.293
		%	45	45	45
3	Kelahiran Pedet	Ekor	393.379	413.048	413.834
		%	80	80	
4	Kematian Pedet	Ekor	39.338	41.305	41.383
		%	10	10	10
5	Pemotongan Betina Produktif	Ekor	133	Meminimalisir pemotongan betina produktif mendekati 0 % mengacu Perda 1/ 2015	51
		%	0.40		0,62
6	Pengeluaran Bibit	Ekor	3.668	10.000	3.402
	Pengeluaran Ternak Potong	Ekor	11.342	45.500	43.378

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	CAPAIAN
7	Serapan Tenaga Kerja	Orang	3.433	286.839	287.385
8	Kesejahteraan Masyarakat (NTP)		117,98	100	120,60

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2017

Pertumbuhan populasi ternak sapi pada tahun 2017 sebesar 5,20 persen dari 1.092.719 ekor di tahun 2016 meningkat menjadi 1.149.540 ekor pada tahun 2017. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi tahun 2017 adalah peningkatan produksi pakan hijauan berkualitas, integrasi pengembangan peternakan lintas sektoral, pengendalian pemotongan betina produktif, pemeriksaan laboratorium pada beberapa kasus penyakit strategis, peningkatan mutu genetik, penanganan gangguan reproduksi pada sapi potong, pelayanan kesehatan hewan dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan kelompok.

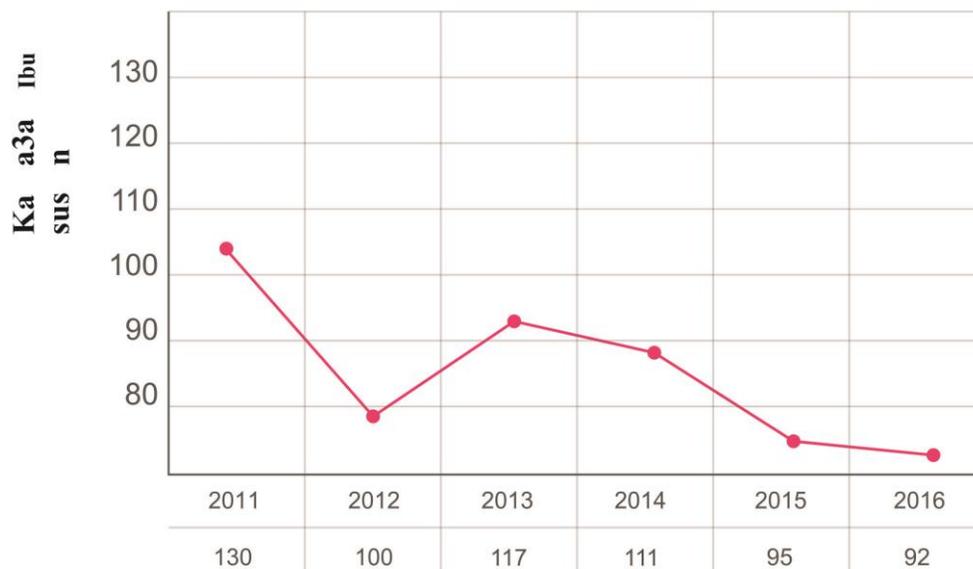
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.3.a Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI).

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 sebesar 91,83% berarti sekitar 8,17% persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan (seperti: dukun beranak). Cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan cakupan tahun 2015 yaitu 91,7% Komplikasi dan kematian ibu serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi dimasa persalinan. Hal ini dapat disebabkan karena pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang professional (memiliki kompetensi kebidanan). Pada tahun 2016, jika cakupan pelayanan K4 dibandingkan dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, maka cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan lebih rendah 4,77% daripada cakupan pelayanan K4 ibu hamil, dapat diartikan sekitar 5.132 ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan K4, pada saat persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan dapat terus melakukan pengawasan pada ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan K4 agar pada saat memasuki masa persalinan dapat tetap tertangani oleh tenaga kesehatan. Kematian ibu menurut WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari

setelah persalinan atau berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Berdasarkan SDKI 2012 angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu di NTB tahun 2012 sebesar 251 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, jumlah kasus kematian ibu di Provinsi NTB selama tahun 2016 adalah 92 kasus, menurun dibandingkan tahun 2015 dengan 95 kasus. Trend jumlah kematian ibu tahun 2011-2016 terlihat pada tabel gambar berikut.

Gambar 2.5.
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2011-2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2011-2016

Gambar 2.5. menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu di Provinsi NTB cenderung fluktuatif, namun apabila dicermati lebih lanjut, dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kematian ibu menunjukkan progres positif atau cenderung menurun.

2.3.b Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita.

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan

ekonomi penduduk karena indikator ini merupakan refleksi sosial ekonomi yang terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak, status gizi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Laporan rutin (pencatatan) petugas kesehatan di Provinsi NTB mencatat bahwa kasus kematian balita pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Kasus kematian balita pada tahun 2015 adalah 1.152 kasus, terdiri dari 1.086 kasus kematian bayi dan 66 kasus kematian anak balita dari 104.597 kelahiran hidup, sedangkan kasus kematian balita tahun 2016 adalah 1.084 kasus, terdiri dari 1.006 kasus kematian bayi dan 78 kematian anak balita dari 103.132 kelahiran hidup. AKB adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB Provinsi NTB telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 2003-2012, namun masih diatas angka nasional. Menurut data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di Provinsi NTB pada tahun 2007 sebesar 72/1000 kelahiran hidup mengalami penurunan menjadi 57/1000 kelahiran hidup sesuai data SDKI 2012. Jumlah kematian bayi, tahun 2017 sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9.0 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun 2016 sebanyak 1.006 kasus dengan proporsi 9.86 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2015-2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8.
Kematian Bayi Tahun 2015 - 2017

NO	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017	
		Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup
1	Mataram	34	8.422	25	8.422	44	8.231
2	Lombok Barat	42	13.739	38	13.739	31	13.772
3	Lombok Utara	82	4.391	59	4.391	86	4.567
4	Lombok Tengah	192	18.425	192	18.425	242	19.641
5	Lombok Timur	460	26.457	467	26.457	346	26.145
6	Sumbawa Barat	28	2.813	24	2.813	17	2.857
7	Sumbawa	75	8.838	66	8.838	30	8.853
8	Dompu	35	5.387	30	5.387	40	5.700
9	Bima	91	10.013	80	10.013	74	10.207
10	Kota Bima	17	3.450	25	3.450	19	3.177
	NTB	1056	101.935	1006	101.935	929	103.170
	Proporsi	10,35		9.86		9.00	

(per 1.000 KH)			
----------------	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.8. diatas menunjukkan bahwa kematian bayi terbanyak terjadi di Lombok Timur. Jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di Provinsi NTB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi di Kabupaten Lombok Timur. Mendekatkan dan memudahkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di wilayah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan kontinyu terutama tentang kesehatan reproduksi serta sosialisasi yang lebih intens adalah beberapa upaya yang diharapkan dapat menekan kasus kematian pada bayi.

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

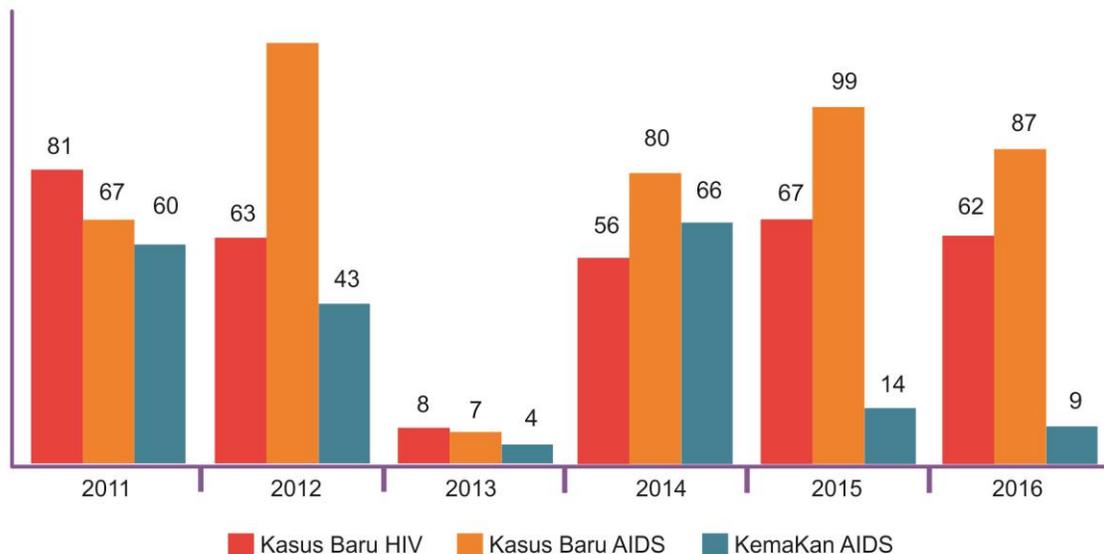
2.3.c Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular.

Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, jumlah kasus yang ditemukan sangat sedikit dibandingkan dengan kenyataannya. HIV/AIDS patut mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat eksese yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka Provinsi NTB berpotensi sebagai tempat terjadinya penularan HIV-AIDS. Demikian juga sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri, kemungkinan terjadinya penularan HIV-AIDS cukup besar. Kasus HIV-AIDS ditemukan di seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi NTB.

Berdasarkan laporan VCT rumah sakit/puskesmas dan laporan rutin AIDS kabupaten/kota tahun 2016, jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Jumlah kasus yang ditemukan tahun 2015 adalah 67 kasus HIV dan 99 kasus AIDS, sedangkan tahun 2016 adalah 62 kasus HIV, dan 87 kasus AIDS. Jumlah kematian

karena AIDS di Provinsi NTB tahun 2015 sebanyak 14 kasus, mengalami penurunan menjadi 9 kasus tahun 2016. Penemuan penurunan kasus dan penurunan angka kematian AIDS yang cukup signifikan antara lain dipengaruhi oleh penambahan jumlah VCT di kabupaten/kota, penjangkauan ke populasi kunci lebih banyak, dukungan pendanaan untuk kegiatan mobile VCT yang cukup baik dan kerjasama serta kerja keras semua pihak untuk menanggulangi HIV/AIDS. Perkembangan penemuan kasus baru HIV/AIDS terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6.
Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS dan Kematian AIDS di Provinsi NTB
Tahun 2011-2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2016

Gambar 2.6. memperlihatkan bahwa dalam 6 (enam) tahun terakhir, temuan kasus baru HIV positif ataupun AIDS cenderung fluktuatif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian semua pihak mengingat dampaknya di masyarakat terutama bagi generasi muda. Konsistensi dan komitmen dari *decision maker*, petugas kesehatan, lembaga swadaya, masyarakat umum dan keluarga sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan dan penanganan HIV/AIDS, tidak hanya dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan, tetapi juga dukungan moril.

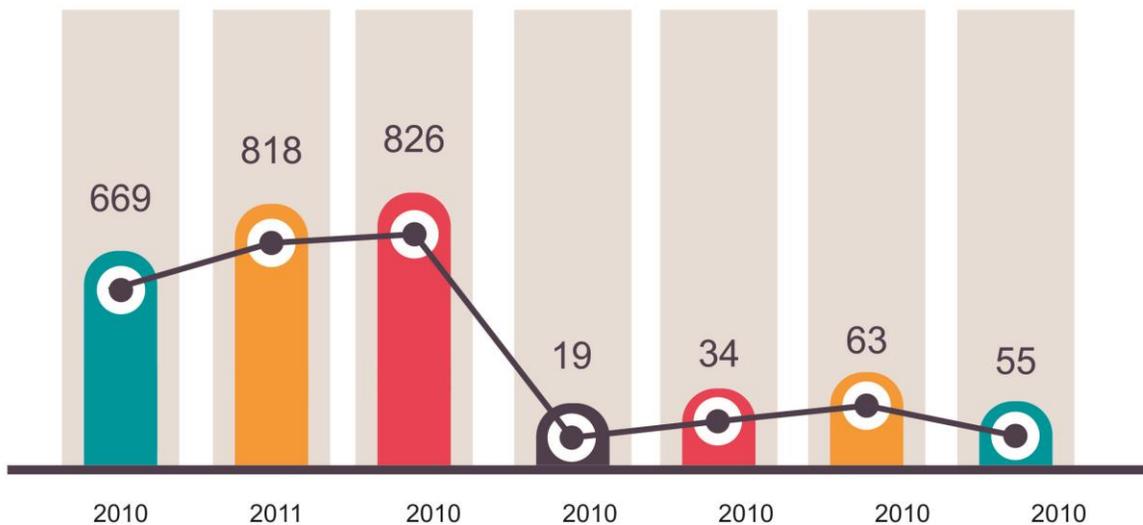
Kegiatan pengendalian HIV-AIDS dilakukan juga melalui pengamatan terhadap hasil skrining/penapisan darah saat donor darah. Pada tahun 2015 dari 41.569 pendonor yang sampel darahnya diperiksa, ditemukan 55 sampel darah yang positif HIV. Untuk

tahun 2016, jumlah sampel darah yang diskriming adalah 46.496 sampel, dan ditemukan 81 positif HIV.

Provinsi NTB adalah salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh turis domestik maupun mancanegara. Sebagai daerah tujuan wisata, bukan hanya efek positif yang akan timbul, tetapi juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi adalah penyebaran penyakit infeksi menular seksual (IMS) lainnya, antara lain penyakit syphilis. Berdasarkan laporan, pada tahun 2015 jumlah kasus IMS (syphilis) sebanyak 63 orang, mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 55 orang dan banyak terjadi pada kelompok umur 25 - 49 tahun. Penyebaran kasus IMS di kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 11. Kasus yang dilaporkan adalah jumlah penderita yang berobat ke sarana puskesmas dan jaringannya, sehingga jumlah penderita sebenarnya di populasi belum terdeteksi. Trend kasus baru IMS di Provinsi NTB tahun 2010-2016 terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7.

Trend Kasus Baru IMS (Syphilis) di Provinsi NTB Tahun 2010-2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2010-2016

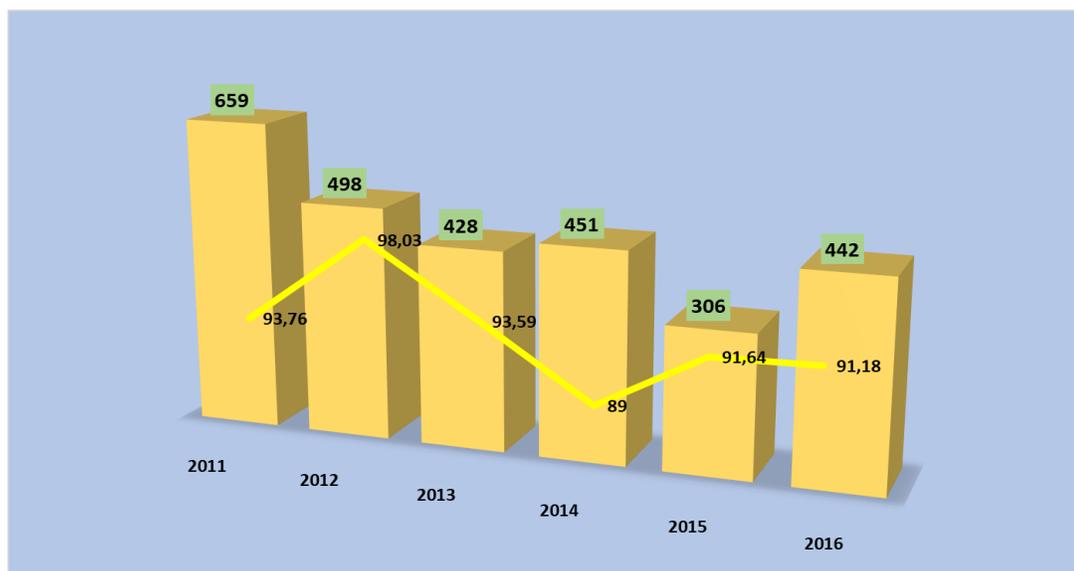
Gambar 2.7. memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 kasus IMS syphilis sedikit mengalami penurunan. Agar jumlah kasus IMS dapat tertangani secara menyeluruh, maka diperlukan sistem pelaporan kasus dari sarana pelayanan kesehatan yang baik dan tertib.

Kedepan, diharapkan semua sarana pelayanan kesehatan dapat memberikan laporan, sehingga gambaran sebaran penyakit sphyllis dapat diperoleh.

Tuberkulosis (TB) yang juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Tujuan penemuan dan penanggulangan penyakit TB adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Provinsi NTB, pada tahun 2015 dilaporkan bahwa jumlah seluruh pasien TB (semua tipe) mencapai 5.931 orang, dan sebanyak 4.151 orang diantaranya merupakan kasus baru BTA+. Sedangkan untuk tahun tahun 2016, jumlah seluruh pasien TB adalah 5.826 orang, dengan 3.860 orang merupakan kasus TB baru BTA+. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka kasus TB pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,8%.

Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015, yakni dari 91,64% tahun 2015 menjadi 91,18% tahun 2016. Trend keberhasilan pengobatan (SR) di Provinsi NTB tahun 2011-2016 terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8.
Tren Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun 2011-2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2016

Gambar 2.8. memperlihatkan bahwa SR pengobatan TB Paru cenderung fluktuatif. Mengingat TB adalah kasus yang membutuhkan penanganan yang lama dan bersifat menular, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam penanggulangannya. Penjangkauan suspek yang lebih intens dan luas, sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat, pelatihan yang kontinyu bagi petugas kesehatan serta dukungan dalam penganggaran adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kejadian TB.

2.3.d Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM mempunyai durasi yang panjang dan umumnya berkembang lambat. Empat jenis PTM utama menurut WHO adalah penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner, stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis (asma dan penyakit paru obstruksi kronis), dan Diabetes Melitus (DM).

Peningkatan kasus PTM kemungkinan akan terus berlanjut seiring dengan perubahan *life style* atau perilaku masyarakat seperti kurang olahraga atau aktifitas fisik, pola makan dengan gizi tidak seimbang, lebih banyak mengkonsumsi *fast food* atau *junk food*, perokok dan lingkungan yang tidak bebas asap rokok. Di Provinsi NTB, faktor resiko dan PTM yang dilaporkan kabupaten/kota adalah hipertensi, obesitas dan pemeriksaan kanker leher rahim dan payudara. Deteksi dini faktor resiko PTM di semua tingkatan pelayanan kesehatan, penanggulangan faktor resiko PTM dan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PTM berbasis masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menekan resiko atau angka kematian akibat PTM.

Salah satu deteksi dini faktor resiko PTM adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah yang dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Sampai dengan tahun 2016 belum semua kabupaten melaporkan hasil pencatatan pengukuran tekanan darah, sehingga data yang tercatat belum mewakili seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Deteksi dini dilakukan pada penduduk usia ≥ 18 tahun. Dari 2.785.722 penduduk usia ≥ 18 tahun, jumlah penduduk yang telah dilakukan pengukuran tekanan darah adalah 329.052 jiwa. Data tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.835.217 jiwa dan penduduk yang telah dilakukan pengukuran tekanan darahnya sebanyak 710.395 jiwa.

2.3.e Mencapai Cakupan Kesehatan Universal.

Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan dan kemandirian pembangunan di bidang kesehatan yang diwujudkan antara lain sebagai penyelenggara berbagai upaya pelayanan kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. Peran serta dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dalam bentuk pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan, dana sehat, asuransi sosial di bidang kesehatan dan berbagai bentuk pembiayaan kesehatan prabayar.

Perkembangan peserta jaminan kesehatan di Provinsi NTB cukup positif. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2016 sebanyak 67,36% dari total penduduk, dan kesemuanya merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini dikarenakan jamkesda dan asuransi swasta ataupun asuransi perusahaan sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2.3.f Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Informasi tentang fertilitas diperoleh dengan menanyakan kepada semua Wanita Usia Subur (WUS) yang menjadi sampel SDKI mengenai jumlah anak yang pernah dilahirkan seumur hidupnya, baik pria maupun wanita, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Untuk mendapatkan laporan lengkap tentang anak, WUS ditanya tentang jumlah anak yang tinggal di rumah, tinggal di tempat lain, dan yang sudah meninggal. Setiap anak yang lahir hidup ditanyakan jenis kelamin, tanggal lahir, dan status kelangsungan hidup. Sedangkan anak yang sudah meninggal ditanyakan umur ketika meninggal. Berdasarkan SDKI, angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) di Provinsi NTB mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir, yaitu 2,8 anak per 1.000 perempuan pada tahun 2009 dan tetap pada angka 2.8 pada Tahun 2012, mengalami penurunan 2.5 pada Tahun 2017. Sementara itu, persentase wanita umur 15-49 Tahun yang sedang hamil menurut data SDKI Tahun 2017 adalah 4.0 dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita umur 40-49 Tahun adalah 3.0. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi meningkat dari 73.21 (2015) menjadi 74.75% (2016) dan meningkat 74.77% (2017).

2.3.g Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.

Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata.

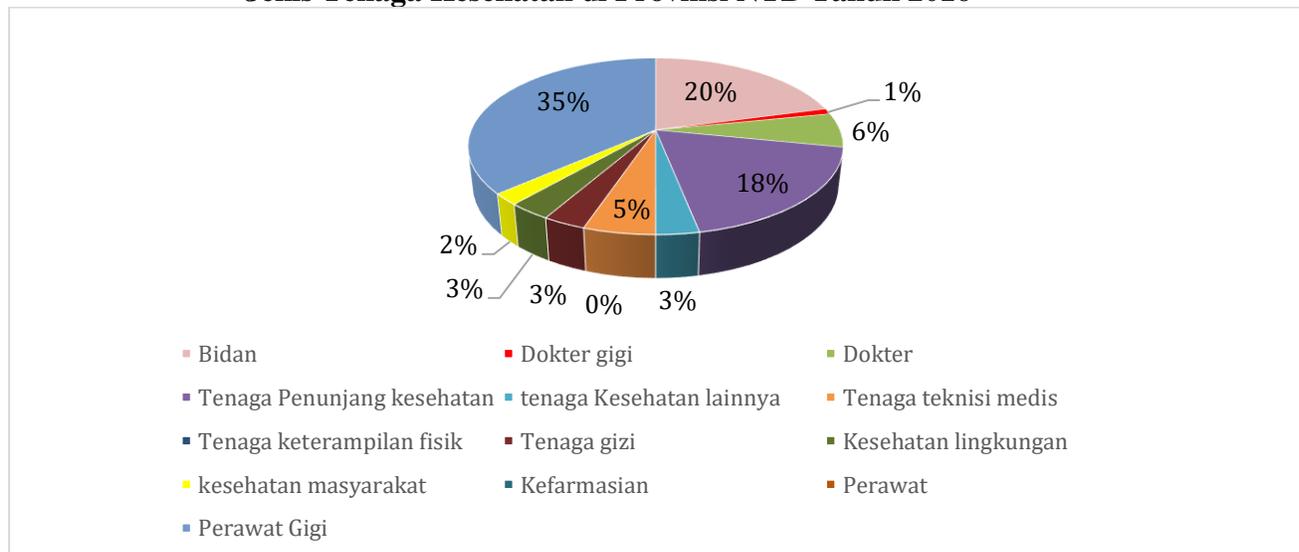
Tenaga Kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitarian, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2016 sebanyak 16.390 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah tenaga di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta dan tidak termasuk tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Proporsi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.8.
Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2016

Gambar 2.8. memperlihatkan bahwa proporsi terbanyak adalah tenaga perawat sebanyak 35% dan bidan sebanyak 20% dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB.

Tenaga dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit sebanyak 315 orang. Kondisi ini lebih rendah daripada kondisi tahun 2015 dimana dokter spesialis sebanyak 373 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 6 per 100.000 penduduk. Rasio dokter spesialis ini berada di bawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 11 per 100.000 penduduk (target 2019).

Tenaga dokter umum di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB sebanyak 680 orang dan rasio dokter umum adalah 14 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum di Provinsi NTB masih di bawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 45 per 100.000 penduduk (target 2019).

Tenaga dokter gigi di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB sebanyak 146 dengan rasio 3 per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi di Provinsi NTB masih dibawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 13 per 100.000 penduduk (tahun 2019).

Tenaga perawat di fasilitas kesehatan yang ada Provinsi NTB sebanyak 5.779 dan rasio tenaga perawat adalah 118 per 100.000 penduduk, masih di bawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 180 per 100.000 penduduk (tahun 2019).

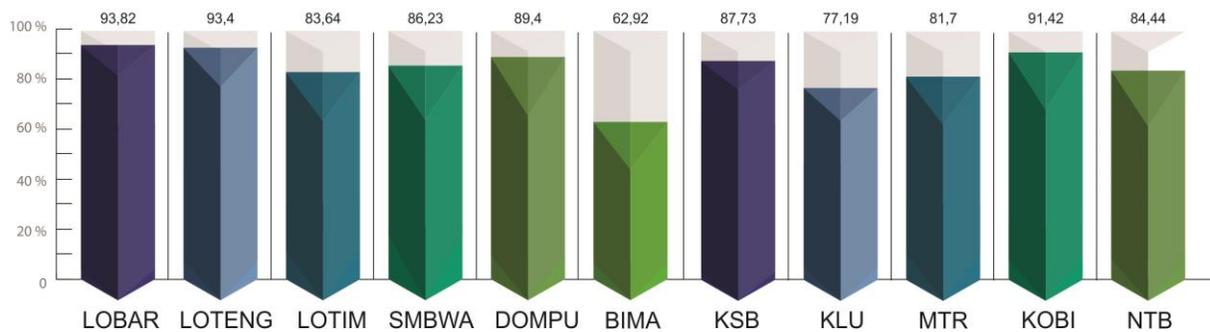
Tenaga bidan di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB sebanyak 3.207 orang dengan rasio 65 per 100.000 penduduk, masih di bawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 120 per 100.000 penduduk (tahun 2019).

Pelayanan Kefarmasian

Salah satu komponen penting dari sarana pelayanan kesehatan yang bermutu adalah manajemen logistik obat yang mencakup pengadaan, distribusi dan penyimpanan obat.

Pada tahun 2016 rata-rata ketersediaan 20 jenis obat dan vaksin di Puskesmas se Provinsi NTB sebesar 84,44%. Gambaran tentang ketersediaan obat dan vaksin di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.9
Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota
se Provinsi NTB Tahun 2016



Sumber: Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2016

Dari gambar 2.9. diketahui bahwa tidak ada Kabupaten yang cakupan ketersediaan obat dan vaksin nya 100% dan yang paling rendah cakupannya adalah Kabupaten Bima. Obat dan vaksin sebanyak 20 item tersebut harus tersedia di seluruh Puskesmas, agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan pengobatan yang maksimal kepada masyarakat di wilayahnya.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

2.4.a Partisipasi pendidikan penduduk NTB.

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2017 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB.

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Utama Perluasan Akses Pendidikan

No	Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Realisasi – Tahun					Target
		2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2016/ 2017
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	a. APK PAUD	65,55%	65,65%	62,97%	63,46%	74,89%	70,42%
	b. APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paketr	113,62%	113,95%	112,29%	109,29%	107,83%	114,15%
	c. B APK SMA/MA/SMK/Paket	104,85%	106,76%	108,67%	110,14%	109,99%	104,17%
2	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	a. APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paketr	99,95%	99,96%	99,90%	99,91%	99,67%	99,83%
	b. B APM SMA/MA/SMK/Paket	95,00%	96,81%	97,23%	97,79%	98,22%	97,77%
	c. C	72,57%	74,73%	76,02%	78,80%	83,35%	81,72%
3	Angka Melanjutkan/CR						
	a. CR ke SMP/MTs b. CR ke SMA/MA/SMK	100,75 97,16%	102,48 98,97%	101,09 98,99%	100,88 99,03%	100,04 99,07%	100,00% 98,79%
4	Menurunnya Angka Drop Out						
	a. SD/MI	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,15%	0,25%
	b. SMP/MTs	0,48%	0,47%	0,45%	0,33%	0,25%	0,45%
	c. SMA/MA/SMK	1,59%	1,33%	1,22%	1,09%	0,93%	0,94%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perluasan Akses Pendidikan yang ditargetkan untuk tahun 2017, pada umumnya dapat dicapai dan sebagian melampaui target yang ditetapkan. Capaian Akses Partisipasi Kasar (APK) PAUD ditargetkan pada tahun 2014-2018, Tahun 2017 sebesar 70,42 % bisa dicapai sebesar 74,89 %, Angka Partisipasi SD/MI/Paket A Setara yang ditargetkan mencapai 114,15% dapat direalisasikan sebesar 107,83 %, Capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang ditargetkan mencapai 104,17% dapat direalisasikan sebesar 109,99 % sehingga ada pencapaian diatas target sebesar 5,82%; Capaian APK SMA/AMK/MA/SMALB/Paket C yang ditargetkan mencapai 90,42 % dapat direalisasikan 92,22%, sehingga ada pencapaian diatas target sebesar 1,80 %.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A yang ditargetkan mencapai 99,83%, dapat direalisasikan 99,67 %, melampui.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan mencapai 97.77%, dapat direalisasikan 98.22 %, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 0.45 %,

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C yang ditargetkan mencapai 81.72 %, dapat direalisasikan 83.35 %, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 1,63 %.

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs ditargetkan sebesar 100,00 % dapat terealisasi sebesar 100,04 % sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 0,04 %

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK ditargetkan sebesar 98,79 % dapat terealisasi sebesar 99.07 % sehingga pencapaian di atas target sebesar 0,28 %..

Harapan menurunnya angka Drop Out SD/MI ditargetkan sebesar 0,25% dapat terealisasi sebesar 0,15 % bisa dicapai dibawah target renstra.

Angka DO SMP/MTs ditargetkan sebesar 0.45% dapat terealisasi sebesar 0,25 %,

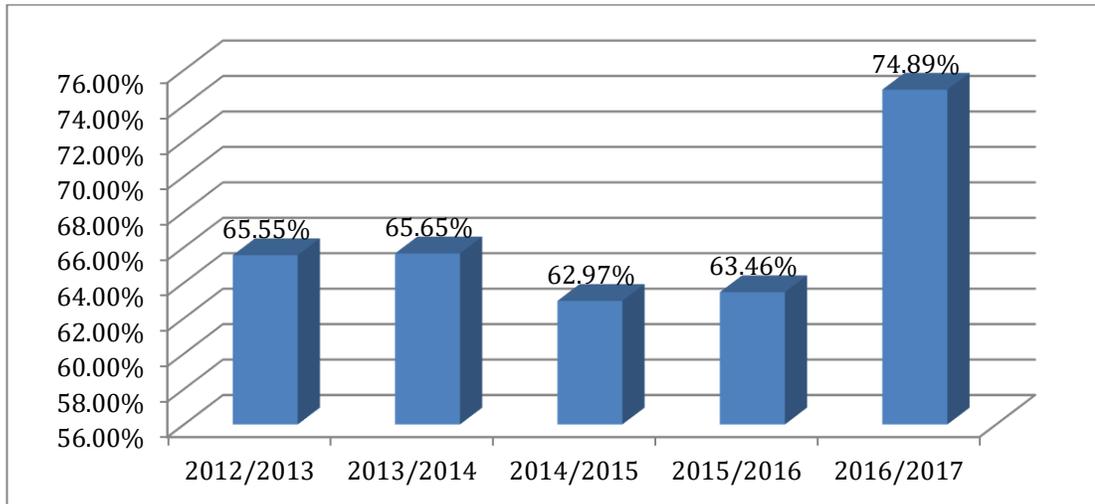
Angka DO SMA/MA/SMK ditargetkan sebesar 0.94 % dapat terealisasi sebesar 0,93 %,

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD telah mencapai 70,42 % dari target tahun 2016/2017 sebesar 74,89 %. Gambaran perkembangan Garfik APK PAUD selama 5 tahun terakhir (2012/2013 s.d 2016/2017) dapat dilihat pada Grafik 2.2. berikut.

Grafik 2.2.
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2016/2017



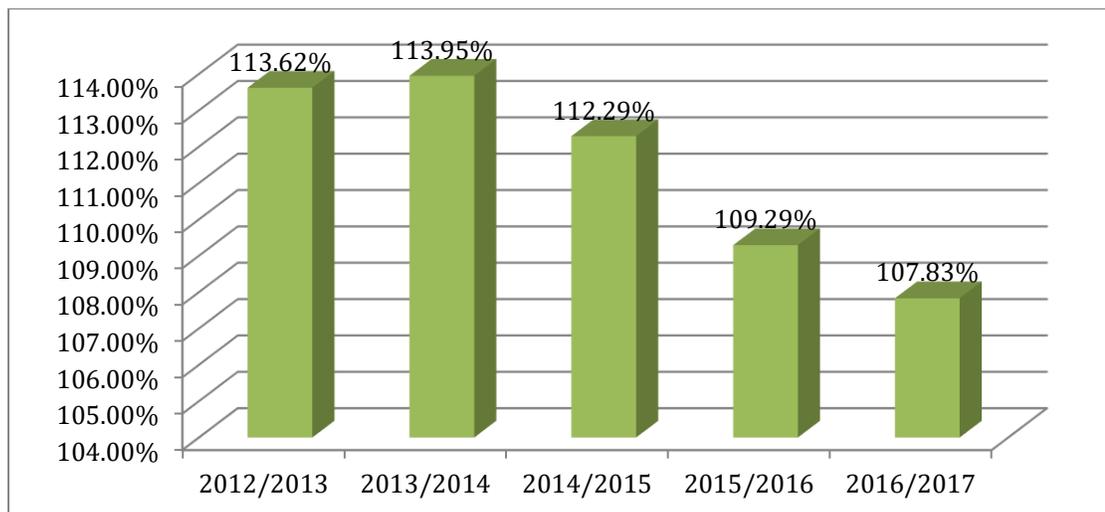
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

APK SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A telah mencapai 107,83% belum mencapai target tahun 2016/2017 sebesar 114,157%.

Gambaran perkembangan Grafik APK SD/MI selama 5 tahun terakhir (2012/2013 s/d 2016/2017) dapat dilihat pada Grafik 2.3. berikut :

Grafik 2.3.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A

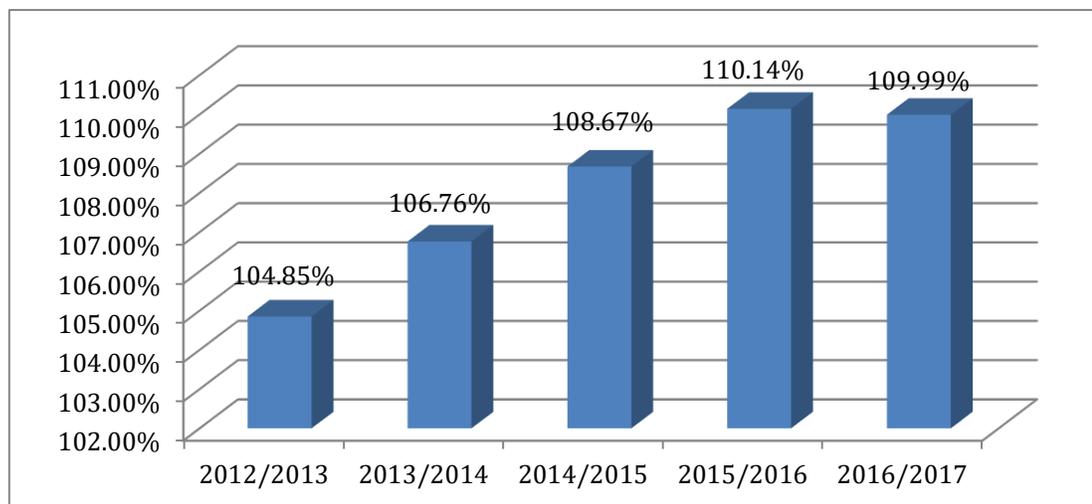


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

SMP/MTs/SMLB/SMPT/Paket B

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahun 2016/2017 telah mencapai 109,99 %, melampaui target tahun 2016/2017 sebesar 104,17 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015/2016 sebesar 110,14 %, maka realisasi tahun 2016/2017 terjadi penurunan sebesar 0,15 %. Gambaran perkembangan Grafik APK SMP/MTs selama 6 tahun terakhir (2012/2013 s/d 2016/2017) dapat dilihat pada Grafik 2.4. berikut :

Grafik 2.4.
Perkembangan APK SMP/MTs

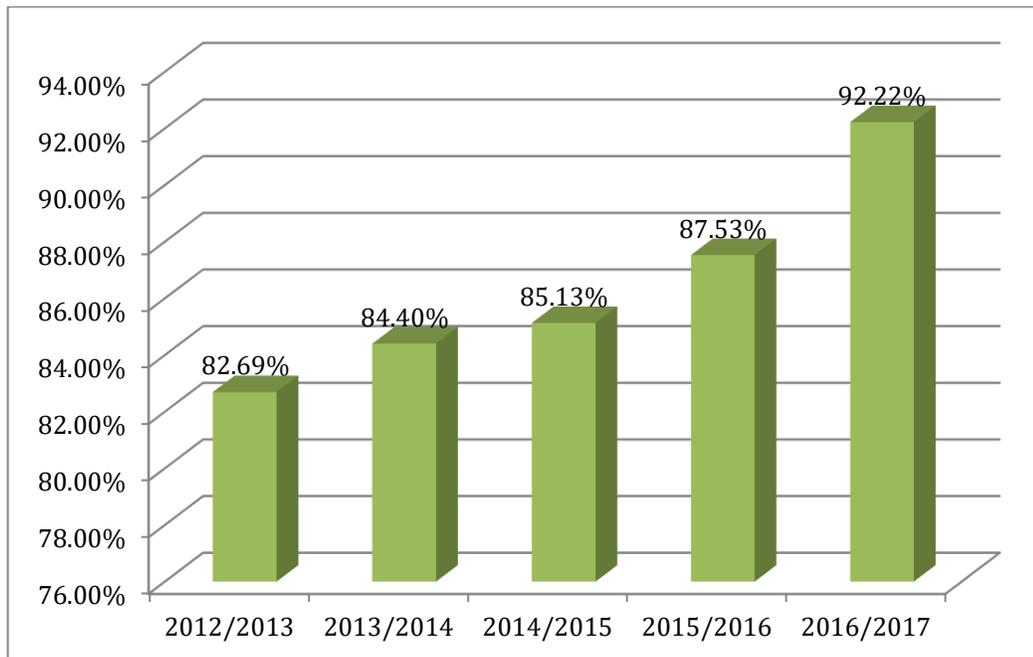


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

APK SMA/MA/SMK/Paket C

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C telah mencapai 92,22% melampaui target tahun 2016/2017 sebesar 90.42%. Dibandingkan dengan tahun 2015/2016 sebesar 87,53%, pada tahun 2016/2017 telah terjadi peningkatan sebesar 4,69%. Dengan capaian APK seperti itu, berarti pada tahun 2016/2017 sudah lebih banyak anak usia pendidikan menengah yang bersekolah daripada anak yang tidak bersekolah. Gambaran perkembangan Grafik APK SMA/MA/SMK dan Paket C selama 5 tahun terakhir (2012/2013 s/d 2016/2017) dapat dilihat pada Grafik 2.5. berikut :

Grafik 2.5.
APK SMA/MA/SMK



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

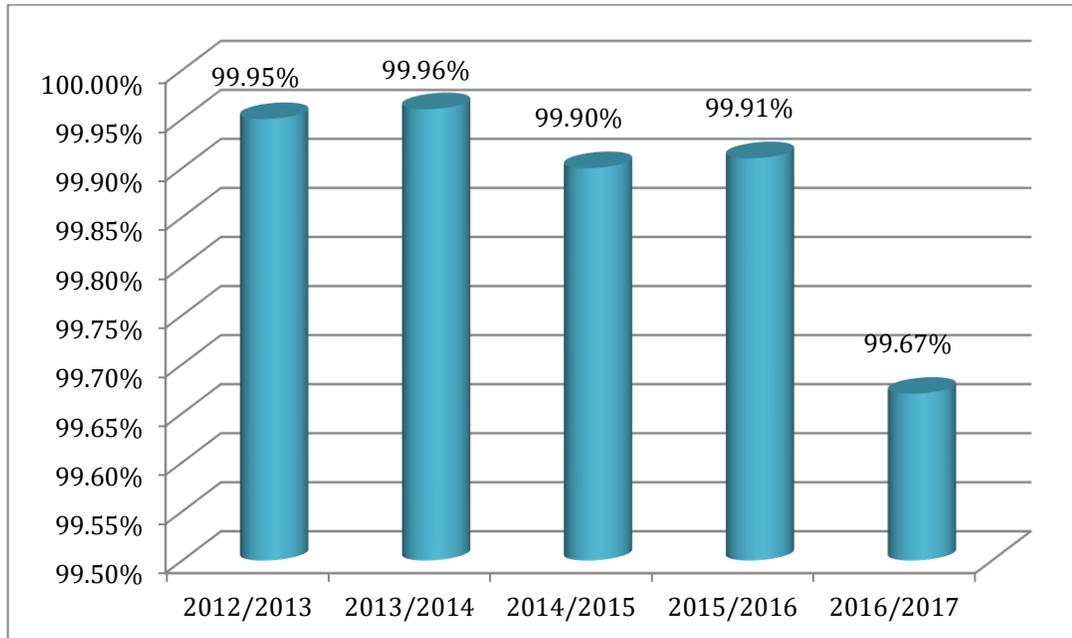
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

APM SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A telah mencapai 99,67% dan target tahun 2016/2017 sebesar 99,83%.

Gambaran perkembangan Grafik APM SD/MI/Paket A selama 5 tahun terakhir (2012/2013 s/d 2016/2017) dapat dilihat pada grafik 2.6 berikut ini :

Grafik 2.6.
Perkembangan Grafik APM SD/MI/Paket A 2012/2013 - 2016/2017



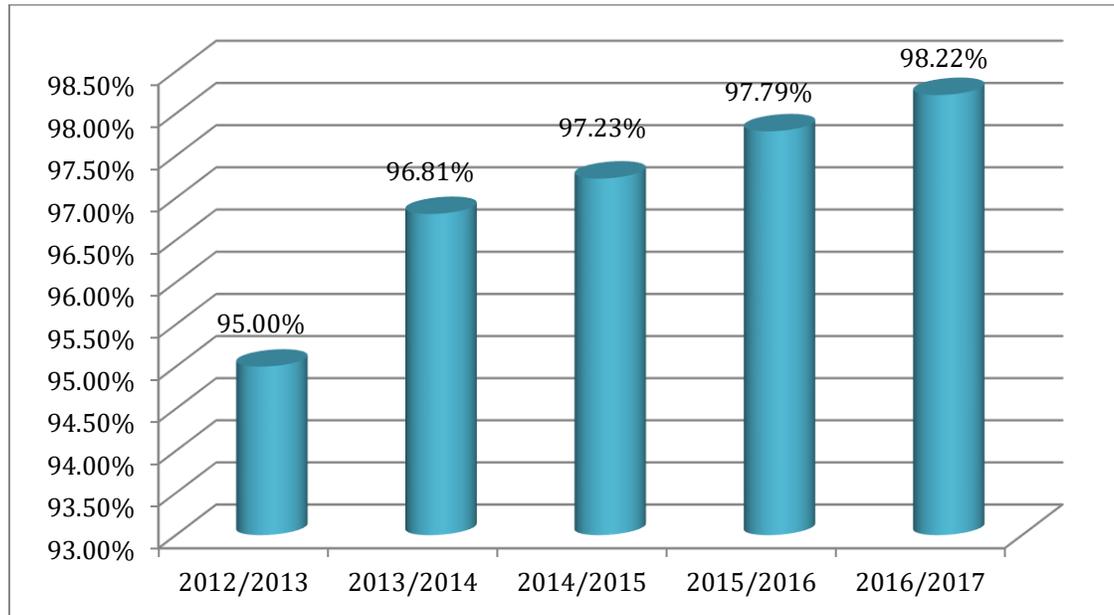
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

APM SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan mencapai 97.77%, Tahun Ajaran 2016/2017 dapat direalisasikan 98,22%, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 0.45%. Dibanding dengan realisasi tahun 2015/2016 sebesar 97.79%, pada tahun 2016/2017 telah terjadi peningkatan sebesar 0.49%.

Gambaran perkembangan Grafik APM SMP/MTs/Paket B selama 6 tahun terakhir (2012/2013 s/d 2016/2017) dapat dilihat pada garfik 2.7.berikut :

Grafik 2.7. Perkembangan APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2012-2017



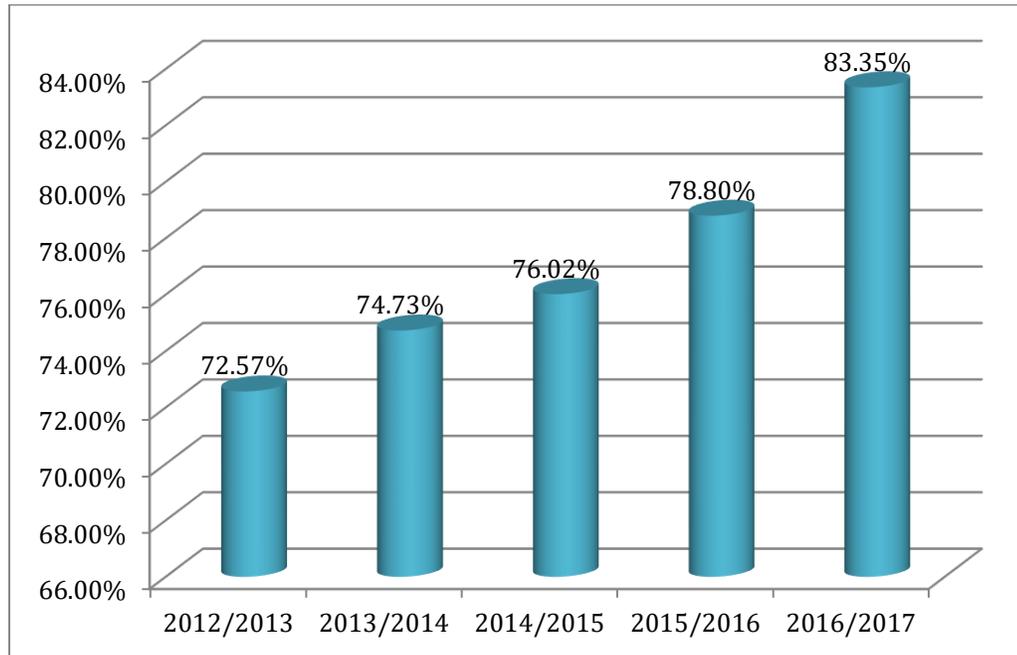
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

APM SMA/MA/SMK/Paket C

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C yang ditargetkan mencapai 81.72%, tahun ajaran 2016/2017 dapat direalisasikan 83.35%, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 1,63%.

Dibanding dengan realisasi tahun 2015/2016 sebesar 78.80%, pada tahun 2016/2017 menjadi 83,35% ini menandakan telah terjadi peningkatan sebesar 4,55%. Gambaran perkembangan Grafik SMA/MA/SMK/Paket C selama 5 tahun terakhir (2012/2013 s/d 2016/2017) dapat dilihat pada grafik 2.8. berikut :

**Grafik 2.8. Perkembangan SMA/MA/SMK/Paket C
Tahun 2012/2013- 2016/2017**



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

Angka Melanjutkan (CR).

Angka melanjutkan ke SMP/MTs.

Lulusan SD/MI tahun pelajaran 2015/2016 sebesar 101.329 anak, yang melanjutkan ke SMP/MTs tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 101.374 anak atau 100,04%, hal ini berarti secara umum lulusan SD/MI tidak ada yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs bahkan yang melanjutkan lebih besar dari lulusan SD/MI berarti ada lulusan tahun sebelumnya atau pendatang dari luar daerah.

Tabel Perkembangan lulusan SD/MI dan angka melanjutkan ke SMP/MTS Tahun 2012/2013 -2016/2017

No.	Tahun	Lulusan SD/MI Tahun sebelumnya	Melanjutkan SMP/MTs	
			Jumlah	%
1.	2012/2013	95.644	96.361	100,75
2.	2013/2014	94.520	96.866	102,48
3	2014/2015	95.649	96.696	101.09
4.	2015/2016	100.784	101.668	100.88
5.	2016/2017	101.329	101.374	100,04

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA

Lulusan SMP/MTs tahun pelajaran 2015/2016 sebesar 89.049 anak, yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 88.221 anak atau 99,07%.

**Tabel 2.11.
Perkembangan lulusan SMP/MTS dan angka melanjutkan ke SMA,MA dan SMK Tahun 2012/2013 - 2016/2017**

No.	Tahun	Lulusan SMP/MTs Tahun sebelumnya	Melanjutkan SMA/MA/SMK	
			Jumlah	%
1.	2012/2013	78.457	76.226	97,16
2.	2013/2014	76.622	75.835	98,97
3.	2014/2015	79.366	78.565	98,99
4.	2015/2016	88.016	87.165	99,03
5.	2016/2017	89.049	88.221	99,07

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

2.4.b Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki.

Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang. Pada tahun 2016, Rasio APK SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki

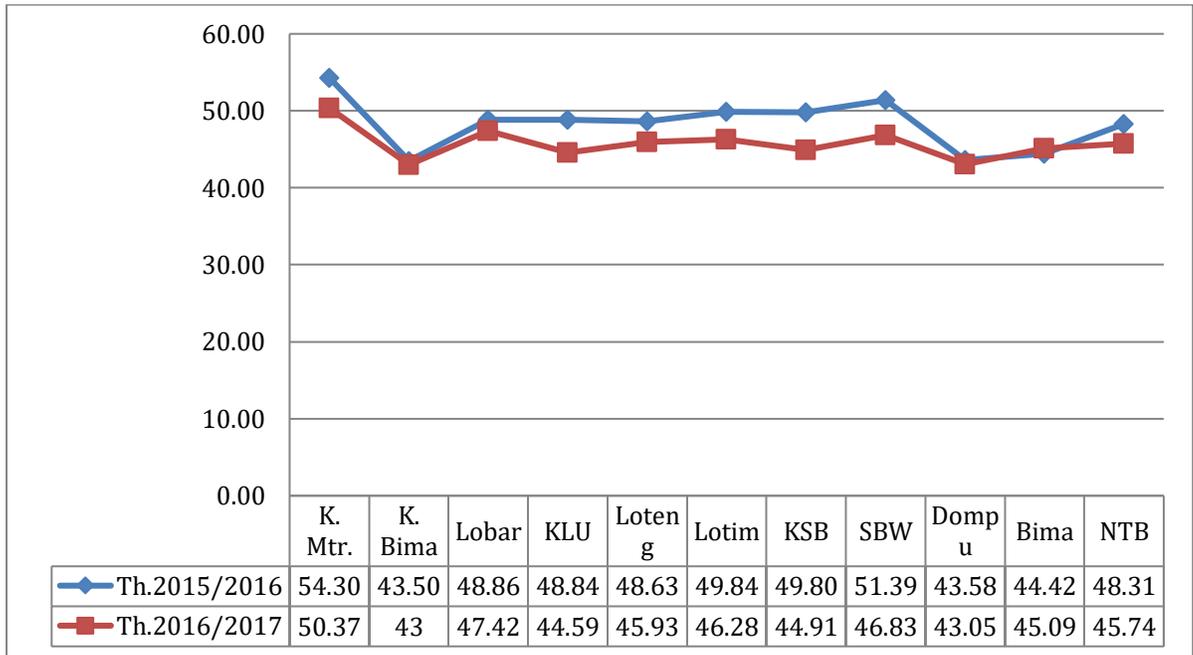
sebesar 0,99, rasio APK SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,05, dan rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,06. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki mencapai 1,16. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah setara.

2.4.c Kemampuan siswa Indonesia.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan merupakan pilar kebijakan pendidikan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan manusia Indonesia berkualitas, memiliki taraf hidup lebih baik, memiliki kemampuan berinteraksi sosial serta mampu hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya, serta memiliki daya saing tinggi di era global. Kebijakan ini diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat dengan mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Dalam lima tahun terakhir, telah dilakukan berbagai upaya untuk merealisasikan target-target pembangunan pendidikan di bidang peningkatan mutu dan daya saing, sebagaimana telah ditetapkan RENSTRA Dinas 2008– 2013, dan RENSTRA dinas Dikbud tahun 2013 - 2018

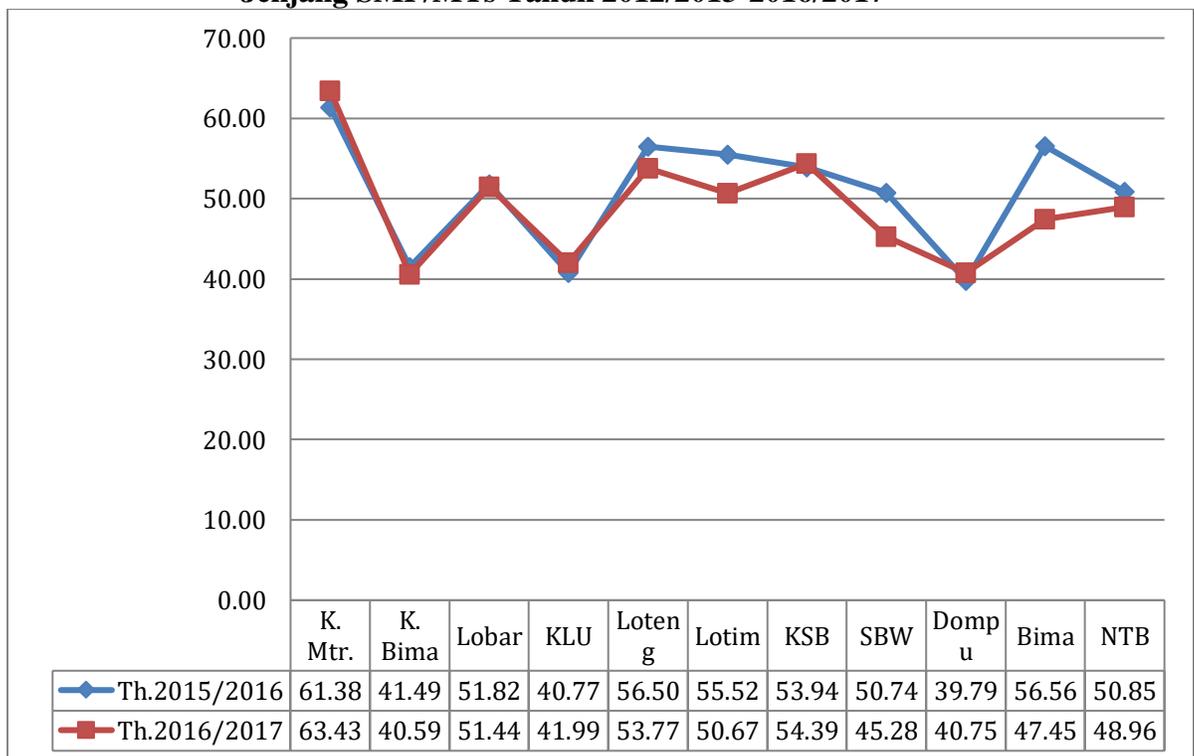
Pada tahun 2009, terdapat 6 indikator kinerja utama (IKU) pada bidang peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, dan telah berhasil dilampaui dengan baik bila dihubungkan dengan target capaian. Tabel dibawah menggambarkan secara lengkap capaian kinerja peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dalam kurun waktu 2012/2013 s.d 2016/2017

Grafik 2.9. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Kabupaten/Kota Jenjang SMK Tahun 2012/2013 - 2016/2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

Grafik 2.10. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Kabupaten/Kota Jenjang SMP/MTs Tahun 2012/2013-2016/2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

2.4.d Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Guna memenuhi amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru harus berkualifikasi akademik minimal S-1 atau D-4, Dinas Dikbud NTB telah melakukan berbagai upaya kebijakan dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru, mulai dari guru TK sampai SMA/SMK.

Dari jumlah guru secara keseluruhan sebanyak 85.165 orang, terdiri GT44.632 orang guru berstatus GTT Sementara sisanya, yaitu 40.533 Orang. Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap dengan kualifikasi S-1/D-4 dan di atas S-1/D-4, sebanyak 71.324 orang guru (83.75%), dan yang berkualifikasi pendidikan di bawah S-1/D-4 baik guru PNS maupun non PNS adalah sebanyak 13.841 orang guru (16.25%) dengan rincian perolehan prosentasi kualifikasi :

Perolehan prosentasi kualifikasi guru TK mencapai 72,88%, Perolehan prosentasi kualifikasi guru SD mencapai 73.26%, Perolehan prosentasi kualifikasi guru SLB mencapai 89,35%, Perolehan prosentasi kualifikasi guru SMP mencapai 95,27%, Perolehan prosentasi kualifikasi guru SMA mencapai 98,98%, Perolehan prosentasi kualifikasi guru SMK mencapai 98.46%.

Gambaran kondisi guru di Nusa Tenggara Barat tahun pelajaran 2015/2016 berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah pada table berikut :

Tabel 2.12. Guru Tetap dan Tidak Tetap Yang Sudah dan Belum Kualifikasi Berdasarkan Satuan Pendidikan Tahun 2016/2017

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru			Guru yang Sudah S1/D4		Guru yang Belum S1/D4	
		GT	GTT	Jlh	Jlh	%	Jlh	%
1.	TK	2.283	3.957	6.240	4.548	72,88%	1.692	48,37%
2	SD	22.371	18.579	40.950	30.000	73,26%	10.950	26,74%
3	SLB	789	0	789	705	89,35%	84	10,65%
4	SMP	9.132	9.421	18.553	17.675	95,27%	878	4,73%
5	SMA	5.549	3.909	9.458	9.362	98,98%	96	1,02%
6	SMK	4.508	4.667	9.175	9.034	98,46%	141	1,54%
Total		44.632	40.533	85.165	71.324	83,75%	13.841	16,25%

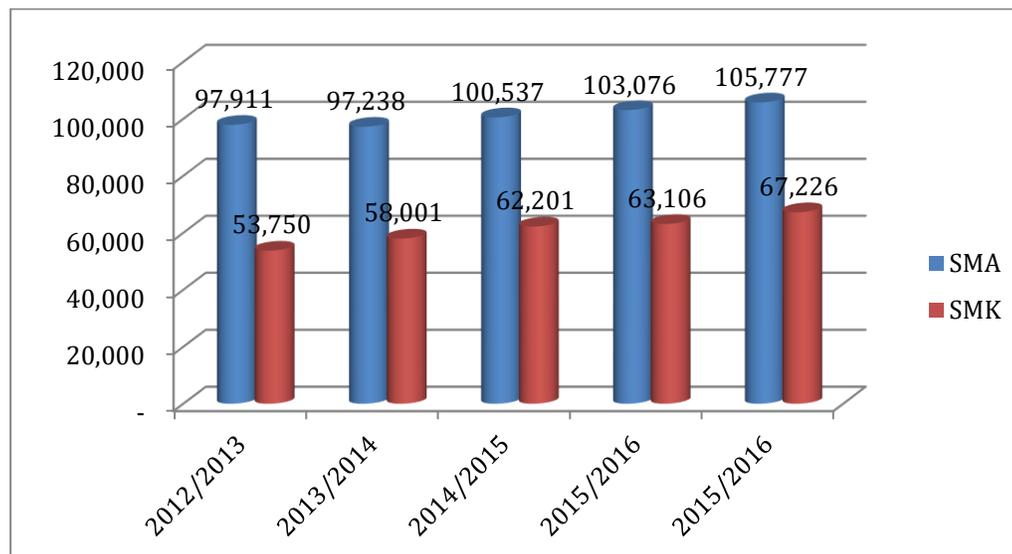
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

Rasio Jumlah SMA/MA : SMK

Kebijakan untuk meningkatkan rasio peserta didik SMK dibanding SMA dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 38:62 pada tahun 2015. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri.

Capaian peningkatan rasio siswa SMK:SMA berdasarkan provinsi untuk tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa perkembangan siswa SMK sangat menggembirakan karena sudah mencapai target rasio siswa SMK:SMA 38:62 atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini bisa dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.11.
Grafik Perkembangan Rasio Siswa SMK/SMA
Tahun 2016/2017

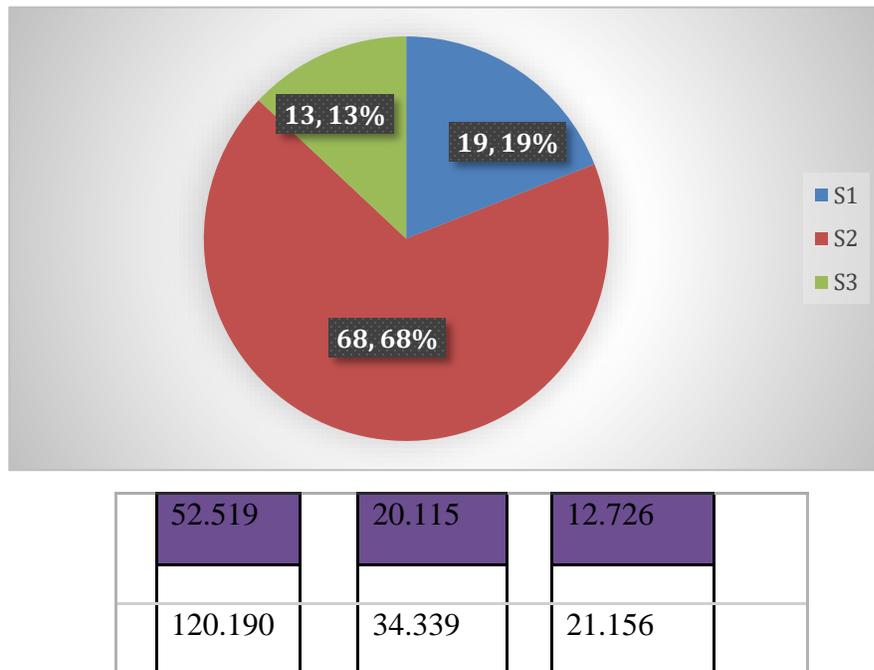


Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTB, 2017

2.4.e Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan.

Parameter penting untuk mengukur kualitas institusi pendidikan adalah akreditasi kelembagaannya. Dari Gambar 12 dapat terlihat bahwa di tingkat satuan pendidikan jenjang SD, SMP maupun SMA, sudah banyak satuan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik. Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B mencapai lebih dari 60%.100% 50% 0%.

Gambar 2.10. Pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B



SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat

Sementara, akreditasi institusi pendidikan tinggi minimal B baru mencapai sekitar 34,6% atau sebanyak 387 dari 1.120 pendidikan tinggi yang sudah terakreditasi (Gambar 2.10). Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi nasional perlu terus didorong agar penyelenggaraan pendidikan dapat memenuhi standar kualitas yang berlaku.

Gambar 2.10. Status Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi Sumber: diolah dari data forlap.ristekdikti.go.id, 11 Januari 2017.

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

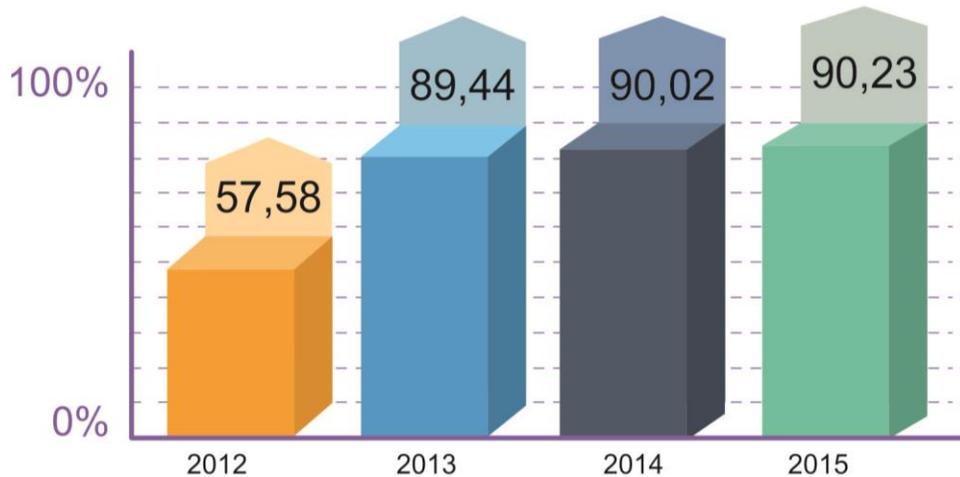
Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan, dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah. Sedangkan gender itu sendiri adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan bukan merupakan

kodrat, sehingga dapat berubah sesuai jaman dan bersifat lokal tergantung pada kondisi daerah setempat.

Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender pada RPJMN adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kemudian, arah kebijakan RPJMN tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan RPJMD menjadi (1) meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indikator jumlah SKPD/OPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); (2) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan indikator capaian meningkatnya cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kabupaten/kota layak anak; (3) Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi remaja dengan indikator capaiannya meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan.

Capaian kinerja lainnya dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD/OPD yaitu meningkatkan Indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya ekonomi. Perkembangan IPG di NTB dapat dilihat pada Grafik 2.11.

**Grafik 2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB
Tahun 2012 – 2015**

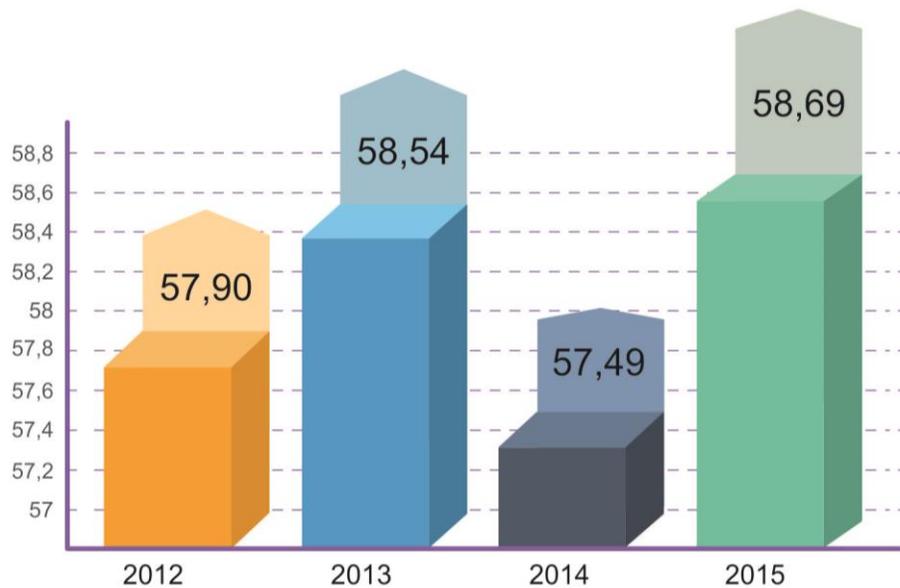


Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012 - 2015

Grafik 2.11. Menunjukkan bahwa IPG di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2012 IPG Provinsi NTB sebesar 57,58 melonjak naik pada tahun 2013 sebesar 89,44 sampai dengan tahun 2014 dan 2015 terus mengalami kenaikan masing-masing 90,02 dan 90,23. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

Selain IPG, ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender adalah IDG. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. IDG menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan jika dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Indeks Pemberdayaan Gender di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.12.

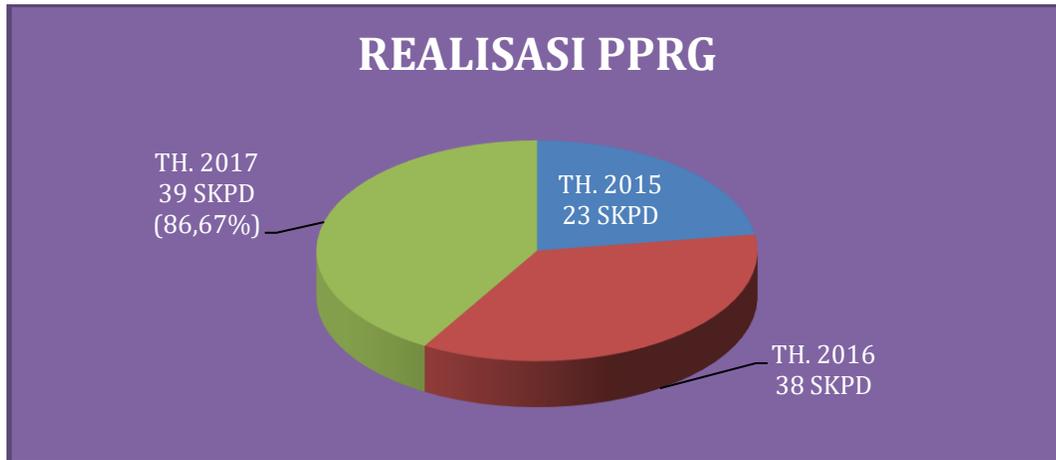
**Grafik 2.12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di NTB
Tahun 2012 – 2015**



Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012 - 2015

Grafik 2.12. menggambarkan IDG NTB tahun 2012 sebesar 57,90 mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 58,54. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 57,49 dan naik lagi pada tahun 2015 sebesar 58,69. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah wanita yang berperan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Provinsi NTB mengalami pluktuasi setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu program/kegiatan pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk mendorong peningkatan peranan perempuan dalam posisi manajerial. Untuk lebih terencana, maka program/kegiatan terkait gender dimasukkan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Realisasi kinerja PPRG di NTB dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11.
Realisasi kinerja PPRG Tahun 2015-2017



Sumber: DP3APPKB Provinsi NTB, 2017

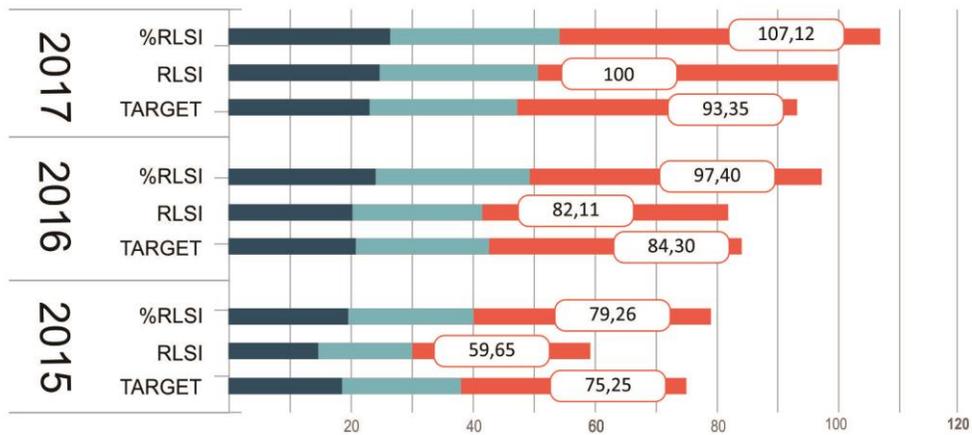
Gambar 2.11 menunjukkan realisasi kinerja PPRG Provinsi NTB pada tahun 2015 adalah 23 SKPD dari target 25 SKPD, sedangkan tahun 2016 38 SKPD dari target 25 SKPD dan tahun 2017 yaitu 39 SKPD dari target 38 SKPD.

Realisasi kinerja PPRG yang terus meningkat setiap tahunnya berpengaruh positif terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB. Namun berpengaruh pluktuatif terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini dapat diartikan bahwa perlu evaluasi terhadap kebijakan khususnya yang kaitannya dengan pemberdayaan perempuan untuk menduduki posisi manajerial.

2.5.a Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada Grafik 2.13. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 sebanyak 658 kasus, target yang ditangani oleh DP3AKB sebanyak 495 kasus dan realisasinya 392 (79,19%). Terjadi peningkatan kasus kekerasan pada perempuan tahun 2016 sebanyak 932 kasus, target kasus yang ditangani DP3AKB 842 orang dan realisasi kasus yang ditangani 842 kasus (97,40%). Tahun 2017 jumlah kasus kekerasan menurun menjadi 635 kasus, target kasus yang ditangani DP3AKB 593 kasus, namun realisasinya melampaui target sebanyak 635 kasus (107,08%).

Grafik 2.13.
Capaian kinerja Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan



Sumber: DP3APPKB Provinsi NTB, 2017

Pencapaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini didukung oleh peningkatan kinerja, kualitas SDM pemberi pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya dukungan dana yang cukup untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Program yang mendukung indikator ini adalah program penguatan kelembagaan PUG dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Cakupan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak telah menjadi agenda pembangunan global dan nasional sejak ditandatanganinya Konvensi Hak Anak (KHA) 25 tahun yang lalu dan Indonesia telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jumlah Kasus kekerasan pada anak di Provinsi NTB terus meningkat. Pada Tahun 2016 jumlah kekerasan pada anak perempuan sebanyak 139 anak dan meningkat menjadi 301 anak pada tahun 2017 (Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB). Kasus pelanggaran hak anak meliputi kekerasan, penelantaran, eksploitasi perdagangan anak, kekerasan secara fisik, psikis dan seksual pada anak yang terjadi merupakan fakta yang tidak bisa disembunyikan, oleh karena itu dampak negatif bila kasus tindak kekerasan tidak ditangani akan terjadi hal-hal sebagai berikut dapat membuat kejahatan/tindak kekerasan terhadap anak semakin meluas, Pelaku tindak kekerasan terhadap anak tidak jera dan menimbulkan situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat sekitarnya tidak nyaman (konduusif), dapat membuat perkembangan mental anak menurun (dampak psikologis) serta berakibat pada tumbuh kembang anak.

Sedangkan dampak positif bila ditanganinya kasus kekerasan terhadap anak adalah dapat menghentikan tindak kejahatan atau tindak kekerasan terhadap anak, dapat meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan atau tindak kekerasan terhadap anak, melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang dengan baik, dapat membuat efek jera pada pelaku tindak kekerasan pada anak dan memberikan rasa aman pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Untuk memudahkan pemahaman perhitungan indikator kinerja rata-rata jumlah cakupan kekerasan terhadap anak adalah jumlah anak yang tertangani kasus kekerasan dibagi jumlah seluruh anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Pada tahun 2017 DP3AP2KB Provinsi NTB didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Pelatihan Tematik Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang berlokasi di dua kabupaten yang merupakan lokasi PATBM pada tahun 2016 yaitu: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu

Sementara itu Pemerintah NTB telah berupaya keras menekan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTP/KTA) dengan berbagai cara antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota lebih memperhatikan masalah pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri karena banyak TKW yang meninggalkan anak-anak mereka, sehingga rentan menghadapi kekerasan dan seksual di sekitar lingkungannya.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga menggelar seminar dan diskusi Fasilitasi dan sosialisasi Kabupaten/kota Menuju Layak Anak (KLA).

Berdasarkan data tahun 2017, penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 1.054 kasus yang terdiri dari 635 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 419 kasus kekerasan terhadap anak. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 data kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 1.338 kasus yang terdiri dari 244 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.094 kasus kekerasan terhadap perempuan. Terjadi penurunan kasus sebesar sebesar 21,23 persen (284 kasus). Sedangkan untuk cakupan penanganan korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 99,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan yang melapor selalu mendapatkan pelayanan dan penanganan. Keadaan ini karena dukungan dan telah berfungsinya Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. Perkembangan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13.
Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Tahun 2016-2017

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	
			TARGET	REALISASI
Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	%	90,37	93,35	99,33

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2017

Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: melatih tenaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan fungsi mobil operasional “MOLIN” (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) dalam penjangkauan kasus kekerasan, surveillance ISO 9001-2015 bagi pengelola P2TP2A yang anggarannya bersumber dari dana DEKON). Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, antara lain; Belum maksimalnya pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) tentang KLA dalam upaya pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

2.5.b. Menghapus Semua Praktek Berbahaya

Rata-rata usia kawin pertama perempuan (Indikator kinerja pada Renstra dan RPJMD).

Gambaran umum indikator kinerja pada nomor urut 8 (delapan) pada Renstra

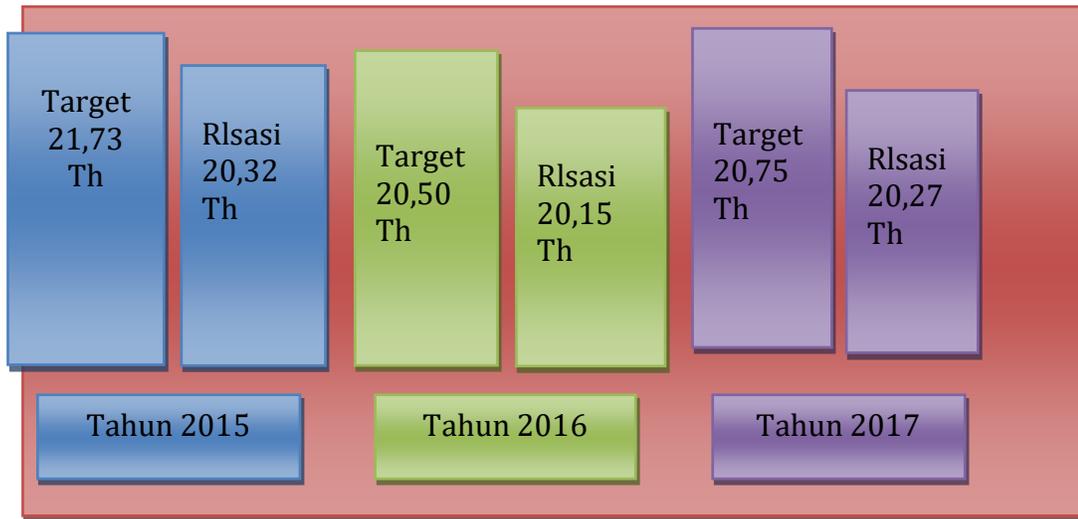
DP3APPKB Provinsi NTB dan nomor urut 24 dari 31 indikator kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Revisi RPJMD Tahun 2017) yaitu rata-rata usia kawin pertama perempuan. Indikator tersebut merupakan tolok ukur yang dapat merangkum beberapa indikator kinerja pada 2 (dua) urusan yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dengan sasaran strategis adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP). Intervensi program dan kegiatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan dini/muda pada usia 10-20 Tahun, sedangkan usia yang paling aman bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan pertama yaitu usia 21 – 30 tahun.

Dampak negatif dari perkawinan dini/muda antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya kasus perceraian, rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan swasta, tingginya angka kematian ibu dan bayi yang disumbang oleh perkawinan terlalu muda yaitu usia di bawah 18 tahun sebesar 3% dan usia terlalu tua di atas 34 tahun sebesar 4,7% berdasarkan survei demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) tahun 2007 dan dampak jangka panjang yaitu memperpanjang mata rantai kemiskinan karena parkawinan dini/muda dilakukan sebagian besar oleh keluarga miskin.

Apabila sasaran strategis dapat diwujudkan dengan target 21 tahun di akhir program (Tahun 2018) dari rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka **dampak positifnya adalah** mencegah ledakan jumlah penduduk, mencegah risiko kehamilan dan melahirkan sekaligus memperpendek waktu kehamilan dan melahirkan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan perempuan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang mandiri dan berkarier dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja mengalami fluktuatif yaitu capaian kinerja tahun 2015 20,32% dari target 21,73 dan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 20,15% dari target 20,50% sedangkan tahun 2017 meningkat kembali yaitu 20,27 dari target kinerja 20,75 (revisi RPJMD 2016). Capaian kinerja seperti pada grafik 2.14. berikut :

Grafik 2.14.
Rata-rata usia kawin pertama perempuan Tahun 2015-2017



Sumber data: BPS NTB, 2017

Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan dengan indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan jenis indikator kinerja *outcome intermediate*. Permasalahan yang mendasar yaitu ingin merubah budaya perkawinan dini/muda dikalangan remaja putri yaitu usia 10-20 Tahun menjadi pendewasaan usia perkawinan dengan usia antara 21 – 30 tahun (usia yang paling aman untuk kehamilan dan melahirkan).

Untuk merubah budaya adalah hal yang sangat sulit di wujudkan, mengingat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor pendidikan, tingkat pengetahuan, ekonomi keluarga, pengasuhan anak, teknologi semakin canggih, administrasi catatan sipil, desa/kelurahan dan kolaborasi program dan kegiatan dengan lintas program/lintas sektor terkait belum maksimal. Pengukuran kinerja *outcome intermediate* diperlukan waktu yang panjang dan tidak bisa saat ini melaksanakan program dan kegiatan saat ini juga dilakukan pengukuran, berbeda halnya dengan jenis indikator kinerja *outcome* atau hasil sesaat.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi

kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

2.5.c Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, Serta Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin

Perempuan berpeluang besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau menduduki posisi manajerial baik di lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dengan semakin besarnya partisipasi perempuan diharapkan akan menjamin penghapusan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, secara individu atau antar kelompok tanpa ada yang terpinggirkan. Menyuarakan kepentingan perempuan dalam kebijakan di daerah seharusnya dimaknai sebagai tindakan yang juga relevan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan parlemen harus bisa memberikan keadilan maupun kesetaraan gender. Negara telah menjamin kepentingan perempuan tersebut dengan adanya kebijakan afirmasi, yaitu sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPD lembaga legislatif yang dituangkan dalam UU Nomor 10 tahun 2008.

Implementasi dari undang-undang mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tersebut belum tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari akses perempuan dalam bidang politik masih rendah. Pada Pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan dari daerah pemilihan Provinsi NTB di DPR dan DPD mencapai 21.43%, sedangkan di DPRD Tingkat 1 sebesar 9.23% (KPU Provinsi NTB, 2017). Dari sisi internal, rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan beberapa hal seperti rendahnya pendidikan maupun kultur atau budaya. Dari sisi kultur/budaya, perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki dan tidak berhak mengambil keputusan sendiri termasuk dalam pilihan politik. Sementara dari sisi eksternal adalah pandangan masyarakat bahwa memasuki dunia politik memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang cukup besar, sehingga identik dengan dunia laki-laki.

Faktor-faktor tersebut secara langsung akan membatasi jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif.

Selain itu, Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah Provinsi NTB Eselon II juga masih rendah yaitu sebesar 9.23%. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “*affirmative action*” terutama melalui terobosan politik.

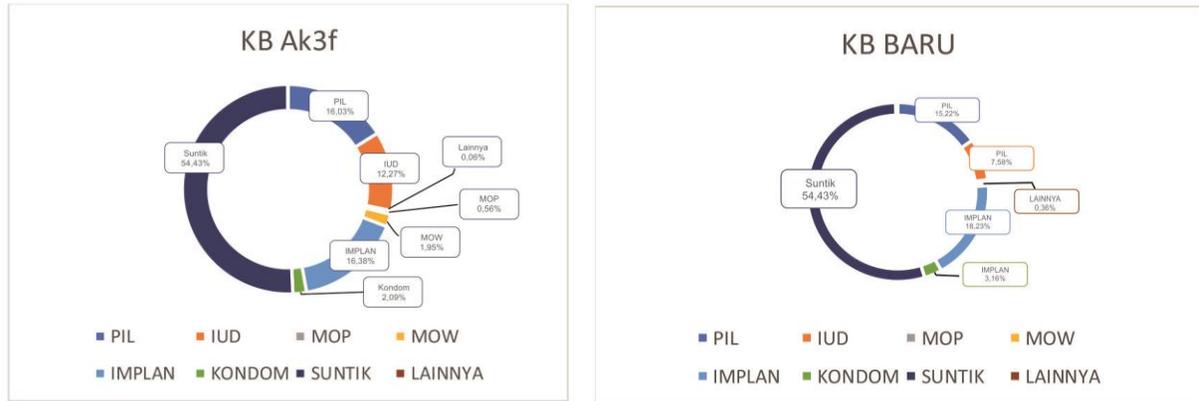
2.5.d Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi

Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan *Unmet Need* pelayanan KB telah menurun dari 13,1% pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern meningkat dari 98,3% menjadi 98,9% dan laki-laki meningkat dari 94,1% menjadi 97,2% pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi perlu pemecahan masalah sejak dari hulu, salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB).

Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi NTB tahun 2016 sebanyak 948.263 pasangan. Peserta KB baru pada tahun 2016 sebanyak 127.882 orang meningkat jika dibandingkan dengan peserta KB baru pada tahun 2015 yaitu sebanyak 124.206 orang. Peserta KB aktif pada tahun 2016 sebanyak 758.543 orang menurun dari jumlah KB aktif pada tahun 2015 sebanyak 781.421 orang. Peserta KB baru pada tahun 2016 menggunakan kontrasepsi MKJP (IUD, MOP, MOW dan implant) sebanyak 25,15% dan non MKJP (suntik, pil, kondom) sebanyak

74,85% sedangkan peserta KB aktif pada tahun 2016 menggunakan kontrasepsi MKJP (IUD, MOP, MOW dan implant) sebanyak 27% dan non MKJP (suntik, pil, kondom) sebanyak 73%.

Gambar 2.11.
Cakupan Pemakaian Kontrasepsi oleh Peserta KB Baru dan KB aktif di Provinsi NTB Tahun 2016



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2016

Gambar 2.11. menunjukkan bahwa peserta KB baru dan KB aktif sebagian besar menggunakan KB suntik, karena penggunaan KB suntik tidak memerlukan banyak tahap yang sulit, termasuk metode kontrasepsi yang terhitung murah untuk masyarakat dan akses untuk memperoleh layanan KB suntik relatif lebih mudah.

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.

Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

2.5.e Meningkatkan Penggunaan Teknologi

2.5.f Kebijakan dan Perundang –Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan

Pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut, dibuat regulasi untuk memperlancar pelaksanaannya yaitu dengan dikeluarkannya PERDA No.

2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Adapun isi Perda tersebut adalah : (1) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, (2) Mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak korban kekerasan dan peraturan perundang-undangan, (3) Melakukan Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, (5) menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat, (6) Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban, (7) melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB juga mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yaitu PERDA Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. Memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. Meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. Meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di daerah.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan infrastruktur antara lain diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Target yang harus dicapai adalah meningkatnya akses terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi semua.

2.6.a Menjamin Akses Air Minum Layak dan Terjangkau

Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah mencapai 85,55persen terdiri atas perkotaan 90,65persen dari target 86,22persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 80,45persen dari target 80,18persen. Tahun 2017, pembangunan prasarana air bersih untuk masyarakat miskin di perdesaan dan ibu kota kecamatan sebanyak 7 paket melalui dana APBD di 6 Kabupaten dan 1 Kota. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) Desa sebanyak 37 paket.

Tabel 2.13. Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2016 – 2017 dan Target 2018

No	Program Unggulan	Kegiatan Prioritas	Capaian Kinerja					
			Indikator	Satuan	2016	2017		Target 2018
					Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih	Cakupan air bersih di perkotaan dan perdesaan	Kota (%)	89,95	86,22	90,65	87,56
				Desa (%)	78,47	80,18	80,45	81,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017.

Cakupan air bersih terdiri dari dua macam yaitu cakupan air bersih perkotaan dan cakupan air bersih perdesaan. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung cakupan air bersih perdesaan dimana untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 80,18 persen dengan realisasi sebesar 79,79 persen.

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi cakupan air bersih perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah berupa pembangunan sumur bor produksi. Pembangunan sumur bor pada 9 (sembilan) lokasi di 3 (tiga) Kabupaten. Sementara sumur bor pembiayaan yang dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, melalui Program Penelitian, Mitigasi dan pelayanan Geologi, Sub Program Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah. Adapun sumur bor yang dibangun berjenis sumur bor produksi sebanyak 9 titik yang dibangun beberapa lokasi.

Akses terhadap Sumber Air Minum Keluarga. Air minum yang layak yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim. Masalah kemiskinan sebagai salah satu

penyebab rendahnya kemampuan penduduk mengakses air minum yang layak. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, rendahnya kualitas bangunan septic tank dan masih buruknya sistem pembuangan limbah juga mempengaruhi ketersediaan sumber air minum.

Pada tahun 2016 penduduk di Provinsi NTB yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebanyak 80,36%. Air minum layak tersebut diperoleh melalui sarana sumur gali terlindung memenuhi syarat 45,93% dan perpipaan yang memenuhi syarat (PDAM, BPSPAM) sebanyak 41,95% dan sisanya diperoleh melalui jaringan non perpipaan yang memenuhi syarat seperti sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung dan penampungan air hujan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

2.6.b Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau

Data terkait pelayanan sanita yang baik untuk masyarakat di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 2.14. Jumlah penduduk Provinsi NTB pada Tahun 2014 sebesar

4.773.795 Jiwa, dan yang mendapatkan layanan sanitasi yang layak sebanyak 2.573.535 jiwa (53,91%). Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 jumlah penduduk yang mendapat pelayanan sanitasi yang layak sebanyak 2.910.877 jiwa (60.20%) dari jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 4.835.577 jiwa, dan meningkat lagi pada tahun 2017 sebanyak 3.311.440 jiwa (67.69%) dari jumlah penduduk sebesar 4.896.162 jiwa. Program/kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan sanitasi yang baik untuk masyarakat NTB terus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

NTB untuk teknisnya dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk sosialisasinya.

Tabel 2.14.
Capaian Pelayanan Sanitasi Provinsi NTB

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2015	2016
1	Lombok Barat	358.951	421.153
2	Lombok Tengah	499.388	582.895
3	Lombok Timur	564.713	674.169
4	Sumbawa	345.811	371.172
5	Dompu	143.521	164.836
6	Bima	246.897	292.054
7	Sumbawa Barat	107.770	114.957
8	Lombok Utara	124.549	143.916
9	Mataram	385.734	405.191
10	Bima	133.544	141.098
	Total	2.910.877	3.311.440

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2017

2.6.c Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Pengertian setiap kriteria dari STBM adalah : Stop buang air besar sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Pengamanan

sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar

Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 2.15. Pada Tahun 2014 desa/kelurahan yang melaksanakan Sanimas sebanyak 1076 desa/kelurahan dan meningkat menjadi 1100 desa/kelurahan pada tahun 2015 dan 2016. Pelaksanaan STBM di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan fisik sarana buang air besar (jamban) dan Dinas Kesehatan untuk sosialisasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan STBM.

Tabel. 2.15.
Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi NTB Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2014 – 2016

No.	Kab/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM di NTB		
		2014	2015	2016
1	Kota Mataram	50	50	50
2	Lombok Barat	122	122	122
3	Lombok Tengah	139	139	139
4	Lombok Timur	254	254	254
5	Lombok Utara	33	33	33
6	Sumbawa Barat	63	64	64
7	Sumbawa	153	157	157
8	Dompu	51	52	52
9	Bima	173	191	191
10	Kota Bima	38	38	38
	Total	1076	1.100	1.100

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2015-2017

2.6.e Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau Sebagai Air Baku

Peningkatan kualitas air sungai sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangatlah penting. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan penyediaan air baku adalah sektor pertanian.

Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung pemenuhan kebutuhan air baku, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI). Kegiatan strategis lainnya dalam rangka pengamanan daerah permukiman terhadap bencana banjir dilakukan melalui perkuatan tebing sungai. Pada tahun 2017 dilaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Kering (JILK) pada lahan kering menjadi lahan agrowisata di Kecamatan Sembalun (JILK Pangsor, Bale Ijuk) dan Pringgabaya (JILK Gunung Malang), pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 16 DI untuk luas areal irigasi 36,968 Ha dan di Pulau Sumbawa pada 21 DI untuk luas areal irigasi 31.370 Ha. Perkuatan tebing sungai di Pulau Lombok 28 Lokasi/daerah aliran sungai, pengamanan wilayah permukiman + 1.750 KK. Di Pulau Sumbawa sepanjang 5.000 meter sebanyak 119 paket dalam rangka pengamanan wilayah permukiman + 3.640 KK.

Prasarana sumber daya air di Provinsi NTB mampu mendukung produksi padi sebesar 2,5 juta ton/tahun melampaui target produksi 2,4 juta ton. Salah satu bendungan yang menopang penyediaan air irigasi adalah Bendungan Pandan Dure pertanian seluas 5.168 Ha. Selain pembangunan waduk Pandan Dure, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan waduk Tanju-Mila di Kabupaten Dompu dan waduk Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang sumber pendanaannya dari APBN serta pengadaan lahan dari APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten. Dari dana APBD Provinsi telah dibangun Embung Prode di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang akan mengairi areal tanah kritis seluas 500 Ha.

Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6.” Pada saat ini kondisi kualitas air sungai menurun karena pencemaran limbah domestik, dan parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

2.6.f Jumlah DAS Yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya

Daerah Aliran Sungai (DAS) ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. Kegunaan dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai.

Saat ini sebagian Daerah Aliran Sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, penambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS. Gejala Kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat dari penyusutan luas hutan dan kerusakan lahan terutama kawasan lindung di sekitar Daerah Aliran Sungai.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Selain itu, kerusakan DAS juga mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai yang mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh erosi dari lahan kritis, limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian (perkebunan).

Untuk mengatasi kerusakan DAS, dibuatlah RPDAST (Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu) yang merupakan konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi NTB tahun 2013 – 2017 sebanyak 3 (tiga) RPDAST, antara lain (1) RPDAST DAS Dodokan, (2) RPDAST DAS Palung, dan (3) RPDAST DAS Moyo. Program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB yang mendukung indikator tersebut adalah program pengendalian DAS dan hutan lindung dengan kegiatan penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS dengan

indikator pulihnya kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW. Tahun 2018 – 2019 ditargetkan akan membuat RPDAST di DAS Sari Tahun 2018, tetapi untuk 2019 belum ditentukan DAS yang akan dibuatkan RPDAST.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi dan jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi NTB dapat dilihat dalam Tabel 2.16. Pada Tahun 2013 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 75 Ha, Tahun 2014 seluas 8.397 Ha, Tahun 2015 seluas 15.659 Ha dan Tahun 2017 seluas 4.090 Ha. Untuk DAS yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya pada tahun 2015 sebanyak 2 (DAS Moyo dan Palung) dan tahun 2017 sebanyak 2 (DAS Moyo, Sari).

Tabel 2.16. Luas Lahan Kritis dalam KPH yang Direhabilitasi Tahun 2013 – 2017 dan Jumlah DAS Prioritas Yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya Tahun 2015 - 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi (Ha)	75	8.397	15.659	15.069	4.090
2.	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	-	-	2 (DAS Moyo, Palung)	-	2 (DAS Moyo, Sari)

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTB, 2017

Jumlah DAS di Provinsi NTB sebanyak 570 Daerah Aliran Sungai. Dari 540 DAS, yang dipulihkan sebanyak 187 DAS namun fokus pada 3 DAS, yaitu DAS Moyo, Palung dan Sari. Sedangkan 383 DAS lainnya dikategorikan dalam DAS yang dipertahankan (BPDAS Provinsi NTB, 2017). Artinya masih banyak DAS di Provinsi NTB dikategorikan DAS yang perlu dipulihkan kesehatannya.

Hasil analisa spatial terhadap penilaian masing-masing indikator kriteria dan sub kriteria penentuan klasifikasi DAS menunjukkan fenomena sebagai berikut :

1. DAS yang hidrologisnya kritis yang ditandai oleh rendahnya persentase penutupan lahan, tingginya laju erosi tahunan, dan besarnya nisbah debit sungai maksimum (musim hujan) dan debit minimum (musim kemarau) serta kandungan lumpur (*sediment load*) yang berlebihan.

2. Urgensi perlindungan investasi yang telah, sedang atau akan dibangun bangunan vital dengan investasi besar di daerah hilirnya, antara lain : waduk, bendungan, dan bangunan vital pengairan lainnya.
3. Potensi banjir di wilayah BPDAS Dodokan Moyosari sangat tinggi hal ini disebabkan karena kondisi topografi yang terjal , dan rata-rata curah hujan wilayah yang cukup tinggi, berdampak pada tingginya limpasan permukaan (*run off*) pada musim penghujan.
4. Daerah perladangan dan perkebunan serta pola olah lahan yang tersebar di wilayah BPDAS Dodokan Moyosari secara umum berpotensi terhadap kerusakan tanah dan lingkungan karena tidak menerapkan atau tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah dengan benar.
5. Daerah dimana tingkat pendapatan penduduk rendah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya alam tanah, air dan hutan ternyata juga masih rendah. Kondisi ini perlu di dorong adanya pengembangan kelembagaan yang intensif khususnya dalam upaya pengelolaan DAS.

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan bidang ESDM hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang ESDM di Kabupaten/Kota berpindah menjadi kewenangan Provinsi. Sementara itu terkait sub urusan minyak dan gas serta pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2.7.a Kebutuhan Energi Daerah

Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN. Beberapa terobosan yang telah dan sedang dilaksanakan diantaranya melalui:

- 1) Program 'Listrik Murah dan Hemat' yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik. Harapannya dengan sambungan listrik tersebut dapat masyarakat meningkatkan produktifitasnya dalam mencapai kesejahteraan.
- 2) Pembangunan Penerangan Jalan Umum *Lighting Emitting Diode* (PJU-LED) jaringan listrik PLN yang dipasang di sepanjang jalan Negara mulai dari gerbang barat Pulau Lombok di Pelabuhan Lembar hingga di ujung timur di Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari pelabuhan Poto Tano di ujung barat hingga pelabuhan Sape di ujung timur P. Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi yaitu dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Program ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber energi terbarukan sesuai dengan potensi energi alam setempat seperti : pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Tabel 2.17.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi NTB Tahun 2016 s/d 2017

No	Indikator Kinerja		Satuan	2016	2017
1	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Target	%	70,34	72,67
		Realisasi		77,89	85,10
		Capaian		110,73	117,10

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2017

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan persentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100 persen. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2017. Angka rasio elektrifikasi yang dimaksud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN.

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan RPJMD 2013-2018 adalah peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18.
Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga (RT)	RT Berlistrik Non PLN	RE non PLN (persen)	RT Berlistrik PLN	RE PLN (persen)	RE Total (persen)
1	Kota Mataram	125.620	-	-	141.117	112,34	112,34
2	Kab. Lombok Utara	59.562	2.210	3,71	50.127	84,16	87,87
3	Kab. Lombok Barat	186.777	2.632	1,41	136.658	73,17	74,58
4	Kab. Lombok Tengah	275.267	3.511	1,28	214.886	78,06	79,34
5	Kab. Lombok Timur	344.358	3.627	1,05	274.955	79,85	80,90
6	Kab. Sumbawa Barat	34.983	1.179	3,37	30.738	87,87	91,24
7	Kab. Sumbawa	116.015	3.788	3,27	105.936	91,31	94,58
8	Kab. Dompu	58.758	1.793	3,05	53.892	91,72	94,77
9	Kab. Bima	118.606	2.937	2,48	94.403	79,59	82,07
10	Kota Bima	40.681	76	0,19	33.402	82,11	82,11
Total		1.360.627	21.753	1,60	1.136.114	83,50	85,10

Sumber : (1) Badan Pusat Statistik, Tahun 2016 (diolah)
 (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017
 (3) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, 31Desember 2017

Dari tabel diatas diketahui sampai akhir tahun 2017 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 1.157.867 KK atau 85,10 persen dari Penduduk 1.360.627 KK. Dengan kata lain masih ada sekitar 14,90 persen 202.760 KK penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan listrik untuk penduduk NTB, pemerintah Provinsi NTB merencanakan Kebutuhan pembangkit Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di NTB Tahun 2017-2020, 2025, 2030, 2040 dan 2050 yang dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Kebutuhan Pembangkit Energi Sumber Daya Mineral di NTB Tahun 2017-2020, 2025-2050

JenisPembangkit	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050

On Grid								
PLTD (MW)	140	140	127	114	50	40	20	-
PLTD Sewa (MW)	180	50	46	43	25	20	10	-
PLTU Batubara (MW)	184	234	334	434	654	654	654	654
PLTG (MW)	300	300	300	300	360	420	480	540
PLTMH (MW)	4	4	4	4	4	5	7	15
PLTS (MW)	20	50	95	180	215	250	270	400
PLTM (MW)	12	30	35	40	50	55	55	60
PLTP (MW)	-	-	-	20	20	100	169	169
PLTA (MW)	30	30	30	30	30	50	60	60
PLTBayu (MW)	7	10	10	10	25	25	50	50
PLTBm (MW)	6	6	6	6	10	15	25	25
PLTSa (MW)	2	2	2	2	4	6	8	10
Off Grid								
PLTMH (MW)	1	1	1	1	1	1	1	1
PLTS (MW)	5	5	5	5	5	5	5	5
Total	890	862	995	1,189	1,453	1,646	1,814	1,989

Sumber : Draft Rencana Umum Kebutuhan Energi Daerah Provinsi NTB

2.7.b Produksi dan Penggunaan Energi

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan urusan bidang ESDM cukup tinggi, seperti halnya untuk pengembangan ketenagalistrikan merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Penyediaan tenaga listrik di NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (*on grid*) dan layanan Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut.

Investasi sektor pertambangan energi dan kelistrikan masih menjadi tumpuan Provinsi NTB. Sebagai gambaran, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi tahun 2017 dari investasi yang masuk sebesar Rp.11,28 triliun, sektor pertambangan energi dan kelistrikan berkontribusi sebesar Rp. 8,4 triliun (74,52 persen). Begitu juga nilai ekspor Provinsi NTB masih didominasi oleh barang tambang/galian non migas, berdasarkan data BPS tahun 2017 nilai ekspor NTB sebesar USD.997,34 juta dimana USD.996,19 juta atau 99,89 persen merupakan eksport barang tambang/galian non migas berupa komoditi konsentrat mineral logam (tembaga, emas dan perak).

Berdasarkan data BPS tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

(termasuk subsektor pertambangan bijih logam) terhadap total PDRB sebesar 20,75 persen turun 1,43 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2016 sebesar 22,18 persen. Penurunan ini disebabkan adanya kontraksi pertambangan bijih logam sebesar -5,15 point. Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (tidak termasuk subsektor pertambangan bijih logam) terhadap total PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,27 point dari 3,92 persen pada tahun 2016 menjadi 4,19 persen tahun 2017. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan perumahan berakibat pada tingginya permintaan bahan galian terutama batuan. Eksploitasi terhadap komoditi pertambangan batuan yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi bahan baku utama pembangunan menyebabkan munculnya kegiatan penambangan baik perorangan maupun kelompok di seluruh Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi telah mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU Minerba harus direvisi menyesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan. Penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi perusahaan mineral logam hingga tahun 2017 dengan terbitnya IUP Khusus Operasi Produksi PT. Amman Mineral Nusa

Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan luas lahan IUP OP sebesar 25.000 Ha di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyesuaian Kontrak Karya yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan satu Kontrak Karya milik PT. Sumbawa Timur Mining yang belum disesuaikan menjadi IUP.

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2017 sebanyak 228 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari : 20 IUP Mineral Logam, 199 IUP Batuan dan 9 IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Penjualan. Untuk IUP Mineral Logam terdiri dari komoditi emas (Au), tembaga (Cu), perak (Ag), Mangan (Mn), Pasir dan bijih besi (Fe), serta timah hitam (Pb). Dimana terdapat 17 IUP yang sudah memasuki masa Operasi Produksi dan 3 IUP yang masih dalam tahap eksplorasi.

Tabel 2.20.
Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2017

NO	PROVINSI	IUP									IUP- OPK	JUML IUP
		MINERAL LOGAM			MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN				
		EKSP	OP	JUMLAH	EKSP	OP	JMLH	EKSP	OP	JUML		
1	Provinsi NTB											
2	Kab. Lombok Barat	1	2	3	0	0	0	1	34	35	1	39
3	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	6
4	Kab. Lombok Timur	0	1	1	0	0	0	6	74	80	2	83
5	Kab. Sumbawa	1	5	6	0	0	0	12	15	27	0	33
6	Kab. Dompu	0	2	2	0	0	0	0	13	13	2	17
7	Kab. Bima	0	6	6	0	0	0	1	9	10	1	17
8	Kab. Sumbawa Barat	1	1	2	0	0	0	2	18	20	1	23
9	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	4
10	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kota Bima	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6
TOTAL		3	17	20	0	0	0	32	167	199	9	228

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB, 2017.

2.7.c Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya

berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. Dari definisinya, semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan, karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah besar. Beberapa diantaranya bisa segera diterapkan di tanah air, seperti: bioethanol sebagai pengganti bensin, biodiesel untuk pengganti solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah/limbah pun bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Hampir semua sumber energi tersebut sudah dicoba diterapkan dalam skala kecil di tanah air. Kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui :

(1) Konservasi energi

Mendorong pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan.

(2) Diversifikasi energi

Upaya penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi.

(3) Intensifikasi energi

Upaya pencairan sumber energi baru agar dapat meningkatkan cadangan energi guna dimanfaatkan menghasilkan tenaga listrik

Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi NTB salah satunya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Sumber EBT yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik adalah tenaga mikro hidro (PLTMH), tenaga surya (PLTS), dan tenaga minihidro (PLTM).

Tabel 2.21. Rekap Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) Tahun 2014 - 2017

NO.	EBT	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017

1	Jumlah PLTM/PLTMH yang Dibangun (kW)	15,043	15,043	15,143	15,143
2	Jumlah SHS/PLTS yang Dibangun (Unit)	8,786	11,112	11,585	12,598

Sumber : Draft RUED Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.21. menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit EBT jenis PLTM/PLTMH tahun 2014 dan 2015 sebesar 15.043 kW, masing-masing naik menjadi 15.143 kW pada tahun 2016 dan 2017. EBT PLTS yang dibangun pada tahun 2014 8.786 Unit, naik menjadi 11.112 unit pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 PLTS yang dibangun masing-masing sebesar 11.585 unit dan 12.598 unit.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan BerkelanjutanPerkembangan Ekonomi Makro.

2.8.a Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulus bagi produktivitas, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tidak heran selain menjadi tolak ukur berjalannya roda perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU). Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan indikator turunannya disajikan setiap triwulan untuk memberikan gambaran perekonomian wilayah.

Memasuki Triwulan IV-2017, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi NTB hampir mencapai 31,2 trilyun rupiah. Nilai ini menurun dibandingkan PDRB pada triwulan III-2017 yang mencapai 34,5 trilyun rupiah. Namun jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan yang sama di tahun 2016, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan, kondisi Triwulan IV-2017 juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV-2016, sehingga pertumbuhan ekonomi *y-on-y* Provinsi NTB sebesar 0,58 persen. Lebih lanjut, jika sub kategori pertambangan bijih logam tidak dimasukkan ke dalam PDRB, terlihat bahwa perekonomian Provinsi NTB pada Triwulan IV-2017 tumbuh diatas 8 persen dan berada diatas pertumbuhan nasional yang tumbuh 5,19 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi NTB pada Triwulan IV-2017 (*y-on-y*) adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,70 poin, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang pertumbuhan sebesar 1,02 poin, sebaliknya lapangan

usaha pada pertambangan dan penggalian justru menjadi sumber degradasi pertumbuhan ekonomi NTB sebesar -5,67 poin.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2017 terhadap 2016, maka pertumbuhan ekonomi NTB hanya tumbuh sebesar 0,11 persen. Rendahnya pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada kegiatan pertambangan bijih logam dibanding 2016, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar - 19,86 persen.

Pertanian masih menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017, karena disaat ekonomi NTB tertekan lajunya oleh kinerja pertambangan bijih logam/konsentrat dan ekspor luar negeri, namun lapangan usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan mampu tumbuh meyakinkan sehingga pertumbuhan ekonomi NTB yang nyaris tumbuh negatif yang cukup dalam akhirnya tumbuh positif sebesar 0,11 persen. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh pertanian sebesar 1,37 poin, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,02 poin dan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,68 poin. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sumber kontraksi sebesar -5,15 poin.

2.8.c Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sensus Ekonomi 2016, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) non-pertanian mendominasi sekitar 98,33% dari total unit usaha secara keseluruhan. Dominasi lapangan usaha non-pertanian tersebut, antara lain: (1) perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; (2) akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman; dan (3) industri pengolahan. Kontribusi UMK terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, yaitu sebesar 76,28% dengan tiga wilayah penyebaran yang paling besar adalah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi.

Mengingat besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi, khususnya membuka lapangan kerja, maka diperlukan upaya yang dapat mendorong keberlanjutan UMKM.

Pemerintah provinsi NTB melalui dinas koperasi dan UMKM dapat digambarkan bahwa; tahun 2017 direncanakan jumlah usaha UMKM dengan kualifikasi sebanyak 442 unit

(usaha menengah 2 unit, usaha kecil 40 unit dan usaha mikro sebanyak 400 unit), realisasi sebanyak 835 unit atau 188,92% dari target 442 unit, realisasi ini melampaui target yang direncanakan, secara kumulatif realisasinya sebanyak 3.059 sebesar 173,02 % dari target kumulatif tahun 2017 sebanyak 1.768 unit.

Apabila dibandingkan Tahun 2016, realisasi sebanyak 995 unit atau 225,12% dari target 442 unit, realisasi ini melampaui target yang direncanakan. Begitu juga secara kumulatif realisasi sebesar 167,72% (target kumulatif tahun 2016 sebanyak 1.326 unit, realisasi 2.224 unit atau 167,72%). Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, realisasinya mencapai 779 atau 176,25 % dan secara kumulatif tercapai 1.229 atau 139 % dari target kumulatif 884 unit.

Secara kumulatif capaian kinerja sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 3.059 unit jika dibandingkan terhadap target RPJMD Tahun 2018 sudah mencapai 138,42%, artinya dari target akhir RPJMD sebanyak 2.210 unit sudah melampaui target sebesar 849 unit atau 38,42%, keberhasilan ini disebabkan karena pembinaan terhadap UMKM yang dilakukan baik oleh Dinas Koperasi UMKM maupun dengan pemberdayaan tenaga pendamping dan konsultan PLUT, sehingga pembinaan tersebut berdampak meningkatkan kinerja usaha UMKM.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan pada akses pembiayaan, rendahnya kapasitas inovasi dan teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Selain itu, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing diantaranya : Regulasi dan kebijakan yang belum efektif memberikan kepastian dan perlindungan bagi UMKM; Rendahnya nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

2.8.d Peningkatan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu yang akan ditingkatkan kontribusinya dalam perekonomian dan mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Pariwisata sebagai sektor prioritas di NTB didasari pada besarnya potensi sektor pariwisata yang ada di NTB. NTB memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari KEK Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tomboka (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili dan juga kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Namun, potensi yang besar tersebut perlu ditunjang SDM yang kreatif dan inovatif dan pelaku pariwisata yang profesional

dan kreatif.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB bertanggung jawab terhadap capaian indikator kinerja daerah, yaitu kunjungan wisatawan, baik mancanegara dan nusantara yaitu sebanyak 3,5 juta pengunjung. Untuk target tahun 2018 yaitu 4 juta wisatawan dan didukung oleh seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
3. Dilaksanakan dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku;
4. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

NTB mengalami kemajuan yang pesat di sektor pariwisata, ditandai terus meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang telah mencapai angka 3 juta wisatawan. Selain itu, infrastruktur penunjang pariwisata juga semakin memadai. Kendati demikian, kemajuan tersebut belum optimal jika melihat besarnya potensi yang ada. Jika dikelola lebih optimal, diyakini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang semakin besar, utamanya dampak domino di bidang ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat NTB.

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program Visit Lombok Sumbawa (VLS) yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program Pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan branding *Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa* telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 3,5 (tiga koma lima) juta wisatawan pada akhir tahun 2017.

Tabel 2.22.
Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Tahun 2016	Tahun 2017	
			Target	Realisasi
Kunjungan Wisatawan	1.357.602	3.094.437	3.500.000	3.508.903
Mancanegara	565.944	1.404.328	1.750.000	1.430.249
Nusantara	791.658	1.690.109	1.750.000	2.078.654

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan. Sampai dengan Tahun 2017, kunjungan wisatawan telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2013-2018 yaitu sebanyak 3.508.903 orang wisatawan atau 100,25 persen dari target yang ditetapkan atau meningkat 13,39 persen dibandingkan tahun 2016. Dalam perhitungan jumlah kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan BPS NTB. Perolehan data kunjungan wisatawan tidak hanya dilakukan dengan menghitung Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di hotel-hotel berbintang tetapi juga diperoleh melalui pintu-pintu keluar masuk wisatawan yaitu di Lombok Internasional Airport (LIA), Pelabuhan Lembar (Pelindo), jalur langsung *fast boat* Bali - Gili, pintu masuk Pelabuhan Sape bagi wisatawan overland dari Pulau Komodo, Bandara Salahudin Bima serta lokasi-lokasi lain seperti Sekotong dan Bangko-bangko yang banyak dikunjungi wisatawan dari Bali (*one day tour*).

Keberhasilan lain yang diperoleh NTB di tingkat internasional adalah sejak 7 Oktober 2013 Gunung Rinjani sudah menyandang predikat Geopark Nasional dan pada tahun 2018 menjadi Unesco Global Geopark. Hal ini sangat penting mengingat Gunung Rinjani merupakan destinasi wisata pendakian yang sudah terkenal di mancanegara. Sejak tanggal 20 November 2017 menyusul Gunung Tambora menjadi Geopark Nasional.

Penguatan Branding Pariwisata Halal merupakan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan muslim sebagai pasar potensial. Ruang lingkup pengembangan Pariwisata Halal mengacu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yaitu dengan:

- a) Mengupayakan ketersediaan fasilitas umum dan tempat beribadah serta mendorong pengelola destinasi *Pariwisata Halal* harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar *syari'ah*, *mendorong terbentuknya desa wisata dengan*

potensi religious;

- b) Meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal dengan melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, PHRI dan HPI dengan melakukan pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran Wisata Halal ke pasar potensial, pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai Destinasi Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing dengan melibatkan peran media yang efektif dan efisien;
- c) Mendorong industri Pariwisata Halal dengan prinsip syariah yang disertifikasi DSN-MUI;
- d) Meningkatkan peran kelembagaan baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah dan penyediaan SDM Pariwisata untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dalam perekonomian pariwisata, mengembangkan keterampilan keterampilan tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan disektor pariwisata, menangkap peluang dalam pemanfaatan digitalisasi, serta meningkatkan kompetensi pariwisata, sertifikasi peserta pelatihan dan professional SDM pariwisata

Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, dengan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target kunjungan wisatawan tahun 2017 yaitu melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi secara bertahap, meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi NTB dan citra kawasan pariwisata daerah baik di dalam maupun di luar daerah.

Event dan promosi yang dilaksanakan dan diikuti tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
A.	Promosi Dalam Negeri		
1	Lombok Sumbawa Great Sale	Lombok-Sumbawa	28 Januari-28 Februari 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
2	Festival Bau Nyale	Pantai Seger Lombok Tengah	9-12 Februari 2017
3	Direct Promotion	Jakarta	23 Maret 2017
4	Lombok Travel Mart	Gili Air – Lombok Utara	27 Maret 2017
5	Pesona Lawata	Kota Bima	8 April 2017
6	Festival Kalaki	Bima	9 April 2017
7	Pesona Tambora	Dompu	10-11 April 2017
8	Tour De Lombok	Mataram-Senaru-Kuta-Semalun	13-17 April 2017
9	Rinjani 100	Senaru-Semalun	8 Mei 2017
10	Pelatihan Digital Preneur	Mataram	10 Mei 2017
11	Lombok Sumbawa Festival	Jakarta	20 Mei 2017
12	Seminar Pengembangan Destinasi Wisata	Jakarta	20 Mei 2017
13	Festival Khazanah Ramadhan	Islamic Center NTB	25 Mei-24 Juni 2017
14	Bedah Buku Wisata Halal	Islamic Center NTB	26 Mei 2017
15	Lombok Sumbawa Inframe	Kuta-Mandalika	13 Juni 2017
16	Nuzulul Qur'an	Islamic Center NTB	14 Juni 2017
17	Lombok Sumbawa Photo Contest	Mataram	19 Juni 2017
18	Bulan Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	18 Agustus 2017
19	Lombok Sumbawa Karnival	Mataram	18 Agustus 2017
20	Lombok Sumbawa Village Culture	Mataram	18-22 Agustus 2017
21	Lombok Sumbawa Night Festival	Islamic Center, Mataram	19 Agustus 2017
22	Festival Tunaq	Tunak. Lombok Tengah	20 Agustus 2017
23	Festival Kota Tua	Ampenan	25 Agustus 2017
24	Reli Wisata Lombok Mandalika	Mandalika – Lombok Tengah	26-27 Agustus 2017
25	Mandalika Blogger Camp	Mandalika – Lombok Tengah	26-27 Agustus 2017
26	Mandalika Colour Run	Mandalika – Lombok Tengah	27 Agustus 2018
27	Media Farm Trip Lombok Sumbawa	Mataram	29 Agustus 2017
28	Idul Adha Religi Night Festival	Islamic Center NTB	31 Agustus 2017
29	Grand Fondo New York Indonesia	Senggigi-Bayan	3 September 2017
30	Sosialisasi Standarisasi Usaha Pariwisata Halal	Mataram	4 September 2017
31	Kaliantan Kite Festival	Lombok Timur	10 September 2017
32	Festival Moyo	Sumbawa	10 September-18 Oktober 2017
33	International Halal Travel Fair	Islamic Center – Mataram	14 September 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
34	Festival Photo Film	Taman Budaya Mataram	14 September 2017
35	Lombok International Edu Tourism Conference	Islamic Center – Mataram	14-15 September 2017
36	Festival Kuliner Lombok Sumbawa	Islamic Center NTB	15 September 2017
37	Fashion Street Lombok Sumbawa	Mataram	16 September 2017
38	Sembalun Holti	Sembalun, Lombok Timur	16 September 2017
39	Festival Senggigi	Senggigi, Lombok Timur	16-18 September 2017
40	Seminar Moyo	Sumbawa	11 Oktober 2017
41	Gili Tramena Festival	Gili Tramena	11-12 November 2017
42	Pesona Taliwang	Taliwang	13 November 2017
43	Golf Tournament	Golong, Lombok Barat	9 Desember 2017
44	Lombok Hijab Fun Walk and Run	Kota Tua Ampenan	10 Desember 2017
45	Event di Lombok International Airport	LIA-Lombok Tengah	2 kali dalam seminggu (Sabtu dan Minggu)
46	Event Wisata pada Obyek-obyek Wisata	Se-NTB	10 kali pentas
B. Promosi Luar Negeri			
1	ITB-Berlin	Berlin	8-12 Maret 2017
2	Sales Mission Hongkong	Hongkong	12-14 Desember 2017
3	Arabian Travel Mart, Sales Mission Dubai	Dubai	24-27 April 2017
4	Jamuan Kenegaraan HUT RI, Sales Mission Korea	Kedubes RI, Korea Selatan	8-11 Juni 2017
5	Malaysia Travel Mart (<i>Matta</i>)	Malaysia	8-10 September 2017
C. Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik			
1	Promosi melalui media Suara NTB, Lombok Post, Radar Lombok dan Radar Mandalika	Mataram	Selama Tahun 2017
2	Promosi melalui media cetak melalui Republika	Mataram	Selama Tahun 2017
3	Promosi melalui media Lombok TV, TV9	Mataram	Selama Tahun 2017
4	Promosi melalui media Trans 7, TV one	Mataram	Selama Tahun 2017
5	Promosi melalui media Republika, Lombok Insiders, Genpi, Lombok One, Lombok News, Utara Kita.com	Mataram	Selama Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
6	Peliputan Wartawan Lombok Post, Radar Mandalika	Mataram	Selama Tahun 2017
7	Publikasi melalui <i>API Magazine</i> Media Jepang (6 x terbit)	Mataram	Selama Tahun 2017
8	Publikasi melalui <i>API Magazine</i> Berbahasa Inggris (5x terbit)	Mataram	Selama Tahun 2017
9	Publikasi melalui <i>Arabic Magazine</i> (2 x terbit)	Mataram	Selama Tahun 2017
10	Baliho, Spanduk, Umbul-umbul	Mataram	Triwulan I, 2017
11	PIN Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	Triwulan I, 2017
12	Banner	Mataram	Triwulan I, 2017
13	Dokumentasi	Mataram	Triwulan I, 2017
14	Bag Kit	Mataram	Triwulan I, 2017
15	Brosur/Leaflet Bahasa Inggris, Indonesia, arab	Mataram	Triwulan I, 2017
16	Dekorasi Stand Pameran	Mataram	Triwulan II, 2017
17	Stopmap Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	Triwulan II, 2017
18	Guide Book Bahasa Inggris	Mataram	Triwulan II, 2017
19	Goodiebags Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	Triwulan II, 2017
20	Dekorasi Tourist Information Center (LIA)	Mataram	Triwulan III, 2017
21	Calender Event 2018	Mataram	Triwulan IV, 2017

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Selain upaya melalui media promosi dan event-event kepariwisataan, upaya lain yang dilakukan adalah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Upaya pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur menuju destinasi, secara bertahap menyiapkan fasilitas umum, penguatan Branding Wisata Syariah sebagaimana amanat Perda 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pembangunan TIC di destinasi unggulan, pengembangan destinasi berbasis *ecotourism* baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa melalui pengembangan desa wisata. Pembenahan infrastruktur destinasi pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis.

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.

2.9.a Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Capaian kinerja Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perhubungan diukur dengan indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013–2018 yaitu Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Angkutan Laut, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.24.
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2017

Indikator	Satuan	Tahun Awal RPJMD 2013	2016	2017		Kondisi Kinerja di Akhir RPJMD 2018
				Target	Realisasi	
Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut						
- Angkutan Udara	Orang	2.145.290	3.778.787	3.476.000	4.080.124	3.626.000
- Angkutan Laut	Orang	125.794	1.071.173	197.828	1.327.229	227.502

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017

Angkutan Udara

Jumlah penumpang udara yang melalui 3 bandara, Lombok Internasional Airport (LIA) di Lombok Tengah, Bandara Sultan M. Salahuddin di Kabupaten Bima, dan Bandara Sultan M. Kaharuddin di Sumbawa selama tahun 2017 sebanyak 4.080.124 orang atau sudah mencapai 117,38 persen dari target yang ditetapkan di RPJMD, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk periode yang sama tercatat hanya ada 3.787.778 orang. Ini berarti secara tahunan terdapat kenaikan sebesar 7,72 persen. Kenaikan penumpang angkutan udara ini disumbang oleh arus penumpang terutama melalui LIA. Penumpang pesawat terbang yang melalui LIA sebanyak 90 persen dari keseluruhan penumpang pesawat yang datang dan berangkat dari dan ke Pulau Lombok, sedangkan penumpang yang melalui Bandara Sultan M. Salahuddin dan Bandara Sultan M. Kaharuddin masing-masing hanya 7 persen dan 3 persen saja.

Tingginya minat kunjungan menuju Pulau Lombok dibuktikan dengan dibukanya satu rute baru penerbangan domestik pada akhir semester I tahun 2017 yaitu rute Lombok – Bandung yang dilayani oleh PT. Lion Air. Disamping itu meningkatnya popularitas Pulau Lombok

sebagai destinasi liburan unggulan menyebabkan adanya penerbangan charter langsung sebanyak 7 trip dari Incheon, Korea Selatan ke LIA-Lombok. Kesiapan infrastruktur bandara di LIA juga sudah ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan mampunya LIA didarati oleh pesawat berbadan lebar. Pada awal agustus 2017 untuk pertama kalinya dimusim haji 2017, LIA bisa melayani pesawat berbadan lebar Boeing 747-400. Dengan berhasilnya pendaratan pesawat berbadan lebar ini, bandara LIA sudah siap secara infrastruktur dan personil untuk melayani kedatangan dan keberangkatan pesawat berbadan lebar yang biasanya dipergunakan untuk melayani penerbangan jarak jauh menuju Timur-Tengah dan Eropa.

Angkutan Laut

Capaian arus penumpang pada angkutan laut dihitung dari 5 pelabuhan laut di NTB yaitu Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan Laut Badas, Pelabuhan Laut Bima, Pelabuhan Laut Senggigi dan Pelabuhan Laut Bangsal/Pemenang. Pada tahun 2017, jumlah penumpang angkutan laut tercatat sebesar 1.327.229 orang atau 670.90 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 197.828 orang. Tahun 2016 tercatat sebanyak 1.071.173 orang yang melalui 5 pelabuhan laut di NTB. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah penumpang laut sebesar 23.90 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2017 ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2018, karena perhitungan target tahun 2018 disusun berdasar pada arus penumpang laut dari 3 (tiga) pelabuhan laut (Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan Laut Badas, Pelabuhan Laut Bima). Seiring dengan berkembangnya pariwisata di NTB, penumpang angkutan laut didominasi dengan menggunakan kapal cepat dari Pulau Bali menuju Pulau Lombok melalui 2 (dua) pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Laut Senggigi dan Pelabuhan Laut Bangsal/Pemenang.

Dalam rangka mendukung capaian jumlah angkutan penumpang pada angkutan laut maka Dinas Perhubungan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan pemantauan operasional kapal cepat dalam rangka mengantisipasi meningkatnya pengguna kapal cepat. Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama dengan stakeholder terkait (Polairud, TNI AL, Pemda KLU, dan lainnya) membentuk Tim Pengawasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang kapal cepat. Tim ini memastikan kapal cepat yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan yang sudah ditetapkan dan melakukan pendaratan pada fasilitas pelabuhan yang ada. Diharapkan agar kapal cepat ini tidak langsung

menuju pantai di perairan 3 Gili untuk menjamin kelestarian lingkungan di daerah Gili Matra.

2. Kegiatan pengembangan angkutan laut. Kegiatan ini meliputi pembinaan kepada 180 orang pengusaha dan pekerja yang ada di pelabuhan seperti perusahaan bongkar-muat, perusahaan jasa pengurusan transportasi, perusahaan pelayaran, dan lainnya agar melakukan pengurusan legalitas operasional dan bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan orang di pelabuhan laut.

3. Update database kepelabuhanan di Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelabuhan-pelabuhan yang ada di NTB, termasuk seluruh fasilitas yang dimiliki seperti lapangan peti kemas, gudang, dermaga, fasilitas bongkar muat, dan lainnya. Data-data ini disajikan dalam bentuk elektronik/website sehingga memudahkan akses informasi bagi para pihak berkepentingan. Update data ini sangat penting dilakukan sebagai dasar bagi pengembangan pelabuhan yang ada di Provinsi NTB.

Selain jasa angkutan penumpang, Dinas Perhubungan Provinsi NTB juga mencatat arus barang yang masuk dan keluar pada 3 pelabuhan yang diusahakan yang dikelola oleh PT. Pelindo III. Pelabuhan Lembar, jumlah muat barang tidak ada karena pengusaha angkutan barang lebih memilih menggunakan pelabuhan ASDP dengan menggunakan truk. Untuk jumlah sapi, Pelabuhan Bima mengirim sapi terbesar yaitu 11.918 ekor sapi, bila dibandingkan dengan Pelabuhan lainnya.

Tabel 2.25.
Data Bongkar Muat Barang di Provinsi NTB Tahun 2017

NO.	PELABUHAN	2017	
		BONGKAR	MUAT
1.	Lembar	1.114.543 ton -	- 661 ekor sapi
2.	Bima	63.046 ton -	36.342 ton 11.918 ekor sapi
3.	Badas	220.961 ton -	208.440 ton 1.110 ekor sapi
JUMLAH		1.398.550 ton -	244.782 ton 13.689 ekor sapi

Sumber: Pelindo III, 2017

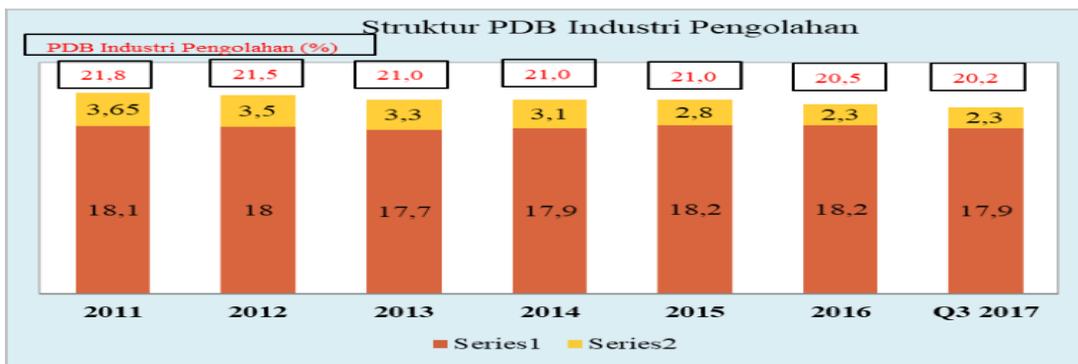
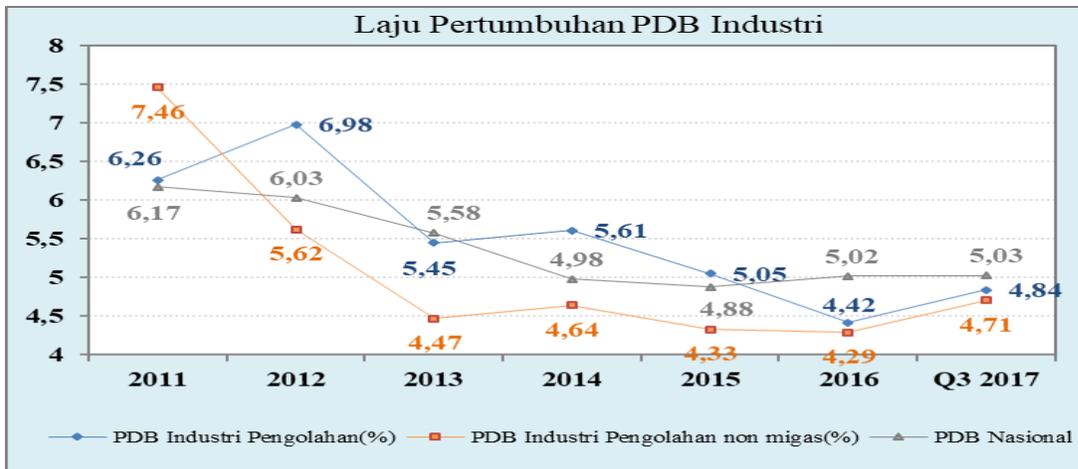
Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Provinsi NTB, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis untuk angkutan darat dan angkutan laut. Angkutan perintis merupakan angkutan yang

melayani daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Beroperasinya angkutan perintis ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian warga di daerah-daerah tersebut sehingga terwujud masyarakat NTB yang sejahtera.

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan, akses pada bahan baku dan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam sehingga mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Kecenderungan kontribusi dan pertumbuhan PDB pengolahan dapat dilihat pada Gambar 31. Pertumbuhan industri diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mencapai 17,0 juta orang, atau meningkat sebesar 9,5% dari periode yang sama di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan meningkat sebesar 26,9%.

Industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran dari Industri skala Kecil dan Menengah (IKM). Berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil dan Statistik Industri Besar dan Sedang (BPS, 2015), pada periode 2011 – 2015, nilai tambah IKM terhadap PDB industri memiliki nilai terendah sebesar 1,09% pada tahun 2011, dan nilai tertinggi sebesar 6,28% pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 sebesar 3,74%. Fluktuasi kinerja IKM ini salah satunya dipengaruhi oleh terbatasnya akses ke pembiayaan formal karena kendala penyediaan agunan dan kelayakan usaha. Pemerintah mengupayakan penanganan atas kendala tersebut melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan realisasi per 31 Oktober 2017 sebesar Rp.79,6 triliun, termasuk Rp.4,9 triliun (6%) disalurkan untuk IKM (Kemenko Perekonomian, 2017). Volume penyaluran KUR untuk IKM sampai bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp.3,9 triliun (4% dari total KUR). Peningkatan penyaluran KUR juga diikuti dengan peningkatan jumlah akun kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk di sektor industri, dari 8,4 juta rekening.

Gambar 2.12. Struktur dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan



Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Pada tahun 2010 meningkat menjadi 15,4 juta rekening pada tahun 2016 (Bank Indonesia, 2016). Berdasarkan data tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan IKM adalah upaya mendorong peningkatan kinerja IKM melalui optimalisasi penyerapan kredit untuk sektor produksi/industri.

Industri nasional juga telah menerapkan praktik produksi dan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Data Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan rasio emisi terhadap nilai tambah industri dari 0,13% pada tahun 2010 menjadi 0,12% pada tahun 2014. Selain itu selama periode 2010 hingga 2014 terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan emisi CO₂ per kapita dari -5,21% pada tahun 2010 menjadi -6,46% pada tahun 2014. Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi agar penurunan emisi gas rumah kaca terus berkelanjutan adalah dengan menyesuaikan seluruh teknologi industri/produksi, transportasi dan rumah tangga agar efisien dan ramah lingkungan terutama di sektor-sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Pertumbuhan industri yang berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta inovasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia secara umum telah menunjukkan perbaikan dari sisi litbang dan inovasi. Data dari IMF dan Bank Dunia dalam *R&D Magazine* menunjukkan bahwa proporsi anggaran Litbang terhadap PDB di Indonesia meningkat dari 0,08% pada tahun 2013 menjadi 0,3% pada tahun 2016. Kinerja ini diikuti dengan peningkatan ranking jumlah ilmuwan dan insinyur di Indonesia dari ranking ke-51 pada tahun 2012 menjadi ranking ke-35 pada tahun 2017 (WEF, 2017). Walaupun demikian, proporsi anggaran Litbang masih kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan Iptek dan inovasi yang didukung alokasi anggaran yang memadai melalui pelibatan swasta dalam pendanaan Litbang, serta adanya keterkaitan antara SDM berkualitas, Litbang dan kebutuhan pengembangan industri.

Penguasaan Iptek juga ditunjukkan oleh penguasaan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu indikatornya yaitu proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*. Selama periode 2009 - 2014, jumlah penduduk yang terlayani jaringan pita lebar meningkat dari 1,86% menjadi 6,66% (Kemenkominfo, 2015). Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler juga terus meningkat dari 38,5% pada tahun 2010 menjadi 58,3% pada tahun 2016 (Susenas, 2016). Indonesia tercatat sebagai negara urutan ke-8 di dunia dengan penduduk terbanyak pengguna internet (*Internet World Statistic*). Kondisi ini didukung oleh perluasan jumlah kabupaten/kota yang dijangkau *backbone* serat optik pita lebar nasional hingga mencapai 72% pada tahun 2014 (Kemenkominfo, 2015). Pada tahun 2019, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet ditargetkan mencapai 100% di wilayah *Universal Service Obligation* (USO). Tantangan yang dihadapi dalam akses teknologi dan informasi adalah peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing industri, serta perluasan akses ke pasar.

2.10. Mengurangi Kesenjangan

2.10.a. Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peningkatan kesenjangan di sebagian besar provinsi terjadi dalam kurun waktu yang sama dengan periode kenaikan Koefisien Gini nasional yaitu 2009-2012. Sementara itu, pada periode 2013-2017, sebagian provinsi mengalami penurunan yang cukup baik.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini

Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,396 dan turun menjadi 0,363 pada Maret 2011. Gini Ratio naik pada September 2011 menjadi 0,366. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014, nilai Gini Ratio berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 yaitu sebesar 0,391. Pada Maret 2015 Gini Ratio mulai turun menjadi 0,368 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,365 pada September 2016. Gini Ratio pada Maret 2017 naik menjadi 0,371 dan kembali naik pada September 2017 sebesar 0,378.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,413. Angka ini sama dengan Gini Ratio pada Maret 2017 dan meningkat sebesar 0,003 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,410. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2017 tercatat sebesar 0,323. Angka ini meningkat sebesar 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,314 dan meningkat 0,017 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,306.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,85 persen yang berarti Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 dan kondisi September 2016 yang nilainya sama sebesar 18 persen.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2017 adalah sebesar 16,05 persen atau tergolong ketimpangan sedang. Sementara itu, persentase pengeluaran

kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah pedesaan pada September 2017 adalah sebesar 20,14 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2.26. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Nusa Tenggara Barat September 2016, Maret 2017 dan September 2017

Daerah/Tahun	Penduduk 40% terbawah	Penduduk 40% menengah	Penduduk 20% atas	Jumlah
Perkotaan				
September 2016	15,81	37,00	47,18	100
Maret 2017	15,79	36,60	47,61	100
September 2017	16,05	35,72	48,23	100
Pedesaan				
September 2016	20,49	41,33	38,18	100
Maret 2017	20,40	40,36	39,24	100
September 2017	20,14	39,78	40,08	100
Perkotaan +Pedesaan				
September 2016	18,00	38,46	43,54	100
Maret 2017	18,00	37,55	44,45	100
September 2017	17,85	37,03	45,12	100

Sumber;BPS NTB

Kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif adalah upaya yang sedang dibangun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Selain perlindungan social tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan trobosan yaitu melawan kemiskinan dari desa diantaranya dengan memanfaatkan basis data terpadu, menspasialkan desa-desa miskin sesuai data BDT serta membuat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se -NTB untuk menganggarkan dan melaksanakan tujuh program dalam percepatan penanggulangann kemiskinan berdasarkan data BDT. Ketujuh program tersebut adalah : Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jamban Keluarga, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan sampah (Bank sampah) dan Cakupan Air bersih.

Walaupun anggaran fungsi perlindungan sosial meningkat setiap tahun, masih terdapat beberapa tantangan utama dalam upaya mengurangi ketimpangan, penanggulangan

kemiskinan dan kerentanan. Tantangan utama tersebut adalah (1) pemutakhiran data penerima program yang belum sesuai dengan kondisi dinamis di lapangan, dan (2) keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan yang mengawal program-program ini seperti pendamping/fasilitator, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang terdidik, terlatih, serta memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan tantangan di daerah.

Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran

Jumlah Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang, turun 124.505 orang dibanding Februari 2017 (semester lalu) dan turun 68.162 orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.316.720 orang, turun 106.720 orang dibanding keadaan semester lalu dan berkurang 50.590 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 79.449 orang, mengalami penurunan sekitar 17.775 orang dibanding semester lalu dan berkurang sebanyak 17.572 orang dibanding setahun yang lalu.

Sejalan dengan turunnya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 68,49 persen, turun 4,13 persen poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 3,07 persen poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan musim panen bergeser ke bulan september sehingga pekerja masih belum terserap dan tergolong sebagai bukan angkatan kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki sebesar 82,11 persen sementara TPAK perempuan hanya 56,18 persen. Namun demikian, dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 5,80 persen poin sementara TPAK laki-laki juga mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin

2.10.e. Kepesertaan aktif jaminan social bidang ketenagakerjaan

Tabel 2.26.a Jumlah Kepesertaan Aktif Jaminan Social Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perusahaan	NA	NA	4.457	5.001
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	NA	NA	89.241	80.088

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB

Tabel 2.26.a menunjukkan Jumlah perusahaan di NTB pada Tahun 2017 sebesar 4.457 perusahaan, meningkat jumlahnya menjadi 5.001 perusahaan pada tahun 2018. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2017 sebanyak 89.241 orang, menurun 80.088 orang pada tahun 2018.

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dan dicegah, lebih dari setengah populasi penduduk di dunia telah tinggal di perkotaan. BPS mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 54% pada tahun 2015 dan akan bertambah menjadi 67% pada tahun 2035. Dalam periode tahun 1970-2012, setiap pertambahan 1% urbanisasi di Indonesia, akan menambah 2% PDB dan 4% PDB per kapita (WB, 2014) dan belum sebaik negara-negara di Asia lainnya (7% di Thailand, 8% di Vietnam, 10% di Tiongkok, dan 13% di India). Perekonomian Indonesia ditopang oleh aktivitas ekonomi di perkotaan yang ditunjukkan dengan kontribusi PDB perkotaan mencapai 40% pada periode 2005-2010 (Bappenas, 2014). Dari 40% kontribusi PDRB perkotaan, PDRB dari metropolitan menyumbang porsi yang paling besar, yakni berkisar 56-58% (Gambar 40). Urbanisasi dan pembangunan perkotaan merupakan salah satu agenda prioritas yang harus tercapai pada tahun 2030 melalui Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan.

2.11.a Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan

Terjangkau

Urusan pembangunan perumahan diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang menjadi indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013–2018. Pada tahun 2017 melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan dengan pola pembangunan baru yang di prioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Terdapat 6 (enam) paket pekerjaan di 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Capaian penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 1.081 unit rumah pada Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26. Data Penanganan Perumahan Provinsi NTB Tahun 2014 – 2017

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah PenangananRTLH				Jumlah
			2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	Unit	25	23	26	32	106
2	Kab. Lombok Barat	Unit	153	116	157	160	586
3	Kab. Lombok Utara	Unit	48	56	70	76	250
4	Kab. Lombok Tengah	Unit	252	156	195	208	811
5	Kab. Lombok Timur	Unit	270	242	309	217	1.038
6	Kab. Sumbawa	Unit	96	61	76	96	329
7	Kab. Sumbawa Barat	Unit	15	20	18	52	105
8	Kab. Dompu	Unit	55	31	38	72	196
9	Kab. Bima	Unit	79	72	92	121	364
10	Kota Bima	Unit	7	23	26	47	103
Jumlah		Unit	1.000	800	1.008	1.081	3.888

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

Tantangan yang dihadapi: (1) Paket kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang dihibahkan seringkali terjadi perubahan lokasi dari usulan awal/proposal yang diajukan; (2) Lokasi pembangunan perumahan yang bervariasi dengan jarak jangkauan berbeda sementara pagu anggarannya sama, menyebabkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan pembangunan; (3) Beberapa Kabupaten / Kota membuat usulan penerima bantuan pada lokasi tersebar dan tidak dalam satu kawasan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjangkau lokasi tersebut; (4) Belum terkoordinasi dan terintegrasinya dengan baik pengembangan perumahan antara Kabupaten / Provinsi dengan pusat.

2.11.b. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tahun 2013 memperlihatkan bahwa 80% kota dan kabupaten di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi.

Berdasarkan kategori dalam Index Risiko Bencana Indonesia (IRBI), provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan index bencana tinggi di Indonesia. Bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagian besar disebabkan oleh faktor hidrologi, meteorologi dan perubahan iklim. Tiga jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan menjadi perhatian khusus adalah bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Pemerintah provinsi berkomitmen dengan pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal maupun regional. Sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir dampak terjadinya bencana. Faktor lain yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah Masih kurangnya sistem peringatan dini (*early warning system*) dan informasi yang memadai dan dapat bekerja dengan lebih baik, menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Nusa Tenggara Barat sangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan rekayasa dengan mengembangkan *display* sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan:

Risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan diperkirakan akan semakin besar mengingat semakin banyaknya penduduk perkotaan. Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup (Target 11.5 dan 11.6). Dalam kurun waktu 2009-2014 (Tabel 6) kualitas lingkungan

hidup meningkat, namun kualitas udara semakin memburuk yang kemungkinan besar disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 persen IKA, 30 persen IKU dan 40 persen IKTL. Adapun data IKLH dirilis secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga pada tahun 2017 belum tersedia datanya karena menunggu rilis data tersebut.

Tabel 2.27. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017

Indikator	Satuan	2016	2017		Kondisi Kinerja Akhir 2018
			Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		56,53	67,89	NA	67,95
Mata Air Terlindungi	Titik	414	417	485	438

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Metode yang digunakan untuk data IKA adalah dengan pemantauan dan pengambilan sample 10 sungai yang menjadi prioritas Provinsi dan 3 sungai yang menjadi prioritas Nasional, serta melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Pemantauan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli.

Tabel 2.28. Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NILAI INDIKATOR	2016	2017
Indeks Kualitas Air	27,19	30,54*)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Indeks Kualitas Udara

Kualitas udara adalah angka yang menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.

Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu perumahan dan perkantoran/perdagangan. Pemantauan kualitas udara ini menggunakan passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuji dan hasilnya dikirimkan kembali kepada Dinas LHK NTB sebagaimana berikut.

Tabel 2.29. Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2017

No	Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
				Kadar NO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar SO2
				µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3
1	NTB (5200)	LOMBOK BARAT (5201)	Transportasi	7.60	5.60	8.54	8.94
			Industri/Agro Industri	5.90	3.70	9.86	12.75
			Pemukiman	6.40	6.00	6.42	7.71
			Perkantoran/ Komersial	4.40	3.60	10.20	11.49
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
2	NTB (5200)	LOMBOK TENGAH (5202)	Transportasi	7.90	9.00	3.98	<2.57
			Industri/Agro Industri	9.00	8.20	6.85	5.14
			Pemukiman	8.70	5.70	2.60	<2.57
			Perkantoran/ Komersial	Hilang	7.50	Hilang	<2.57
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
			Transportasi	18.00	19.80	6.09	5.14
			Industri/Agro Industri	11.60	8.40	4.13	4.68

No	Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2	
				Kadar NO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar SO2	
				µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	
3	NTB (5200)	LOMBOK TIMUR (5203)	Pemukiman	10.60	9.10	<2.57	<2.57	
			Perkantoran/ Komersial	13.20	13.40	5.60	3.18	
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57	
4	NTB (5200)	SUMBAWA (5204)	Transportasi	20.60	23.10	11.34	7.17	
			Industri/Agro Industri	28.50	30.20	14.55	12.24	
			Pemukiman	6.50	8.50	3.51	4.68	
			Perkantoran/ Komersial	11.40	11.10	10.61	8.18	
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57	
5	NTB (5200)	DOMPU (5205)	Transportasi	20.20	15.00	4.25	<2.57	
			Industri/Agro Industri	11.20	10.30	3.25	<2.57	
			Pemukiman	11.00	11.00	<2.57	<2.57	
			Perkantoran/ Komersial	9.40	8.00	3.31	<2.57	
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57	
6	NTB (5200)	KAB. BIMA (5206)	Transportasi	20.30	16.80	15.47	12.85	
			Industri/Agro Industri	11.80	10.90	7.53	7.71	
			Pemukiman	9.70	7.50	6.23	5.14	
			Perkantoran/ Komersial	14.50	15.40	3.55	<2.57	
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57	
7	NTB (5200)	KAB. SUMBAWA BARAT (5207)	Transportasi	9.20	9.60	15.02	12.85	
			Industri/Agro Industri	10.90	11.20	13.88	12.08	
			Pemukiman	12.20	13.20	20.20	17.99	
			Perkantoran/ Komersial	7.20	8.10	3.37	4.13	
	Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57			
	8	NTB (5200)	LOMBOK UTARA (5208)	Transportasi	6.40	5.90	10.33	10.28
				Industri/Agro Industri	7.30	7.20	7.04	8.31
Pemukiman				5.00	3.50	3.30	3.57	
9	NTB (5200)	MATARAM (5271)	Perkantoran/ Komersial	4.10	3.30	4.10	4.61	
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57	
			Transportasi	18.80	10.40	7.41	6.02	
9	NTB (5200)	MATARAM (5271)	Industri/Agro Industri	16.30	13.20	9.95	6.48	
			Pemukiman	11.80	12.60	3.09	3.46	

No	Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
				Kadar NO2 µg/Nm3	Kadar NO2 µg/Nm3	Kadar SO2 µg/Nm3	Kadar SO2 µg/Nm3
			Perkantoran/ Komersial	22.80	14.30	12.42	10.28
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
10	NTB (5200)	KOTA BIMA (5272)	Transportasi	16.80	16.80	7.71	5.14
			Industri/Agro Industri	18.20	20.80	5.14	<2.57
			Pemukiman	15.50	14.80	<2.57	<2.57
			Perkantoran/ Komersial	14.90	10.90	9.45	6.98
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
STANDAR BAKU MUTU				40		20	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Berdasarkan hasil pemantauan, parameter SO₂ dan NO₂ di seluruh titik pemantauan berada di bawah baku mutu, kecuali titik pemukiman di Kabupaten Sumbawa Barat pada periode pemantauan tahap I. Pada titik perkantoran Kabupaten Lombok Tengah periode pemantauan tahap I, alat *passive sampler* yang sudah dipasang hilang, sehingga tidak ada data dan pada tahap II lokasi pemantauan udara dipindah. Sebagai catatan, alat *passive sampler* yang dipasang di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah hilang, sehingga tidak ada data yang dikirim ke pusat, pada tahap II lokasi pemasangannya dipindah. Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai indeks kualitas udara NTB tahun 2017, diperoleh nilai 88,02 atau meningkat dari tahun 2016 sebesar 81,20.

Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan adalah rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering primer, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman.

Upaya lainnya yaitu merehabilitasi daerah tangkapan yang dilakukan dengan membangun 2 unit bangunan sipil teknis berupa DAM Penahan yang berfungsi mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 2016 Indeks Tutupan Lahan NTB mencapai 60,03 sedangkan tahun 2017

belum dapat ditentukan nilai indeksinya karena dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, namun berbagai upaya peningkatan tutupan lahan didorong melalui beberapa kegiatan, antara lain kegiatan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.700 Ha dari target 3.800 Ha, Penyediaan bibit sebanyak 700.000 batang yang ekuivalen dengan lahan seluas 1.400 Ha (dengan asumsi jarak tanam 4 x 5 m dan jumlah bibit per hektarnya 500 batang) dan rehabilitasi daerah tangkapan air seluas 700 Ha. Selain itu, Dinas LHK telah melaksanakan pembangunan 13 unit Dam Penahan dan 7 unit Dam Pengendali untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis.

Untuk mendukung pengembangan jenis tanaman endemik yang berkualitas baik, juga dilaksanakan pengembangan perbenihan tanaman hutan dengan target 5 jenis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa.

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah melakukan RHL di wilayah kerjanya antara lain PT. Sumbawa Juta Raya memiliki rencana penanaman dan pemeliharaan DAS pada kawasan Hutan Lindung seluas 1.103 ha dalam wilayah DAS Moyo, Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.5640/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/10/2017 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. Sumbawa Juta Raya tanggal 26 Oktober 2017. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap sampai pada tahun 2026.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tahun 2013 memperlihatkan bahwa 80% kota dan kabupaten di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi.

Berdasarkan kategori dalam Index Risiko Bencana Indonesia (IRBI), provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan index bencana tinggi di Indonesia. Bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagian besar disebabkan oleh faktor hidrologi, meteorologi dan perubahan iklim. Tiga jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan menjadi perhatian khusus adalah bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Pemerintah provinsi berkomitmen dengan pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal

maupun regional. Sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir dampak terjadinya bencana. Faktor lain yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah Masih kurangnya sistem peringatan dini (*early warning system*) dan informasi yang memadai dan dapat bekerja dengan lebih baik, menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana yang terjadi. Nusa Tenggara Barat sangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan rekayasa dengan mengembangkan *display* sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan:

Pembangunan kota yang terpadu dan inklusif. Untuk mengukur proses pembangunan perkotaan yang inklusif (Target 11.3), digunakan ukuran keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sektor swasta, komunitas filantropi, serta akademisi dalam proses perencanaan pembangunan seperti misalnya dalam Musrenbang. Pemerintah provinsi NTB setiap pelaksanaan musrenbang provinsi selalu melibatkan sektor swasta, mitra pembangunan seperti NGO, organisasi masyarakat, akademisi, dan filantropi dalam setiap perencanaan pembangunan. Penerapan sistem informasi perencanaan (*e-planning/entebePLAN*) yang dibangun merupakan upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 7 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang, e-KUA PPAS, e-Pokir, dan e-ASB.

Tahun 2017, Bappeda Provinsi NTB telah terpilih sebagai SKPD terbaik I berdasarkan penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB. Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi. Selain itu, dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi, khususnya pemanfaatan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan, Bappeda telah mengembangkan inovasi NTB SATU PETA berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website <http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id>. Inovasi tersebut menghantarkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang dinilai mampu melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif.

Untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan kegiatan : (1) Forum SKPD yang bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan SKPD lingkup Provinsi NTB, (2) Sarasehan Pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder yaitu unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan Provinsi NTB (LSM), pihak swasta dan lainnya. (3) Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah momen yang dipergunakan untuk menselaraskan program/kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper). Salah satu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan SCP adalah penerapan Proper yang menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper dikembangkan dengan prinsip dasar antara lain peserta bersifat selektif, artinya peserta Proper diperuntukkan bagi industri yang proses produksinya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi perusahaannya. Terdapat lima kategori Proper, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah. Jumlah perusahaan yang menerima Proper untuk masing-masing kategorinya pada

Kategori Emas untuk industri yang telah konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses

produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. **Kategori Hijau** bagi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan

lingkungan dan juga telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggungjawab sosial dengan baik. **Kategori Biru** adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Kategori Merah** untuk yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. **Kategori Hitam**, diberikan kepada perusahaan dan/atau kegiatannya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 12 Emas, 172 Hijau, 1.422 Biru, 284 Merah, dan sebanyak 3 (tiga) perusahaan mendapat kategori Hitam (Gambar 41).

Secara umum penerima Proper Biru meningkat dari 52 perusahaan pada tahun 2002-2003 menjadi 1.422 perusahaan pada tahun 2015-2016. 12 perusahaan Peringkat Emas yang terdiri atas 7 (tujuh) perusahaan migas, 2 (dua) perusahaan panas bumi, 1 (satu) perusahaan farmasi, 1 (satu) perusahaan tambang, dan 1 (satu) perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Terdapat 5 (lima) perusahaan berperingkat hitam yang terdiri atas perusahaan air minum dalam kemasan, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan peleburan logam, perusahaan pengolahan ikan, dan perusahaan briket arang (KLHK 2016). Tingkat ketaatan perusahaan terhadap Proper tahun 2015-2016 mengalami peningkatan menjadi 85% dari sebelumnya 74% pada tahun 2014-2015, namun tantangan yang dihadapi antara lain perlunya upaya untuk mendorong perusahaan besar melaksanakan praktek usaha berkelanjutan dan pelibatan perusahaan lainnya dalam program Proper. Selain itu, saat ini telah dicetuskan program *Green Industry* melalui *Green Industry Award* oleh Kementerian Perindustrian. Program ini merupakan bentuk insentif nonfinansial kepada perusahaan ramah lingkungan dengan karakteristik yang mirip dengan Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Kedua program tersebut perlu dilakukan sinkronisasi agar memberi nilai tambah bagi industri.

Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Hingga tahun 2017 telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R) melalui beroperasinya 3 (tiga) unit pusat daur ulang skala kota dengan kapasitas masing-masing 20, 10 dan 5 (lima) ton per hari yang berpotensi mengurangi

timbulan sampah sebesar 12.775 ton/tahun. Selain itu, sebanyak 5.244 unit Bank Sampah telah dibangun untuk mengelola sampah sebanyak 4.402.643 ton selama kurun waktu 2014-2017. Tantangan penerapan prinsip 3R di bank sampah hanya mampu mengelola 1,7% dari total timbulan sampah nasional. Untuk itu diperlukan upaya tindak lanjut untuk mensinergikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R secara lebih luas.

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dari tahun 2009-2015 jumlah perusahaan yang telah memiliki sertifikat SML terus meningkat. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 2.001 perusahaan telah memiliki Sertifikat SML. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB khususnya di bidang pengawasan lingkungan adalah dengan melakukan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2017, terdapat 6 perusahaan yang dipantau. Hasil evaluasi pemantauan terhadap AMDAL dan UKL-UPL

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

2.13.a Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Kabupaten/Kota

Isu perubahan iklim merupakan isu yang tak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Nusa Tenggara Baratsangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan rekayasa dengan mengembangkan *display* sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur

pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan:

Selain bekerjasama dengan BMKG, BPBD Provinsi NTB juga bekerjasama dengan industry pariwisata melakukan pembentukan Prosedur Tetap (Protap/ SOP) kebencanaan dan pembentukan tim siaga bencana di semua hotel terutama di kawasan Senggigi. Mengawali langkah-langkah tersebut, BPBD Provinsi NTB telah mengadakan workshop penanggulangan bencana bagi hotel-hotel di wilayah pesisir dan Gili di pulau Lombok pada bulan September dan November 2016. Kegiatan ini bertujuan agar industri pariwisata dapat memahami manajemen potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam upaya penjaminan keamanan para wisatawan di hotel mereka. Workshop tersebut menghasilkan komitmen dari hotel dan mall untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyusunan prosedur standar (SOP) kedaruratan:

- 1).Penyusunan Rencana Kontinjensi gempa dan tsunami khusus untuk kawasan Senggigi yang dilanjutkan pemasangan rambu evakuasi.
- 2).Proses simulasi yang belum terjadwal.
- 3).Diharapkan industri pariwisata dapat memahami peran mereka dan terlibat secara aktif baik pra-bencana, saat kejadian bencana, maupun pasca-bencana.

BPBD Provinsi NTB juga melakukan kerjasama (MoU) dengan Fakultas Kedokteran di Universitas Mataram, Unizar, Universitas Yarsi, Poltekes yang dijadwalkan pada bulan Januari dan Pebruari 2018 untuk mengadakan simulasi penggulungan bencana.

Untuk mewujudkan target penurunan emisi GRK, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario *fair*) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

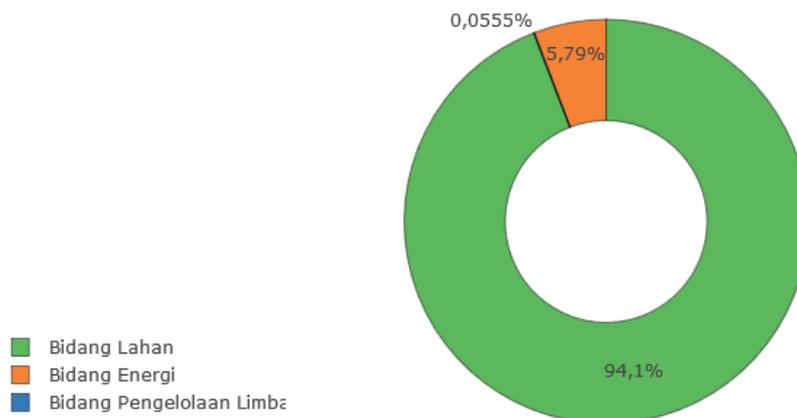
2.13.b Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tahun 2016 merupakan tahun keenam pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. K/L terkait serta Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan RAN dan RAD-GRK, yang didukung dengan pembiayaan APBN, APBD, swasta, masyarakat dan berbagai program dukungan kerjasama internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Provinsi NTB telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan emisi gas rumah kaca/RAD GRK, sesuai Peraturan Gubernur No.51 Tahun 2012. RAD-GRK disusun untuk perencanaan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca di daerah sampai dengan tahun 2020. Penyusunan RAD-GRK provinsi ntb bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah provinsi NTB untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca di provinsi NTB. RAD-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung yang meliputi bidang lahan (pertanian, kehutanan), bidang energy (energi, transportasi, industri), bidang pengelolaan limbah (sampah domestic dan limbah cair domestic).

Kontribusi penurunan emisi berdasarkan sektor sampai tahun 2017 di provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Gambar 2.15. sebagai berikut :

Gambar 2.15. Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor



Sumber data:<http://pep.pprk.bappenas.go.id> diakses tgl 23 juli 2018

Di provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2017, rekapitulasi penurunan emisi gas rumah kaca didapatkan hasil penurunan emisi; untuk bidang lahan sebesar 94,1%, bidang energy 5,79% dan bidang pengelolaan limbah 0,0555 %, dengan grafik kumulatif perbandingan *baseline* dan potensi penurunan emisi tersaji dalam Gambar 43.

Gambar 2.15.
Grafik Perbandingan Baseline dan Potensi Penurunan Emisi GRK
Tahun 2010-2017



Sumber data: <http://pep.pprk.bappenas.go.id> diakses tgl 23 juli 2018

Sampai dengan tahun 2017 baseline (kondisi tanpa intervensi aksi mitigasi) sebesar 7,90 MTON CO₂ eq. Estimasi/realisasi jumlah emisi gas rumah kaca sebesar 6,33 MTON CO₂ eq. Jadi berdasarkan data diatas penurunan emisi GRK di provinsi NTB sebesar 19,87 % terhadap baseline tahun 2017. Tantangan ke depan adalah diperlukannya sinergitas antar sektor, swasta dan masyarakat untuk mempercepat upaya penurunan emisi dengan perubahan pola aktivitas yang rendah karbon.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

2.14.a Jumlah Kawasan Konservasi Perairan di Daerah

Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan, yang mengamankan disusunnya Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) melalui proses sistematis, partisipatif, transparan dan berbasis sains. RTRLN ini sudah masuk proses formalisasi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, UU No. 27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamankan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa disertai 278 pulau-pulau kecil dengan luas perairan laut 29.159,04 km² dan panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km, merupakan obyek yang sangat potensial untuk pengembangan banyak sektor

seperti perikanan, pariwisata, konservasi, transportasi laut, industri maritim dan kegiatan lainnya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB juga tidak berbeda jauh dengan wilayah lain yang rentan terhadap kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Upaya mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, berupa konflik kewenangan, konflik kepentingan, konflik pembangunan antar sektor dan ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan, perlu penerapan konsep pengelolaan pesisir terpadu, yang mengatur upaya-upaya pencegahan melalui penegakan hukum dan aturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari upaya tersebut adalah dengan penyediaan produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk peraturan daerah khususnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K). Hal ini sejalan dengan perintah Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan, salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang berfungsi sebagai arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasis sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB telah diinisiasi sejak tahun 2015 yaitu berupa penyusunan dokumen awal, kemudian di tahun 2016 dilanjutkan dengan proses penyusunan dokumen antara dan dokumen final, maka di tahun 2017 telah dituntaskan proses legislasinya sehingga ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037.

Selama proses penyusunan dokumen antara hingga ditetapkan beserta Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga NGO lainnya seperti FAO, WWF, BCC dan WCS terkait dengan penguatan muatan regulasi yang mendorong optimasi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan memperhatikan fungsi keberlanjutan. Adapun bentuk keterlibatan NGO dimaksud yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pembahasan agar peraturan daerah tersebut telah

mempertimbangkan relevansinya dengan berbagai aturan perundangan terkait, telah mengakomodasi usulan dan arahan berbagai stakeholder yang terlibat dan potensi kena dampak oleh peraturan yang hendak dibuat, dan yang lebih penting perda ini harus dapat diimplementasikan. Disamping itu, beberapa dukungan strategis dari NGO adalah memfasilitasi dukungan pendanaan dan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), clearing house, konsultasi teknis dan evaluasi ranperda di kementerian dalam negeri.

Salah satu substansi yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah penetapan beberapa kawasan konservasi perairan di Provinsi NTB. Kawasan Konservasi dimaksudkan sebagai kawasan yang dipergunakan untuk mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal di kawasan perairan laut atau pulau.

Tabel 2.30.
Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Ha)	229.555	272,055
2	Realisasi (Ha)	229.555,36	214.411,32*)
3	Pencapaian (%)	100,00	84,38

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

*) Data Sementara

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Selanjutnya, Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan¹⁹. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pengawasan Sumberdaya Kelautan dari Kewenangan Kabupaten menjadi Kewenangan Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menangani urusan Konservasi dan Pengawasan Berdasarkan kawasan konservasinya, adalah 1) UPTD Balai Konservasi Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok 2) UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa 3) UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu.

Balai konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melaksanakan teknis kegiatan :1).perlindungan sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 2). pelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 3) Menerapkan manajemen pemanfaatan sumberdaya hayati secara bijaksana dan berkelanjutan 4) pengawasan/patroli secara rutin terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dikawasan konservasi 5) Melakukan operasi gabungan terhadap tindakan illegal fishing di kawasan konservasi 6) pencegahan terhadap pencemaran perairan kelautan dan perikanan 7) pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) kelautan dan perikanan 8) pembinaan terhadap peningkatan kapsiatas SDM dan Kelembagaan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) 9) sosialisasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi dan pengawasan 10) pelatihan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) tentang manajemen pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 11) Memberikanpercontohan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk kegiatan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama *Wildlife Conservation Society* (WCS) telah merancang aplikasi SMART PATROL (*spatial, monitoring and reported tool*). Aplikasi ini dirancang sebagai media komunikasi antar pihak (masyarakat/pokmaswas dengan pokja pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB). Dengan aplikasi ini setiap pihak bisa memberi laporan terkait pengelolaan dan pelanggaran/*distruktif fishing* melalui telepon genggam Android, Laporan tersebut langsung terhubung dengan server yang dikelola pokja pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk selanjutnya dianalisa dan disimpan secara otomatis dalam basis data sehingga memudahkan untuk ditindak lanjuti.

Peningkatan produksi dan kualitas produksi kelautan dan perikanan dilakukan

melalui peningkatan sarana usaha perikanan dilakukan melalui penyaluran paket bantuan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan skala usaha, efektifitas, efisiensi dan kemandirian masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar hasil perikanan. Target produksi perikanan provinsi NTB tahun 2017 adalah 1,321.074 ton dengan realisasi mencapai 1.410.654,36 ton (106,78 %) yang dihasilkan oleh 202.497 orang nelayan dan pembudidaya ikan, dari jumlah produksi tersebut sebesar 1.227.021,06 ton dari hasil budidaya perikanan dan sebesar 183.633,30 ton dari hasil penangkapan.

Tabel 2.31.
Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN (TON)		
	TANGKAP	BUDIDAYA	JUMLAH
2016	173.657,2	1.183.076,31	1.356.733,51
2017	183.633,3	1.227.021,06	1.410.054,36

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017

Peningkatan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Pemanfaatan Berkelanjutan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memiliki 20 juta hektar kawasan KKL. Selain upaya untuk meningkatkan luas KKL, juga dilakukan pengukuran kualitas pengelolaannya dengan mengembangkan alat ukur/evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebut dengan E-KKP3K. E-KKP3K telah digunakan secara rutin, termasuk untuk memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi perairan daerah. Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan mengacu pada Permen KP No. 2/2009. Nusa Tenggara Barat merencanakan pencadangan kawasan konservasi perairan seluas 291.594 Ha (10%) sampai tahun 2020. Sejak Tahun 2014 NTB telah mencadangkan kawasan konservasi seluas 151.089 Ha, tahun 2015-2016 seluas 229.555,36 Ha dan hingga tahun 2016 Provinsi NTB telah berhasil mencadangkan 7,87 persen dari luas perairan teritorialnya. Pada tahun 2017 realisasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) mengalami penurunan 6,597 persen dibanding tahun 2016. Hal ini karena adanya penyesuaian alokasi ruang laut di Provinsi NTB dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037.

2.14.b Jumlah Nelayan Yang Dilindungi

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Indonesia juga terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil. Capaian indeks nilai tukar nelayan untuk tahun 2017 adalah 105,9 persen, meningkat 3,87 persen dari indeks tahun 2016. Tingginya Nilai Tukar Nelayan (112,25) masih menjadi pendorong utama kontraksi positif nilai tukar perikanan.

Tabel 2.32.
Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2016 – 2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Index)	105,00	106,00
2	Realisasi (Index)	108,07	112,25
3	Pencapaian (%)	102,92	105,90

Sumber data : BPS Provinsi NTB, 2017.

Kenaikan capaian index NTN Provinsi NTB menunjukkan index harga yang diterima (penerimaan) nelayan lebih tinggi bila dibandingkan index beli (pengeluaran nelayan), artinya nelayan mengalami surplus sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan nelayan pada provinsi NTB Tahun 2017 tersebut cenderung meningkat. Program/kegiatan pemerintah berupa bantuan untuk nelayan yang dilaksanakan selama ini sangat membantu menekan biaya pengeluaran nelayan sehingga semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Peningkatan kesejahteraan nelayan dengan melihat kenaikan realisasi NTN tahun ini juga dapat dipengaruhi oleh 1) adanya nelayan yang memiliki akses permodalan melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan untuk meningkatkan kapasitas usahanya dan 2) perlindungan Nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sehingga nelayan mendapatkan santunan atas kecelakaan diri baik akibat aktivitas usaha maupun resiko kecelakaan lainnya. Kedua faktor tersebut diharapkan menjadi strategi dalam membantu meningkatkan indeks NTN ke depan.

Namun, masih rendahnya SDM Nelayan menjadi salah satu kendala dalam mendorong kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu nelayan membutuhkan pendampingan untuk membantu

dalam mengakses permodalan ke perbankan dan pemahaman yang kurang terkait mekanisme pemanfaatan BPAN untuk klaim asuransi. Untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menunjuk petugas di Kabupaten/Kota dalam rangka memfasilitasi nelayan yang mendapatkan Bantam Premi Asuransi Nelayan dan penunjukkan petugas Konsultan Kerja Mitra Bank (KKMB) untuk memfasilitasi nelayan mengakses permodalan dengan instrumen sertifikat tanah yang dimiliki.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan wilayah KPH dibagi atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan 7 jenis HHBK, antara lain bambu, rotan, kemiri, nilam, kayu putih, madu, dan jahe merah. Pengembangan ini meliputi pengembangan dari wilayah hulu sampai ke hilirnya. Hal ini penting karena dapat mendukung kemandirian pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Berbagai upaya yang dilakukan ialah memperluas areal penanaman untuk jenis HHBK Kemiri, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, mendorong skema Kemitraan bersama KPH, pemberian bantuan peningkatan produksi, menyediakan biaya untuk uji laboratorium kualitas HHBK, dan pembangunan pabrik produksinya.

Sosialisasi terkait kemitraan terkait pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya antara masyarakat dan pihak KPH semakin ditingkatkan. Dalam APBD 2017, kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang dilaksanakan. Beberapa KPH sudah mulai menginisiasi proses kemitraan tersebut sehingga perlu didukung dengan proses distribusi informasi yang tepat baik metode maupun substansinya, sehingga skema kemitraan nantinya tidak seolah-olah kegiatan bagi-bagi lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk tahun 2017, target 3.800 Hektar direncanakan berasal dari kegiatan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.700 Ha, Penyediaan bibit sebanyak 700.000 batang yang ekuivalen dengan lahan seluas 1.400 Ha (dengan asumsi jarak tanam 4 x 5 m dan jumlah bibit per hektarnya 500 batang) dan rehabilitasi daerah tangkapan air seluas 700 Ha. Selain itu, Dinas LHK juga akan melaksanakan pembangunan Dam Penahan dan Dam Pengendali untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis. Untuk mendukung pengembangan jenis

tanaman endemik yang berkualitas baik, juga dilaksanakan pengembangan perbenihan tanaman hutan dengan target 5 jenis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa. Sampai bulan Desember 2017, terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah melakukan RHL di wilayah kerjanya.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada tahun 2017, program ini melaksanakan 3 jenis kegiatan yaitu Operasi Pengamanan Hutan dengan indikator Perlindungan seluas 3.350 Ha. Fokus dalam rangka mendukung kegiatan perlindungan hutan, Dinas LHK NTB melakukan kegiatan patroli rutin di setiap KPH. Salah satu inovasi Dinas LHK yaitu pengamanan hutan berlapis dimana petugas lapangan melaksanakan penjagaan selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Selain itu juga dilakukan koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan ilegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Selain itu, Dinas LHK NTB melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2017 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut di atas, Dinas LHK NTB juga membentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2017 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa kabupaten.

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun

Kelembagaan yang Tangguh

2.16.a. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan.

Indikator kinerja daerah yang terkait dengan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 adalah penurunan jumlah konflik sosial, dan partisipasi masyarakat dalam politik sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017

Indikator	Satuan	Tahun			
		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	37	23	32	21
Partisipasi masyarakat dalam Politik	%	72,00	73,43	72,50	73,43

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB, 2017

Penurunan Jumlah Konflik Sosial. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan fungsi mencegah terjadinya dan meluasnya konflik sosial, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB secara terus menerus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi yang dibentuk untuk keperluan tersebut, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian, jika konflik terjadi maka diupayakan agar cepat diselesaikan secara optimal hingga tidak berdampak luas. Dengan demikian, maka tindakan deteksi dini dan pencegahan dini sangat penting artinya dalam mengurangi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dampak positif dari tindakan tersebut diperoleh hasil bahwa target penurunan konflik sosial semakin meningkat setiap tahunnya.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator penurunan jumlah konflik telah dilakukan sejumlah kerjasama dengan mitra Bakesbangpoldagri khususnya FKDM, dan Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB. Efek yang dapat dilihat dari intensnya membangun kemitraan ini yaitu berkurangnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Artinya bahwa konflik sosial yang terjadi tidak memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat baik yang berada di wilayah berkonflik ataupun wilayah sekitarnya.

Partisipasi masyarakat dalam Politik

Penjelasan terkait dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam politik hanya dapat diukur setelah penyelenggaraan pemilihan umum. Pada tahun 2017 di Provinsi NTB sama dengan tahun 2016 tidak ada penyelenggaraan pemilu baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun tingkat partisipasi masyarakat NTB pada tahun 2015 mencapai 73,43 persen. Berdasarkan trend yang terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu baik itu pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), rata-rata partisipasi masyarakat NTB cenderung mengalami peningkatan. Sehingga pencapaian target 73,00 persen partisipasi masyarakat dalam politik pada pilukada tahun 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019 akan tercapai.

2.16.c. Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

Secara umum upaya untuk menggem- bangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat digambarkan oleh capaian-capaian berikut:

1) Perilaku anti korupsi di Indonesia; 2) Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk, Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah; 3) Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 4) Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik; 5) Kondisi demokrasi di Indonesia. Pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses yang partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama-sama.

Hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan, dimana total kerugian negara/daerah sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.147.332.788.020,26 dan yang sudah dikembalikan ke kas negara/daerah sebesar Rp.109.977.877.681,78 termasuk didalamnya yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar Rp.6.531.595.525,17. Adapun sisa total kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan dan perlu ditindaklanjuti sebesar Rp.37.334.910.338,48.

Untuk meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) perangkat daerah yang bersumber dari dana pusat maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017 telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tata kelola (*Governance*), manajemen resiko dan pengendalian internal pada perangkat daerah sehingga maturitas sistem pengendalian Pemerintah Daerah peringkatnya naik dari yang sebelumnya Level II menjadi level III, yang artinya praktik pengendalian dilingkungan APIP dan Pemerintah Daerah telah terdokumentasi dengan baik dengan sistem evaluasi yang perlu didokumentasikan secara memadai. Kondisi inilah yang berkontribusi dalam pencapaian Opini WTP 6 kali berturut-turut.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD (dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang berprestasi), Bappeda berupaya untuk menyamakan pemahaman dengan Biro Organisasi dan Inspektorat terkait SAKIP untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di Provinsi NTB, melibatkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi, dengan narasumber dari Kota Bandung yang telah mampu mencapai nilai SAKIP A berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB. Dalam kegiatan ini sekaligus di-*launching* aplikasi e-SAKIP.

Terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan 2017 dengan LKPD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut Opini BPK RI tahun 2016 - 2017.

Tabel 2.34.
Opini BK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB
Tahun 2016 – 2017

TAHUN PELAPORAN	OPINI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Sedangkan untuk Kab./Kota pada tahun pelaporan 2017 seluruh Kab./Kota se NTB telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini menunjukkan peningkatan pada tahun sebelumnya dimana ada 1 Kab./Kota yang masih berada di bawah opini WTP.

Tabel 2.35.
Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2013-2016

NO	KAB./KOTA	OPINI LKPD			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kota Mataram	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lombok Barat	WDP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP	WTP
5.	Kab. Lombok Utara	WDP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Dompu	WDP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Bima	WDP	WDP	WTP	WTP
10.	Kota Bima	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

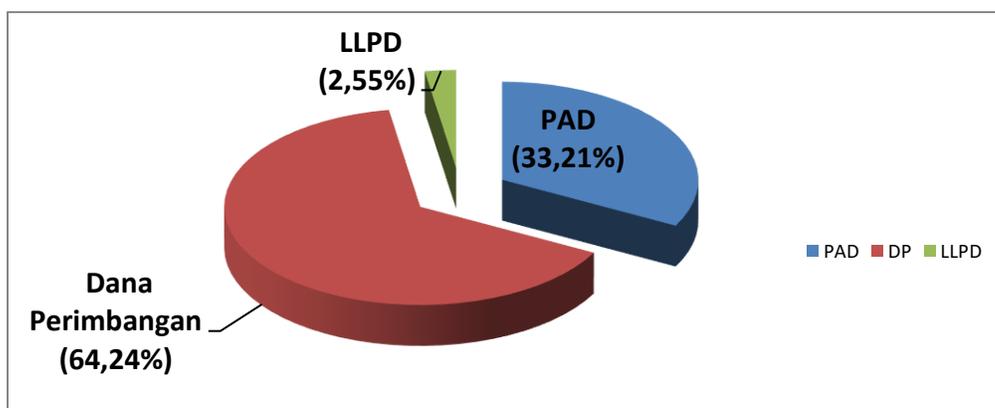
2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

2.17.a Mobilisasi Sumber Daya Domestik.

Bagi Indonesia salah satu target penting yang berkaitan dengan mobilisasi

sumberdaya domestik adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi negara dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp.5.088.511.234.826,00 atau 99,36 persen dari target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2017 yang sebesar Rp.5.121.402.497.258,00. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp.1.689.823.934.520,00; Dana perimbangan sebesar Rp.3.268.927.294.306,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp.129.760.006.000,00 kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :

Grafik 2.36.
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah
Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 64,24 persen masih lebih besar dibandingkan kontribusi PAD sebesar 33,21 persen, begitupula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dimana kontribusi Dana Perimbangan sebesar 65,39 persen, PAD 34,43 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 0,18 persen.

Adapun rincian peningkatan PAD tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.37.
Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2017

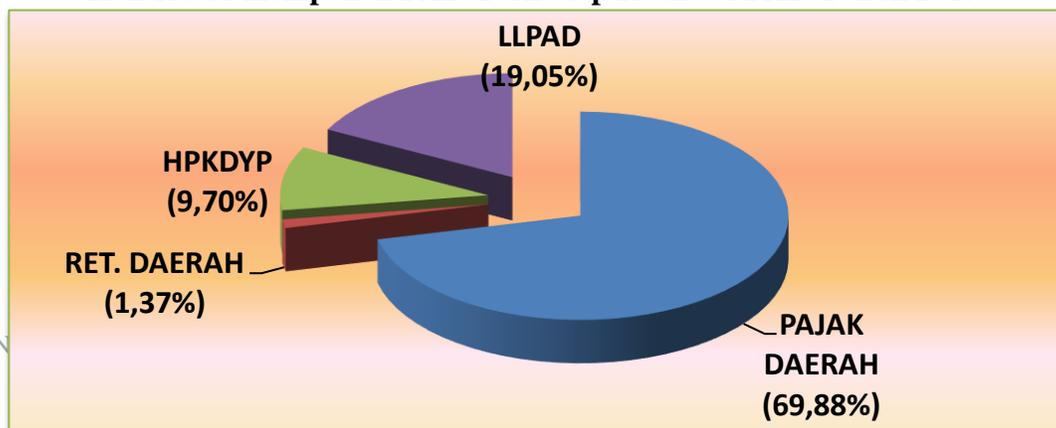
No.	Uraian	2016	2017				Selisih Realisasi 2017-2016
		Realisasi	Target	Realisasi*	%	% Ptb	
I.	PAJAK DAERAH	1.003.260.953.668	1.144.453.452.935	1.180.802.223.647	103,18	17,70	177.541.269.979
II.	RETRIBUSI DAERAH	29.792.038.549	24.685.464.000	23.208.505.714	94,02	-22,10	-6.583.532.835
III.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	72.827.611.744	166.202.468.137	163.852.468.137	98,59	124,99	91.024.856.393
IV.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	253.963.415.476	306.347.269.425	321.960.737.021	105,10	26,77	67.997.321.544
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.359.844.019.437	1.641.688.654.497	1.689.823.934.520	102,93	24,27	329.979.915.082

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 *data unaudit/LRA 1 Februari 2018

Dari tabel diatas terlihat komponen PAD yang paling besar peningkatannya dibanding tahun 2016 adalah Pajak Daerah dengan peningkatan sebesar Rp.177.541.269.979,00. Peningkatan Pajak Daerah disebabkan meningkatnya penerimaan dari semua komponen Pajak Daerah tahun 2017. Sedangkan komponen PAD tahun 2017 yang penerimaannya menurun dari tahun 2016 adalah Retribusi Daerah, hal tersebut disebabkan beralihnya Retribusi Tera Ulang menjadi kewenangan pemerintah Kab/Kota serta berkurangnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan akibat beberapa obyek retribusi tersebut yang beralih menjadi obyek BLUD pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah.

Perbandingan kontribusi masing-masing komponen PAD dapat dilihat dalam diagram berikut.

Grafik 2.15
Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2017



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 * data unaudit/
LRA 1 Februari 2018

Pajak Daerah merupakan bagian PAD yang paling besar peranannya/kontribusinya terhadap PAD. Dengan kondisi tahun 2013 sebesar Rp.697.834.322.423,00, Pajak Daerah telah meningkat hingga 69,21 persen pada tahun 2017 dengan realisasi Rp.1.180.802.223.647,00 dan diproyeksi meningkat 82,32 persen pada tahun 2018 jika dihitung dari kondisi tahun 2013. Pada tahun anggaran 2017, penerimaan seluruh komponen Pajak Daerah telah melampaui target dengan capaian Pajak Daerah tahun 2017 sebesar 103,18 persen.

Untuk masa mendatang, penerimaan pajak masih akan menghadapi beberapa tantangan terutama berkaitan dengan (i) belum optimalnya penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulan; serta (ii) rendahnya kesadaran wajib pajak, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5%.

2.17.b. Kemitraan Multipihak.

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk organisasi kemasyarakatan.

Kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan target adalah jumlah kerjasama investasi antara Pemerintah dan Dunia Usaha Dokumen MoU. Pada akhir tahun 2017, jumlah kerjasama investasi yang terjalin sebanyak 21 Dokumen MoU terdiri dari kerjasama antar Pemerintah anggota MPU yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali dengan 2 Dokumen MoU serta kerjasama antar Pemerintah dengan dunia usaha dalam rangka peningkatan pemahaman investasi dalam pengembangan kapasitas usaha sebanyak 19 Dok MoU baik dengan pengusaha dari dalam maupun luar negeri.

**Tabel 2.37. Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama DPM-PTSP
Provinsi NTB Tahun 2017**

No	Uraian	Tentang	Keterangan
1	Perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi NTB dengan BPJS Nomer : 570/012/DPMPTSP/2017 Nomor ; 01/KTR/DIVRE-XI/2017 Tanggal ; 5 januari 2017	Kepersertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang daftarkan pemerintah provinsi NTB	-Telah di tanda tangani pada tanggal 5-1-2017 -telah ditanda tangani oleh para pihak
2	Nota kesepahaman antara kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan pemerintah provinsi NTB Nomor :420/080/2017 Tanggal : 21 februari 2017	Pengadaan calon pegawai negeri sipil guru garis depan tahun 2016	-Telah di tanda tangani pada tanggal 21-2-2017 -telah ditanda tangani oleh gubernur NTB (pihak kedua) tetapi belum ditandatangani sekhen. kemendikbud (pihak kesatu)
3	Kesepakatan bersama antara provinsi NTB dengan institut pemerintahan dalam negeri RI Nomor :060/041/DPMPTSP Nomor :070/149/IPAM/2017 Tanggal : 23 februari 2017	Kerjasama pelaksanaan kajian penelitian dan seminar	-Telah di tanda tangani pada tanggal 23-2-2017 - telah ditanda tangani oleh gubernur NTB dan (pihak ke-3) gubernur IPDN (pihak kedua)
4	Kesepakatan bersama antara provinsi NTB dengan Universitas Indonesia Nomor :24/NKB/R/UI/2017 Nomor :070/149/IPAM/2017 Tanggal : 6 Maret 2017	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	-Telah di tanda tangani oleh kedua pihak -telah ditanda tangani oleh Gubernur NTB (pihak kesatu) dan Rektor UI (pihak kedua)
5	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Badan Narkotika Nasional(BNN) Nomor :060/094/DPM dan PTSP Nomor : B/1513/IV/DE/HK.01.00/2017/BNN Tanggal : 1 Maret 2017	Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Nusa Tenggara Barat	- Telah Ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 oleh kedua belah pihak

No	Uraian	Tentang	Keterangan
6	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 580/118/DISDAG Nomor: 70/PKS/SURAT-4/0417 Tanggal 28 April 2017	Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan Perbankan Serta Dukungan Pasar Online (Market Place) di Nusa Tenggara Barat	- Telah ditandatangani pada tanggal 28 April 2017 oleh kedua belah pihak
7	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan PT.POS Indonesia Nomor :510/119/DISDAG Nomor : 70/PKS/Surat-4/0417 Tanggal : 28 April 2017	Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Pelayanan Pos serta Dukungan Pasar Online (Market Place) di Nusa Tenggara Barat	Telah ditandatangani pada tanggal 28 April 2017 oleh kedua belah pihak
8	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Kepolisian Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Pangkalan TNI AL Mataram. Nomor :180/142/DPM & PTSP Nomor : B/MoU-17/V/2017 Nomor: B-1283/P-2/65-1/105/2017 Nomor: BA/01/V/2017 Tanggal : 9 Mei 2017	Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Telah ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2017 oleh Semua Pihak
9	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor :180/406/KUM Nomor : B.1782/Un.07/01/R/PP.00.9/09/2017 Tanggal , 7 September 2017	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Telah ditandatangani pada tanggal 7 September 2017 di Surabaya oleh PARA PIHAK
10	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor :180/407/KUM Nomor : UN.3/OT.01.6/4307/2017 Tanggal , 8 September 2017	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Telah ditandatangani pada tanggal 8 September 2017 di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang oleh PARA PIHAK
11	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Nomor : Nomor : Tanggal , 19 Oktober 2017	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2017 di Mataram – NTB.

No	Uraian	Tentang	Keterangan
12	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Badan tenaga Nuklir (BATAM). Nomor : Nomor : Tanggal , 19 Oktober 2017	Penelitian Pengembangan, Perekayasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir di Provinsi NTB	Telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2017 di Mataram – NTB
13	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)Tbk. Nomor :420/266/DPM & PTSP Nomor : B.3910/KC-XI/LYN/10/2017 Tanggal , 19 Oktober 2017	Kartu Tani Sebagai Alat Penebusan dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Provinsi NTB.	Telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2017 di Mataram – NTB
14	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Universitas Pertahanan. Nomor :420/267/DPM & PTSP Nomor : 132/KB/X/UNHAN/2017 Tanggal , 19 Oktober 2017	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2017 di Mataram – NTB
15	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan dengan PT.Hydro Perdana Retailindo. Nomor :420/268/DPM & PTSP Nomor : 002/NK/HPR-NTB/X/2017 Tanggal , 19 Oktober 2017	Pengembangan Usaha Retail Syariah di Nusa Tenggara Barat	-Telah diadakan rapat pada tanggal 9 Juni 2017. - Telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2017 di Mataram-NTB
16	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Yayasan Forest For Life Indonesia. Nomor :420/271/DPM & PTSP Nomor : Tanggal , 19 Oktober 2017	Kerjasama Pengelolaan Sampah Organik di Provinsi NTB dengan Memanfaatkan Teknologi Biokonversi.	Telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2017 di Mataram – NTB
17	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : HKI.HM.05.02-44 Nomor : 180/294/DPM & PTSP Tanggal , 29 Nopember 2017	Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual	Sudah Ceremonial, telah ditandatangani Pihak I (Bapak Gubernur) sedangkan Pihak II masih dalam Proses.
18	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dengan	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi	Telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2017 di

No	Uraian	Tentang	Keterangan
	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.. Nomor : / /Diskop UKM/IX/2017 Nomor : / / Tanggal , 29 Nopember 2017	Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Mataram , NTB oleh Pihak I (Kadis Koperasi UKM Prov. NTB) sedangkan Pihak II masih dalam Proses
19	Kesepakatan bersama antara Provinsi NTB dengan PT. Selong Selo. Nomor : Nomor : Tanggal , 17 Desember 2017	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Tastura, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB	Telah ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2017 di Mataram – NTB
20	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kapolda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram. Nomor :523/185.8/05/DISLUTKAN/2017 Nomor : B/487/X/2017/Dit Pol Air Nomor: B-07/P.2.4/Es/10/2017 Nomor : BA/03/X/2017 Tanggal , 31 Oktober 2017	Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB	Telah ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2017 di Mataram – NTB
21	Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Bappeda Provinsi NTB dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Nomor :050/5527/02-Bappeda Nomor : 729/11.3.AU/0/XII/2017 Tanggal , 28 Desember 2017	Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sumber Daya Manusia dan Potensi Geopark.	Telah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2017 di Mataram – NTB

2.17.c. Teknologi Informasi.

Teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang juga sangat penting untuk mewujudkan TPB/SDGs. Salah satu indikator yang dianggap sangat vital adalah banyaknya individu yang menggunakan internet. Realisasi masyarakat yang mengakses layanan NTB online sampai dengan tahun 2017 sebanyak 881.774 orang atau

meningkat 1.083 persen dari tahun 2016 yaitu sebanyak 80.000 orang.

Sementara itu kunjungan pengguna pada Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB selama tahun 2017 sebanyak 88.439, kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2017 yaitu sebanyak 24.687 kali kunjungan. Jumlah yang mengunduh Daftar Informasi Publik (DIP) tertinggi adalah pada bulan Juli 2017 dengan 10.656 kali unduhan. Sedangkan untuk Permohonan Informasi yang masuk selama tahun 2017 adalah sejumlah 4 orang pemohon.

Tabel 2.38.
Traфик Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB
Tahun 2017

BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN (Kali)	DOWNLOAD DIP (Kali)	PERMOHONAN INFORMASI (Orang)
1	2	3	4
Januari	6.317	2.256	-
Februari	3.372	915	1
Maret	3.568	2.501	-
April	9.887	366	-
Mei	24.687	5.387	1
Juni	17.263	10.032	1
Juli	8.629	10.656	-
Agustus	2.788	2.180	-
September	5.240	2.685	-
Oktober	2.549	3.206	-
November	4.139	1.725	1
Desember	-	-	-
TOTAL	88.439	41.909	4

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2017.

Minat masyarakat cukup tinggi untuk mengakses informasi publik secara online. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kunjungan Sistem Informasi Online PPID Provinsi NTB setiap bulannya menyentuh diatas ribuan kunjungan. Begitu pula dengan banyaknya Daftar Informasi Publik (DIP) yang diunduh oleh pengakses, menggambarkan bahwa informasi publik yang disediakan pada sistem informasi online PPID Provinsi NTB sangat diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan kecilnya angka permohonan informasi pada tahun 2017 menandakan bahwa informasi yang telah disediakan cukup lengkap, sehingga tidak banyak permohonan informasi diluar informasi publik yang telah disediakan dalam sistem informasi PPID Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terbantu

dengan adanya sistem informasi ini sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang harus kesulitan dalam memperoleh informasi publik badan publik, artinya Pemerintah Provinsi NTB telah berupaya maksimal dalam melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan.

Perdagangan Internasional. Salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global. Realisasi Ekspor Daerah NTB bulan Desember 2017 tercatat volume sebesar 70.979,433 ton terjadi peningkatan volume sebesar 148,84 persen dari bulan November 2017 tercatat volume sebesar 28.524,348 ton. Demikian pula dengan nilai bulan Desember 2017 tercatat sebesar US.\$137.566.033,013 terjadi penurunan nilai sebesar 154,58 persen dari ekspor bulan Nopember 2017 tercatat sebesar US.\$54.036.697,530.

Ekspor tambang bulan Desember 2017 tercatat volume sebesar 70.959,691 ton terjadi peningkatan volume sebesar 148,79 persen dari bulan November 2017 tercatat volume sebesar 28.521,526 ton. Demikian juga dengan nilai bulan Desember 2017 tercatat sebesar US.\$137.373.400,120 terjadi peningkatan nilai sebesar 154,42 persen dari bulan November 2017 tercatat sebesar US.\$ 53.994.714,260 sedangkan Realisasi ekspor non tambang bulan Desember 2017 tercatat volume sebesar 19,742 ton terjadi peningkatan volume sebesar 599,58 persen dari bulan November 2017 tercatat volume sebesar 2,822. Demikian juga dengan nilai ekspor non tambang bulan Desember 2017 tercatat nilai sebesar US.\$192.632,893 terjadi penurunan nilai sebesar 48,46 persen dari ekspor November 2017 tercatat nilai sebesar US.\$41.983,270.

Ekspor Daerah Nusa Tenggara Barat secara kumulatif bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat volume sebesar 533.951,570 ton terjadi penurunan volume sebesar 32,04 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 yang tercatat volume sebesar 785.694,634 ton. Sebaliknya dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat sebesar US.\$997.338.671,712 terjadi penurunan nilai sebesar 36,95 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 yang tercatat sebesar US.\$1.581.791.827,978.

Ekspor sektor tambang secara kumulatif bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat volume sebesar 533.809,098 ton terjadi penurunan volume sebesar 32,05 persen dari bulan

Januari s/d Desember 2016 tercatat volume sebesar 785.586,366 ton. Demikian juga dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar US\$.996.194.047,290 terjadi penurunan nilai sebesar 36,95 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat nilai sebesar 1.580.767.759,960 *sedangkan ekspor non tambang* bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat volume sebesar 142,472 ton terjadi peningkatan volume sebesar 31,59 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat volume sebesar 108,268 ton. Demikian juga dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar US\$.1.144.624,422 terjadi peningkatan nilai sebesar 11,77 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat volume sebesar 1.024.068,018.

Secara keseluruhan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 14 (empat belas) komoditi dan dikirim ke 17 (tujuh belas) negara tujuan ekspor oleh 21 (dua puluh satu) eksportir melalui 7 (tujuh) pelabuhan muat.

Realisasi ekspor berdasarkan komoditi bulan Januari s/d Desember 2017 sebanyak 14 (empat belas) jenis dengan perolehan devisa Daerah Nusa Tenggara Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.39.
Komoditas dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

KOMODITAS	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Konsentrat Tembaga	996.194.047,290	99,89
Udang Vannamei	516.431,20	0,05
Gerabah	44.185,490	0,004
Kerajinan Buah Kering	226.102,050	0,02
Mutiara	302.417,629	0,03
9 (Sembilan) komoditi lainnya	55.488,053	0,01
Total Ekspor	997.338.671,712	100,00

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

NegaraTujuan ekspor Daerah NTB tahun 2017 tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) negara dengan nilai ekspor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

NEGARA TUJUAN	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Jepang	331.324.673,790	33,22
Philipina	452.107.732,060	45,33
Korea Selatan	147.004.756,750	14,74
India	65.955.728,690	6,61
13 (tigabelas) negara lainnya	945.780,422	0,09
Total Ekspor	997.338.671,712	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Terdapat tujuh pelabuhan muat yang digunakan untuk mengekspor produk NTB tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

PELABUHAN MUAT	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Benete Sumbawa	996.194.047,290	99,89
Lombok Internasional Airport	389.677,800	0,04
Tanjung Perak- Surabaya	232.007,233	0,02
Ngurah Rai Denpasar	379.376,480	0,04
3 (tiga) Pelabuhan Muat lainnya	143.562,909	0,01
Total Ekspor	997.338.671,712	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Salahsatu permasalahan adalah Realisasi ekspor daerah Nusa Tenggara Barat belum tercatat seluruhnya di NTB karena sebagian besar dokumen ekspor produk masih di urus di daerah lain termasuk pembukaan L/C melalui Bank Devisa yang ada di luar daerah seperti Bali, Surabaya dan Jakarta.

2.17.d. Ketersediaan Data.

Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi berkualitas sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi di era globalisasi menjadi suatu keharusan, hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam

rangka mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Program NTB Online merupakan satu model implementasi sistem *e-government* (e-gov), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi dan pencegahan korupsi maupun mendukung manajemen pengambilan keputusan oleh pimpinan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT), memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan informasi, dan sebaliknya masyarakat juga dapat secara langsung menyampaikan masukan kepada pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan fasilitas IT di seluruh perangkat daerah perlu segera diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan program NTB online, ditempuh melalui tiga tahapan, yakni konsolidasi di tahun 2015, disusul tahapan otomasi online tahun 2016-2017 dan tahapan integrasi tahun 2018. Pada tahapan konsolidasi, kegiatan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jaringan yang terkoneksi atau saling terhubung antar perangkat daerah dan pusat data yang ada di sekretariat daerah. Salah satu indikasi aktifitas perangkat daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah website setiap perangkat daerah selalu terupdate yang berisikan publikasi program, kebijakan dan kegiatan pemda dan mengoptimalkan pemanfaatan e-mail resmi perangkat daerah untuk komunikasi dan layanan data/informasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyediaan data TPB/SDGs di Indonesia diantaranya adalah (i) keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah); (ii) munculnya daerah administrasi baru karena sistem desentralisasi pemerintah; (iii) belum maksimalnya pemanfaatan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa K/L; dan (iv) belum tersedianya data untuk beberapa indikator global TPB/SDGs.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs



3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, dalam kurun waktu 2015-2018 telah ditetapkan 4 target yang diukur melalui 13 indikator seperti yang diuraikan dalam Tabel 3.1. Target-target tersebut terdiri dari (1) Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, (2) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, (3) menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, (4) membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mewujudkan Tujuan 1 TPB/SDGs, pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2018-2023 menjabarkan misi ke-2 untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan yang isinya “Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi”. Adapun strategi/arah kebijakan untuk mewujudkan misi ke-2 antara lain : (1) Meningkatkan perlindungan, memberikan jaminan masyarakat miskin; (2) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; (3) Memperkuat kualitas dan daya dukung lembaga kesejahteraan sosial; (4) Meningkatkan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (5) Menguatkan basis data perencanaan dan informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan; (6) Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (7) Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan; (8) Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik; (8) Meningkatkan kualitas sanitasi; (9) Meningkatkan kualitas rumah layak huni; (10) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (11) Menurunkan luasan kawasan kumuh kota; (12) Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan; (12) Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal; (13) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi; (14) Memperbaiki akses

yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi masyarakat; (15) Mengembangkan BUMDES potensial; (16) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk.

Dalam rangka menjalin komitmen mengentaskan kemiskinan Pemerintah Provinsi NTB telah menghasilkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan secara bersama program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. Program kegiatan Tahun 2017 tersebut adalah :

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
2. Jamban Keluarga;
3. Pengembangan Rumah Layak Huni;
4. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
6. Pengelolaan sampah melalui pendirian Bank Sampah;
7. Cakupan air bersih.

Strategi lainnya adalah dengan penetapan 500 desa prioritas penanggulangan kemiskinan mulai tahun 2017 pada saat rakor kemiskinan tahun 2017, yang akan di intervensi secara bersama antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa dan NGO. Dan Pada Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor : 050.13-510 Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018, tentang Penetapan Lokasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh pemerintah provinsi NTB dan diantaranya ada 10 desa sebagai pilot proyeck penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan *holistik, integratif*, tematikdan spasial. Sehingga diharapkan penanganan lebih fokus dan terarah berbasis desa.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tahun 2018, percepatan penanggulangan kemiskinan diperluas menjadi 14 program/kegiatan, antara lain :

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
2. Jamban Keluarga;
3. Rumah Tidak Layak Huni;
4. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
6. Pengelolaan sampah melalui pendirian Bank Sampah;
7. Cakupan Air Bersih;

8. Pengembangan Desa Wisata;
9. Pertanian Konservasi;
10. Sambungan Listrik Murah dan Hemat;
11. Desa Mandiri Pangan;
12. Motorisasi Nelayan;
13. Bantuan Non Tunai Bersyarat (BPNT);
14. Motorisasi nelayan atau budidaya udang fanani bagi nelayan miskin di halaman rumah.

Program Tujuan 1. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan mencakup (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, (2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, (3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), (4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, (5) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, (6) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, (7) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, (7.a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, (8) Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan, (9) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, (10) Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata, (11) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, (12) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi, (13) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (14) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, (15) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, (16) Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, (17) Program Pengelolaan Hutan, (18) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, (19) Program Pengembangan Perumahan, (20) Program Pengembangan Permukiman, (21) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, (21.a) Program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar, (22) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, (23) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, (24) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, (25) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (26) Program Jaminan Sosial, (26.a) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, (27) Program Pembinaan Anak Terlantar, (28) Program

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, (29) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (29.a) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, (29.b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, (30) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, (31) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, (32) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, (33) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, (34) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, (35) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, (36) Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), (37) Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), (38) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, (39) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, (40) Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah, (41) Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah, (42) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, (43) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, (44) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, (45) Program Keluarga Berencana, (46) Program Pengelolaan Hutan.

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Lembaga nonpemerintah tersebut antara lain:

(1) Yayasan NW, program yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan
- b. Pemberdayaan ekonomi ummat
- c. Program usaha dan kesejahteraan
- d. Pembangunan Shelter/Huntara
- e. Pembangunan Masjid
- f. Dapur Umum dan Siaga Pangan
- g. Sekolah Darurat

(2) Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, program yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan unit usaha kreatif pengelolaan sampah (bank sampah) yang mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan kegiatan pelatihan manajemen bank sampah dan inkubasi bisnis pengelolaan sampah

- (3) Baznas NTB, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pengentasan Kemiskinan, dengan kegiatan pembangunan rumah layak huni dan pembangunan jamban untuk masyarakat miskin
- (4) AIP-RURAL dan Partner, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- (5) Geopark Rinjani, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program peningkatan peran perempuan dan Generasi Sehat Cerdas
- (6) LAZ DASI NTB, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program badah bale;
 - b. Air kehidupan;
 - c. Program pemberdayaan ekonomi umat;
 - d. Kesehatan
- (7) BSMI NTB, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program kesehatan;
 - b. Peduli yatim dhuafa
- (8) Aksi Cepat Tanggap (ACT), program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pendampingan Desa Wakaf;
 - b. Pendampingan disabilitas (Desa Disabilitas Berdaya);
 - c. Pendampingan pengemis asongan;
 - d. Pondok sosial;
 - e. Warung wakaf pelopor dan warung tradisional binaan;
 - f. Wakaf sumur
- (9) mm

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel 3.1. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 1 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 1 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 3.1 Target Pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS/Susenas, BDT	% (Maret)	14,75 (2018)	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	Semua OPD
1.2.2*	Penduduk Miskin	BDT	Orang	737460 (2018)	640.118	593.564	547.010	500.456	453.902	Semua OPD
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS) / P BPJS	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan / PSJSN-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB	%	68,83	77,67	82,18	85,99	89,29	92,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR	Dinas Sosial Provinsi NTB	%	5,7	6,8	7,4	8,0	8,6	9,2	Dinas Sosial Provinsi NTB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial Provinsi NTB	Orang	165.362	360.201	396.221	435.844	479.429	527.372	Dinas Sosial Provinsi NTB
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,										
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes	BPS/Susenas	%	85,72 (2016)	87,13	87,60	88,07	88,54	89,01	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BKKBN / BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BKKBN
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BKKBN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Susenas	%	69.58 (2016)	75,61	76,87	77,95	78,90	79,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL	BPS/Susenas	%	58.31 (2016)	65,79	67,39	68,78	70,00	71,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	BPS/Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD	BPS/Susenas	%	100,57 (2017)	100,22	100,39	100,54	100,67	100,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat / APM SMP	BPS/Susenas	%	94,84 (2017)	102,81	102,41	102,96	103,36	103,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA	BPS/Susenas	%	106,99 (2017)	95,02	96,30	97,50	98,70	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	BPS/Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana										
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD Provinsi NTB	lokasi	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BPBD	resiko	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI/ JIUPASNA	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	2	1	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda Provinsi NTB	Rupiah (Juta)	1045554 (2018)	1.791.528	2.537.502	3.283.476	4.029.450	4.775.424	Bappeda

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.2 . Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 9 indikator yang tersedia datanya di Provinsi NTB dari 11 indikator yang seharusnya dicapai sampai dengan 2030. Adapun uraiannya indikator seperti dalam Tabel 3.2. Target-target tersebut terdiri dari (1) menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, (2) menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2. Strategi/arah kebijakan RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi: (1) Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan pengembangan produk pertanian; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan; (3) Meningkatkan penerapan teknologi dalam produksi dan pemasaran peternakan potensial; (4) Mengembangkan budidaya perikanan potensial dan memberikan nilai tambah; (5) Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan; (6) Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal.

Program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi meningkatnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan masyarakat yang dibangun dan diisi cadangan makanan, Tersalurkanya bantuan/dukungan kegiatan di daerah rawan pangan, tersedianya laporan prognosa ketersediaan pangan selama 5 tahun, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, terpantaunya arus keluar masuk komoditas pangan strategis, semakin banyaknya kawasan rumah pangan lestari, terpantaunya kondisi keamanan dan mutu pangan, buah dan sayuran segar, terlaksananya pembinaan dan pengawasan kebun prima, terbentuknya kelompok pengembangan

peternakan dan pelaku usaha peternakan, meningkatnya jumlah panti pembenihan yang memenuhi standar dan bersertifikat CPIB, meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB, meningkatnya jumlah produksi benih ikan air tawar, meningkatnya jumlah benih ikan air payau dan ikan laut, pengendalian OPT tanaman perkebunan, intensifikasi dan penanaman tanaman semusim, dan perbanyak benih padi, palawija, hortikultura, dan kerjasama perbenihan dengan penangkaran.

Selain itu, untuk keamanan penyediaan produksi dalam daerah, pemerintah daerah melakukan rangkaian kegiatan seperti membatasi keluarnya bibit betina untuk sektor peternakan dan pemenuhan kebutuhan dalam daerah dulu baru boleh didistribusikan ke luar daerah untuk empat sektor utama yang memenuhi kebutuhan pangan.

Program Tujuan 2. Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 adalah (1) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), (2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, (3) Program peningkatan produksi hasil peternakan, (4) Program pengembangan budidaya perikanan, (5) Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan penyediaan pangan. Lembaga non pemerintah tersebut antara lain:

1. AIP – PRISMA, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Meningkatkan akses petani ke pasar, dengan kegiatan :
 - (1) Mempromosikan benih bersertifikat yang ditangkar di lokal;
 - (2) Membuat dan mempromosikan pakan sapi yang berkualitas;
 - (3) Promosi program YARO (bayar separo) dengan mempergunakan benih jagung berkualitas.

Sementara itu upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 yang tertuang dalam RPJMD (2018-2023) adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat.

Program Tujuan 2. Program dan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMN 2018-2023 antara lain terkait dengan: (1) Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat dengan indikator Persentase Balita Gizi Buruk yang ditangani, (2) Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan indikator Jumlah Desa Pelaksana GEN, (3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, (4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, (5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, (6) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak, (7) Program perbaikan gizi masyarakat.

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan perbaikan gizi masyarakat. Lembaga non pemerintah tersebut antara lain:

1. Konsepsi dan SNV, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program ketahanan pangan dan gizi dengan kegiatan rencana;
 - b. Program advokasi program dan berkontribusi pada penurunan stunting
2. Aksi Cepat Tanggap (ACT), program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program pendampingan kasus sosial gizi buruk;
 - b. Program sarapan sehat;
 - c. Program bengkel gizi terpadu

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel 9. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 2 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 2 Buku RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 3.2 Target Pencapaian Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,6	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0		Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,54	6,09	5,57	5,13	4,75	4,42		Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS	%	7,54	6,09	5,57	5,13	4,75	4,42		Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	37.2	35	34	33	32	31	Dinas Kesehatan
2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	23.5	20	19	18	17	16	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	8,6	7.5	7	6.5	6	5.5	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), survei indikator kesehatan nasional (sirkesnas)	%	56,5	53	51	49	48	47	Dinas Kesehatan
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), BPS/Susenas	%	41,2	60	65	70	75	80	Dinas Kesehatan
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH Point) mencapai	DKP	%	78,3 (2018)	78,80	79,60	80,60	81,80	83,30	Dinas Ketahanan Pangan
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	DKP	%	30,18	30,40	30,48	30,54	30,60	30,65	Dinas Ketahanan Pangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian, BPS/Sakernas	%	32.821,82	27.150	27.200	27.250	27.300	27.350	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 30 indikator. Adapun uraiannya indikator seperti dalam Tabel 3.2. Target-target tersebut terdiri dari (1) Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, (2) Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000., (3) Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, (4) Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, (5) Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan, (6) Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas, (7) Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional, (8) Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Arah kebijakan RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2 : kehidupan sehat dan sejahtera termaktum dalam misi ke-4 yang isinya “Mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif”. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain : (1) Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah dan lansia; (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat; (3) Meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; (3) Meningkatkan layanan posyandu yang unggul dan berkualitas; (4) Meningkatkan kapasitas tim kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan; (5) Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar; (6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan; (7) Meningkatkan pemerataan dan ketersediaan obat antar wilayah; (8) Meningkatkan kualitas reproduksi remaja.

Program Tujuan3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, (2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, (3) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, (4) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), (5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, (6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, (7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, (8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, (9) Program Sumber Daya Kesehatan., (9) Program pengembangan lingkungan sehat, (10) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, (11) Program upaya kesehatan masyarakat, (12) Program obat dan perbekalan kesehatan.

Lembaga non pemerintah yang mendukung tujuan 3 di NTB adalah :

1. Yayasan NW, program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Program peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan dengan kegiatan membuat Poskestren pada masing-masing cabang, membuat klinik kesehatan pada masing-masing daerah dan rumah sakit islam pada masing-masing wilayah;
 - b. Program sosial dan pemberdayaan ekonomi ummat dengan kegiatan pengobatan Kesehatan Lansia, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui;
 - c. Program sosial dan pemberdayaan ekonomi mmmat dengan kegiatan mengadakan pelayanan KB di wilayah Provinsi NTB berkerjasama dengan instansi terkait;

- d. Program peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan dengan kegiatan merintis adanya jaminan sosial dan kesehatan bagi pengurus amal usaha NW;
2. Generasi Emas NTB, program yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Program pemberdayaan keluarga;
 - b. Program integrasi institusi pelayanan dasar.
 3. Kompak, program yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan kelompok rentan terhadap persalinan yang selamat, dengan kegiatan :
 - (1) Fasilitasi penyusunan regulasi yang pro kepada pelayan dasar;
 - (2) Fasilitasi perbaikan Public Finance Managemen kepada unit layanan;
 - (3) Penguatan masyarakat sipil dan pemdes dalam meningkatkan akses layanan dasar;
 - (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pemberian pelayanan kependudukan.

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada Tabel 3.3. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 3 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 3 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 3.3 Target Pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SDKI (2012), AKI se-Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tahun 2015	orang	251 (2012)	-	-	-	223	-	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	BPS/Susenas	%	99.47	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS/Susenas	%	90.42	92	92	94	94	95	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	75 (2012)	-	-	-	70	-	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	33 (2012)	-	-	-	30	-	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	57 (2012)	-	-	-	50	-	Dinas Kesehatan
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1	Angka infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Kemenkes	Kasus	98	61	60	59	58	57	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Kasus	170	130	125	120	115	110	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	%	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Dinas Kesehatan
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	3	3	6	6	7	8	Dinas Kesehatan
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Kemenkes	%	90	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta)	Kemenkes	orang	221	190	180	170	160	150	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis.	Dinas Kesehatan (Survei Mikro Filaria Rate/MFR), BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,9	5,4	5,2	5	4,8	4,6	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesmas dan sirkesnas	%	42	23,38	22,97	22,56	22,15	21,74	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Riskesmas	%	2,00	0,98	0,90	0,80	0,70	0,60	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian	Orang	13	3	3	1	1	0	Kepolisian
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Dinas Kesehatan, BNN	orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BNN
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	orang	20 (2018)	20	20	20	20	20	Dinas Sosial
3.5.1(c)	Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas sosial, BNN	orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BNN
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lembaga	8 (2018)	9	10	11	12	13	Dinas Sosial
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BNN
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.										
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Kepolisian	orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Kepolisian
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BKKBN	%	50,9	55,8	57,3	58,7	59,8	60,8	BKKBN
3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN	%	50,9	51,6	52,0	52,3	52,6	52,9	BKKBN
3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang samadan dinyatakan dalam persentase	BKKBN	%	74,77	75,77	76,04	76,28	76,48	76,65	BKKBN
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BKKBN	%	23,7	19,80	17,51	15,78	14,42	13,32	BKKBN
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	%	2,5	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	BKKBN
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/Susenas	%	6,49 (2016)	5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	BPS/Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	66,74	70,00	73,00	75,00	77,00	80,00	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur \geq 15 tahun	Bappenas/ Susenas	%	5,9	5,40	5,00	4,00	3,00	3,00	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan abat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	74,05	91	92	93	94	95	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 18 indikator. Uraian indikator dapat dilihat dalam Tabel 3.4. Sedangkan target-targetnya dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, (2) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, (3) Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas termaktum dalam misi ke-4, yaitu mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif, tujuannya adalah meningkatkan pemerataan akses layanan dasar dan kualitas SDM melalui penguatan kapabilitas dan keahlian serta penguasaan IPTEK yang maju dan tepat guna. Adapun arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah (1) Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau; (2) Mewujudkan pemerataan, penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan; (3) Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan; (4) Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri; (5) Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas; (6) Meningkatkan pengembangan IPTEK pada setiap bidang.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Program pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pembinaan sekolah dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota, (2) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (3) Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, (4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, (5) Program Pembinaan Ketenagaan, (6) Program pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)

Program lembaga non pemerintah yang mendukung tujuan 4 salah satunya dilaksanakan oleh Yayasan NW. Program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain : (1) Program peningkatan pendidikan, kegiatannya : penyusunan kebijakan dan sistem pembinaan pondok pesantren, madrasah dan sekolah NW, pengembangan sekolah/madrasah/ kelas unggulan pada masing-masing daerah (baik sekolah umum maupun kejuruan), perintisan pembangunan sekolah kejuruan, penyusunan kebijakan dan sistem pembinaan Perguruan Tinggi NW, perintisan Perguruan Tinggi bidang teknologi dan kesehatan, pembinaan kualitas guru lembaga pendidikan Nahdathul Wathan, Penyiapan guru-guru yang berkualitas untuk disebarakan pada berbagai pondok pesantren NW di berbagai wilayah/daerah/ cabang; (2) Program pendidikan, kegiatannya : penetapan cabang muslimat binaan, melaksanakan pembinaan TK, PAUD, TPQ Muslimat; (3) Program Pengembangan Dakwah dan Gerakan Penyadaran Umat, kegiatannya : pengorganisasian tuan guru/ustaz yang ada untuk memberi pengajian di berbagai daerah; (4) Program Integrasi Institusi Pelayanan Dasar (GEN).

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 4 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel : 3.4. Target Pencapaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	68,32 (2018)	68,57	69,07	69,82	71,22	72,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs Berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	63,53 (2018)	64,27	65,51	67,49	70,71	72,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA Berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	74,71 (2018)	75,21	76,21	77,71	80,21	84,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	BPS/Susenas	%	109,63	112,21	113,70	114,94	115,00	116,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	107,83	107,83	107,93	108,03	108,13	108,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	BPS/Susenas	%	94,97	95,33	95,71	96,04	96,32	96,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	110,16	110,31	110,91	110,96	110,97	110,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	95,56	96,66	97,76	98,86	99,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	98,63	99,15	99,95	100,75	100,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur \geq 15 tahun	BPS/Susenas	%	7,66	7,75	7,81	7,87	7,93	7,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(h)	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK Sederajat	BPS/Dinas Pendidikan	%	97,93	98,63	99,15	99,95	100,75	100,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(i)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	68,24	68,26	68,28	68,3	68,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/Susenas	%	37,57 (2016)	39,90	40,36	40,75	41,09	41,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	75,72	78,22	79,47	80,72	81,97	83,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	95,56	96,66	97,76	98,86	99,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	98,63	99,15	99,95	100,75	100,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/Susenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi)	%	21.57 (2016)	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	46.63 (2016)	59,58	62,16	64,34	66,23	67,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	23.71 (2016)	33,49	35,87	38,01	39,98	41,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	BPS/Susenas	%	100,57	100,22	100,39	100,54	100,67	100,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat	BPS/Susenas	%	99,75 (2016)	99,90	99,95	100,00	100,50	100,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	86,18 (2016)	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	96,02	97,3	98,5	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di PT (%)	BPS/Susenas	%	118,84 (2016)	144,71	149,86	154,21	157,98	161,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur \geq 15 tahun	BPS/Susenas	%	87,14	92,52	93,44	94,36	95,18	96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	BPS	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	BPS	%	87,14	92,52	93,44	94,36	95,18	96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	98 (2016)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%SD	97,62	98,32	98,52	98,72	98,92	99,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	98,42	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Dapodik	%SMK	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) Internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	45,59	49,19	50,99	52,79	54,59	57,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	54,70	60,3	63,1	65,9	68,7	71,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	1,8	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	33,99	50,99	57,49	63,99	71,49	79,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	31,73	35,73	38,23	40,73	43,23	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c)Komputer tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	58,51	60,31	61,21	62,11	63,01	63,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	72,07	73,87	74,77	75,67	76,57	77,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke : (d) Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik	%SD	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f)fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dapodik	%SD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g)fasilitas cuci tangan (terdiri dari,sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Dapodik	%SMK	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.										
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dikbud	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.c Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negaraberkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	51,42	58,22	61,62	65,02	68,42	71,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik		orang	3289	3899	4204	4509	4814	5119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Jumlah Kepala SMK yang bersertifikat pendidik		orang	1741	2025	2167	2309	2451	2593	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	76,88	78,28	81,28	84,28	88,28	93,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minima S1/D4		%	83,26	90,91	92,86	94,81	96,76	98,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	77,51	84,76	87,76	90,76	93,76	97,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	95,77	97,07	97,97	98,87	99,77	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minima S1/D4		%	99,22	99,74	99,76	99,78	99,79	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	99,48	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4		%	98,96	99,49	99,52	99,55	99,58	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru Negeri yang bersertifikat		%	80,03	92	93	94	95	96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru Swasta yang bersertifikat		%	13,89	16	17	18	19	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 12 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.5. Sedangkan target-targetnya tersebut terdiri dari : (1) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, (2) Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, (3) Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional, (4) Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut, (5) Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional, (6) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Dalam RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 5. Kesetaraan Gender termaktum dalam misi ke-1, yaitu mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang profesional. Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan gender yang proposional dalam pembangunan. Sedangkan arah kebijakannya antara lain : (1) Memperkuat perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak; (2) Meningkatkan peran serta perempuan dalam

pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga; (3) Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Arah kebijakan lainnya untuk mendukung kesetaraan gender adalah PERDA No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Isi Perda tersebut adalah : (1) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, (2) Mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak korban kekerasan dan peraturan perundang-undangan, (3) Melakukan Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, (5) menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat, (6) Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban, (7) melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

Untuk perlindungan perempuan dan anak, pemerintah provinsi juga mengeluarkan PERDA Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015. Dalam PERDA tersebut dijelaskan tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah : (1) Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak; (2) Memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; (3) Mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak; (4) Meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak; dan (5) Meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di daerah.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah : (1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak, (2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, (4) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (5) Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), (5.a) Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), (6) Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, (7) Program Keluarga Berencana, (8) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, (9) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Program lembaga non pemerintah untuk mendukung tujuan 5 adalah :

- (1) Pendampingan POKJA dan keberlanjutan GEOSITE (Geopark Tambora), melalui kegiatan :
 - a. Peningkatan peran Perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.
- (2) Peningkatan peran perempuan dan Generasi Sehat Cerdas (Geopark Tambora), melalui kegiatan :
 - a. Perlindungan hak perempuan

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel 12. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 5 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 5 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel : 3.5. Target Pencapaian Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPA3AKB Provinsi NTB	%	0,069	0,067	0,065	0,063	0,061	PM0,060	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	Anak	301	238	206	174	142	110	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AKB Provinsi NTB	%	0,014	0,017	0,016	0,015	0,015	0,014	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS melalui SPHPN	%	0,035	0,046	0,045	0,044	0,043	0042	Dinas Sosial
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	BPS melalui Susenas	%	0.62 (2016)	0,39	0,2	0,1	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.	BPS melalui Susenas	%	18.86 (2016)	11	10	9	8	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN	%	20 (2016)	19,4	19,6	19,8	20	10,2	BKKBN
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan SUPAS	%	75 (2012)	-	-	-	<65%	-	BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS melalui Susenas	%	91.25 (2016)	95,56	96,66	97,76	98,86	99,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.										
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)	KPU Provinsi NTB	%	21.43 (2014)	-	25,00	-	-	-	KPU
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Provinsi NTB)	KPU Provinsi NTB	%	9.23 (2014)	-	20,00	-	-	-	KPU
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD, BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Kepegawaian Daerah
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkaithubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BKKBN, BPS melalui SDKI	%	77.90 (2012)	-	-	-	>82%	-	BKKBN
5.6.1(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN	%	15,6	11,34	9,21	7,08	4,95	3,1	BKKBN
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	99,6	100	100	100	100	100	BKKBN
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Biro Hukum, BKKBN, Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UU/PP	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	BPN	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS melalui Ssesnas	%	48,96	54,1	56,4	58,7	61	63,3	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.										
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	OPD	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel. 3.6. Sedangkantarget-target tersebut terdiri dari (1) Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, (2) Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan, (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global, (4) Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air, (5) menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat, (6) melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Arah kebijakan dalam RPJMD (2018-2023) yang terkait Tujuan “Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi, dengan strategi” termaktum dalam misi ke-7, yaitu mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industrial, sektor unggulan, serta kawasan strategis. Sedangkan arah kebijakannya adalah : (1) Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku; (2) Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan; (3) Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern; (4) Perbaiki kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air, udara dan tutupan

lahan, dengan arah kebijakan merehabilitasi hutan dan lahan; (5) Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan (6) Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan.

Program Tujuan 6. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, (2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, (3) Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan indikator tersedianya sarana air bersih dan sanitary, (4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah, (5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, (6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, (7) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, (8) Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, (9) Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, (10) Program Pengelolaan Hutan, (11) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, (12) Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (13) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, (14) Program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar.

Program/kegiatan non pemerintah yang mendukung tujuan 6 antara lain :

- (1) PLAN WINNER Project (Women and Disabilities Inclusive WASH and Nutrition) di masyarakat (dilaksanakan oleh KONSEPSI dan TRANSFORM).
 - a. Roadshow WINNER Projeet di Lokasi sasaran (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan);
 - b. Pelatihan Gender dan Inklusi kepada POKJA AMPL Kabupaten, Kecamatan dan PKK Kecamatan;
 - c. Pelatihan MKGS kepada POKJA AMPL Kabupaten, Kecamatan;
 - d. Pertemuan Diskusi Komunitas dan tokoh masyarakat secara berkala terkait STBM – WASH;
 - e. Lokakarya Gender dan Inklusi;
 - f. MKGS di kelurahan/desa;
 - g. Pelatihan tools monev dan verifikasi STBM ke tim kerja STBM kelurahan dan tim STBM kecamatan;
 - h. Promosi STBM;

- i. Pemicuan STBM;
 - j. Training Tukang/wirausaha sanitasi (Latrine packages, communal septick);
 - k. Pelatihan Wirausaha sanitasi untuk keterampilan bisnis;
 - l. Pelatihan GESI untuk wirausaha sanitasi;
 - m. Membangun sistem dan mekanisme pasar produk Sanitasi (Loby, Audensi dan Koordinasi Pemerintah dan Swasta);
 - n. Pelatihan Pemeliharaan Operasional (septick komunal perkotaan di Kota Mataram);
 - o. Review SSK dan Pengembangan Rencana Kerja di tingkat kabupaten;
 - p. Monitoring lapangan oleh Manajmen Lembaga bersama POKJA AMPL;
 - q. Pendataan lapangan;
 - r. Pelatihan STBM Smart untuk sanitarian;
 - s. Pertemuan Pokja AMPL di Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pengelolaan air limbah (dilaksanakan oleh KONSEPSI dan TRANSFORM)
- a. Lokakarya Pengelolaan air limbah.

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel 3.6. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 6 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.6. Target Pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	69,58 (2016)	75,61	76,87	77,95	78,9	79,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter/detik	299.196	299.196	299.196	299.196	299.196	299.196	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	74,20	78,50	80,65	82,80	84,95	87,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	43,07 (2016)	50	52,3	54,6	56,9	59,2	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	BPS : Susenas	%	58,31 (2016)	65,79	67,39	68,78	70	71,09	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.									
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/ Kelurahan	1100 (2016)	1100	1100	1100	1100	1100	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PU	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
<p>Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p>										
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
<p>Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</p>										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LHK	Jumlah RPDAST	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Stasiun	62	62	62	62	62	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of</i>	Dinas LHK	DAS	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	<i>Understanding</i> (MoU) lintas Negara.									
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas LHK	Ha	200	200	200	200	200	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Wilayah sungai	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	25	35	40	44	48	52	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas LHK	DAS	2	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LHK	DAS	1	2	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas LHK	Danau	1	1	1	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LHK	Danau	NA	1	1	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LHK	Danau	NA	1	1	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LHK	Hektar	4090	6000	6000	6000	6000	6000	BPDASHL Dodokan Moyosari
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LHK	DAS	2	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.7 Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 3 indikator. Target tersebut terdiri dari Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern dengan indikator : (1) Rasio elektrifikasi, (2) Konsumsi listrik per kapita dan (3) Rasio penggunaan gas rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 7. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah penyambungan listrik murah dan hemat, dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik.

Program Tujuan 7. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 adalah melakukan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, yang terdiri dari :

1. Kegiatan pengembangan pemanfaatan bidang ketenagalistrikan, dengan indikator tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin;
2. Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan;
3. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan, dengan indikator tersedianya database perusahaan ketenagalistrikan.

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel 3.7. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 7 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 7 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.



Tabel : 3.7. Target Pencapaian Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	87,78 (2018)	88,16	90,2	91,8	93,4	95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	kwh	579,05	607,47	631,68	657,78	687,61	721,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas	%	54,76	52,27	53,24	54,21	55,18	56,15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Selain sektor tambang, sektor non tambang memiliki potensi besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. NTB sebagai salah satu provinsi yang terpilih mengembangkan kawasan ekonomi khusus, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika telah mengupayakan sektor pariwisata berkontribusi lebih besar lagi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata perlu diberdayakan karena diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 20.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk mencapai target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMD (2018-2023) termaktum dalam misi ke-3, yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi. Adapun strategi dan arah kebijakannya antara lain : (1) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi; (2) Memperbaiki akses

yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan masyarakat; (3) Mengembangkan BUMDES potensial; (4) Meningkatkan investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan; (5) Meningkatkan dan mengembangkan komoditas ekspor potensial; (6) Meningkatkan pelaksanaan good corporate governance dalam BUMD; (7) Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja; (8) Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja; (9) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja; (10) Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan; (11) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM.

Program Tujuan 8. Kegiatan OPD yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB/SDGs adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan rincian kegiatan :
 - a. Terapan Teknologi Tepat Guna
 - b. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran
 - c. Padat karya produktif
 - d. Pemberdayaan Tanaga Kerja Mandiri
- 2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan rincian kegiatan :
 - a. Pelatihan Kewirausahaan Produktif
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan rincian kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Pengupahan DaerahExpo pemagangan dalam dan luar negeri
- 4) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan rincian kegiatan :
 - a. Layanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing
 - c. Informasi Pasar Kerja (Job Fair)
 - d. Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara
- 5) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 6) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 7) Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 8) Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 9) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 10) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 11) Program Pengembangan Kemitraan
- 12) Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8TPB/SDGs. Adapun lembaga non pemerintah yang mendukung tujuan 8 antara lain :

1. Geopark Tambora, melalui program/kegiatan :
 - a. Program Pengembangan Usaha Produktif dan Investasi dengan kegiatan jasa transportasi geopark dan pengembangan geomarine;
 - b. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan kegiatan Fasilitasi jasa pengelolaan situs/Geosite dan Pengelolaan Trekking dan Softreking Geosite;
 - c. Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan dengan kegiatan Pembinaan lembaga dan kelompok masyarakat yang potensial, Pembinaan dan pendampingan usaha produktif masyarakat dan Pengembangan Geoproduk Ekonomi kreatif;
 - d. Program Pendampingan POKJA dan keberlanjutan GEOSITE, dengan kegiatan Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal, Peningkatan Daya Saing dan ketersediaan SDM siap kerja lintas sektoral dan Peningkatan jaringan serikat pekerja, petani, nelayan dan pedagang.
2. GIZ-ISED, melalui program/kegiatan :
 - a. Program Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development dengan kegiatan Pelatihan E-COMMERCE bagi hotel dan sekolah vokasi di Lombok, Pelatihan Soft Skill (termasuk ToT) bagi karyawan hotel dan sekolah vokasi di Lombok, Implementasi program "Bisnis Inklusif" dengan melibatkan perusahaan swasta sebagai "driver" untuk kerjasama pengembangan Pariwisata Kebugaran & Produk Spa di Lombok dengan Martha Tilaar dan Implementasi program "Bisnis Inklusif" dengan melibatkan perusahaan swasta sebagai "driver" untuk kerjasama produk pertanian Sembalun dengan Javara Indonesia.

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel 3.8. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 8 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 8 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.



Tabel : 3.8. Target Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	-1,09	0,84	0,88	0,93	0,96	1	Semua OPD
8.1.1. (a)	PDB per kapita	BPS	Rupiah (ADH Berlaku)	25008	28.675	30.725	32.855	34.985	37.115	Semua OPD
8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakernas	%	58.42 (2016)	58,67	58,71	59,03	59,11	59,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui Sakernas	%	35,93	37,6	38,47	39,35	40,26	41,18	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakernas	%	96,81	96,14	96,09	96,05	96,01	98,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakernas	Rupiah	10628 (2016)	10.900	11.000	11.300	11.500	12.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	3,32	3,28	3,26	3,21	3,19	3,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	17,27	17,19	17,15	17,12	17,08	17,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS melalui Sakernas	%	19.53 (2016)	18	17	16	15	14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	orang	1.858.242	3.253.640	4.305.298	5.696.877	7.538.250	9.974.800	Dinas Pariwisata

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susenas	orang	2.215.211	3.805.536	4.987.883	6.537.574	8.568.740	11.230.972	Dinas Pariwisata
8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua										
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKPBU, OJK, BPS	Bank/ ATM	31/896 (2015)	PM	PM	PM	PM	PM	BI/OJK
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/Statistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BI/OJK
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BI/OJK

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030, ditetapkan 3 target dan 5 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.9. Adapun target-target dari tujuan 9 meliputi (1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang, (3) Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing, (4) Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan, (5) Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 9 yang diarahkan untuk mencapai target-target Tujuan 9 yang ditetapkan dalam RPJMD (2018-2023) meliputi strategi/arah kebijakan : (1) Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dalam pengembangan kawasan strategis; (2) Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan; (3) Strategi pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif serta teknologi pertanian, perikanan dan peternakan dengan arah kebijakan pengujian dan sertifikasi alat produksi; (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis.

Program Tujuan 9. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9, antara lain adalah: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, (3) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, (4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, (4.a) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, (5) Program Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Darat/Terminal, (5.a) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, (6) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, (7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, (8) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, (9) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, (10) Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian, (11) Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP (One Village One Product), (12) Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah, (13) Program Pengembangan e-Government.

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel 3.9. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 9 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 9 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.



Tabel : 3.9. Target Pencapaian Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9.1.1	Jalan Mantap Provinsi	Dinas PUPR	%	83,55 (2018)	84,55	85,55	86,55	87,55	88	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	7	7	9	10	10	10	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	7	7	8	8	8	9	Dinas Perhubungan
9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS : Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Makro dan Kecil	%	4.2 (2016)	4,4	4,4	4,5	4,5	4,7	Dinas Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS, Dinas Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Komite Kebijakan KUR	Rp (Juta)	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian
Target 9.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas LHK	%	1,27	1,23	1,13	0,93	0,83	0,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan										
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BAPPEDA
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Bappeda	orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BAPPEDA
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020										
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	48	54	56	58	59	60	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	21	29	33	39	45	50	Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 4 target dan 8 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.10. Target-target dari Tujuan 10 meliputi : (1) Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, (2) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut, (3) Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar, (4) Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Kebijakan Tujuan 10. Kebijakan peningkatan pemerataan antarkelompok pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung dengan strategi seperti :

1. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal melalui perbaikan sistem perpajakan yang memastikan kuintil teratas membayar pajak dengan semestinya, peningkatan *collection rate*, serta redistribusi sistem pendapatan yang merata.
2. Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk infrastruktur, sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi);
3. Memperbesar investasi padat pekerja;
4. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro;
5. Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif;
6. Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
7. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;
8. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar; dan

9. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Program Tujuan 10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mendukung tujuan 10, antara lain: (1) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, (5) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, (6) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, (7) Program Pengembangan Perumahan, (8) Program Pengembangan Permukiman, (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, (10) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, (11) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, (12) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (13) Program Jaminan Sosial, (13.a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, (14) Program Pembinaan Anak Terlantar, (15) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, (16) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, (17) Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan, (18) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, (19) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel 3.10. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 10 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 10 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.



Tabel : 3.10. Target Pencapaian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	%	0.371	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	Semua OPD
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	14,75 (2018)	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	Semua OPD
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	8	8	8	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	3.62 (2014)	PM	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	%	4.22 (2014)	PM	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya										
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS melalui Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Sosial
10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut										
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS : IDI	%	79,40	82,87	86,41	89,4	92	94,29	Bakesbangpoldagri
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Kebijakan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar										
10.4.1.(b)	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	orang	68832	85120	90230	95145	100125	105196	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.										
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	Dokumen	8	12	14	16	18	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 11 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.11. Target-target tersebut antara lain : (1) Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan, (2) Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua, (3) Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara, (4) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, (5) Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, (6) Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, (7) Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Kebijakan Tujuan 11. Strategi/ arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut : (1) Strategi penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas sanitasi, meningkatkan kualitas rumah layak huni, meningkatkan

peran serta masyarakat dalam mengelola sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah, dan menurunkan luasan kawasan kumuh kota; (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan; (3) Mendorong konektivitas antar wilayah baik darat, laut dan udara; (4) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemulihan sektor permukiman berdasarkan hasil verifikasi dan validasi; (5) Memulihkan layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, serta infrastruktur lainnya mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait sekaligus aspirasi masyarakat korban gempa.

Program Tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain: (1) Program Pengembangan Perumahan, (2) Program Perencanaan Tata Ruang, (3) Program Pemanfaatan Ruang, (4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, (4.a) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, (5) Program peningkatan pelayanan angkutan, (5.a) Program pengembangan transportasi laut, (5.b) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, (6) Program Peningkatan Manajemen Transportasi, (7) Program Siaga Darurat Bencana, (8) Program Tanggap Darurat Bencana, (9) Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana, (10) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, (11) Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, (12) Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan, (13) Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, (14) Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur (transportasi, SDA, air bersih dan sanitasi serta energi).

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, antara lain :

1. Yayasan NW, dengan program :
 - a. Program peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan, kegiatannya membangun tim bantuan darurat untuk penanganan bencana.
2. Aksi Cepat Tanggap (ACT), dengan program :
 - a. Program Kajian dan pelatihan kebencanaan;

- b. Perlengkapan peralatan apd, p3k, tandu,tenda, perahu karet;
- c. Program Aksi Kebencanaan;
- d. Pengelolaan Tim trauma healing;
- e. Kunjungan Kebencanaan.

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel 3.11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 11 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.11. Target Pencapaian Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 11.1 : Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan										
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	96.52 (2016)	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR	Kawasan perkotaan metropolitan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang & Kota Baru	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.2.1.(a)	Persentase pengguna modal transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Kota	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Metropolitan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas PU dan Infratraktur, dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	institusi	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BAPPEDA
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	11	11	11	11	11	11	Dinas PU dan Infratraktur, dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas PU dan Infratraktur, dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Orang	8	2	2	2	2	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Desa/ Kelurahan	5	4	4	4	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas ESDM.	EWS	1	2	2	2	2	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	%	39,72	50	55	60	65	70	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas PERKIM, LHK	Kota Hijau	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas PERKIM, LHK
Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	kota	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas PERKIM, LHK
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS melalui Susenas	%	12.87 (2016)	13,08	13,13	13,16	13,2	13,22	Kepolisian
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	90	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	%	2 (2015)	1	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 4 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel. 3.12. Adapun target-target yang mendukung pencapaian tujuan 12 antara lain : (1) Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang, (2) Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, (3) Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen, (4) Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 12. Kebijakan dalam rangka mendukung Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab telah diinisiasi oleh pemerintah dengan kebijakan terkait Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. Kebijakan yang kaitannya dengan pencapaian tujuan 12 yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 antara lain : (1) Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan pengembangan produk pertanian; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan; (3) Mengembangkan budidaya perikanan potensial dan memberikan nilai tambah; (4) Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan, (5) Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah.

Program Tujuan 12. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain:

- (1) Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, melalui kegiatan :
 - a. Pengelolaan persampahan dan limbah b3, dengan indikator jumlah kelompok bank sampah yang terbina, jumlah dokumen regulasi, jumlah unit TPA regional.
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan indikator : teridentifikasinya bentuk kerusakan lingkungan, terpantaunya industri/sumber-sumber bahan pencemar lingkungan, tersedianya peraturan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, terlaksananya pengujian untuk air dan udara oleh lab. Lingkungan.
 - c. Penataan dan Perencanaan Lingkungan, dengan indikator : tersedianya dokumen data, informasi dan perencanaan lingkungan hidup daerah; tersinkronisasinya dokumen lingkungan.
 - d. Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan indikator : penilaian dokumen amdal dan UKL/UPL, terevaluasinya pelaksanaan amdal dan UKL/UPL.
 - e. Peningkatan kapasitas masyarakat, dengan indikator : peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, tertanganinya pengaduan kasus lingkungan.
- (2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- (3) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- (4) Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap;
- (5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, melalui kegiatan :
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah, dengan indikator output : terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air limbah.
- (7) Program Pengelolaan Lingkungan dan SDA, melalui kegiatan :
 - a. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dengan indikator output : terbentuknya unit pengelolaan sampah swadaya masyarakat, terpenuhinya sarpras dan operasionalisasi TPA regional

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah sebagai berikut :

- (1) Program Pengembangan unit usaha kreatif pengelolaan sampah (bank sampah) yang mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang dilakukan oleh Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan manajemen bank sampah
 - b. Inkubasi Bisnis Pengelolaan Sampah

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel 3.12. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 12 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.12. Target Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
<p>Target 12.1 : Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.</p>										
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwinsprogram</i> .	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Kolaborasi tematik	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<p>Target 12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.</p>										
12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER		PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<p>Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.</p>										
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.			PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Ketahanan Pangan, dinas Pertanian dan Perkebunan
<p>Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p>										
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Peserta Proper	14	14	14	15	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan	Dinas LHK	Ton	1.226	1.484	1.632	1.795	1.974	2.171	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	perundangan (sektor industri).									
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (3R)										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LHK	%	6,75	14	18	22	26	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LHK	Perusahaan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan										
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LHK	Fasilitas Publik	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 1 indikator dapat dilihat pada Tabel 3.13. Target Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 13. Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 13 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut : meningkatkan kesiapsiagaan bencana, sasarannya adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana. Adapun strategi/arah kebijakannya antara lain : (1) Meningkatkan upaya pencegahan dini bencana, (2) Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan.

Program Tujuan 13. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain :

- (1) Program Siaga Darurat Bencana, melalui kegiatan :
 - a. Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana;
 - b. Penanganan Siaga Darurat Bencana;
 - c. Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
- (2) Program Tanggap Darurat Bencana, melalui kegiatan :
 - a. Penanganan korban Masa Tanggap Darurat;
 - b. Penanganan transisi ke pemulihan darurat;
 - c. Pendampingan psiko sosial korban bencana;
 - d. Pembentukan dan Pelatihan TRC.
- (3) Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar;

- b. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
 - c. Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana.
- (4) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana, melalui kegiatan :
- a. Penyusunan Dokumen DED;
 - b. Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana;
 - c. Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma;
 - d. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Program/kegiatan non pemerintah yang mendukung tujuan 13 salah satunya dilaksanakan oleh Geopark Rinjani. Adapun program/kegiatannya antara lain : (1) Perlindungan Sumberdaya Alam, melalui kegiatan ; a. Gerakan Konservasi Taman Bumi, b. Olah Sampah Terpadu Usaha, c. Kebun bibit kreatif, d. Pengkayaan Boi Endemik, e. Reboisasi Taman Bumi, f. Siaga Sumber air, g. Ekowisata Sungai Lestari, h. Penangkaran Bio Endemik.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 3.13. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 13 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.13. Target Pencapaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1*	Dokumen strategipengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	dokumen	2 (2015)	1	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	8	2	2	2	2	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 14 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 antara lain : (1) Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut dan sumber air; (2) Mengembangkan desa pesisir yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumberdaya lokal; (3) Mengembangkan budidaya perikanan potensial dan memberikan nilai tambah.

Program Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain :

- (1) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, melalui kegiatan :
 - a. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. Pengelolaan konservasi laut dan perairan;
 - c. Penataan ruang laut dan pengelolaan perairan pesisir dan pulau2 kecil;
 - d. Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan.
- (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Pengelolaan dan pengembangan unit penangkapan ikan dan kenelayanan, dengan indikator : pelaksanaan perlindungan nelayan (bantuan premi asuransi nelayan) dan pelaksanaan diversifikasi usaha keluarga nelayan.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel 3.14. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 14 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.14. Target Pencapaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.										
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	225965,32	585994	678908	769425	843384	905915	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	98	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	orang	17794	22862	24865	26558	28025	29319	Dinas Kelautan dan Perikanan

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 15 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 termaktum dalam misi ke-6, yaitu mempercepat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan :(1) Merahabilitasi hutan dan lahan; (2) Menerapkan smart patrol untuk melindungi hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal; (4) Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan; (5) Pemberdayaan masyarakat.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain :

- (1) Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
 - b. Penegakan Hukum Kehutanan
 - c. Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati
 - d. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- (2) Program Pengelolaan Hutan, melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan dan Tata Hutan

- (3) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
 - b. Pengelolaan DAS
 - c. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel 3.15. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 15 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 15 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.15. Target Pencapaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	% (Data 5 Tahunan)	4,87 (2018)	5,01	5,16	5,31	5,47	5,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.										
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LHK	Ha	0						BKSDA NTB
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LHK	Ha	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LHK	KPH	11	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	0,142 (2018)	0,147	0,151	0,156	0,160	0,165	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Tujuan 16 memiliki 8 target dengan 31 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16.

Kebijakan Tujuan 16. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 16 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pemberian kesempatan kebebasan sipil pada masyarakat, (2) Memperkuat kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan pembangunan, (3) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, (4) peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, (5) Optimalisasi peran masyarakat adat dalam balai mediasi, (6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman, (7) Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (8) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, (9) Penegakan peraturan perundangan, (10) Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan, (11) Meningkatkan standarisasi pelayanan pada unit pelayanan publik, (12) Meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan TI.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain : (1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, (2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan, (4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), (5) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN, (6) Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan, (7) Program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, (7.a) Program penguatan akuntabilitas kinerja, (7.b) Program peningkatan kualitas kelembagaan, (7.c) Program evaluasi kinerja SKPD, (7.d) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, (8) Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement, (9) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, (10) Program Pendidikan Politik Masyarakat, (10.a) Program pengembangan wawasan kebangsaan (11) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, (12) Program Penataan Administrasi Kependudukan, (13) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, (14) Program Perencanaan Sosial dan Budaya, (15) Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik.

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel 3.16. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 16 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 16 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel : 3.16. Target Pencapaian Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	Kasus	20	16	14	12	10	8	Kepolisian
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian	orang	14	14	PM	PM	PM	PM	Kepolisian
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	1.5 (2016)	1,1	1,02	0,96	0,9	0,85	Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kepolisian	orang	5.466.688	5.951.615	6.101.909	6.228.981	6.339.055	6.436.147	Kepolisian
TARGET 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Kepolisian
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Sosial Prov. NTB	Anak	707	387	337	280	250	200	Kepolisian, Dinas Sosial
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kepolisian	Anak	391	330	300	270	240	210	Kepolisian

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua										
16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisian	orang	19	12	13	13	13	13	Kepolisian
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA	Perkara	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Pengadilan Tinggi Provinsi NTB
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB
TARGET 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	PM	PM	PM	PM	PM	PM	KPK NTB
TARGET 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPK
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKD	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BKD
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPKAD, LPSE
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKD	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BKD

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Ombudsman NTB
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU	%	10 (2014)	15	PM	PM	PM	PM	KPU
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi NTB).	KPU	%	9.23 (2014)	13	PM	PM	PM	PM	KPU
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	13,04	14,5	15	15,5	16	17	BKD
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS : IDI	%	93,98	74	75	76	77	78	Bakesbangpoldagri
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS : IDI	%	79,40	82,87	86,41	89,4	92	94,29	Bakesbangpoldagri
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS : IDI	%	62.08	63,36	63,62	63,83	64,02	64,18	Bakesbangpoldagri
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat	BPS : Susenas	%	58,39	64	66	68	70	72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0-17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota di Provinsi NTB	BPS : Susenas	%	74,66	79,74	81,03	82,12	83,07	83,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
TARGET 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional HAM	Berkas Pengaduan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Komisi Nasional HAM Perwakilan NTB
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
TARGET 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan /Dokumen	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 5 target yang dijabarkan ke dalam 9 indikator. Target Tujuan 17 terdiri atas (1) mobilisasi sumber daya domestik; (2) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (3) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (4) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (5) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 17. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 17 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, (2) Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah, (3) Meningkatkan nilai ekspor daerah yang berorientasi penciptaan nilai tambah, (4) Memperkuat jaringan pasar lokal dan luar, (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang berfokus kepada peningkatan nilai investasi daerah, (6) Peningkatan pengelolaan perdagangan dalam negeri.

Program Tujuan 17. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan :
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
 - b. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;

- c. Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan;
 - d. Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor;
 - e. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi;
 - h. Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak;
 - i. Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah;
 - j. Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL;
 - k. Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL;
 - l. Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - m. Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL;
 - n. Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - o. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan;
- (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- a. Pengembangan kluster produk ekspor;
 - b. Identifikasi potensi ekspor daerah;
 - c. Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB;
 - d. Penyediaan sarana promosi ekspor daerah;
 - e. Pendampingan Desainer (Design Dispace Services).

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel 3.17. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 17 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 17 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.



Tabel : 3.17. Target Pencapaian Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	1,21	1,23	1,26	1,26	1,30	1,42	BAPPENDA
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB	Bappenda	%	0,95 (2018)	0,92	0,94	0,97	1	1,04	BAPPENDA
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bappenda	%	24,40	26,45	28,06	29,91	32,4	36,64	BAPPENDA
TARGET 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.										
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI, BI	US\$	12.556,94	9.762,29	8.607,67	7.589,62	6.691,97	5.900,49	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BI
TARGET 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS, Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan
TARGET 17.8 : Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	22,64	29	33	39	45	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika
TARGET 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.										
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Bappeda	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BAPPEDA
TARGET 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	-96.33 (2016)	11	11	11	11	11	Dinas Perdagangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	Dokumen	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	Alokasi	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
<p>TARGET 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>										
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	34	36	36	40	40	45	BPS, OPD sumber data
17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics (NSDS)</i> .	BPS	Strategi Daerah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BAPPEDA
<p>TARGET 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>										
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Sensus Penduduk	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	BPS	Data registrasi	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	507.744	69.582	81.480	95.413	111.729	130.834	Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, Biro Umum

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	98	99	99	99	99	99	BPS
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	6.03 (2016)	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	BPS

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

RAD tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB/SDGs provinsi, dan rencana program aksi /kegiatan, tetapi juga perlu menggaransi bagaimana target pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi terwujud. Untuk itu diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2017-2018. Sebagai bagian integral dari siklus rencana aksi pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi, kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RAD TPB/SDGs Provinsi NTB dibentuklah wahana bagi para peneliti dan akademisi untuk berkontribusi menyampaikan pemikiran konstruktif dalam usaha-usaha pencapaian TPB/SDGs yang dinamakan SDGs Center Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur NTB. Salah satu tugas dari SDGs Center adalah memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).

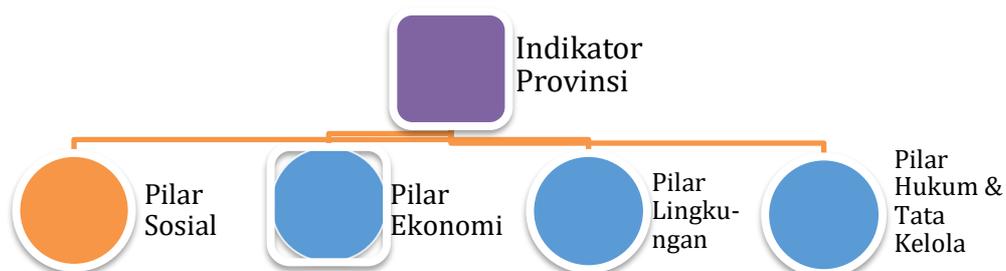
Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 050.13 – 227 Tahun 2018, tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Tugas tim penyusun laporan adalah : (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan laporan tahunan pencapaian indikator TPB/SDGs di Provinsi NTB, (2) Menyusun laporan tahunan pencapaian indikator TPB/SDGs di Provinsi NTB dan (3) Memberikan informasi yang detail tentang pencapaian indikator TPB/SDGs di Provinsi NTB. Selain itu, sesuai SK Gubernur NTB Nomor : 050.13 – 229 Tahun 2018 dibentuk Tim Penyusun Database Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2018 dengan rincian tugas sebagai berikut : (1) Mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan database capaian indikator TPB/SDGs, (2) Menganalisa data capaian indikator TPB/SDGs, (3) Menyusun buku database capaian

indikator TPB/SDGs dan (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Setiap tahun Gubernur NTB juga menetapkan tim sekretariat SDGs yang bertugas untuk: (1) Memberikan dukungan teknis operasional kepada Tim Penyusun RAD, Data Base dan Laporan Tahunan Kegiatan TPB/SDGs, (2) Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan RAD, Data Base dan Laporan Tahunan Kegiatan TPB/SDGs, (3) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Tim Penyusun RAD, Data Base dan Laporan Tahunan TPB/SDGs, (4) Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Tim Penyusun RAD, Database dan Laporan Tahunan SDGs dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Lain yang terkait, (5) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) dan (6) Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Tim TPB/SDGs serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Tim TPB/SDGs.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Gambar 4.1 Indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan



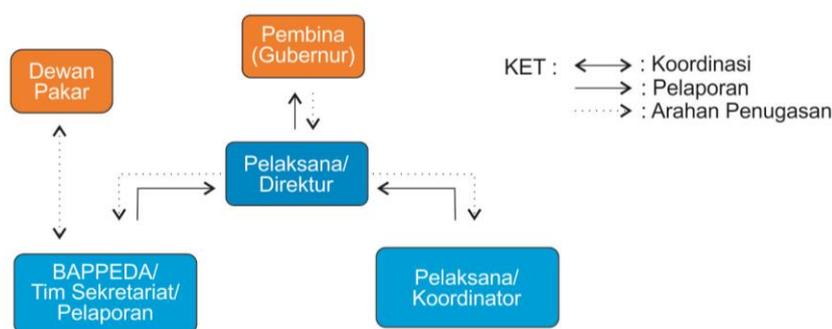
Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Secara nasional, TPB/SDGs mencakup 17 goals, 94 target/sasaran, dan 319 indikator. Berdasarkan indikator TPB/SDGs nasional itu, pemetaan di NTB menunjukkan ada 173 indikator SDGs yang mempunyai disagregasi pada wilayah administrasi provinsi dan/atau kabupaten/kota. Keseluruhan jumlah indikator tersebar ke dalam pilar pembangunan sosial sebanyak 83, pilar pembangunan ekonomi sebesar 38, pilar pembangunan lingkungan sebanyak 39, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebanyak 13 indikator.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs

4.1.a Mekanisme Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi

Alur pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs dilakukan dengan mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 050.13-636 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Gambar 4.2. Alur Informasi Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB



Alur pelaporan dalam pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs (Gambar 4.2) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Tim Sekretariat/Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Database (Bappeda)** menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali dan membuat laporan tahunan TPB/SDGs pada bulan Desember.
2. **Kepala Bappeda Provinsi NTB** menyampaikan laporan Tahunan dan DataBase pencapaian indikator SDGs yang berisi progres kemajuan indikator beserta kendala dan hambatan pencapaiannya kepada Direktur Pelaksana yang di jabat oleh

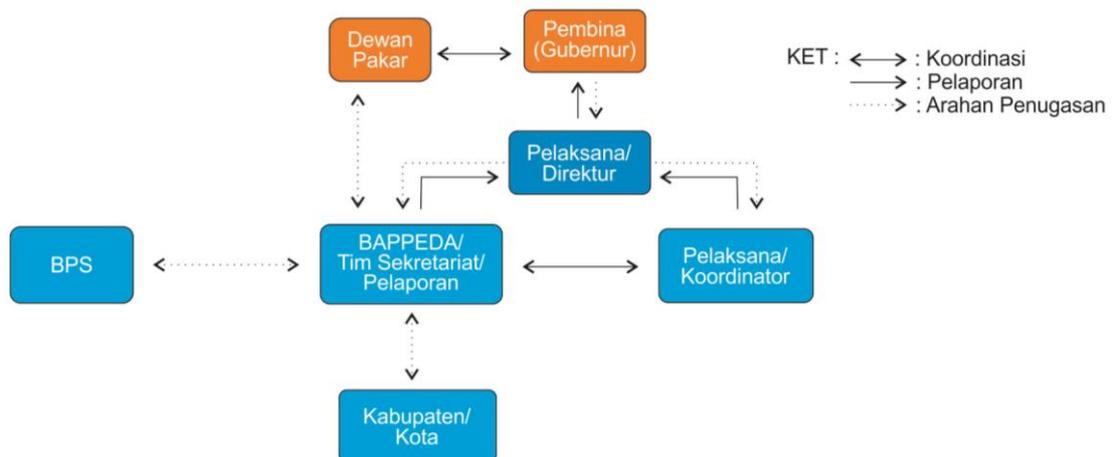
Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Direktur pelaksana dan dewan pakar mengarahkan kepada Bappeda dan koordinator pelaksana (tim SDGs centre) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan pencapaian indikator TPB/SDGs.

3. **Pelaksana/Direktur(Sekretaris Daerah)** menyampaikan laporan kepada Pembina (Gubernur).
4. **Pembina (Gubernur)** menyampaikan laporan capaian TPB/SDGs kepada Kementerian PPN/Bappenas dan ditembuskan ke Sekretariat TPB/SDGs Pusat.

4.1.b. Mekanisme Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAD perlu dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGs serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi indikator-indikator yang ada. Alur pelaporan dalam evaluasi RAD TPB/SDGs (Gambar 4.3) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 4.3. Alur Pelaporan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs



Alur pelaporan dalam pelaporandan evaluasi RAD TPB/SDGs (Gambar 4.3) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Tim Sekretariat/Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Database (Bappeda)** menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan. Kabupaten/Kotasaling berkoordinasi dengan Provinsi terkait program/kegiatan yang mendukung capaian indikator TPB/SDGs. BPS bersama Sekretariat TPB/SDGsmelakukan koordinasi terkait data

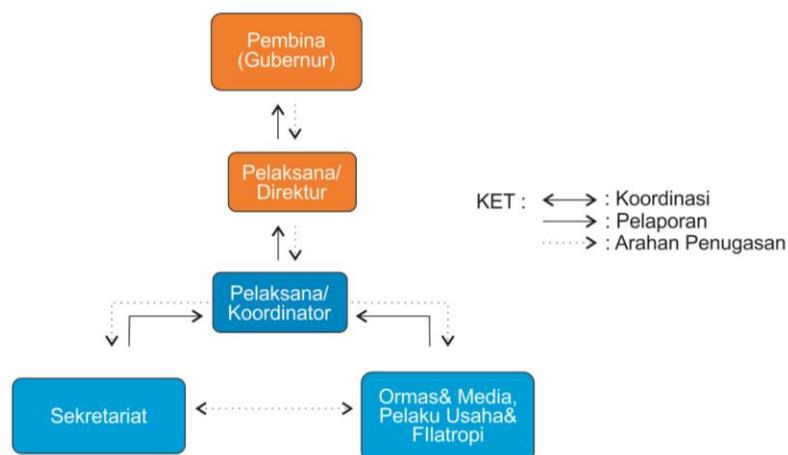
capaian indikator-indikator TPB/SDGs.

2. **Kepala Bappeda Provinsi NTB** menyampaikan laporan Tahunan dan DataBase capaian indikator SDGs yang berisi progres kemajuan indikator beserta kendala dan hambatan pencapaiannya kepada Direktur Pelaksana yang di jabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Direktur pelaksana dan dewan pakar mengarahkan kepada Bappeda dan koordinator pelaksana (tim SDGs centre) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan pencapaian indikator TPB/SDGs.
3. **Pelaksana/Direktur(Sekretaris Daerah)** menyampaikan laporan kepada Pembina (Gubernur).
4. **Pembina (Gubernur)** menyampaikan laporan capaian TPB/SDGs kepada Kementerian PPN/Bappenas dan ditembuskan ke Sekretariat TPB/SDGs Pusat.

4.1.b. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.

Gambar 4.4. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah



Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.4) sebagai berikut:

1. **Organisasi nonpemerintah** melakukan *voluntary self assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self assessment tool*. lalu disampaikan kepada Pelaksana/Koordinator dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB selaku Tim Sekretariat SDGs.
2. **Pelaksana/Koordinator** melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi lembaga non pemerintah kepada Direktur (Sekretaris Daerah).
3. **Sekretaris Daerah** melaporkan kepada Gubernur sebagai dewan pembina

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang **inklusif** juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah dibentuk SDGs Center yang bertugas untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 050.13-636 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, *workshop* serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada OPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

PROGRAM/KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB YANG Mendukung Indikator TPB/SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Tujuan 1											
INDIKATOR SDGs :	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan									
	1.2.2*	Penduduk Miskin									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani											
Kegiatan 1 : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terbinanya kelembagaan petani	Kelompok		100	100				12,387,966,660	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Kegiatan 1 : Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya bantuan pengolahan hasil pertanian/perkebunan	unit		20	20				4,199,646,860	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Program 2 : Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											
Kegiatan 1 : Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan	Kelompok		40	40				17,269,480,568	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak	Meningkatnya SDM Peternak	Kelompok		135	135				33,561,656,400	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
Program 3 : Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)											
Kegiatan 1 : Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan	KRPL	30	100	100	100	100	100	30,564,825,000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kelompok	Desa		100	100	100	100	100	60,084,325,000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Program 4 : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri											
Kegiatan 1. Operasi pasar rakyat	Terlaksananya Operasi Pasar Rakyat dan Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin	Paket		2	3	3	3	3	840,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Fasilitas Pasar Sembako Murah	Jumlah pelaksanaan pasar murah	Kali		4	4	4	4	4	500,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Program 5 : Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan											
Kegiatan 1. Penguatan Organisasi Pedagang kaki Lima Dan Asongan	Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang difasilitasi	Orang		100	150	170	180	200	1,325,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penataan tempat berusaha bagi Pedagang kaki Lima dan Asongan	Tersedianya tempat usaha bagi pedagang kakilima yang aman, tertib rapi dan bersih	Paket		7	9	10	12	13	23,675,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Program 6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah											
Kegiatan 1.Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang terlatih dalam pemanfaatan sumber daya	IKM	64	60	60	80	80	100	1,894,225,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam memperkuat jaringan klaster industri	IKM	156	140	200	240	240	240	8,210,645,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan	Jumlah IKM yang produknya tersertifikasi halal dan teruji mutu produk unggulan	IKM	30	130	145	160	175	190	3,610,382,500	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI	Jumlah IKM yang produknya terdaftar dan terlindungi HKI, sertifikasi SNI	IKM	106	248	250	250	250	250	3,889,650,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pembinaan Legalitas Usaha IKM (HKI,SNI,HKI,PIRT, dan Halal)	Jumlah IKM terbina legalitas usaha (HKI, SNI, PIRT, dan Halal)	IKM		400	400	400	400	400	2,793,083,250	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 6. Pelatihan IKM berbahan Baku Produk Unggulan	Jumlah IKM yang terlatih dalam mengembangkan bahan baku produk unggulan	IKM		40	80	80	80	80	2,437,348,100	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 7. Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah IKM yang terlatih dalam pengolahan hasil perkebunan	IKM		130	150	150	150	150	6,755,625,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerima bantuan peralatan dan mesin	IKM	352	340	350	360	370	380	33,853,250,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan kemasan (packaging) produk IKM olahan	Jumlah IKM olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)	IKM	20	20	25	30	35	40	1,125,000,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM logam dan mesin yang terfasilitasi SNI	IKM		48	48	50	50	55	2,365,195,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 8. Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah											
Kegiatan 1. Penguatan mutu produk unggulan olahan pangan	Jumlah IKM dalam penguatan mutu produk olahan pangan	IKM		80	120	120	120	120	569,230,500	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan mutu kemasan produk olahan pangan	Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu kemasan	IKM	20	100	125	150	175	200	2,849,000,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pendampingan peningkatan mutu	Jumlah IKM peningkatan mutu kemasan produk unggulan daerah	IKM	20	30	40	50	60	70	1,070,650,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata											
Kegiatan 1. Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota	jumlah destinasi pariwisata di 10 kab/kota	Desa wisata		50	50				93,879,792,520	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Kawasan Pariwisata	jumlah kawasan strategis pariwisata	KSPD		11	11				8,893,347,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 11. Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata											
Kegiatan 1. Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif	jumlah fasilitas ukm yang tersedia serta dukungan industri kreatif dalam event pariwisata	lokasi		10	10				4,911,828,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 12. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan											
Kegiatan 1. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	RTS		2500	2500				17,569,203,200	APBD	Dinas ESDM Prov. NTB
Program 13. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit		807	807				54,075,591,339	APBD	Dinas ESDM Prov. NTB
Program 14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan											
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina	orang		60	60	60	60	60	899,500,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Program 15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap											
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi	Kelompok		30	30	30	30	30	712,952,701	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Program 16. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil											
Kegiatan 1. Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir	Peningkatan Produksi Garam Rakyat	Ton (Ribu)		180	190	200	210	220	3,177,237,968	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Program 17. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
Kegiatan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah TPA regional yang terbangun	unit	0	1	1	1	1	1	173,528,955,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah mitra dalam pengelolaan sampah	mitra	0	2	2	2	2	2	15,200,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk	unit	4	75	105	105	105	110	18,500,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Program 18. Program Pengelolaan Hutan											
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kehutanan	Terbentuknya kelompok tani hutan di wilayah tertentu Balai KPH	KTH	0	3	3	3	3	3	3,145,900,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
	Pengembangan core Business KPH melalui Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	15,271,190,301	APBD	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (KPH Rinjani Timur)	Jenis	2	3	3	3	3	3	2,060,905,171	APBD	KPH Rinjani Timur
	Pemanfaatan HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan (KPH Sejong Mataiyang Brang)	Kegiatan	0	3	3	3	3	3	2,700,000,000	APBD	KPH Sejong Mataiyang Brangrea
	Pembangunan usaha HHBK kemiri, rotan, dan bambu serta usaha pengelolaan jasa lingkungan (air, ekowisata)	Kegiatan	0	2	2	2	2	2	4,457,349,994	APBD	KPH Puncak Ngengas Batulanteh
	Pengembangan usaha ekonomi kreatif (KPHP Batulanteh)	Kegiatan	3	3	2	3	2	3			
	Pengembangan core Business KPH melalui Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	4,589,108,067	APBD	KPH Ropang
	Pemberdayaan masyarakat setempat melalui skema kemitraan kehutanan (KPH)	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	6,422,803,299	APBD	KPH Ampang Riwo Soromandi
	Pengembangan kelas HHK (Jabon Putih) dan HHBK (Kemiri, empon-empon dan madu) (KPHL Toffo Pajo)	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	2,774,816,791	APBD	KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
	Operasionalisasi kelas perusahaan HHK (jati dan mahoni) dan pembangunan kelas perusahaan HHBK kemiri (KPHP Madapangga)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2			
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat (KPH Maria Donggomassa)	Blok	4	4	4	4	4	4	3,763,446,159	APBD	KPH Maria Donggomassa
Program 19. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah											
Kegiatan 1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat	Kab/Kota		10	10	10	10	10	283,887,150,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Program 20. Program Pengembangan Perumahan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan rumah layak huni di Provinsi NTB	Unit	1083	3500	3500	3500	3500	3500	525,000,000	APBD	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
Program 21. Program Pengembangan Permukiman											
Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Kualitasnya	%		4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	50,000,000,000	APBD	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
Program 22. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
Kegiatan 1. Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia dan BHP Mata Untuk Operasi dan Evaluasi Hasil Refraksi Luar Gedung	Tahun		1	1				10,457,059,000	APBD	Rumah Sakit Mata Mataram
Program 23. Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan 1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Biaya Pasien Tidak Mampu, Terlantar dan Masalah Sosial Lainnya)	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	orang	585	300	300	300	300	300	22,680,000,000	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Program 24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
Kegiatan 1. Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah Orang Yang Di Operasi	orang	0	25	25	25	25	25	1,144,706,250	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pelayanan sunatan masal	Jumlah Orang Yang disunat	orang	600	500	400	500	500	500	1,800,000,000	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pelayanan Kesehatan pasien rujukan kasus gizi buruk	Jumlah Orang Yang disunat	orang	85	75	75	75	75	75	1,831,530,000	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Program 25. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
Kegiatan 1. Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah Orang Yang Di Operasi	orang		100	100				212,000,000	APBD	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Program 26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya											
Kegiatan 1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya	Jiwa		200	300	300	500	600	8,261,726,575	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan dan pendampingan berusaha dalam	KK		250	350	450	550	650	15,571,975,315	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pemberdayaan warga miskin melalui bantuan peralatan usaha untuk menunjang keterampilan yang	KK		250	350	450	550	650	24,801,968,750	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pemberdayaan fakir miskin	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui penguatan ekonomi mikro dengan bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama	Kelompok		250	350	450	550	650	257,784,794,950	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pemberdayaan KAT	Terlaksananya pemberdayaan warga miskin KAT dengan penguatan ekonomi keluarga yang berbasis usaha melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan sarana/prasarana	Lokasi		2	2	2	2	2	10,491,309,095	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 27. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
Kegiatan 1. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat)	Terselenggaranya pembinaan kesos bagi anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelenggaraan event nasional bagi anak	orang		250	350	450	550	650	449,945,870	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pembinaan Lanjut Usia (LU)	Terselenggaranya pembinaan terhadap lanjut usia terlantar baik melalui LKS maupun luar LKS dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar	orang		100	200	300	400	500	326,012,340	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan	orang		200	300	400	500	600	3,536,073,920	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 4. Peningkatan ketrampilan bagi PMKS	Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sarana usaha mikro dalam	orang		200	300	400	500	600	4,222,592,415	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 28. Program Jaminan Sosial											
Kegiatan 1. Jaminan sosial korban bencana alam	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana alam	Kab/Kota		10	10	10	10	10	328,305,089,600	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Jaminan sosial korban bencana sosial	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana sosial	Kab/Kota		10	10	10	10	10	202,821,982,000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3. Jaminan sosial keluarga	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial keluarga penerima manfaat dengan baik	orang		10000	10000	10000	10000	10000	305,016,901,100	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 29. Program Pembinaan Anak Terlantar											
Kegiatan 1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam balai	orang		140	140				3,141,341,800	APBD	Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
Program 30. Program Pembinaan Anak Terlantar											
Kegiatan 1. Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan formal 12 tahun dan informal bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar dalam balai	orang		100	100				4,037,200,800	APBD	Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan
Program 31. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja											
Kegiatan 1. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	orang	200	200	200	200	200	200	21,254,917,860	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Terlaksananya Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	orang	750	750	750	750	750	750	4,047,116,578	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Program 32. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)											
Kegiatan 1. Pelayanan Operasi Katarak	Jumlah penderita katarak yang di operasi	Tahun		1	1	1	1	1	431,157,283,240	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 33. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin											
Kegiatan 1. Pelayanan Operasi Katarak	Jumlah penderita katarak yang di operasi	Orang		1500	1700	1900	2000	2100	27,255,591,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN	Kabupaten/Kota yang melakukan MoU JKN NTB	Kabupaten/kota		10	10	10	10	10	2,602,020,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS) /P BPJS									
PEMERINTAH											
Program 1. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin											
Kegiatan 1. Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN	Kabupaten/Kota yang melakukan MoU JKN NTB	Kabupaten/kota		10	10	10	10	10	2,602,020,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
Kegiatan 1. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Perusahaan	60	60	60	60	60	60	514,845,794	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Program 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan											
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Perusahaan	50	50	50	50	50	50	447,660,000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Pembinaan dan Pengawasan sarana keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB		Perusahaan	25	25	25	25	25	25	376,359,268	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR								
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma											
Kegiatan 1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma		orang		200	200				1,466,298,000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat								
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya											
Kegiatan 1. Pemberdayaan fakir miskin		Kelompok		250	350	450	550	650	257,784,794,950	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 2 : Program Jaminan Sosial											
Kegiatan 1. Jaminan sosial keluarga		Jiwa		10000	10000	10000	10000	10000	305,016,901,100	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes								
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak											
Kegiatan 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak		orang	30	60	60	60	60	60	3,162,595,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia		paket	25	40	40	40	40	40	2,155,709,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL								
PEMERINTAH											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Program 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Peningkatan Imunisasi	Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2,797,704,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.											
INDIKATOR SDGs :	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML									
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/ P LSL									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1. Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Frekuensi pemantauan kualitas air bersih	Kab/Kota	1	4	4	4	4	4	2,707,670,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan penggunaan jamban keluarga	Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban	%	82.67	85	88	90	93	95	34,040,688,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	Frekuensi pembinaan kelompok wirausaha sanitasi	Kali	1	4	4	4	4	4	1,334,462,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Program 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah											
Kegiatan 1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	283,887,150,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah	lokasi	50 (2018)	50	50	50	50	50	124,102,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat		Dokumen	10	2	3	4	5	6	36,630,600,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 4. Perencanaan prasarana dan sarana air limbah		Dokumen	3	3	3	3	3	3	18,315,300,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP								
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Permukiman											
Kegiatan 1. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB		Dokumen		1	1	1	1	1	8,273,395,000	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		%		4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	50,000,000,000	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA								
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)											
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah		Paket		2	2				33,920,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah		ruang/ paket		58	58				41,300,154,600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan Ruang Guru Sekolah		Paket		4	4				1,168,120,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah		ruang/ paket		27	27				22,187,920,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5. Pembangunan perpustakaan sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	Paket		10	10				100,018,547,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)											
Kegiatan 1. Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya gedung baru SMK	unit		3	4				2,120,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang/ paket		61	61				38,476,779,728	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	ruang/ paket		90	90				94,116,500,272	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktikum dan Peraga siswa	Paket		10	10				69,126,034,400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya bangunan sekolah yang baik	Paket		30	30				5,300,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	Paket		5	5				2,544,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)											
Kegiatan 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)	Tahun		1	1	1	1	1	431,157,283,240	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran/ PKAL									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
INDIKATOR SDGs :	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	RTS		2500	2500				17,569,203,200	APBD	Dinas ESDM Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah									
Program 1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana											
Kegiatan 1. Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)	Jambore Desa Tangguh Bencana Provinsi NTB	Orang		300	300	300	300	300	3,052,550,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pendampingan bagi masyarakat dalam upaya PRB di Provinsi NTB	Berkurangnya Desa Rawan Kekeringan	Desa		70	70	70	70	70	85,471,400,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penilaian Kinerja Desa tangguh Bencana	Terlaksananya Penilaian Indikator Desa Tangguh Bencana	Desa		10	10	10	10	10	1,831,530,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Program 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam											
Kegiatan 1. Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjir dan Tanah Longsor	jumlah lokasi Aman Bencana Banjir dan Longsor	lokasi		10	10	10	10	10	61,051,000,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)									
Program 1.											
Kegiatan 1.	Indikator 1										
INDIKATOR SDGs :	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana									
Program 1. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana											
Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen DED	Teridentifikasi Lokasi pasca Bencana	Lokasi		10	10	10	10	10	3,052,550,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Laporan		10	10	10	10	10	2,136,785,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan											
Kegiatan 1. Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Terbentuknya tentang penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Paket		1	1				397,500,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Program 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam											
Kegiatan 1. Penyusunan Rencana Kontijensi di KEK Mandalika, Global Hub, Samota	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen		3	3	3	3	3	9,157,650,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
Tujuan 2											
INDIKATOR SDGs :	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)									
PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat											
Kegiatan 1 : Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat	Jenis/item obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan	Jenis	3	5	5	5	5	5	130,729,767,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota	Kali	2	4	4	4	4	4	130,729,767,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 3: Program Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1. Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Frekuensi pemantauan kualitas air bersih	Kab/Kota	1	4	4	4	4	4	2,707,670,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Peningkatan penggunaan jamban keluarga	Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban	%	82.67	85	88	90	93	95	34,040,688,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	Frekuensi pembinaan kelompok wirausaha sanitasi	Kali	1	4	4	4	4	4	1,334,462,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 4: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Peningkatan Imunisasi	Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2,797,704,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 5. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)											
Kegiatan 1: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penanganan kasus gizi kurang	BALITA	375	200	200	200	200	200	2,284,415,000	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.1.1*	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan									
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan sekala pengalaman kerawanan pangan									
	2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)											
Kegiatan 1: Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan	KRPL	30	100	100	100	100	100	30,564,825,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 2: Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	TON	150	150	150	150	150	150	8,901,264,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 3: Pengembangan desa mandiri pangan	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kelompok	Desa	100	100	100	100	100	100	60,084,325,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 4: Pengembangan Lumbung Pangan	Terbangun dan terisinya lumbung pangan masyarakat	LUMBUNG	10 (2018)	23	42	52	52	52	13,370,155,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 5: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penanganan kasus gizi kurang	BALITA	375	200	200	200	200	200	2,284,415,000	APBD	DKP Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 6: Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan	Terlaksananya pemantauan arus distribusi komoditas pangan	KOMODITAS	18	18	18	18	18	18	410,357,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 7: Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam mendukung capaian skor PPH	ORANG	2,207	7950	6600	6600	6600	6600	2,817,950,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 8: Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	LDPM	48	52	52	52	52	52	732,882,500	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 9: Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya inspeksi keamanan pangan segar	KOMODITI		15	15	15	15	15	3,415,722,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 10: Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Mendukung Diversifikasi Pangan	Pembinaan dan Pengembangan usaha Kelompok Hilirisasi beras sasambo	Lokasi	3	1	1	1	1	1	893,565,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 11: Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia	Peningkatan kapasitas PUPM/TTI	PUPM/TTI		33	33	33	33	33	1,495,255,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 12: Monitoring dan Evaluasi Rice Milling Unit (RMU)	informasi ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat di RMU	RMU		116	116	116	116	116	480,000,000	APBD	DKP Provinsi NTB
Kegiatan 13: Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal	Tersedianya pangan lokal dari umbi-umbian dan aneka kacang	Lokasi		2	2	2	2	2	1,475,000,000	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)									
	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta									
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita									
PEMERINTAH											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat											
Kegiatan 1 : Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat	Jenis/item obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan	Jenis	3	5	5	5	5	5	130,729,767,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota	Kali	2	4	4	4	4	4	130,729,767,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 2: Program Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1. Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Frekuensi pemantauan kualitas air bersih	Kab/Kota	1	4	4	4	4	4	2,707,670,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan penggunaan jamban keluarga	Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban	%	82.67	85	88	90	93	95	34,040,688,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan	Frekuensi pembinaan	Kali	1	4	4	4	4	4	1,334,462,000	APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 3: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Peningkatan Imunisasi	Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2,797,704,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 4. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)											
Kegiatan 1: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penanganan kasus gizi kurang	BALITA	375	200	200	200	200	200	2,284,415,000	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak											
Kegiatan 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Bidan yang diberikan orientasi PPGDON	orang	30	60	60	60	60	60	3,162,595,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan									
		Skor PPH (Point)									
		Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
Tujuan 3											
INDIKATOR SDGs :	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup									
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)									
	3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak											
Kegiatan 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Bidan yang diberikan orientasi PPGDON	orang	30	60	60	60	60	60	3,162,595,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia	jumlah pkprkit, ukskit, dan lansia	paket	25	40	40	40	40	40	2,155,709,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.									
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.									
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak											
Kegiatan 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Bidan yang diberikan orientasi PPGDON	orang	30	60	60	60	60	60	3,162,595,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.									
PEMERINTAH											
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Peningkatan Imunisasi	Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2,797,704,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.3.2	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV									
	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.									
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria									
	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.									
	3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.									
	3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis.									
	3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).									
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota	Kali	1	4	4	4	4	4	214,118,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah Kab/Kota yg melaporkan kasus penyakit endemik/ epidemik rutin dan tepat waktu	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	1,817,408,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan surveillence Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota	Kali	1	4	4	4	4	4	214,118,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun									
PEMERINTAH											
Program 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Frekuensi pembinaan ke Kabupaten/kota	Kali	1	4	4	4	4	4	424,000,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata											
Kegiatan 1. Pembangunan rumah sakit	Jumlah gedung yang dibangun	Paket	2	-	2	1	-	-	6,091,820,000	APBD	RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Program 2 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Frekuensi pembinaan ke Kabupaten/kota	Kali	1	4	4	4	4	4	424,000,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis									
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi									
PEMERINTAH											
Program 1 :											
Kegiatan 1 :	Indikator 1										
INDIKATOR SDGs :	3.5.1.(c)	Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)											
Kegiatan 1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar	orang		100	100				2,746,500,492	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu									
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba									
PEMERINTAH											
Program 1 :											
Kegiatan 1 :	Indikator 1										
INDIKATOR SDGs :	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas											
Kegiatan 1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Terpasangnya fasilitas keselamatan	Jenis		10	10				23,453,250,480	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
Kegiatan 2. Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan	Tersedianya dokumen fasilitas jalan di NTB	Dokumen		1	1				92,549,024	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi darat	Orang		2	2				171,455,000	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern									
	3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin									
	3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang samad dinyatakan dalam persentase									
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun									
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan									
PEMERINTAH											
Program 1: Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan 1: Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jenis Akreditasi yang dilaksanakan	Jenis	1	3	4	4	4	4	2,743,021,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2: Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Frekuensi pembinaan pelayanan laboratorium	Kali	1	2	2	2	2	2	1,013,446,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	Frekuensi pembinaan ke FKTP	Kali	1	4	4	4	4	4	896,985,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Frekuensi pembinaan ke FKTL	Kali	1	4	4	4	4	4	1,367,237,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 3 : Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Tersedianya peralatan dan Perbekalan Kesehatan	Paket		1	1				4,825,120,000	APBD	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
	Terlaksananya Pengadaan Obat dan BHP Mata serta Pengadaan Bahan Kimia	Tahun		1	1				4,240,000,000	APBD	Balai Kesehatan Matara
Kegiatan 4 : Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani	Orang		500	500				8,056,000,000	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Kegiatan 4. Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah pasien pasung tertangani	orang		50	50				4,897,666,400	APBD	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Kegiatan 5 : Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pasien yang ditangani oleh Tim ACT (Accertive Community Therapy)	persen		600	600				1,176,684,800	APBD	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
INDIKATOR SDGs :	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)									
Program 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
Kegiatan 1. Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin dan JKN	Kabupaten/Kota yang melakukan MoU JKN NTB	Kabupaten/ Kota	10	10	10	10	10	10	2,602,020,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun									
Program 1: Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan 1: Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan melalui 3 jenis media	Kab/Kota	3	4	6	8	9	10	2,380,378,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2: Peningkatan dan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Frekuensi pembinaan ke Kabupaten/kota	Kali	1	4	4	4	4	4	953,131,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan abut dan vaksin di Puskesmas									
Program 1: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1: Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan		Jenis	15	15	20	25	30	35	2,187,093,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2: Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan		kali	2	4	4	4	4	4	768,327,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3: Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan		Kali	2	4	4	4	4	4	244,204,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan								
Program 1: Program Sumber Daya Kesehatan											
Kegiatan 1: Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan		Kali	2	4	4	4	4	4	574,032,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir		Orang	3	9	9	9	9	9	2,945,611,000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Tujuan 4											
INDIKATOR SDGs :		4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca dan (ii) matematika								
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :		4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B								
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs Berakreditasi minimal B								
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :		4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA Berakreditasi minimal B								
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat										
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat										
PEMERINTAH												
Program 1												
Nama Kegiatan 1	Indikator 1											
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat										
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun										
PEMERINTAH												
Program 1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)												
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya Gedung Baru SMA	Paket		2	2				33,920,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	ruang/ paket		58	58				41,300,154,600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
Kegiatan 3 : Penambahan Ruang Guru Sekolah	Terbangunnya Ruang Guru Sekolah	Paket		4	4				1,168,120,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	ruang/ paket		27	27				22,187,920,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
Kegiatan 5. Pembangunan perpustakaan sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	Paket		10	10				100,018,547,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
Program 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)												
Kegiatan 1. Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya gedung baru SMK	unit		3	4				2,120,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
Kegiatan 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang/ paket		61	61				38,476,779,728	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	ruang/paket		90	90				94,116,500,272	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktikum dan Peraga siswa	Paket		10	10				69,126,034,400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya bangunan sekolah yang baik	Paket		30	30				5,300,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	Paket		5	5				2,544,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)											
Kegiatan 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersalurkannya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)	Tahun		1	1	1	1	1	431,157,283,240	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat									
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)											
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya Gedung Baru SMA	Paket		2	2				33,920,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	ruang/ paket		58	58				41,300,154,600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan Ruang Guru Sekolah	Terbangunnya Ruang Guru Sekolah	Paket		4	4				1,168,120,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	ruang/ paket		27	27				22,187,920,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pembangunan perpustakaan sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	Paket		10	10				100,018,547,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)											
Kegiatan 1. Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya gedung baru SMK	unit		3	4				2,120,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang/ paket		61	61				38,476,779,728	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	ruang/ paket		90	90				94,116,500,272	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa	Paket		10	10				69,126,034,400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya bangunan sekolah yang baik	Paket		30	30				5,300,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	Paket		5	5				2,544,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)											
Kegiatan 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)	Tahun		1	1	1	1	1	431,157,283,240	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)									
PEMERINTAH											
INDIKATOR SDGs :	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)									
		Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)									
PEMERINTAH											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Program 1 : Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan											
Kegiatan 1 : Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi yang diadakan	unit		16	16				318,000,000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kegiatan 2 : Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah SDM pengelola balai TIK yang ditingkatkan	Orang		1460	1460				3,710,000,000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	Telaksananya pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	dokumen		40	40				330,720,000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kegiatan 4 : Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah media pembelajaran (master) berbasis TIK yang digandakan	keping		600	600				212,000,000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
INDIKATOR SDGs :	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat									
INDIKATOR SDGs :	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat									
PEMERINTAH											
INDIKATOR SDGs :	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)											
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya Gedung Baru SMA	Paket		2	2				33,920,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	ruang/ paket		58	58				41,300,154,600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan Ruang Guru Sekolah	Terbangunnya Ruang Guru Sekolah	Paket		1	1				1,168,120,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	ruang/ paket		27	27				22,187,920,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pembangunan perpustakaan sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	Paket		4	4				100,018,547,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)											
Kegiatan 1. Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya gedung baru SMK	unit		1	1				2,120,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang/ paket		61	61				38,476,779,728	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	ruang/ paket		133	133				94,116,500,272	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa	Paket		10	10				69,126,034,400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya bangunan sekolah yang baik	Paket		10	10				5,300,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	Paket		5	5				2,544,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)											
Kegiatan 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)	Tahun		1	1				431,157,283,240	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di PT (%)									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pengembangan Sistem Pelaporan Hasil Belajar Siswa	Tersedianya aplikasi e-raport	tahun		1	1				530,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)											
Kegiatan 1. Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah yang memadai	paket		2	2				3,158,800,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik Persentase Guru Negeri yang bersertifikat Persentase Guru Swasta yang bersertifikat									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan Ketenagaan											
Kegiatan 1. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya sistem penghargaan dan perlindungan PTK	tahun		1	1				211,698,748	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk. Provinsi	Terpilihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Peserta		200	200				2,120,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terbitnya Dokumen Angka Kredit Guru dan Pengawas	tahun		1	1				318,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	Orang		300	300				1,060,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Kebudayaan	Orang		300	300				4,216,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan		1	1				424,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Tujuan 5											
INDIKATOR SDGs :	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami kekerasan (fisik, seksual, atauemosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan									
	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.									
	5.2.2*	Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.									
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
Kegiatan 1. Pendampingan dan Penangan Kasus	Terlaksannya Kegiatan Bedah Kasus	orang		180	180				159,975,200	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
Kegiatan 2. Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan	Terlaksannya Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan	orang		60	60				899,940,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
Kegiatan 3. Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	orang		1875	1875				367,581,500	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB	Tersedianya Anggaran Untuk Penguatan LPA Provinsi NTB	orang		250	250				411,386,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Program 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan											
Kegiatan 1. Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya Sosialisasi bagi Camat dan Dialog dengan TOGA, TOMA dan TODAT	orang		665	665				446,874,800	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Terlaksananya Kegiatan PATBM di Masyarakat di kabupaten/Kota	Desa		6	6				977,569,100	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun									
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.									
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.									
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate /ASFR</i>).									
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja											
Kegiatan 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya Rakor PUP, GEN & KESPRO dan Saresehan Duta Remaja/PIK-R / FOR	orang		370	370				1,454,389,960	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Sosialisasi PUP ke Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi PUP di Sekolah	orang		7500	7500				1,865,780,200	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pengembangan Metode DW pada beberapa Kelompok Masyarakat	Terlaksannya Rakor Pencapaian Indikator Kinerja PUP	orang		100	100				475,622,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)											
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya Gedung Baru SMA	Paket		2	2				33,920,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	ruang/ paket		58	58				41,300,154,600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan Ruang Guru Sekolah	Terbangunnya Ruang Guru Sekolah	Paket		1	1				1,168,120,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang laboratorium dan ruang	Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	ruang/ paket		27	27				22,187,920,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pembangunan perpustakaan sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	Paket		4	4				100,018,547,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)											
Kegiatan 1. Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya gedung baru SMK	unit		1	1				2,120,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang/ paket		61	61				38,476,779,728	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	ruang/ paket		133	133				94,116,500,272	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa	Paket		10	10				69,126,034,400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya bangunan sekolah yang baik	Paket		10	10				5,300,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	Paket		5	5				2,544,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Program 3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)											
Kegiatan 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)	Tahun		1	1				431,157,283,240	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah									
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan											
Kegiatan 1. Kegiatan pendidldkan dan pelatihan penlngkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terlaksanya Pendidikan Politik bagi Perempuan	orang		60	60				298,920,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksannya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan	orang		400	400				649,780,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Temu PUSPA Daerah	Terlaksananya Kegiatan Temu PUSPA Daerah	orang		60	60				225,059,200	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkaithubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.									
	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).									
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Keluarga Berencana											
Kegiatan 1. Pelayanan KIE	Tersusunnya Media KIE	dokumen		1	1				292,030,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan									
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan									
PEMERINTAH											
Program 1. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pertemuan Berkala Tim UPG	Terlaksannya Pertemuan Pokja PUG dan Pendampingan Tekhnis PPRG	orang		530	530				472,760,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Program 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
Kegiatan 1. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersusunnya Dokumen Data KTP/KTA dan Data Gender	dokumen		2	2				236,120,300	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Tujuan 6											
INDIKATOR SDGs :	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.									
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.									
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan									
PEMERINTAH											
Program 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah											
Kegiatan 1 : Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	97,849,358,960	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum	dokumen	10	2	3	4	5	6	36,630,600,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Program 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1 : Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Frekuensi Pemantauan Kualitas Air Bersih	Kali	1	4	4	4	4	4	2,707,670,000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB
Kegiatan 2 : Sarana Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Frekuensi Pemantauan Tempat-tempat umum	Kali	1	4	4	4	4	4	1,334,462,000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.										
PEMERINTAH												
Program 1												
Nama Kegiatan 1	Indikator 1											
	Indikator 2											
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.										
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
	6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.										
PEMERINTAH												
Program 1 : Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah												
Kegiatan 1 : Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah	lokasi	350	50	50	50	50	50	122,102,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	
Kegiatan 2 : Perencanaan prasarana dan sarana air limbah	Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air limbah	dokumen	3	3	3	3	3	3	18,315,300,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	
Program 2 : Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)												
Kegiatan 1. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary	Paket		20	20				4,240,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB	
Program 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat												
Kegiatan 1 : Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Frekuensi Pemantauan Kualitas Air Bersih	Kali	1	4	4	4	4	4	2,707,670,000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB	
Kegiatan 2 : Sarana Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Frekuensi Pemantauan Tempat-tempat umum	Kali	1	4	4	4	4	4	1,334,462,000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB	
Program 4. Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar												
Kegiatan 1 : Peningkatan penggunaan jamban keluarga	pembangunan jamban keluarga miskin	unit	0	4000	4000	4000	4000	4000	32,783,892,000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB/Dinas PUPR Provinsi NTB	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 2 : peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat		Kali	2	4	4	4	4	4	1,256,797,000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB	
INDIKATOR SDGs :		6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).									
PEMERINTAH												
Program 1												
Nama Kegiatan 1		Indikator 1										
		Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :		6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.									
PEMERINTAH												
Program 1 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah												
Kegiatan 1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah		Tersedianya dokumen pengawasan pemanfaatan air tanah	dokumen	1	1				354,888,000	APBD	Dinas ESDM Provinsi NTB	
		Terkendalinya perizinan pemanfaatan air tanah	Tahun	1	1				1,842,280,000	APBD	Balai ESDM Wilayah Sumbawa	
INDIKATOR SDGs :		6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.									
PEMERINTAH												
Program 1 : Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya												
Kegiatan 1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi		Jumlah Daerah Irigasi yang direncanakan	DI	4	5	5	5	5	27,472,950,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	
Kegiatan 2. Pembangunan jaringan irigasi		Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi	Km	1500	54,250	54,250	54,250	54,250	879,134,400,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	
Kegiatan 3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi		OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan	Km	41.43	80.94	93.08	107.04	123.09	141.56	192,310,650,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 4. Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi		Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air	dokumen	3	3	3	3	3	7,631,375,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	
Program 2 : Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya												

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Kapasitas tampung air baku yang terpenuhi	M ³	1000	1,000	1100	1210	1331	1464.1	161,178,515,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Perencanaan Embung, Cek Dam dan Bangunan Penampung Lainnya	Tersusunnya lap perencanaan / DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya	dokumen	2	5	5	5	5	5	16,178,515,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah bendungan dan embung yang dipelihara rutin	Buah	200	223	223	223	223	225	199,636,770,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung											
Kegiatan 1. Penyelenggaraan RHL, Reklamasi Hutan, Perhutanan Sosial dan Perencanaan DAS	Pulihnya kesehatan DAS Prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW	RPDAST	1	1	1	1	1	1	1,500,000,000	APBN	BPDASHL DMY
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya											
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi	Jumlah jaringan hidrologi yang dioperasikan optimal	Pos	28	40	40	40	40	40	6,489,721,300	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya											
Kegiatan 1. Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah pos Hidrologi yang di <i>updating</i> , publikasi dan validasi data hidrologi	Pos	50	70	70	70	70	70	4,334,621,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan									
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan 1. Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang terpelihara	DAS	2 (DAS Moyo dan DAS Dodokan)	2	2	2	2	2	7,864,131,050	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	4,499,174,202	APBD	Balai KPH Orong Telu Brang Beh
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1,674,970,816	APBD	Balai KPH Ropang
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Sari)	1 (DAS Sari)	1 (DAS Sari)	1 (DAS Sari)	1 (DAS Sari)	5,608,297,488	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
Program 2. Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem											
Kegiatan 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Tahun	1	1	1	1	1	1	17,048,555,243	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
		Ha	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	4,589,483,284	APBD	Balai Taman Hutan Raya Nuraksa
		Ha	78,148	78,148	78,148	78,148	78,148	78,148	16,264,169,553	APBD	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
		Ha	37,589	37,589	37,589	37,589	37,589	37,589	12,735,259,357	APBD	Balai KPH Rinjani Timur
		Ha	121,512	121,512	121,512	121,512	121,512	121,512	7,191,832,220	APBD	Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea
		Ha	78,078	78,078	78,078	78,078	78,078	78,078	7,238,365,293	APBD	Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
		Ha	73,369	73,369	73,369	73,369	73,369	73,369	5,731,648,591	APBD	Balai KPH Ropang
		Ha	120,540	120,540	120,540	120,540	120,540	120,540	7,989,577,701	APBD	Balai KPH Orong Telu Brang Beh
	Ha	67,406	67,406	67,406	67,406	67,406	67,406	7,752,713,863	APBD	Balai KPH Ampang Plampang	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
		Ha	88,129	88,129	88,129	88,129	88,129	88,129	9,545,323,850	APBD	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi
		Ha	57,181	57,181	57,181	57,181	57,181	57,181	8,958,349,011	APBD	Balai KPH Tambora
		Ha	96,607	96,607	96,607	96,607	96,607	96,607	7,301,592,761	APBD	Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
		Ha	70,651	70,651	70,651	70,651	70,651	70,651	10,727,393,312	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
Kegiatan 2. Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Jumlah Stock karbon di HP, HL dan Tahura	Titik	550	550	550	550	550	550	1,984,157,500	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Perlindungan Flora dan Fauna	Kegiatan		1	1	1	1	1	750,000,000	APBD	Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea
	Penyuluhan dalam rangka perlindungan dan konservasi alam kepada masyarakat	Kegiatan		2	2	2	2	2	3,400,858,776	APBD	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
	Pembuatan plot flora lokal	Ha		10	10	10	10	10	10,572,134,514	APBD	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi
	upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna	Kegiatan		2	2	2	2	2	253,361,650	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
	Upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna	Kegiatan		2	2	2	2	2	281,463,425	APBD	Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
Program 2. Program Pengelolaan Hutan											
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kehutanan	Pengembangan Core Business KPH melalui Pengembangan HHK, HHBK dan Jasa	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	17,332,095,471	APBD	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (KPH Rinjani)	Jenis		3	3	3	3	3	4,760,905,170	APBD	KPH Rinjani Timur
	Pemanfaatan HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	7,157,349,994	APBD	KPH Sejorong Mataiyang Brangrea
	Pembangunan usaha HHBK kemiri, rotan, dan bambu, dan usaha pengelolaan jasa lingkungan (air, ekowisata)	Kegiatan	0	2	2	2	2	2	4,457,349,994	APBD	KPH Puncak Ngengas Batulanteh
	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif (KPHP)	Kegiatan	3	3	2	3	2	3			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Pengembangan Core Business KPH melalui Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	11,012,111,366	APBD	KPH Ropang
Pemberdayaan masyarakat setempat melalui skema Kemitraan Kehutanan (KPH	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	9,197,620,090	APBD	KPH Ampang Riwo Soromandi
Pembangunan Kelas HHK (jabon putih) dan HHBK (kemiri, empon-empon, dan madu) (KPHL Toffo Pajo)	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	2,774,816,791	APBD	KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
Operasionalisasi kelas perusahaan HHK (Jati dan Mahoni) dan Pembangunan Kelas Perusahaan HHBK Kemiri (KPHP Madapangga	Kegiatan	2	2	2	2	2	2			
Pengembangan Core Business KPH melalui Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5,699,313,539	APBD	KPH Maria Donggomassa
Kegiatan 2. Perencanaan dan Tata Hutan	kegiatan	2	2	2	2	2	2	1,935,867,380	APBD	KPH Ampang Riwo Soromandi
Penataan wilayah kerja KPHL Ampang Riwo Soromandi	kegiatan	2	2	2	2	2	2	940,029,720	APBD	KPH Puncak Ngengas Batulanteh
Pemantapan kawasan dan areal kerja (KPHL Puncak Ngengas)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2			
Penataan batas (KPHP Bantulanteh)	Kegiatan	6	6	5	6	5	6	239,977,439	APBD	KPH Sejorong Mataiyang Brangrea
Penataan kawasan hutan (KPH Sejorong Mataiyang Brang	Kegiatan	4	4	4	4	4	2			
Penataan Kawasan dan Area Kerja (KPH Maria	Kegiatan	1	3	3	3	3	3	706,054,815	APBD	KPH Maria Donggomassa
Penataan Kawasan Hutan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1,800,766,401	APBD	KPH Orong Telu Brang Beh
Penataan wilayah kerja KPHL Ropang	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	1,619,280,093	APBD	KPH Ropang
Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja (KPHL Toffo	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1,061,890,569	APBD	KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja (KPHP	Kegiatan	4	4	2	3	3	3			
Pemantapan kawasan hutan (KPH Rinjani Barat)	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	3,510,432,500	APBD	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
	Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja (KPHL Tastura)	Kegiatan	2	1	1	1	1	1			
	Penataan Kawasan Hutan (KPHL Rinjani Timur)	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	868,526,789	APBD	KPH Rinjani Timur
Kegiatan 3. Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi		15	15	15	15	15	2,661,635,563	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	8,964,118,330	APBD	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	362,642,940	APBD	KPH Tambora
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	1,174,621,240	APBD	KPH Maria Donggomassa
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	340,425,260	APBD	KPH Rinjani Timur
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	239,139,820	APBD	KPH Sejong Mataiyang Brangrea
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	521,570,903	APBD	KPH ampang plampang
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	894,040,002	APBD	KPH Orong Telu Brang Beh
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	376,884,917	APBD	KPH Ropang
	Terciptanya peredaran HHK dan HHBK yang tertib	lokasi	1	1	1	1	1	1	2,117,816,454	APBD	KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
PEMERINTAH											
Program 1. Program Rehabilitasi, kerjasama dan perhutanan sosial											
Kegiatan 1. Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang terpelihara	DAS	2 (DAS Moyo dan DAS)	2	2	2	2	2	7,864,131,050	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Moyo)	4,499,174,202	APBD	Balai KPH Orong Telu Brang Beh				
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Moyo)	1,674,970,816	APBD	Balai KPH Ropang				
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Sari)	5,608,297,488	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa				
Kegiatan 2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	DAS Moyo		1	1	1	1	1	12,335,400,000	APBD & APBN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB/BPDASHL DMY
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung											
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	DAS		5	5	5	5	5	Belum ditentukan karena belum melakukan pembahasan renstra 2018-2023	APBN	BPDASHL DMY
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.									
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.									
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.									
PEMERINTAH											
Program 1. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan											
Kegiatan 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kegiatan		1	1	1	1	1	1,536,712,888	APBD Dinas LH KSB	Dinas LHK / Dinas LH Kab. Sumbawa Barat sebagai pelaksana kegiatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.										
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.										
PEMERINTAH												
Program 1.												
Kegiatan 1. Rehabilitasi Sempadan Danau				1	1	1	1	1	Belum ditentukan karena belum melakukan pembahasan renstra 2018-2023	APBN, APBD Kab. Sumbawa Barat	BKSDA NTB, Pemda KSB, dan BWS	
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
PEMERINTAH												
Program 1. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung												
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan di hulu DAS, 15 DAS Prioritas dan KPH	Ha		6000	6000	6000	6000	6000	Belum ditentukan karena belum melakukan pembahasan renstra 2018-2023	APBN	BPDASHL DMY	
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.										
PEMERINTAH												
Program 1. Rehabilitasi, kerjasama dan perhutanan sosial												
Kegiatan 1 Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang terpelihara	DAS	2 (DAS Moyo dan DAS Dodokan)	2	2	2	2	2	7,864,131,050	APBD	Dinas LHK	
Tujuan 7												
INDIKATOR SDGs :	7.1.1*	Rasio elektrifikasi										
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita										
PEMERINTAH												
Program 1 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan												

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan	dokumen		1	1				365,909,880	APBD	Dinas ESDM Prov. NTB
Kegiatan 2. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	RTS		2500	2500				17,569,203,200	APBD	Dinas ESDM Prov. NTB
Kegiatan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya database perusahaan ketenagalistrikan	dokumen		1	1				183,865,268	APBD	Dinas ESDM Prov. NTB
Tujuan 8											
INDIKATOR SDGs :	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita									
	8.1.1. (a)	PDB per kapita									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin									
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal									
PEMERINTAH											
Program 1 : Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja											
Kegiatan 1. Terapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TIG yang dibuat	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	12,712,364,011	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Orang	200	200	200	200	200	200	13,829,922,103	APBD	Disnakertran

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Padat Karya Produktif	Terlaksananya Padat Karya Produktif	Lokasi	10	10	10	10	10	10	20,294,790,762	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Pemberdayaan Tanaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Orang	200	200	200	200	200	200	21,254,917,860	APBD	Disnakertran
Kegiatan 5. Layanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya pelayanan Pekerja Migran Indonesia melalui Layanan Terpadu Satu	Orang	2400 (2018)	2400	2400	2400	2400	2400	2,620,394,391	APBD	Disnakertran
Kegiatan 6. Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Perizinan Tenaga Kerja Asing	Orang	300 (2018)	300	300	300	300	300	1,037,867,000	APBD	Disnakertran
Kegiatan 7. Informasi Pasar Kerja (Job Fair)	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (Job fair)	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	12,655,756,303	APBD	Disnakertran
Kegiatan 8. Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Terlaksananya Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Orang	750	750	750	750	750	750	4,047,116,578	APBD	Disnakertran
Program 2 : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja											
Kegiatan 1. Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas	Orang	50	50	50	50	50	50	1,316,868,238	APBD	Disnakertran
INDIKATOR SDGs :	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
Kegiatan 1. Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	Naskah	14	14	14	14	14	14	912,319,892	APBD	Disnakertran
INDIKATOR SDGs :	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.									
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran									
PEMERINTAH											
Program 1 : Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Terapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG yang dibuat	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	12,712,364,011	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Orang	200	200	200	200	200	200	13,829,922,103	APBD	Disnakertran
Kegiatan 3. Padat Karya Produktif	Terlaksananya Padat Karya Produktif	Lokasi	10	10	10	10	10	10	20,294,790,762	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Orang	200	200	200	200	200	200	21,254,917,860	APBD	Disnakertran
Kegiatan 5. Layanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya pelayanan Pekerja Migran Indonesia melalui Layanan Terpadu Satu	Orang	2400 (2018)	2400	2400	2400	2400	2400	2,620,394,391	APBD	Disnakertran
Kegiatan 6. Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Perizinan Tenaga Kerja Asing	Orang	300 (2018)	300	300	300	300	300	1,037,867,000	APBD	Disnakertran
Kegiatan 7. Informasi Pasar Kerja (Job Fair)	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (Job fair)	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	12,655,756,303	APBD	Disnakertran
Kegiatan 8. Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Terlaksananya Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Orang	750	750	750	750	750	750	4,047,116,578	APBD	Disnakertran
Program 2 : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja											
Kegiatan 1. Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	orang	350	350	350	350	350	350	457,882,500	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri	Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri	orang	65	65	65	65	65	65	4,055,332,822	APBD	Disnakertran
Kegiatan 3. Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri	Terlaksananya program pelatihan dasar luar negeri	orang	200	200	200	200	200	200	842,503,800	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Terlaksananya Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja	orang	200	200	200	200	200	200	1,029,012,773	APBD	Disnakertran

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5. Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas	orang	50	50	50	50	50	50	1,316,868,238	APBD	Disnakertran
Kegiatan 6. Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC)	Terlaksananya Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC)	orang	100	100	100	100	100	100	610,510,000	APBD	Disnakertran
INDIKATOR SDGs :		8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)								
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja											
Kegiatan 1. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)	Lembaga	45	45	46	47	48	49	1,068,429,741	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	Lembaga	100	100	100	100	100	100	723,228,461	APBD	Disnakertran
Kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Orang	20	20	20	20	20	20	1,134,785,463	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Instansi	10	10	10	10	10	10	335,780,500	APBD	Disnakertran
Kegiatan 5. Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Orang	272	272	272	272	272	272	8,589,945,280	APBD	Balai Latihan Kerja NTB
Kegiatan 6. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12	8,264,838,955	APBD	Balai Latihan Kerja NTB
Program 2. Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi											
Kegiatan 1. Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya peningkatan dan pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	orang		30	30				190,104,322	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
Kegiatan 2. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP)	orang		60	60				332,485,854	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)	orang		160	160				494,671,896	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
Kegiatan 4. Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	orang		30	30				209,045,886	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
Kegiatan 5. Pelatihan Ternak Unggas	Terlaksananya Pelatihan Ternak Unggas	orang		30	30				181,182,620	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs :	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran									
	8.8.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3									
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Pengawasan Ketenagakerjaan											
Kegiatan 1. Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Norma K3	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Sumberdaya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalam Rangka Bulan K3	Perusahaan	200	200	200	200	200	200	200,000,000	APBD	Disnakertrans NTB
Kegiatan 2. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Perusahaan	50	20	20	20	20	20	340,000,000	APBD	Disnakertrans NTB
Kegiatan 3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	Perusahaan	50	20	20	20	20	20	220,000,000	APBD	Disnakertrans NTB
Kegiatan 4. Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI	Provinsi	4	2	3	3	3	3	180,000,000	APBD	Disnakertrans NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5. Pembinaan dan Pengawasan sarana keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB	Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Perusahaan Rokok dan Tembakau	Perusahaan	25	25	25	25	25	25	220,000,000	APBD	Disnakertrans NTB
Kegiatan 6. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Rokok dan Tembakau	Perusahaan	25	25	25	25	25	25	400,000,000	APBD	Disnakertrans NTB
Kegiatan 7. Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan	100	100	100	100	100	100	349,444,324	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 8. Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan norma kerja di perusahaan	Perusahaan	80	80	80	80	80	80	351,986,383	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 9. Pemeriksaan dan Pengujian K3	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian	Perusahaan	35	35	35	35	35	35	403,418,903	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 10. Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	Terlaksananya penanganan kasus ketenagakerjaan	Kasus	55	55	55	55	55	55	257,278,072	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 11. Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan	Terlaksananya Pemeriksaan CTKI ke Penampungan	Lokasi	3	3	3	3	3	3	281,716,787	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 12. Pengurangan Pekerja Anak	Terlaksananya Pengurangan Pekerja Anak	Anak	520	520	520	520	520	520	2,639,847,682	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 13. Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	orang	30	30	30	30	30	30	328,997,734	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Kegiatan 13.a. Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan	Perusahaan	150	150	150	150	150	150	282,751,601	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 14. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Perusahaan	60	60	60	60	60	60	122,982,355	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
Kegiatan 15. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma K3	Perusahaan	50	50	50	50	50	50	122,982,355	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
Kegiatan 16. Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau sumbawa	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dan pengujian K3 pada perusahaan di Pulau Sumbawa	Perusahaan	25	25	25	25	25	25	94,898,895	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
Kegiatan 17. Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa	Terlaksananya Pengawasan norma kerja pada perusahaan di Pulau Sumbawa	Bulan	12	12	12	12	12	12	92,456,855	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
Kegiatan 18. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Tersedianya dana untuk penanganan kasus Tipiring	Kasus	10	10	10	10	10	10	117,317,433	APBD	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
INDIKATOR SDGs :	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara									
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata											
Kegiatan 1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	jumlah event jaringan kerjasama serta media informasi	Media		10	10				12,960,620,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	jumlah event promosi yang dilaksanakan	event		10	10				25,661,889,800	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pengembangan statistik wisata terpadu	jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata	buku		2	2				1,261,400,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata											
Kegiatan 1. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	jumlah produk pariwisata	Jenis		10	10				127,730,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota	jumlah destinasi pariwisata di 10 kab/kota	desa wisata		50	50				93,879,792,520	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembinaan dan Pemanjanaan Kawasan Pariwisata	jumlah kawasan strategis pariwisata	SKPD		11	11				8,893,347,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengawasan, Standarisasi, dan Sosialisasi Usaha pariwisata	jumlah buku pedoman standarisasi	buku		4	4				488,130,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 3. Program Pengembangan Kemitraan											
Kegiatan 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	jumlah pelaku wisata yang dilatih	orang		200	200				2,783,348,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya	jumlah pokdarwis/kelembagaan pariwisata yang diberikan	pokdarwis		12	12				2,981,356,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 4. Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata											
Kegiatan 1. Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata	jumlah standar atraksi dan daya tarik wisata	standar		5	5				3,084,260,800	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Fasilitas Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata	jumlah event atraksi wisata yang tersedia	event		240	240				14,235,694,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif	jumlah fasilitas ukm yang tersedia serta dukungan industri kreatif dalam event pariwisata	lokasi		10	10				4,911,828,000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
Tujuan 9											
INDIKATOR SDGs :	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi									
PEMERINTAH											
Program 1 : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan											
Kegiatan 1. Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi	Dokumen	16	4	4	4	4	4	20,452,085,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan provinsi	Km	40	49.5	54.45	59.9	65.88	72.47	1,343,122,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 3. Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersusunnya rencana pembangunan jembatan	Dokumen	16	4	4	4	4	4	6,105,100,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4. Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan	Meter	400	110	121	133.1	146.41	161.05	189,258,100,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Program 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan											
Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Meter	4134.4 (2018)	4597.84	5057.62	5563.39	6119.73	6731.7	27,881,991,700	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi	Km	100 (2018)	100	110	121	133.1	146.41	732,612,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	Km	733.10 (2018)	1808.21	1989.03	2187.93	2406.72	2647.39	180,863,587,500	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pemeliharaan rutin jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan, Berfungsinya jalan provinsi secara optimal, Dipertahankannya kemantapan jalan provinsi, Meningkatnya efektifitas dan efisien UPTD Balai Pemeliharaan Jalan	Km		416.55	416.55				65,520,376,560	APBD	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan rutin jalan	Tahun		1	1				44,876,327,480	APBD	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
Program 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan											
Kegiatan 1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	915,765,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	641,035,500	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	9.1.2.(a)	Jumlah bandara									
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan									
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dokumen		6	6				20,778,982,416	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB	
INDIKATOR SDGs :		9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis									
PEMERINTAH												
Program 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan												
Kegiatan 1. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut		Tersedianya Fasilitas Pelabuhan	pelabuhan	1	1				84,836,385,560	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB	
Program 2. Program Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Darat/Terminal												
Kegiatan 1. Peningkatan/pengembangan Kepelabuhanan di NTB		Tersusunnya Database Kepelabuhanan	Dokumen	1	1				112,553,768	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB	
INDIKATOR SDGs :		9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita									
INDIKATOR SDGs :		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur									
PEMERINTAH												
Program 1												
Nama Kegiatan 1		Indikator 1										
		Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :		9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur									
PEMERINTAH												
Program 1												
Nama Kegiatan 1		Indikator 1										
		Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri									
PEMERINTAH												
Program 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi												
Kegiatan 1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri		Jumlah IKM Ilmate yang terfasilitasi dalam pengembangan sistem inovasi teknologi industri	IKM	24	70	100	120	140	140	3,938,975,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM ilmate yang terfasilitasi dalam pengembangan industri	IKM	40	140	150	170	190	190	4,105,475,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah											
Kegiatan 1. Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang terlatih dalam pemanfaatan sumber daya	IKM	64	60	60	80	80	100	1,894,225,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam memperkuat jaringan kluster industri	IKM	156	140	200	240	240	240	8,210,645,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan	Jumlah IKM yang produknya tersertifikasi halal dan teruji mutu produk unggulan	IKM	30	130	145	160	175	190	3,610,382,500	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI	Jumlah IKM yang produknya terdaftar dan terlindungi HKI, sertifikasi SNI	IKM	106	248	250	250	250	250	3,889,650,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pembinaan Legalitas Usaha IKM (HKI, SNI, HKI, PIRT, dan Halal)	Jumlah IKM terbina legalitas usaha (HKI, SNI, PIRT, dan Halal)	IKM		400	400	400	400	400	2,793,083,250	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 6. Pelatihan IKM berbahan Baku Produk Unggulan	Jumlah IKM yang terlatih dalam mengembangkan bahan baku produk unggulan	IKM		40	80	80	80	80	2,437,348,100	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 7. Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah IKM yang terlatih dalam pengolahan hasil perkebunan	IKM		130	150	150	150	150	6,755,625,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri											
Kegiatan 1. Kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerima bantuan peralatan dan mesin	IKM	352	340	350	360	370	380	33,853,250,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan kemasan (packaging) produk IKM olahan	Jumlah IKM olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)	IKM	20	20	25	30	35	40	1,125,000,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM logam dan mesin yang terfasilitasi SNI	IKM		48	48	50	50	55	2,365,195,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial											
Kegiatan 1. Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kreatif	Jumlah IKM yang terlatih dalam diverifikasi produk unggulan industri kreatif	IKM	20	60	60	60	60	60	2,497,775,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan	Jumlah IKM kerajinan yang terlatih dalam meningkatkan mutu dan desain produk unggulan	IKM	20	60	80	80	80	80	2,454,825,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penyeragaman dokumen program perindustrian	Jumlah dokumen penyeragaman program perindustrian	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2,630,350,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 4. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah event promosi produk IKM yang ditingkatkan	Event	4	4	5	6	6	7	1,723,125,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 5. Penyediaan informasi strategi pembangunan sektor perindustrian	Jumlah dokumen data dan informasi sektor perindustrian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,346,000,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 5. Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian											
Kegiatan 1. Penyeragaman Dokumen Program Perindustrian	terlaksananya kegiatan penyeragaman dokumen program perindustrian	Dokumen		1	1				1,399,942,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	terlaksananya desain dan diversifikasi produk unggulan industri kerajinan	Event		4	4				294,945,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian	tersedianya informasi strategis pembangunan daerah	Dokumen		1	1				415,520,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 6. Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP (One Village One Product)											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP	Jumlah IKM OVOP yang ditingkatkan mutu produknya	IKM	20	40	60	60	80	80	1,579,550,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Desain Produk Berbasis OVOP	Jumlah IKM OVOP ditingkatkan desain produknya	IKM	20	40	60	60	80	80	1,645,550,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 7. Program peningkatan pengelolaan rumah kemasan											
Kegiatan 1. Operasional rumah kemasan	Jumlah operator dan mesin dalam operasional rumah	Jenis	2	2	2	2	2	2	3,239,300,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Bantuan kemasan bagi olahan pangan	Jumlah IKM penerima bantuan kemasan bagi olahan pangan	IKM	100	200	225	250	275	300	4,375,825,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Program 8. Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah											
Kegiatan 1. Penguatan mutu produk unggulan olahan pangan	Jumlah IKM dalam penguatan mutu produk olahan pangan	IKM		80	120	120	120	120	569,230,500	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan mutu kemasan produk olahan pangan	Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu kemasan	IKM	20	100	125	150	175	200	2,849,000,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pendampingan peningkatan mutu kemasan produk unggulan daerah	Jumlah IKM peningkatan mutu kemasan produk unggulan daerah	IKM	20	30	40	50	60	70	1,070,650,000	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .									
	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
	9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan e-Government											
Kegiatan 1. Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center	Persentase Pemenuhan Standar Teknis Data Center dan Data Recovery Center	%		70	70				2,472,884,600	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Kegiatan 2. Pengembangan infrastruktur jaringan intra pemerintah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	OPD		20	20				4,387,632,562	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Kegiatan 3. Penguatan Kelembagaan Tata Kelola TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Koordinasi Komite E-Gov	Dokumen		2	2				987,432,400	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Kegiatan 4. Pembinaan dan Pengendalian Tata kelola TIK	Jumlah OPD yang terbina	OPD		10	10				938,174,200	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Kegiatan 5. Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi TIK	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi		5	5				794,974,560	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Kegiatan 6. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan dan Publik	Jumlah Aplikasi yang terhubung ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi		10	10				493,298,560	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Tujuan 10											
INDIKATOR SDGs :	10.1.1*	Koefisien Gini									
INDIKATOR SDGs :	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan											
Kegiatan 1. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	RTS		2500	2500				17,569,203,200	APBD	Dinas ESDM Prov. NTB
Program 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat	Kab/Kota		10	10	10	10	10	283,887,150,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Program 3. Program Pengembangan Perumahan											
Kegiatan 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan rumah layak huni di Provinsi NTB	Unit	1083	3500	3500	3500	3500	3500	525,000,000	APBD	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
Program 4. Program Pengembangan Permukiman											
Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Kualitasnya	%		4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	50,000,000,000	APBD	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
Program 5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
Kegiatan 1. Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia dan BHP Mata Untuk Operasi dan Evaluasi Hasil Refraksi Luar Gedung	Tahun		1	1				10,457,059,000	APBD	Rumah Sakit Mata Mataram
Program 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan 1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani	orang		500	500				8,056,000,000	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Program 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya											
Kegiatan 1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya	Jiwa		200	300	300	500	600	8,261,726,575	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan dan pendampingan berusaha dalam	KK		250	350	450	550	650	15,571,975,315	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pemberdayaan warga miskin melalui bantuan peralatan usaha untuk menunjang keterampilan yang	KK		250	350	450	550	650	24,801,968,750	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pemberdayaan fakir miskin	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui penguatan ekonomi mikro dengan bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama	Kelompok		250	350	450	550	650	257,784,794,950	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pemberdayaan KAT	Terlaksananya pemberdayaan warga miskin KAT dengan penguatan ekonomi keluarga yang berbasis usaha melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan sarana/prasarana	Lokasi		2	2	2	2	2	10,491,309,095	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
Kegiatan 1. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat)	Terselenggaranya pembinaan kesos bagi anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelenggaraan event nasional bagi anak	orang		250	350	450	550	650	449,945,870	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pembinaan Lanjut Usia (LU)	Terselenggaranya pembinaan terhadap lanjut usia terlantar baik melalui LKS maupun luar LKS dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar	orang		100	200	300	400	500	326,012,340	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan	orang		200	300	400	500	600	3,536,073,920	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4. Peningkatan ketrampilan bagi PMKS	Meningkatnya keberfungsian sosial penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sarana usaha mikro dalam	orang		200	300	400	500	600	4,222,592,415	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 9. Program Jaminan Sosial											
Kegiatan 1. Jaminan sosial korban bencana alam	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana alam	Kab/Kota		10	10	10	10	10	328,305,089,600	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Jaminan sosial korban bencana sosial	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana sosial	Kab/Kota		10	10	10	10	10	202,821,982,000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3. Jaminan sosial keluarga	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial keluarga penerima manfaat dengan baik	orang		10000	10000	10000	10000	10000	305,016,901,100	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Program 10. Program Pembinaan Anak Terlantar											
Kegiatan 1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam balai	orang		140	140				3,141,341,800	APBD	Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
Program 11. Program Pembinaan Anak Terlantar											
Kegiatan 1. Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan formal 12 tahun dan informal bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak	orang		100	100				4,037,200,800	APBD	Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal									
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri									
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 1. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Adanya Pemanfaatan TTG Oleh Masyarakat	orang	30	30	30	30	30	30	1,221,020,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya alam dalam Pemanfaatan TTG	Kelompok Masyarakat yang Mampu Mengembangkan dan Merehabilitasi SDA di Daerah Pesisir	orang	60	30	30	30	30	30	1,831,530,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengembangan Wilayah Pesisir	Terbinanya Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya	orang	0	120	120	120	120	120	1,377,555,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 4. Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat pengelola sumber daya alam	Terbinanya Kelompok Masyarakat	Kelompok	0	10	10	10	10	10	357,539,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 5. Bimtek tenaga teknis dan masyarakat	Terlatihnya tenaga teknis masyarakat yang profesional	orang	0	40	40	40	40	40	893,848,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 6. Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa	Tersuluhnya masyarakat tentang teknologi tepat guna	orang	0	40	40	40	40	40	893,848,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 7. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Adanya lembaga adat di masyarakat perdesaan	Lembaga/ Adat	50	50	50	50	50	50	1,521,251,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 8. Gelar TTG Nasional	Temuan TTG	Jenis alat TTG	10	10	10	10	10	10	3,052,550,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 9. Penguatan kapasitas dan peningkatan sarana dan prasarana desa	Peningkatan sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelayanan di desa	desa	0	16	16	16	16	16	1,526,275,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 10. Bimtek bagi pengurus kelompok pengelola sumber daya alam	terlatihnya kelompok masyarakat	orang	0	40	40	40	40	40	893,848,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 11. Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA penyedia air sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	terlatihnya tenaga yang profesional	orang	0	50	50	50	50	50	1,221,020,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Program 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan											
Kegiatan 1. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen bumdes	orang		200	200				747,512,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	Tersedianya dukungan kegiatan PNPm-MPd yang berkesinambungan	Paket	0	1	1	1	1	1	819,551,720	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Bimtek pendamping desa	Terlatihnya Pendamping Desa yang Profesional dalam Mengembangkan Ekonomi Desa	orang	0	270	270	270	270	270	5,799,845,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 4. Rapat Koordinasi pendamping Desa	Tercapainya Sinergitas antara pemerintah dengan pendamping desa	orang	0	270	270	270	270	270	4,273,570,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 5. Penunjang program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)	Tersedianya dukungan kegiatan P3MD yang berkesinambungan	orang	0	50	50	50	50	50	1,678,903,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 6. Bimtek Pengurus BUMDes	Terlatihnya pengurus BUMDes yang berkesinambungan	orang	50	50	50	50	50	50	1,221,020,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 7. Rakor pengurus BUMDES	tercapainya sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa dalam pengelolaan BUMDES	dokumen	50	50	50	50	50	50	915,765,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 8. Pemberian bantuan permodalan bagi BUMDES	Tersedianya dukungan permodalan bagi BUMDes yang memadai	unit	33	30	30	30	30	30	15,000,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 9. Perlombaan desa dan kelurahan	Tersedianya data dan informasi keberhasilan pembangunan di Desa/Kel.	Desa/ Kelurahan	6	6	6	6	6	6	1,244,485,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 10. Kajian peningkatan kapasitas BUMDES	tersedianya dokumen kajian BUMDES dibidang usaha pertanian	dokumen	0	1	0	0	1	0	225,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 11. Penyusunan profil usaha ekonomi masyarakat perdesaan	tersedianya data profil usaha ekonomi masyarakat yang up to date	Dokumen	0	1	0	0	1	0	125,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 12. Ekspo hasil produksi kelompok usaha ekonomi masyarakat	tersebarluaskannya hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat	Paket	1	1	1	1	1	1	1,564,230,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 13. Bimtek kelompok usaha ekonomi masyarakat	Terlatihnya kelompok usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	orang	0	50	50	50	50	50	893,848,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 14. Monev usaha ekonomi masyarakat	Tersedianya dokumen hasil monev kegiatan usaha ekonomi masyarakat	Dokumen	0	1	1	1	1	1	2,747,295,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 15. Penguatan pengelola lembaga ekonomi desa	Tersedianya tenaga pengelola lembaga ekonomi desa yang memadai	orang	48	90	90	90	90	90	1,923,107,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Program 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Perlombaan desa dan kelurahan	Tersedianya data dan informasi keberhasilan pembangunan di Desa/Kel.	Desa/Kel Juara		6	6	6	6	6	5,189,335,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Terlaksananya Penguatan LPM dan Terdokumentasinya data LPM	Kab/Kota		10	10	10	10	10	4,578,825,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 3. Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Terlaksananya penancangan BBGRM	Kab/Kota		10	10	10	10	10	862,437,200	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 4. Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing	Tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat	Kabupaten		4	4	4	4	4	400,690,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 5. Penguatan kapasitas Lembaga Adat	Terlaksananya Penguatan Lembaga Adat Desa dan Terbentuknya Lembaga Adat Desa yang tertuang dlm Peraturan Desa	Kab/Kota		10	10	10	10	10	4,578,825,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 6. Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa	Tersosialisasinya Kaidah Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa , Teridentifikasinya Potensi Desa dan Tearwujudnya Fungsi Paralegal	Kab/Kota		10	10	10	10	10	984,447,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Program 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pekan inovasi perkembangan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pekan Inovasi perkembangan desa dan kelurahan	Kab/Kota		10	10	10	10	10	9,157,650,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 2. Bimbingan teknis Pembina teknis pemerintah Desa (PTPD)	Terlatihnya pembina teknis Pemerintah Desa (PTPD) dalam bidang manajemen pemdes	orang		208	208	208	208	208	4,444,513,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 3. Bimbingan teknis Tugas Pokok dan Fungsi BPD	Tersedianya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memahami tupoksinya	orang	80	105	105	105	105	105	2,235,077,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 4. Bimbingan teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Tersedianya Aparatur Pemerintahan Desa yang terampil dalam pengelolaan keuangan desa	orang	50	209	209	209	209	209	4,470,154,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 5. Bimbingan Teknis perangkat desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	tersedianya aparatur desa yang memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi	orang		100	100	100	100	100	2,136,785,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 6. Bimbingan Teknis perangkat Desa/Pelaksana Teknis Kewilayahan	Terlatihnya Perangkat Desa yang terampil dalam Pelaksanaan Teknis Kewilayahan	50	209	209	209	209	209		4,470,154,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Program 5. Program peningkatan peran perempuan diperdesaan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Revitalisasi posyandu	tersedianya pokjandal pesyandu kecamatan/kota/kabupaten yang kuat	Kab/Kota		10	10	10	10	10	2,442,040,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pembinaan kesejahteraan keluarga PKK	Gerakan PKK yang semakin profesional	Pokja		4	4	4	4	4	12,210,200,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas									
PEMERINTAH											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil									
PEMERINTAH											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB									
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan									
PEMERINTAH											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1										
INDIKATOR SDGs :	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan									
PEMERINTAH											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Tujuan 11											
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Perumahan											
Kegiatan 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Layak Huni	Unit	1083	3500	3500	3500	3500	3500	525,000,000,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyediaan dan pembangunan perumahan	Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Provinsi NTB	Dokumen/Unit		1	2	1	2	1	127,000,000,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Program Informasi Perumahan dan Permukiman	Aplikasi		1	1	1	1	1	2,451,673,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Kegiatan 4. Perencanaan Pembangunan Perumahan	Dokumen Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengembangan Perumahan Prov. NTB	dokumen		1	1	1	1	1	5,000,000,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Program 2. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial											
Kegiatan 1. Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Akibat Bencana	Terlaksananya fasilitasi pembangunan rumah terdampak bencana	%	20 (2018)	100	100	100	100	100	2,500,000,000,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Program 3. Program Pengembangan Permukiman											
Kegiatan 1. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB	Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB	dokumen		1	1	1	1	1	8,273,395,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh	dokumen		5	5	5	5	5	5,014,250,000	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Kualitasnya	%		4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	50,000,000,000	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).									
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Perencanaan Tata Ruang											
Kegiatan 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang	KSP		2	2	2	2	2	9,462,405,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1,587,326,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Program 2. Program Pemanfaatan Ruang											
Kegiatan 1. Survey dan Pemetaan	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)	KSP	1	2	2	2	2	2	2,136,785,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pemahaman masyarakat dalam hal Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,276,071,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3,022,024,500	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.2.1.(a)	Persentase pengguna modal transportasi umum di perkotaan.									
PEMERINTAH											
Program 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
Kegiatan 1. Pembangunan prasarana perhubungan darat	Halte BRT yang dibangun	Halte		5	5				9,882,249,408	APBD	Dishub Provinsi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perhubungan	dokumen		6	6				20,798,982,416	APBD	Dishub Provinsi
Kegiatan 3. Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal	Tersedianya Fasilitas Terminal	dokumen		1	1				1,285,043,300	APBD	Dishub Provinsi
Program 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas											
Kegiatan 1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Terpasangnya fasilitas keselamatan	Jenis		10	10				23,453,250,480	APBD	Dishub Provinsi
Program 3. Program Peningkatan Manajemen Transportasi											
Kegiatan 1. Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Terlaksanannya Evaluasi & Rekomendasi andalalin	dokumen		10	10				483,360,000	APBD	Dishub Provinsi
Kegiatan 2. Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan	Terpilihnya kab/Kota Tertib Lalu lintas	Kab/Kota		10	10				78,828,384	APBD	Dishub Provinsi
Kegiatan 3. Evaluasi Sistem Transportasi ASDP	Terlaksanannya Operasional Transportasi ASDP	dokumen		1	1				6,472,665,280	APBD	Dishub Provinsi
Kegiatan 4. Peningkatan SDM Transportasi	Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti Pendidikan	Orang		20	20				119,777,800	APBD	Dishub Provinsi
INDIKATOR SDGs :	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.									
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).									
	11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.									
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.										
PEMERINTAH												
Program 1												
Nama Kegiatan 1	Indikator 1											
	Indikator 2											
INDIKATOR SDGs :	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).										
PEMERINTAH												
Program 1.												
Kegiatan 1.												BPBD Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
PEMERINTAH												
Program 1. Program Siaga Darurat Bencana												
Kegiatan 1. Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Siaga Bencana	Kegiatan		40	40	40	40	40	12,210,200,000	APBD	BPBD Provinsi NTB	
Kegiatan 2. Penanganan Siaga Darurat Bencana	Tertanganinya Penanggulangan Bencana pada Tahap Siaga Darurat	Lokasi		10	10	10	10	10	91,576,500,000	APBD	BPBD Provinsi NTB	
Kegiatan 3. Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan peserta gladi penanggulangan bencana	Kegiatan		2	2	2	2	2	2,442,040,000	APBD	BPBD Provinsi NTB	
Program 2. Program Tanggap Darurat Bencana												
Kegiatan 1. Penanganan korban Masa Tanggap Darurat	Tertanganinya Korban Bencana	Orang		2500	2500	2500	2500	2500	15,262,750,000	APBD	BPBD Provinsi NTB	
Program 3. Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana												

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar	Terlatihnya Pemuda dan Pelajar Tanggap Darurat Bencana	Orang		400	400	400	400	400	1,221,020,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Dokumen Hasil Pemantauan	dokumen		1	1	1	1	1	3,052,550,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana	Tersedianya Pelatihan Bagi aparat	Orang		55	55	55	55	55	1,831,530,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.									
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana											
Kegiatan 1. Jambore Desa Tangguh Bencana Provinsi NTB (Destana)	Jambore Desa Tangguh Bencana Provinsi NTB	Orang		300	300	300	300	300	3,052,550,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pendampingan bagi masyarakat dalam upaya PRB di Provinsi NTB	Berkurangnya Desa Rawan Kekeringan	Orang		70	70	70	70	70	85,471,400,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penilaian Kinerja Desa tangguh Bencana	Terlaksananya Penilaian Indikator Desa Tangguh Bencana	Orang		10	10	10	10	10	1,831,530,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 4. Gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur dan Peserta Gladi PB	Orang		2	2	2	2	2	2,442,040,000	APBD	BPBD Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah TPA Regional yang terbangun	unit	0	1	1	1	1	1	173,528,955,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 2. Kerjasama pengelolaan persampahan	jumlah mitra dalam pengelolaan sampah	mitra	0	2	2	2	2	2	15,200,000,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah bank sampah yang terbentuk	bank sampah	4	75	105	105	105	110	18,500,000,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.									
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Terbentuknya tentang penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Paket		1	1				397,500,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Program 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam											
Kegiatan 1. Penyusunan Rencana Kontijensi di KEK Mandalika, Global Hub, Samota	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen		3	3	3	3	3	9,157,650,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Tujuan 12											
INDIKATOR SDGs :	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwinsprogram</i> .									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.									
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
Kegiatan 1. Pengkajian Dampak Lingkungan	Tersedianya data dunia usaha yang memiliki dokumen	dok		1	1	1	1	1	4,038,261,842	APBD	Dinas LHK Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan	menurunnya sumber pencemar air dan udara	lokasi		10	10	10	10	10	9,955,874,808	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Teridentifikasi mata air terlindungi	titik mata air	485	522	552	582	612	642	13,838,680,479	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 4. Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Tercapainya lab yang terakreditasi nasional	unit	0	1	1	1	1	1	4,769,208,000	APBD	Balai Lab Lingkungan
Kegiatan 5. Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH, NSDA Lingkungan Hidup, dan IKPLHD yang tersusun	dokumen	1	3	1	1	1	1	22,741,821,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 6. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	kelompok	0	21	23	25	27	29	4,854,883,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 7. Pengelolaan persampahan dan limbah b3	Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 yang terbina	usaha/keg	0	30	30	30	30	30	1,062,897,910	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Program 2 Program Penataan dan Pengendalian Lingkungan											
Kegiatan 1 Penataan dan Perencanaan Lingkungan	Tersedianya dokumen data, informasi lingkungan hidup	Dokumen	13	15	14	14	14	14	3,652,065,339	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Penyelesaian pengaduan kasus lingkungan, sengketa lingkungan hidup, dan	kasus	10	10	10	10	10	10	1690750000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan persampahan dan limbah b3	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Klpk Bank Sampah	0	50	50	50	50	50	2,985,740,902	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Jumlah RTH dan pantai yang dibersihkan	lokasi	2	2	2	2	2	2	1,130,992,006	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Jumlah TPA Regional yang terbangun	unit	0	1	1	1	1	1	81,611,835,093	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	TPST dan unit BSF yang terbangun	unit	0	2	2	2	2	2	6,046,560,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 yang	perusahaan	30	30	30	30	30	30	507,000,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3 Peningkatan kapasitas masyarakat	Meningkatnya partisipasi sekolah dalam mengikuti	sekolah	0	10	11	12	13	14	1,491,190,120	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	meningkatnya jumlah desa yang mengikuti program	desa	0	10	11	12	13	14	1,443,820,740	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	terpeliharanya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan	dokumen		1	1	1	1	1	857,708,551	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	tersusunnya dokumen RAD-GRK sektor limbah	dokumen		1	1	1	1	1	804,326,167	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
Kegiatan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah TPA Regional yang terbangun	unit	0	1	1	1	1	1	173,528,955,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 2. Kerjasama pengelolaan persampahan	jumlah mitra dalam pengeloaan sampah	mitra	0	2	2	2	2	2	15,200,000,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
Kegiatan 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah bank sampah yang terbentuk	bank sampah	4	75	105	105	105	110	18,500,000,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
Tujuan 13											
INDIKATOR SDGs :	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PEMERINTAH											
Program 1. Program Siaga Darurat Bencana											
Kegiatan 1. Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Siaga Bencana	Unit		40	40	40	40	40	12,210,200,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penanganan Siaga Darurat Bencana	Tertanganinya Penanggulangan Bencana pada Tahap Siaga Darurat	Lokasi		10	10	10	10	10	91,576,500,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 3. Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan peserta gladi penanggulangan bencana	Kegiatan		2	2	2	2	2	2,442,040,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Program 2. Program Tanggap Darurat Bencana											
Kegiatan 1. Penanganan korban Masa Tanggap Darurat	Tertanganinya Korban Bencana	Orang		2500	2500	2500	2500	2500	15,262,750,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penanganan transisi ke pemulihan darurat	tertanganinya Prasarana dan Sarana Layanan Masyarakat darurat	lokasi		10	10	10	10	10	3,052,550,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pendampingan psiko sosial korban bencana	Tertanganinya Psiko Sosial Korban Bencana	Orang		2500	2500				1,685,400,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pembentukan dan Pelatihan TRC	Jumlah TRC yang terbentuk dan Terlatih	Orang		40	40	40	40	40	1,831,530,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Program 3. Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar	Terlatihnya Pemuda dan Pelajar Tanggap Darurat Bencana	pelajar		400	400	400	400	400	1,221,020,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Dokumen Hasil Pemantauan	dokumen		1	1	1	1	1	3,052,550,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana	Tersedianya Pelatihan Bagi aparat	Orang		55	55	55	55	55	1,831,530,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Program 4. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana											
Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen DED	Teridentifikasi Lokasi pasca Bencana	lokasi		10	10	10	10	10	3,052,550,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Laporan		10	10	10	10	10	2,136,785,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma	Terlaksananya Pelatihan Bagi Relawan	Orang		500	500	500	500	500	3,052,550,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 4. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	lokasi		10	10	10	10	10	12,210,200,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Tujuan 14											
INDIKATOR SDGs :	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif	kelompok		80	85	90	95	100	4,272,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Konservasi laut dan Perairan	Luas Kawasan Konservasi Perikanan	Ha	214411	251642	253683	266805	287508	294203	4,420,505,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 kecil	Dokumen Penataan Ruang Laut	Dokumen	1	3	2	2	2	2	6,043,565,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan	Terkelolanya Kawasan Konservasi Perairan	Ha	142976, 229555, 229000	142976, 229555, 229000	142976, 229555, 229000	142976, 229555, 229000	142976, 229555, 229000	142976, 229555, 229000	1,587,294,254	APBD	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok Sumbawa, Bima Dompu
INDIKATOR SDGs :	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil											
Kegiatan 1. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif	kelompok		80	85	90	95	100	4,272,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Konservasi laut dan Perairan	Luas Kawasan Konservasi Perikanan	Ha	214411	251642	253683	266805	287508	294203	4,420,505,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 kecil	Dokumen Penataan Ruang Laut	Dokumen	1	3	2	2	2	2	6,043,565,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.									
PEMERINTAH											
Program 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha, Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi	Kelompok	32	30	30	30	30	30	712,953,501	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Tujuan 15											
INDIKATOR SDGs :	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.									
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.									
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.									
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem											
Kegiatan 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Tahun	1	1	1	1	1	1	17,048,555,243	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	4,589,483,284	APBD	Balai Taman Hutan Raya Nuraksa
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	78,148	78,148	78,148	78,148	78,148	78,148	16,264,164,553	APBD	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	37,589	37,589	37,589	37,589	37,589	37,589	12,735,259,357	APBD	Balai KPH Rinjani Timur
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	121,512	121,512	121,512	121,512	121,512	121,512	7,191,832,220	APBD	Balai KPH Sejongong Mataiyang Brangrea
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	78,078	78,078	78,078	78,078	78,078	78,078	7,238,365,293	APBD	Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	73,369	73,369	73,369	73,369	73,369	73,369	5,731,648,591	APBD	Balai KPH Ropang
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	120,540	120,540	120,540	120,540	120,540	120,540	7,989,577,701	APBD	Balai KPH Orong Telu Brang Beh
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	67,406	67,406	67,406	67,406	67,406	67,406	7,752,713,863	APBD	Balai KPH Ampang Plampang
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	88,129	88,129	88,129	88,129	88,129	88,129	9,545,323,850	APBD	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	57,181	57,181	57,181	57,181	57,181	57,181	8,958,349,011	APBD	Balai KPH Tambora

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	96,607	96,607	96,607	96,607	96,607	96,607	7,301,592,761	APBD	Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu
	Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	70,651	70,651	70,651	70,651	70,651	70,651	10,727,393,312	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
Kegiatan 2. Penegakan Hukum Kehutanan	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus	10	20	20	20	20	20	4,884,080,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	4,988,692,110	APBD	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	1,468,581,805	APBD	Balai Tahura Nuraksa
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	1,363,781,658	APBD	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	1,050,870,863	APBD	Balai KPH Tambora
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	377,295,180	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	840,330,384	APBD	Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	792,898,810	APBD	Balai KPH Orong Telu Brang Beh
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	309,770,332	APBD	Balai KPH Ropang
	Penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana	Kasus		2	2	2	2	2	452,928,211	APBD	Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu
	Kegiatan 3. Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Jumlah Stock karbon di HP, HL dan Tahura	Titik	550	550	550	550	550	550	1,984,157,500	APBD
Perlindungan Flora dan Fauna		Kegiatan		1	1	1	1	1	3,400,858,776	APBD	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan
Penyuluhan dalam rangka perlindungan dan konservasi alam kepada masyarakat		Kegiatan		2	2	2	2	2	750,000,000	APBD	Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea
Pembuatan plot flora lokal		Ha		10	10	10	10	10	10,572,134,514	APBD	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi
upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna		Kegiatan		2	2	2	2	2	253,361,650	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
Upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna		Kegiatan		2	2	2	2	2	281,463,425	APBD	Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	Titik		14	14	14	14	14	4,273,570,000	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	Ha		72,217.19	72,217.19	72,217.19	72,217.19	72,217.19	253,361,650	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
	Pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	kegiatan		7	7	7	7	7	452,467,276	APBD	Balai KPH Orong Telu Brang Beh
	Pemantauan kebakaran lahan	Kali	18	18	18	18	18	18	607,882,975	APBD	Balai KPH Ropang
Program 2. Program Pengelolaan Hutan											
Kegiatan 1. Perencanaan dan Tata Hutan	Penataan wilayah kerja KPHL Ampang Riwo Soromandi	kegiatan	2	2	2	2	2	2	1,935,867,380	APBD	KPH Ampang Riwo Soromandi
	Pemantapan kawasan dan areal kerja (KPHL Puncak Ngengas)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	940,029,720	APBD	KPH Puncak Ngengas Batulanteh
	Penataan batas (KPHP)	Kegiatan	6	6	5	6	5	6			
	Penataan kawasan hutan (KPH Sejorong Mataiyang Brang)	Kegiatan	4	4	4	4	4	2	239,977,439	APBD	KPH Sejorong Mataiyang Brangrea
	Penataan Kawasan dan Area Kerja (KPH Maria)	Kegiatan	1	3	3	3	3	3	706,054,815	APBD	KPH Maria Donggomassa
	Penataan wilayah kerja KPHL Ropang	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	1,619,890,569	APBD	KPH Ropang
	Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja (KPHL Toffo)	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1,061,890,569	APBD	KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
	Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja (KPHP)	Kegiatan	4	4	2	3	3	3			
	Pemantapan kawasan hutan (KPH Rinjani Barat)	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	3,510,432,500	APBD	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
	Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja (KPHL Tastura)	Kegiatan	2	1	1	1	1	1			
	Penataan Kawasan Hutan (KPHL Rinjani Timur)	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	868,526,789	APBD	KPH Rinjani Timur
Program 3. Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial											
Kegiatan 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (KPH dan Tahan)	Ha		2,957.13	3,045.84	3,137.22	3,231.34	3,328.28	2,550,515,417	APBD	Dinas LHK Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang terpelihara DAS	DAS	2 (DAS Moyo dan DAS Dodokan)	2	2	2	2	2	13,637,688,987	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	4,499,174,202	APBD	Balai KPH Maria Donggomasa
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1 (DAS Moyo)	1,674,970,816	APBD	Balai KPH Sejong Mataiyang Brangrea
	Terjaganya kualitas DAS	DAS		24	24	24	24	24	5,608,297,488	APBD	Balai KPH Ampang Plampang
Kegiatan 3. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		35	35	35	35	35	11,570,514,338	APBD	Dinas LHK Prov. NTB
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		4	4	4	4	4	961,247,995	APBD	KPH Ampang Riwo Soromandi
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		4	4	4	4	4	1,497,606,061	APBD	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		3	3	3	3	3	280,196,617	APBD	KPH Sejong Mataiyang Brangrea
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		3	3	3	3	3	264,929,593	APBD	KPH Orong Telu Brang Beh
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		4	4	4	4	4	1,616,568,818	APBD	KPH Ropang
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		4	4	4	4	4	578,653,588	APBD	KPH Ampang Plampang
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		3	3	3	3	3	306,323,393	APBD	KPH Tambora
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		4	4	4	4	4	1,761,016,095	APBD	KPH Maria Donggomassa
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		3	3	3	3	3	260,076,649	APBD	KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu
	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelompok		3	3	3	3	3	524,122,835	APBD	Balai Tahura Nuraksa
INDIKATOR SDGs :	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
	Indikator 2										
Tujuan 16											
INDIKATOR SDGs :	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.									
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.									
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.									
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.									
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan											
Kegiatan 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Orang		150	150				2,426,043,200	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Orang		100	100				982,257,141	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kegiatan 3. Fasilitasi Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terfasilitasinya forum pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Orang		120	120				12,565,006,800	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kegiatan 4. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang dibina	Orang		200	200				520,460,000	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	Orang		3250	3250				13,757,003,300	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Program 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terselenggaranya pertemuan dalam rangka pembahasan teknik pencegahan tindak kejahatan	Orang		100	100				365,466,800	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketenteraman di masyarakat	Tersedianya personil aparat keamanan dalam rangka pengamanan kunjungan kepala Negara, wakil Kepala Negara dan perwakilan negara lain	Orang		300	300				1,158,474,000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Kegiatan Terpadu	Kali		4	4				507,456,768	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 3. Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI)	Jumlah Kegiatan Turjawali	Bulan		12	12				6,747,112,000	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 4. Bimbingan Teknis Kepolisipamongprajaan, Komunikasi, Negosiasi Massa	Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil	orang		40	40				277,258,264	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 5. Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Obyek Vital dan Kemampuan Dasar Intelejen	Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil	Orang		40	40				281,495,084	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 6. Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	Frekuensi Operasi Yustisi	kali		4	4				559,256,000	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 7. Rakor Stabilitas Keamanan	Jumlah Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan	kali		2	2				635,836,336	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Program 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat	Masyarakat yang Mampu dan Mandiri dalam Mendeteksi Dini dan Mencegah Konflik	Orang		200	200				953,887,216	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Masyarakat yang Memahami Potensi Gangguan yang ada di Masyarakat	Orang		100	100				950,606,304	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembinaan & pembentukan kelompok masyarakat patuh perda perkada melalui pendekatan kearifan lokal	Masyarakat yang Memahami Potensi Gangguan yang ada di Masyarakat	Orang		100	100				328,309,348	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 4. Workshop Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum	Aparat dan Masyarakat yang Mampu Melakukan Pendeteksian Dini	Orang		100	100				423,983,060	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 5. Focus Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Masyarakat	Jumlah FGD Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik	Kali		2	2				635,924,952	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Program 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)											
Kegiatan 1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Instansi/Mitra terkait dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tibum dan Tranmas	Kali		1	1				254,188,000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba)	Frekuensi Operasi PEKAT	Kali		12	12				972,986,720	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pemetaan Kawasan Rawan Pekat di Masyarakat	JUmlah Kawasan Rawen Penyakit Masyarakat	Dokumen		1	1				529,486,960	APBD	Satuan Kepolisian Pamong Praja Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.									
	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.									
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pencegahan Korupsi											
Kegiatan 1. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Aduan	30	30	30	30	30	30	1,853,847,804	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan tertentu/Khusus	PD	10	10	10	10	10	10	1,850,917,356	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 3. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	15	15	15	15	15	15	2,623,907,876	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 4. Kegiatan SABER PUNGLI	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	20	20	20	20	20	20	5,498,573,578	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 5. Unit Gratifikasi	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	112,406,491	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 6. Kegiatan TP4D	Jumlah Kegiatan Pendampingan	Kegiatan	10	10	10	10	10	10	7,034,219,906	APBD	Inspektorat Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 7. Pembangunan Zona Integritas pada PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona Integritas	PD	6	6	6	6	6	6	111,389,381	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.									
PEMERINTAH											
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah											
Kegiatan 1. Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asestensi	PD	45	45	45	45	45	45	462,754,370	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 2. Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	163,726,572	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pemeriksaan Reguler/ Audit Kinerja (Audit Operasional)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler/audit kinerja (Audit Operasional)	Dokumen LHP	26	26	26	26	26	26	8,677,516,242	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi											
Kegiatan 1. Review Lakip Pemda	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	152,904,061	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 2. Evaluasi Lakip PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi	PD	45	45	45	45	45	45	773,914,833	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 3. Fasilitasi kegiatan RB	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	111,570,703	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 5. Penilaian dan Pembinaan OPD	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	PD	45	45	45	45	45	45	1,360,706,520	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 6. Review RPJMD	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	149,454,680	APBD	Inspektorat Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 7. Review Renstra	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	PD	45	45	45	45	45	45	152,904,061	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 8. Review Renja	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	PD	45	45	45	45	45	45	152,293,551	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 9. Rivieu RKPD	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	153,089,045	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 10. Peningkatan Manajemen Pengawasan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	16,718,205,840	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement											
Kegiatan 1. Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Dokemen		2	2				199,576,800	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Terselenggaranya Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Dokemen		3	3				973,966,372	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
Program 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah	%		85	85				5,366,419,600	APBD	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekda Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	kali		3	3				216,939,600	APBD	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekda Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	sistem		2	2				208,512,600	APBD	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekda Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.											
INDIKATOR SDGs :	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.											
INDIKATOR SDGs :	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).									
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.									
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.									
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat											
Kegiatan 1. Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pemilihan umum (pileg/pilpres/pilkada)	orang		500	500				4,352,592,564	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyusunan Data Base Politik	Tersusunnya database partai politik	Dokemen		1	1				106,000,000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Program 2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Kegiatan pendidkkan dan pelatihan penlngkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terlaksana Pendidikan Politik bagi Perempuan	orang		60	60				298,920,000	APBD	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan											
Kegiatan 1. Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlatihnya SDM Dalam Pengintegrasian data Non SIAK ke SIAK	orang		112	112				446,896,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	orang		100	100				647,702,400	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan	orang		200	200				131,440,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 4. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Terlatihnya Aparatur Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	orang		170	170				1,045,054,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB
Kegiatan 5. Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertransformasinya Informasi Tentang Kebijakan Kependudukan	orang		84	84				1,422,740,480	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 6. Monitoring dan Evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil	Terpantaunya Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Kependudukan kepada Masyarakat	Kab/Kota		10	10				106,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									
	16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.									
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan											
Kegiatan 1. Fasilitasi Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terfasilitasinya forum pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang		120	120				12,565,006,800	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Program 2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya											
Kegiatan 1. Penguatan Lembaga Mediasi										APBD	Bappeda Provinsi NTB
Program 3. Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik											
Kegiatan 1. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Terselesaikannya Sengketa Informasi Melalui Jalan Mediasi dan Ajudikasi	Kasus		10	10				6,490,608,960	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah masyarakat yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan PPID utama	orang		25000	25000				722,461,444	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Terselesaikannya Sengketa Informasi Melalui Jalan Mediasi dan Ajudikasi	kasus		10	10				6,490,608,960	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
Tujuan 17											
INDIKATOR SDGs :	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.									
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.									
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
Kegiatan 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun	Perda/ Pergub		2	2				1,669,460,780	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Laporan		5	5				5,155,466,456	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
		Laporan		2	2				1,609,843,200	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
		Laporan		2	2				1,492,755,600	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
Kegiatan 3. Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Sentra		43	43				578,701,700	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Laporan		1	1				212,212,000	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
		Sentra		8	8				233,200,000	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
Kegiatan 4. Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	hari		72	72				534,129,760	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan	Laporan		1	1				1,059,321,600	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
		Kali		144	144				1,034,899,200	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
Kegiatan 5. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	event		12	12				2,285,471,300	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
		event		1	1				217,194,000	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
		event		1	1				340,472,000	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
Kegiatan 6. Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah	kasus		2	2				159,254,400	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Laporan		4	4				1,276,240,000	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
		Laporan		1	1				50,964,800	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
		Laporan		1	1				70,256,800	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
Kegiatan 8. Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Laporan		12	12				361,714,400	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Dokumen		1	1				649,250,000	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
		Dokumen		1	1				373,968,000	APBD	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 9. Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait	Laporan		2	2				546,642,000	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 10. Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan sinkronisasi data, penerimaan retribusi dan pll dengan pihak terkait	Laporan		2	2				529,061,900	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 11. Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PPL	Laporan		2	2				732,354,000	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 12. Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah laporan evaluasi obyek retribusi dan pll dan pelaksanaan bintek	Laporan		2	2				3,356,805,880	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 13. Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	Laporan		1	1				159,254,400	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 14. Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen data PBBKB	Dokumen		1	1				484,314,000	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 15. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah dokumen data potensi penerimaan Pajak Air Permukaan	Dokumen		2	2				381,282,000	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).									
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.									
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.									
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.									
PEMERINTAH											
Program 1.											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
INDIKATOR SDGs :	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas									
PEMERINTAH											
Program 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor											
Kegiatan 1. Pengembangan kluster produk ekspor	Eksportir/Pengusaha Peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor	orang		30	30	30	30	30	800,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Identifikasi potensi ekspor daerah	Tersedianya data profil pengusaha dan profil komoditi yang berorientasi/berpotensi	Buku, CD		200	200	200	250	250	375,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB	Semakin meningkatnya kualitas produk ekspor	orang		60	60	65	75	80	430,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Penyediaan sarana promosi ekspor daerah	Semakin dikenalnya barang-barang promosi ekspor daerah	Tahun		1	1	1	1	1	660,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pengembangan informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Semakin meningkatnya kualitas produk-produk kerajinan NTB	produk		2	2				534,494,400	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5. Pendampingan Desainer (Design Dispace Services)	Peserta Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	orang		50	50	50	60	60	600,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Penguatan Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Pengusaha/ eksportir peserta sosialisasi prosedur ekspor	orang		30	30	40	50	50	500,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Membangun Jejaring dengan Eksportir	Laporan Informasi Jejaring dengan Eksportir	Laporan		1	1	1	1	1	825,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 8. Partisipasi pada Pameran dan promosi Luar Negeri	Laporan Kegiatan Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Luar Negeri	Laporan		1	1	1	1	1	1,500,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 9. Evaluasi dan Monitoring Importir dan Eksportir yang sudah memiliki API dan SKA	Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Asosiasi Pedagang Indonesia (API) dan SKA	Laporan		1	1	1	1	1	425,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 10. Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri	Eksportir/pengusaha peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri (tentang MEA)	orang		60	50	60	75	75	435,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 11. Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan Melalui E-Commerce	Jumlah Produk unggulan yang disebarluaskan melalui e-commerce	produk		10	10	15	15	20	600,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									
PEMERINTAH											
Program 1											
Nama Kegiatan 1	Indikator 1										
	Indikator 2										
INDIKATOR SDGs :	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.									
	17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
PEMERINTAH										
Program 1										
Nama Kegiatan 1	Indikator 1									
	Indikator 2									
INDIKATOR SDGs :	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.								
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)								
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.								
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).								
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.								
PEMERINTAH										
Program 1										
Nama Kegiatan 1	Indikator 1									
	Indikator 2									

PROGRAM/KEGIATAN LEMBAGA NON PEMERINTAH YANG Mendukung INDIKATOR SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Tujuan 1										
INDIKATOR SDGs :	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan								
	1.2.2*	Penduduk Miskin								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1 : Program Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kesehatan										
Kegiatan 1 : Membuat Poskestren pada masing-masing cabang			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Program 2 : Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat										
Kegiatan 1 : Mengembangkan Kopontren yang berbadan Hukum Koperasi Syariah (Kopsyah) pada setiap Pondok Pesantren			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 2 : Mengembangkan lembaga keuangan umat (mikro dan makro)			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 3 : mengembangkan wirausaha baru dan mandiri			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 5 : Pembagian air bersih, pemberian sembako dan pakaian layak pakai			v							Yayasan NW Pancor
Program 3 : Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Mengembangkan usaha pengelolaan sumberdaya lokal (finansial, SDM dan material)			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 2 : Pengelolaan zakat, infak dan sadakah serta wakaf secara profesional			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Program 4 : Program Usaha dan Kesejahteraan										
Kegiatan 1 : Pembentukan Unit Kesra			v	v	v					Yayasan NW Pancor
Kegiatan 2 : Market Produk Lokal Berbasis On Line			v	v	v					Yayasan NW Pancor
Kegiatan 3 : Kemitraan dan Investasi			v	v	v					Yayasan NW Pancor
Kegiatan 4 : Koperasi Syariah PGNW			v	v	v					Yayasan NW Pancor
Program 4 : Pengembangan unit usaha kreatif pengelolaan sampah (bank sampah) yang mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin										
Kegiatan 1 : Pelatihan manajemen bank sampah	Terbentuknya Bank Sampah	unit								Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB
Kegiatan 2. Inkubasi Bisnis Pengelolaan Sampah	Bank Sampah yang memulai transaksi bisnis	unit								Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB
Program 4 : Pengentasan Kemiskinan										
Kegiatan 1 : Pembangunan rumah layak huni	Terbangunnya rumah layak huni	unit								Baznas NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2. Pembangunan jamban untuk masyarakat miskin	Terbangunnya jamban	unit									Baznas NTB
Program 1 : Program Badah Bale											
Kegiatan 1 : Pembangunan rumah layak huni				v	v	v	v			ZISWAF	LAZ DASi NTB
Program 2 : Air Kehidupan											
Kegiatan 1 : Menyalurkan air bersih ke daerah kekeringan				v	v	v	v			ZISWAF	LAZ DASi NTB
Program 3 : Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat											
Kegiatan 1 : Pedagang Tangguh				v	v	v	v			ZISWAF	LAZ DASi NTB
Kegiatan 2 : Pemberian bantuan modal usaha				v	v	v	v			ZISWAF	LAZ DASi NTB
Program 4 : Kesehatan											
Kegiatan 1 : Ambulance Gratis				v	v	v				ZISWAF	LAZ DASi NTB
Kegiatan 2 : Rumah Sehat				v	v	v				ZISWAF	LAZ DASi NTB
Kegiatan 3 : Khitanan Massal				v	v	v				ZISWAF	LAZ DASi NTB
Kegiatan 4 : Bhakti Sosial Kesehatan				v	v	v				ZISWAF	LAZ DASi NTB
Kegiatan 5 : Car Free Day Udayana				v	v	v				DONATUR	BSMI NTB
Kegiatan 6 : Khitanan Massal				v	v	v				DONATUR	BSMI NTB
Kegiatan 7 : Pengobatan Massal				v	v	v				DONATUR	BSMI NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 8 : Rumah Sehat BSMI-DASI			v	v	v				BSMI dan DASI	BSMI NTB
Program 5 : Peduli Yatim Dhuafa										
Kegiatan 1 : Kelas Alam untuk Anak Pesisir di Bagek Kembar			v						DONATUR	BSMI NTB
Kegiatan 2 : Santunan untuk Pasien tidak mampu			v	v					DONATUR	BSMI NTB
Program 1 : Pembangunan Shelter/Huntara										
Kegiatan 1 : Pembangunan Hunian Sementara			v	v	v	v			ZISWAF	Yayasan NW Pancor
Kegiatan 2 : Pembangunan Toilet Komunal										
Program 2 : Pembangunan Masjid										
Kegiatan 1 : Pembangunan Masjid dan Renovasi Masjid			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Program 3 : Dapur Umum dan Siaga Pangan										
Kegiatan 1 : Pembagian Sembako dan Cooking Set			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 2 : Dapur Umum			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Program 4 : Sekolah Darurat										
Kegiatan 1 : Pembangunan Sekolah Darurat			v	v	v					Yayasan NW Pancor
Program 5 : Pelayanan Kesehatan Keliling										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Memberikan layanan kesehatan keliling										Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB
Program 6 : Pemberdayaan Ekonomi										
Kegiatan 1 : Revitalisasi Pasar										Baznas NTB
Kegiatan 2 : Pemberian Modal dan Sarana Usaha										Baznas NTB
Program 1 : Pendampingan Desa Wakaf										
Kegiatan 1 : Pendampingan Desa Wakaf	Desa-desanya dengan kondisi ekonomi tertinggal	Desa								ACT
Program 2 : Pendampingan Disabilitas (Desa Disabilitas Berdaya)										
Kegiatan 1 : Pendampingan Disabilitas (Desa)	Warga Disabilitas di desa disabilitas berdaya	Desa								ACT
Program 3 : Pendampingan Pengemis asongan										
Kegiatan 1 : Pendampingan Pengemis asongan	Anak-anak terlantar dan putus sekolah	Orang								ACT
Program 4 : Pondok sosial										
Kegiatan 1 : Pondok sosial	Rumah asuh yatim Dhuafa	Rumah/Tahun								ACT
Program 5 : Warung wakaf pelopor dan warung tradisional binaan										
Kegiatan 1 : warung wakaf pelopor dan warung tradisional binaan	Terbangunnya 10 warung wakaf pelopor dan 1000 warung tradisional binaan	Warung								ACT
Program 6 : Wakaf sumur										
Kegiatan 1 : wakaf sumur	Terbangunnya 10 wakaf sumur di 10 lokasi	lokasi								ACT
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS) / P BPJS								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan / PSJSN-K								
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR								
		Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas / JPPD								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1	Indikator 1									
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1	Indikator 1									
INDIKATOR SDGs :	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifskes								
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL								
	1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-								
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML								
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/ P LSL								
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP								
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD								
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat / APM SMP								
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA								
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL								
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1	Indikator 1									
INDIKATOR SDGs :	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah								
	1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)								
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana								
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB)								
	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1	Indikator 1										
Tujuan 2											
INDIKATOR SDGs :	2.1.1*	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan									
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)									
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)									
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan									
	2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1. Pendampingan kasus sosial gizi buruk											
Kegiatan 1. Pendampingan kasus sosial gizi buruk	Pasien penderita Gizi buruk se NTB	Pasien								ACT	
Program 2. Sarapan sehat											
Kegiatan 1. Sarapan sehat	Masyarakat yang tidak mampu dan juga umum	Orang								ACT	
Program 3. Bengkel gizi terpadu											
Kegiatan 1. Bengkel gizi terpadu		Orang								ACT	
INDIKATOR SDGs :	2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)									
	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta									
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita									
	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil									
	2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1 : Ketahanan Pangan dan Gizi											
Kegiatan 1. Rencana advokasi program dan berkontribusi pada penurunan stunting										Konsepsi dan SNV	
INDIKATOR SDGs :	2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
		Skor PPH (Point)								
		Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.										
INDIKATOR SDGs :	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.										
INDIKATOR SDGs :	2.4.1	Penetapan Kawasan Pertanian Berkelanjutan								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.										
INDIKATOR SDGs :	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas								
	2.5.1(a)	Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat								
	2.5.1(b)	Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih								
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1 : Meningkatkan kualitas budidaya pertanian para petani										
Kegiatan 1. Penerapan teknologi pembungaan dini pada komoditi mangga	Jumlah petani yang menerapkan teknologi dan meningkatkan pendapatannya	petani							Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA
Kegiatan 2. Mempromosikan penanaman benih/bibit bawang yang berkualitas	Jumlah petani yang menerapkan dengan penanaman benih dan meningkat pendapatannya	petani							Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Meningkatkan produktifitas dengan mempromosikan informasi GAP melalui soy doctor (dokter kedelai)	Jumlah petani yang menerapkan teknologi dan meningkatkan pendapatannya	petani								Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA
Kegiatan 4. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan memperkenalkan benih sayur berkualitas dalam <i>small package</i>	Jumlah petani perempuan yang terlibat	petani								Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA
Program 2 : Meningkatkan akses petani ke pasar											
Kegiatan 1. Mempromosikan benih bersertifikat yang ditangkar di lokal	Jumlah produksi benih bersertifikat yang terjual	ton								Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA
Kegiatan 2. Membuat dan mempromosikan pakan sapi yang berkualitas	Jumlah produsen, jumlah produksi dan jumlah pemakai	Produksi/ Kg/petani								Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA
Kegiatan 3. Promosi program YARO (bayar separo) dengan mempergunakan benih jagung berkualitas	Jumlah petani yang memanfaatkan program YARO dan bersedia menjadi agent YARO	petani								Pemerintah Australia - DFAT	AIP - PRISMA
Tujuan 3											
INDIKATOR SDGs :	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup									
	3.1.2*	Proporsiperempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)									
	3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1 : Program Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kesehatan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 1 : Membuat Poskestren pada masing-masing cabang			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	
Kegiatan 2 : Membuat klinik kesehatan pada masing-masing daerah.			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	
Kegiatan 3 : rumah sakit islam pada masing-masing wilayah			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	
Program 2 : Program Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat											
Kegiatan 1 : Pengobatan Kesehatan Lansia, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui			v							Yayasan NW Pancor	
Program 1: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan kelompok rentan terhadap persalinan yang selamat											
Kegiatan1. Fasilitasi penyusunan regulasi yang pro kepada pelayan dasar	Fasilitasi penyusunan regulasi yang pro kepada pelayan dasar	Lotim, KLU, Bima, Sumbawa		4	4	4				KOMPAK	Bappeda, Dinkes
Kegiatan 2. Fasilitasi perbaikan Public Finance Managemen kepada unit layanan	Fasilitasi perbaikan Public Finance Managemen kepada unit layanan	Lotim, KLU, Bima, Sumbawa		4	4	4				KOMPAK	Bappeda, DPKAD
Kegiatan 3. Penguatan masyarakat sipil dan pemdes dalam meningkatkan akses layanan dasar	Penguatan masyarakat sipil dan pemdes dalam meningkatkan akses layanan dasar	Lotim, KLU, Bima, Sumbawa		4	4	4				KOMPAK	BPMPD, Dinkes, Pemkab
Kegiatan 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pemberian pelayanan kependudukan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pemberian pelayanan kependudukan	Lotim, KLU, Bima, Sumbawa		4	4	4				KOMPAK	Pemda, Dukcapil
INDIKATOR SDGs :	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.								
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.								
	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1	Indikator 1									
INDIKATOR SDGs :	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.								
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria								
	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.								
	3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.								
	3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis.								
	3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun								
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi								
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun								
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri								
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis								
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi								
	3.5.1.(c)	Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan								
	3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu								
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern									
	3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin									
	3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi									
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun									
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1 : Program Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat											
Kegiatan 1 : Mengadakan pelayanan KB di wilayah Provinsi NTB berkerjasama dengan instansi terkait				v						Yayasan NW Pancor	
INDIKATOR SDGs :	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan									
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk									
	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)									
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur \geq 15 tahun									
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas									
	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1 : Program Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kesehatan											
Kegiatan 1 : Merintis adanya jaminan sosial dan kesehatan bagi pengurus amal usaha NW				v	v	v	v			Yayasan NW Pancor	
Tujuan 4											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca dan (ii) matematika									
	4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B									
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs Berakreditasi minimal B									
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA Berakreditasi minimal B									
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat									
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat									
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat									
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1 : Program Peningkatan Pendidikan											
Kegiatan 1 : Penyusunan kebijakan dan sistem pembinaan pondok pesantren, madrasah dan sekolah NW				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 2 : Pengembangan sekolah/madrasah/ kelas unggulan pada masing-masing daerah (baik sekolah umum maupun kejuruan)				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 3 : Perintisan pembangunan sekolah kejuruan				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Program 2 : Program Pendidikan											
Kegiatan 1 : Penetapan cabang muslimat binaan	Menetapkan muslimat NW cabang keruak dan muslimat cabang selong			v							Yayasan NW Pancor
INDIKATOR SDGs :	4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1 : Program Pendidikan											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Melaksanakan pembinaan TK, PAUD, TPQ Muslimat			v							Yayasan NW Pancor
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat								
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1 : Program Peningkatan Pendidikan										
Kegiatan 1 : Penyusunan kebijakan dan sistem pembinaan Perguruan Tinggi NW			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
Kegiatan 1 : Perintisan Perguruan Tinggi bidang teknologi dan kesehatan			v	v	v	v				Yayasan NW Pancor
INDIKATOR SDGs :	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)								
		Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat								
		Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat								
		Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat								
		Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di PT (%)								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik										
		Persentase Guru Negeri yang bersertifikat										
		Persentase Guru Swasta yang bersertifikat										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1 : Program Peningkatan Pendidikan												
Kegiatan 1 : Pembinaan kualitas guru lembaga pendidikan Nahdathul Wathan				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	
Kegiatan 2 : Penyiapan guru-guru yang berkualitas untuk disebarkan pada berbagai pondok pesantren NW di berbagai wilayah/daerah/ cabang				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	
Program 1 : Program Pengembangan Dakwah dan Gerakan Penayadaran Umat												
Kegiatan 1 : Pengorganisasian tuan guru/ustaz yang ada untuk memberi pengajian di berbagai daerah				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Tujuan 5										
INDIKATOR SDGs :	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami kekerasan (fisik, seksual, atauemosional) oleh pasangan atau								
	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.								
	5.2.2*	Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan								
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun								
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.								
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.								
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate /ASFR</i>).								
	5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.								
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah								
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkaithubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan								
	5.6.1(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi).								
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.								
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis								
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
Tujuan 6										
INDIKATOR SDGs :	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.								
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.								
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.								
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.								
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).								
	6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.										
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).										
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.										
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.										
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas										
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.										
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.										
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.										
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.										
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.										
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.										
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
Tujuan 7												
INDIKATOR SDGs :	7.1.1*	Rasio elektrifikasi										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
Tujuan 8										
INDIKATOR SDGs :	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita								
	8.1.1. (a)	PDB per kapita								
INDIKATOR SDGs :	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun								
INDIKATOR SDGs :	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin								
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal								
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1 : Meningkatkan Kualifikasi SDM Pariwisata untuk Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Lombok NTB										
Kegiatan 1 : Membuat kajian proyeksi ketenagakerjaan sektor pariwisata di Lombok	Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja			v						ISED
Kegiatan 2 : Membuat kajian dampak pengembangan desa wisata hijau terhadap penciptaan tenaga kerja di Lombok sebagai acuan perencanaan Program ISED di Lombok	Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja			v						ISED

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3 : FGD bersama hotel untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan terkait rantai distribusi mereka dan potensi penyerapan distribusi dari lokal, studi kasus di hotel internasional dan hotel besar yang ada di Lombok		Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja		v							ISED
Kegiatan 4 : Pelatihan tentang Bisnis Model yang Inklusif serta mengidentifikasi potensi bisnis model yang inklusif di sektor pariwisata Lombok		Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja		v							ISED
Kegiatan 5 : Sector Dialog Workshop (tourism sector peer to peer learning workshop) Untuk meningkatkan kemampuan pengusaha untuk merefleksikan, mengembangkan bisnis model yang inklusif dan untuk menjalin hubungan kerjasama antara industri pariwisata dengan UMKM/kelompok tani untuk mengembangkan bisnis model ynag inklusif		Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja		v							ISED
INDIKATOR SDGs :		8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target				Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022				2023
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.								
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara								
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa								
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)								
	8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
Tujuan 9										
INDIKATOR SDGs :	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan								
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita								
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB									
	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .									
	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam									
	9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
Tujuan 10											
INDIKATOR SDGs :	10.1.1*	Koefisien Gini									
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur									
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan									
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal									
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri									
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil									
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
Tujuan 11												
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).										
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.										
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).										
	11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.										
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).										
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.										
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1 : Program Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kesehatan												
Kegiatan 1 : Membangun Tim Bantuan Darurat untuk penanganan bencana				v	v	v	v				Yayasan NW Pancor	
Program 1 : Kajian dan pelatihan kebencanaan												
Kegiatan 1 : Kajian dan pelatihan kebencanaan	Jumlah relawan yangmendapat pelatihan	Relawan									ACT	
Program 2 : Perlengkapan peralatan apd, p3k, tandu,tenda, perahu karet												
Kegiatan 1 : Perlengkapan peralatan apd, p3k, tandu,tenda, perahu karet	Jumlah perlengkapan yang tersedia										ACT	
Program 3 : Aksi Kebencanaan												
Kegiatan 1 : Aksi kebencanaan	Jumlah lokasi yang ditertangani	Lokasi									ACT	
Program 4 : Pengelolaan Tim trauma healing												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Tim trauma healing	Jumlah lokasi yang ditertangani	Lokasi									ACT	
Program 5 : Kunjungan Kebencanaan												
Kegiatan 1 : Kunjungan Kebencanaan	Jumlah lokasi yang dikunjungi	Lokasi									ACT	
INDIKATOR SDGs :	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.								
	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.								
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
Tujuan 12										
INDIKATOR SDGs :	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins</i> program.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.								
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
Tujuan 13											
INDIKATOR SDGs :	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.									
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
Tujuan 14											
INDIKATOR SDGs :	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
Tujuan 15												
INDIKATOR SDGs :	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.										
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.										
	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
Tujuan 16												
INDIKATOR SDGs :	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun										
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.										
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Program 1												
Kegiatan 1.	Indikator 1.											
INDIKATOR SDGs :	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
16.3.1.(b)			Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.								
16.3.1.(c)			Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan								
16.3.2. (a)			Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.									
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah									
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.									
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/									
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).									
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.									
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.									
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Program 1											
Kegiatan 1.	Indikator 1.										
INDIKATOR SDGs :	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.									
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).								
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.								
	16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.								
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.								
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.								
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
Tujuan 17										
INDIKATOR SDGs :	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.								
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.								
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).								
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.								
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.								
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.								
	17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									
INDIKATOR SDGs :	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.								
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)								
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.								
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).								
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.								
PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target					Alokasi Anggaran (2019 s.d 2023)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Program 1										
Kegiatan 1.	Indikator 1.									